BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KOTA PALU

RPKD

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Dearah (RPKD) sebagai dokumen pendamping Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Dokumen RPKD Kota Palu Tahun 2021-2026 merupakan amanat dari Permendagri no. 53 tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan tim koordinasi penangukangan kemiskinan kota/kabupaten. Yang mengamanatkan perlunya dokumen pendamping khusus penangulangan kemiskinan untuk menambah bobot dokumen perencanaan yang besifat strategis.

Disadari bahwa pembangunan akan terimplementasikan dengan baik apabila didukung dengan perencanaan yang komprehensif yang berpihak pada kaum marginal, yang penyusunanya didasarkan atas data dan informasi yang valid serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dokumen RPKD Kota Palu Kota Palu ini, diharapkan menjadi pedoman dalam kinerja penanggulangan kemiskinan di kota palu, yang berjalan dengan prinsip kolaborasi dan terpadu berdasarkan data dan informasi yang valid dan terus terbaharui. Harapannya dokumen ini dapat menjadi dasar pedoman perencanaan khusus penangulangan kemiskinan yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah, masyarakat dan kalangan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan Kota Palu ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan maslahat bagi masyarakat Kota Palu.

Palu, Juli 2021

WALIKOTA PALU

H. Hadianto Rasyid, SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iv
Daftar Gambar vi
Daftar Tabel vii
Daftar Grafik xi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Maksud dan Tujuan I-4
1.3 Landasan Hukum I-12
1.4 Peran TKPK dalam menyusun RPKD I-14
1.5 Sistematika Penulisan I-14

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2 Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana Alam II-10
2.2 Aspek Demografi II-11
2.2.1 Perubahan Penduduk II-11
2.2.2 Komposisi dan Populasi Penduduk II-12
2.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu II-14
2.3.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-14
2.3.2 Aspek Daya Saing Daerah II-29
2.3.3 Aspek Pelayanan Umum II-33

BAB III : PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1 Kajian Kemiskinan III-1
3.2 Memahami Dimensi Kemiskinan III-4

3.3. Profil Kemiskinan Konsumsi III-7
3.3.1 Persentase penduduk miskin (P0) III-8
3.3.2 Jumlah penduduk miskin III-11
3.3.3 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) III-15
3.3.4 Indeks keparahan kemiskinan (P2) III-16
3.3.5 Garis kemiskinan (GK) III-18
3.4. Profil Kemiskinan Non Konsumsi III-20
3.4.1 Bidang Pendidikan III-21
3.4.2 Bidang kesehatan III-45
3.4.3 Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman III-61
3.4.4 Bidang Pembangunan Kelurahan III-72
3.4.5 Bidang Ketenagakerjaan III-76
3.4.6 Bidang Ketahanan Pangan dan Ekonomi III-78
3.4.7 Bidang Kelautan dan Perikanan III-88
3.4.8 Bidang Sosial III-90
3.5 Informasi Sosial Budaya Yang Berkaitan Dengan Isu Kemiskinan Dan Isu-Isu Terkait Lainnya III-92
3.5.1 Isu Strategis III-92
3.5.2 Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu III-92

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM

4.1 Analisa Determinan Kemiskinan IV-1
4.1.1 Theory of Change (ToC)/logika program IV-4

BAB V : LOKASI PRIORITAS

5.1 Lokasi Prioritas Berdasarkan Teori Of Change V-1
5.2 Teori Perubahan menurut Kurt Lewin V-1
5.3 Teori Perubahan menurut Rogers E V-2

BAB VI : PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2021-2026

6 Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan (5 Tahunan) VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

Gambar 2.2 Peta Class Kelerengan

Gambar 2.3 Peta Analisa Rawan Gempa di Kota Palu

Gambar 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Juta Rp)

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan dan PDRB Kota Palu ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019

Gambar 2.6 Struktur Perekonomian Kota Palu menurut tiga sektor Tahun 2019 dan 2020 (persen)

Gambar 2.7 PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Juta Rupiah) Tahun 2015 – 2019

Gambar 2.8 Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2016 – 2020

Gambar 2.9 Rata-rata Pengeluaran per Kapita (Rp/Tahun) Tahun 2016-2020

Gambar 3.1 Penyebab Kemiskinan

Gambar 4.1 Theory of Change bidang Pendidikan

Gambar 4.2 Theory of Change bidang Kesehatan

Gambar 4.3 Theory of Change bidang Ketenagakerjaan

Gambar 4.4 Theory of Change bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Gambar 4.5 Theory of Change bidang Ketahanan Pangan

Gambar 4.6 Theory of Change bidang Sosial

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2021

Tabel 2.2 Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu Menurut Kecamatan

Tabel 2.3 Rata-rata Suhu Udara dan Kelembapan Relatif Setiap bulan di Kota Palu Tahun 2020

Tabel 2.4 Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Arah Angin Terbanyak Setiap bulan di Kota Palu Tahun 2020

Tabel 2.5 Rata-rata Hari Hujan, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari setiap bulan di Kota Palu,Tahun 2020

Tabel 2.6 Distribusi Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2020

Tabel 2.7 Komposisi Penduduk Kota Palu Menurut Struktur Usia Tahun 2020

Tabel 2.8 Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2020

Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)

Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)

Tabel 2.11 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2020 (persen)

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.15 Perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palu, 2016-2020

Tabel 2.16 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi, dan Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.17 Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2016-2020

Tabel 2.18 Perkembangan Inflasi Kota Palu menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) Tahun 2016 – 2019

Tabel 2.19 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 -2019

Tabel 2.20 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Tahun 2020

Tabel 2.21 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2019-2020

Tabel 2.22 Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palu Tahun 2016 -2020

Tabel 2.23 Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu (per 10.000) Tahun 2016-2020

Tabel 2.24 Rasio Guru/Murid Jenjang PendidikanSD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kota Palu (per 1.000 Murid) Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.25 Jumlah Kondisi Bangunan Sekolah Baik Pada Jenjang SD/MI di Kota Palu Tahun 2016 -2020

Tabel 2.26 Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik Pada Jenjang SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.27 Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik Pada Jenjang SMA/SMK/MA di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.28 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2016-2020

Tabel 2.29 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2020

Tabel 2.30 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Palu (per 100.000 penduduk) Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.31 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.32 Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.33 Jumlah dan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

Tabel 2.34 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Palu Tahun 2019

Tabel 2.35 Cakupan Rumah Layak Huni di Kota Palu Tahun 2019

Tabel 2.36 PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu Tahun 2017 – 2020

Tabel 2.37 Jumlah Sarana Sosial di Kota Palu Tahun 2016-2020

Tabel 2.38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu Tahun 2017 – 2020

Tabel 2.39 Persentase Pekerja Perempuan di Kota Palu Tahun 2020

Tabel 2.40 Konsumsi Energi di Kota Palu Tahun 2020

Tabel 2.41 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kota Palu dan Sulawesi Tengah Tahun 2020

Tabel 2.42 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik Tahun 2016-2020

Tabel 2.43 Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN) Tahun 2016-2020

Tabel 2.44 Kinerja Penangulangan Kemiskinan di Kota Palu Tahun 2017-2020

Tabel 3.1 Laju Pertumbuahan Penduduk Kota Palu

Tabel 3.2 Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2020

Tabel 3.3 Jumlah Desil KK Miskin Kota Palu Tahun 2020

Tabel 3.4 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu Tahun 2016-2020

Tabel 3.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2019

Tabel 3.6 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2019

Tabel 3.7 APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK Kota Palu (%) Tahun 2016 – 2020

Tabel 3.8 Perbandingan APM Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020

Tabel 3.9 Angka Kelulusan SD, SMP dan SMA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2016-2020

Tabel 3.10 Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2016-2020

Tabel 3.11 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016-2020

Tabel 3.12 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2016-2020

Tabel 3.13 AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup) Tahun 2016-2020

Tabel 3.14 AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup) Tahun 2016-2020

Tabel 3.15 Jumlah Pertolongan Tenaga Kesehatan Terlatih

Tabel 3.16 Prevalensi Malaria, Diare, DB per 1000 penduduk (%) Kota Palu

Tabel 3.17 Prevalensi HIV/AIDS Kota Palu

Tabel 3.18 Prevalensi Stunting Kota Palu

Tabel 3.19 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Palu Tahun 2019

Tabel 3.20 Cakupan Rumah Layak Huni di Kota Palu Tahun 2019

Tabel 3.21 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kelurahan

Tabel 3.22 Cakupan Kelompok Binaan LPM

Tabel 3.23 Persentase PKK aktif Kota Palu

Tabel 3.24 Rasio Posyandu Per 1.000 Balita Kota Palu Per Kecamatan Tahun 2020

Tabel 3.25 Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2017– 2020

Tabel 3.26 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu Tahun 2017 – 2020

Tabel 3.27 Konsumsi Energi di Kota Palu Tahun 2017-2020

Tabel 3.28 Rata-rata Harga Komoditi Penting per bulan di Kota Palu, 2020

Tabel 3.29 Produksi Perikanan Laut menurut Jenis Usaha Perikanan (Ton), 2016-2020

Tabel 3.30 Produksi Perikanan Darat menurut Jenis Usaha Perikanan (Ton), 2016-2020

Tabel 3.31 Nilai Produksi Perikanan Laut menurut Jenis Usaha Perikanan (000 Rupiah), 2016-2020

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Analisis Identifikasi Masalah Presentase Penduduk Miskin (%) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik 3.2 Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik 3.3 Desil KK Miskin Kota Palu Tahun 2020

Grafik 3.4 Analisis Identifikasi Masalah Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1)(Indeks) Kota Palu Tahun 2016-2020

Grafik 3.5 Analisis Identifikasi Masalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kota Palu Tahun 2016-2020

Grafik 3.6 Analisis Identifikasi Masalah Garis Kemiskinan Kota Palu Tahun 2016-2020

Grafik 3.7 Angka Melek Huruf Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2020

Grafik 3.8 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Palu Tahun 2016-2020

Grafik 3.9 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Grafik 3.10 Angka Partisipasi Murni (APM)

Grafik 3.11 Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2016-2020

Grafik 3.12 Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Grafik 3.13 Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Grafik 3.14 Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Grafik 3.15 Perkembangan APS SD/MI, SMP/MTs/SMA/MA/SMK di Kota Palu (persen) Tahun 2016 - 2020

Grafik 3.16 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Kota Palu Tahun 2017-2019

Grafik 3.17 Analisis Identifikasi Masalah Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Grafik 3.18 Analisis Identifikasi Masalah Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Grafik 3.19 Analisis Identifikasi Masalah Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Grafik 3.20 Analisa Identifikasi Masalah Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik 3.21 Analisa Identifikasi Masalah Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik 3.22 Analisa Identifikasi Masalah Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik 3.23 Analisa Identifikasi Masalah Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik 3.24 Analisa Identifikasi Masalah Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik 3.25 Analisa Identifikasi Masalah Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik 3.26 Analisis Identifikasi Masalah Angka Morbilitas (%) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Grafik 3.27 Analisis Identifikasi Masalah Rasio Bidan (Per 100,000 Penduduk) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik 3.28 Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Grafik 3.29 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palu Tahun 2016-2020

Grafik 3.30 Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (&) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik 3.31 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Palu Tahun 2016-2020

Grafik 3.32 Analisa Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kota Palu Tahun 2016-2020

Grafik 3.33 Analisis Identifikasi Masalah Angkatan Kerja (jiwa) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik 3.34 Analisis Identifikasi Masalah Pertumbuhan Ekonomi (%) Kota Palu Provinsi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik 3.35 Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Inflasi (%) Kota Palu Tahun 2016-2020

Grafik 3.36 Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Harga Beras (Rp) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

Grafik.5.1 Pengelompokan Wilayah Total KRT Per Desil (Desil 1 sampai Desil4) dan Persentase Desil 1 sampai 4 Tingkat Kecamatan Tahun 2020

Grafik 5.2 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan belanja infarastruktur dan tidak ada fasilitas bab Kota Palu Tahun 2020

Grafik.5.3 Pengelompokan Wilayah berdasarkan pada belanja infrastruktur dan tempat pembuangan sampah Tinja (SPAL) Tahun 2020

Grafik 5.4 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan belanja infarastruktur dan tempat pembuangan tinja lubang tanah Kota Palu Tahun 2020

Grafik 5.5 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan belanja infarastruktur dan faslilitas bab milik umum Kota Palu Tahun 2020

Grafik 5.6 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan belanja infarastruktur dan tempat pembuangan tinja di pantai/tanah lapang dan kebun.

Grafik 5.7 Pengelompokan Wilayah Total KRT Per Desil (Desil 1 samapi Desil4) dan Persentase Desil 1 sampai 4 Tingkat Kecamatan Tahun 2020

Grafik 5.8 Pengelompokan Wilayah berdasarkan belanja infrastruktur dan jenis kloset

Grafik 5.9 Pengelompokan Wilayah Total KRT Per Desil (Desil 1 samapi Desil4) dan Persentase Desil 1 sampai 4 Tingkat Kecamatan Tahun 2020

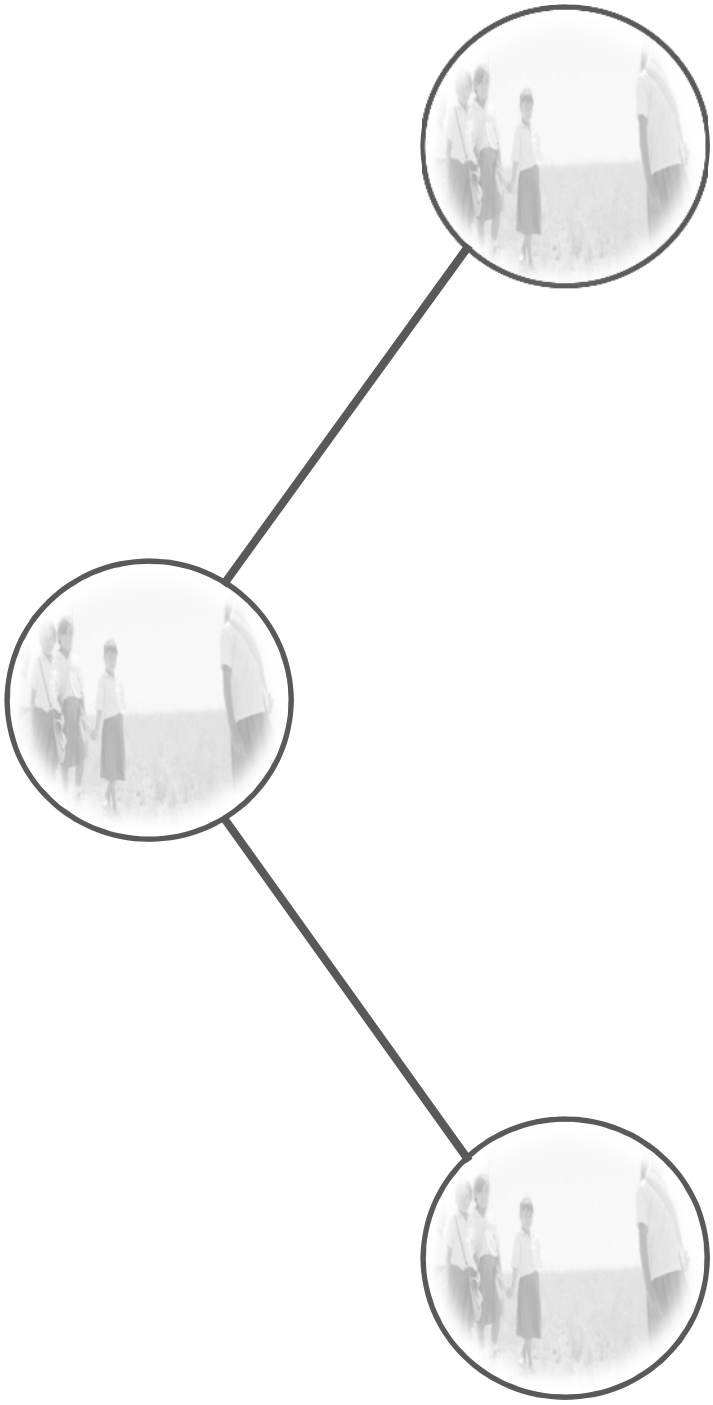

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dimana termuat dalam pasal 1 ayat 3 yang memuat tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang telah mengatur bagaimana proses pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Wali Kota diselenggarakan. Salah satu syarat administratif yang harus disertakan dalam pendaftaran pasangan calon adalah naskah visi dan misi calon Kepala Daerah. Visi-Misi dan Program Kerja calon Kepala Daerah tersebut akan dipromosikan selama masa kampanye, dan selanjutnya akan diterjemahkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah selama 5 tahun. Visi misi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2021-2026.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidak berdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia.

Kemiskinan adalah permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan di Indonesia telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, rasa aman,

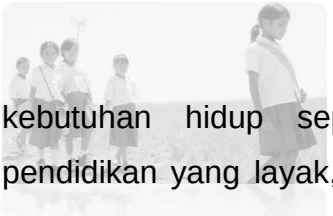

kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan yang terjangkau, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang layak, keadilan, partisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Salah satu isu strategis dalam tahapan pembangunan di Kota Palu adalah persoalan kemiskinan. Setelah pasca bencana tsunami dan likuifaksi di bulan september 2018 lalu angka kemiskinan di Kota Palu mengalami peningkatan.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Palu dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Palu melakukan langkah-langkah strategis dengan menetapkan arah kebijakan tahun 2021 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu tahun 2021-2026.

Pada Peraturan Presiden nomor 166 Tahun 2014 pasal 1 angka pertama menyebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada Peraturan Presiden nomor 166 Tahun 2014 pasal 1 angka kedua menyebutkan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Palu. Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan kemiskinan, diperlukan penanganan yang komprehensif dan bersifat lintas sektor serta keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*). Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Agar koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah kemiskinan menjadi lebih terarah, maka dibentuklan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) secara berjenjang mulai tingkat daerah kabupaten/kota, tingkat daerah provinsi dan tingkat pusat.

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada tingkat Kabupaten/Kota diharapkan dapat memastikan setiap lembaga benar-benar menjalankan kebijakan berbasis penanggulangan kemiskinan, sebagai pusat atau wadah koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) dan pemangku kepentingan, serta berperan aktif dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah, khusus pelaksanaan kinerja penanggulangan kemiskinan, telah masuk menjadi salah satu masalah prioritas yang telah tertuang dalam dokumen Renacana Penangulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026, dan diharapkan dapat menjadi arah bersama bagi Pemerintah Kota Palu, dunia usaha (swasta), masyarakat, dan berbagai pihak dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan secara terarah dan sinergis. Berjalannya hal tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam memenuhi capaian indikator kemiskinan baik tingkat global maupun lokal.

Kolaborasi semua pihak dalam rangka pengentasan kemiskinan sangat lah perlu dimaksimalkan, bertujuan agar lebih banyak dukungan dan apresiasi khsusunya dibidang penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Palu, sesuai dengan ketentuan peraturan daerah kota palu tentang penanggulagan kemskinan. Untuk mewujudkan strategi tersebut, maka dilakukan upaya–upaya terpadu melalui serangkaian tahapan penanggulangan kemiskinan Kota Palu yaitu :

1. Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Seluruh Kebijakan pemerintah daerah;
2. Mendorong terciptanya kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, LSM dan pemerintah dalam upaya memberdayakan kelompok masyarakat miskin;
3. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskinbaik laki-laki maupun perempuan.
4. Meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan perubahan pola pikir melalui perbaikan pendidikan, kesehatan serta keterampilan;
5. Menciptakan iklim yang mampu mendorong perluasan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta memperoleh pelayanan publik yang tidak diskriminatif

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2021-2026 ini merupakan rencana pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan di Kota Palu tahun 2021-2026. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan koordinasi antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kota Palu, yang diatur dalam Bab Hubungan Kerja dan Tata Kerja, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Kota Palu dan upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai komitmen Pemerintah Kota Palu dalam akselerasi penanggulangan kemiskinan. Sedangkan tujuan dari penyusunan RPKD Kota Palu ini adalah :

1. Mengetahui profil program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Palu baik dana dari APBD maupun APBN
2. Memperoleh masukan dan bahan pertimbangan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan selama 5 tahun.
3. Menjadi bahan evaluasi kinerja Tim Kerja Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Palu Tahun 2021-2026

Merupakan sasaran penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam kebijakan 5 tahunan yang bertujuan untuk:

a. Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
b. Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan
c. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana Kelurahan/dana kelurahan.

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program*)	Target Kinerja						Kebijakan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	BIDANG KESEHATAN									
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Usia Harapan Hidup	70,66	71,01	71,73	71,73	72,09	72,45	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
2	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Rasio Dokter per satuan Penduduk	98,93	99	99,01	99,01	99,01	99,01	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
4	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
	BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR									
5	Infra Strukutr Dasar	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
6	Infra Strukutr Dasar	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	33,98	31,4	32,02	32,66	33,32	33,98	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
7	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Persentase ketercapaian Pelaksanaan Program pemberdayaan sosial	100	100%	100%	1	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
8	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Persentase tercapainya rehabilitasi kesejahteraan sosial	100	100%	100%	1	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain

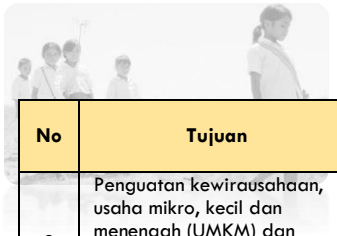

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program*)	Target Kinerja						Kebijakan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
9	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Persentase perlindungan jaminan sosial	100	100%	100%	1	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
	BIDANG KETENAGAKERJAAN									
10	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	.	100%	.	.	.	.	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
11	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Persentase pemenuhan tenaga kerja bersertifikasi	.	.	.	.	.	.	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
12	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Tingkat pengangguran terbuka	6%	6%	5,70%	5,42%	5,14%	5%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
	BIDANG KETAHANAN PANGAN									
13	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Indeks Ketahanan Pangan	90,4	91,4	92,4	93,4	94,4	95,4	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
14	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Cakupan penanganan kerawanan pangan							Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
15	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Persentase pelanggaran keamanan pangan							Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
	BIDANG KEMISKINAN									
16	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	0,678	0,681	0,715	0,751	0,788	0,828	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
17	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
18	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,85	1,81	1,78	1,74	1,71	1,67	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain

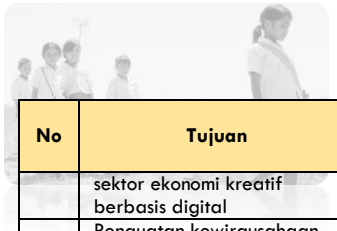

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program*)	Target Kinerja						Kebijakan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	sektor ekonomi kreatif berbasis digital									
19	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
20	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
21	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
22	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Cakupan pengembangan UMKM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
23	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
24	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
25	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
26	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain

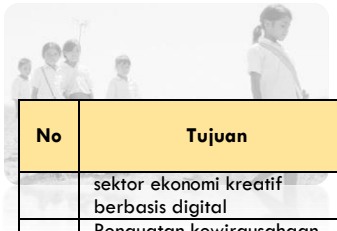

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program*)	Target Kinerja						Kebijakan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	sektor ekonomi kreatif berbasis digital		perlindungan Hak Kekayaan Intelektual							
27	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
28	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digital	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
29	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
30	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
31	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
32	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Nilai tukar petani/nelayan Kota Palu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
33	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
34	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
35	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Cakupan perencanaan dan pembangunan industri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
36	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain

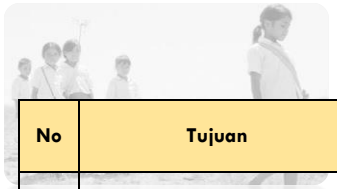

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program*)	Target Kinerja						Kebijakan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
37	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
38	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
39	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
40	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
41	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
42	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
43	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
44	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
45	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
46	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
47	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
48	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah,

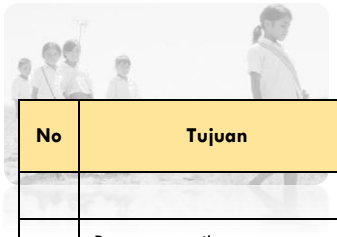

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program*)	Target Kinerja						Kebijakan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
										usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
49	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
50	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
51	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
52	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
53	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
54	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
55	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
56	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
57	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
58	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
59	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain

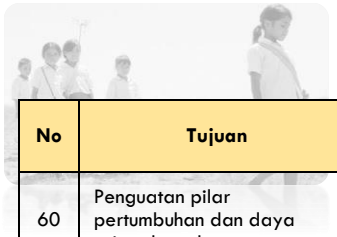

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Program*)	Target Kinerja						Kebijakan
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
60	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
61	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
62	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain
63	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain

* Indikator makro pada masing-masing bidang (seperti: pendidikan, kesehatan dst)

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RPKD Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara, Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota Palu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan KemiskinanKota Palu;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020. tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

1.4. Peran TKPK dalam menyusun RPKD

TKPK Kota Palu mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. Sedangkan fungsi TKPK dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan RPKD dan rencana aksi Kota Palu.
b. Koordinasi penyusunan RPKD Kota Palu khusunya dibidang Penanggulangan Kemiskinan.
c. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan.
d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan.
e. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Palu di dasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang isu kemiskinan, maksud dan tujuan penanggulangan kemiskinan 5 tahun kedepan, Landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan, Kemiskinan masalah multidimensi dan arti penting daerah memiliki RPKD, Peran TKPK dalam menyusun RPKD serta sistematika penulisan RPKD.

Bab II Kondisi Umum Daerah

Bab ini berisi hasil identifikasi kondisi : Perekonomian, Geografis, Demografis, Akses kepada pelayanan publik (pemerintah, pendidikan, kesehatan, akses permodalan dll), informasi sosial budaya yang berkaitan isu kemiskinan dan isu-isu terkait lainnya. Hasil identifikasi perencanaan di atas berpengaruh dan membentuk isu kemiskinan / kesejahteraan di suatu daerah.

Bab III Profil Kemiskinan Daerah

Bab ini berisi tentang profil kemiskinan konsumsi meliputi : presentase penduduk miskin (P0), jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), garis kemiskinan (GK), profil kemiskinan non konsumsi meliputi : bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur dasar, bidang ketahanan pangan, bidang ekonomi, bidang fiskal daerah, bidang pendapatan daerah, bidang belanja daerah, bidang indikator daerah. Masing-masing indikator di analisis dengan satu paket analisis; posisi relatif, perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan relevansi perkembangan untuk dijadikan bahan dalam merumuskan masalah pada indikator tertentu pada masing-masing bidang.

Bab IV Prioritas Program

Bab ini berisi tentang prioritas intervensi : Berisi *Theory of Change (ToC)* Program semua bidang (sebagai cara untuk mencari akar masalah dari masalah yang sudah diidentifikasi), Analisis Keterkaitan semua bidang (sebagai cara untuk menguji ketepatan prioritas intervensi antara data capaian dengan harapan/rencana), analisis APBD untuk penanggulangan kemiskinan : Komposisi APBD berdasarkan pendapatan dan belanja, Sumber pendapatan daerah (belanja langsung dan tidak langsung), Perkembangan derajat otonomi fiskal dan ruang fiskal, Penjelasan relevansi dan efektivitas APBD terhadap kondisi kemiskinan daerah. Prioritas program penanggulangan kemiskinan merupakan program yang diarahkan untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, penguatan ekonomi, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. Informasi prioritas program terhadap kondisi kemiskinan daerah didahului dengan melakukan analisis logika program atau teori perubahan (*Theory of Change)* dan analisis keterkaitan serta rencana analisis anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.

Bab V Lokasi Prioritas

Bab ini berisi tentang Lokasi prioritas program berdasarkan *Theory of Change (ToC)*, Matrik Tujuan Penannggulangan Kemiskinan, Matriks Prioritas

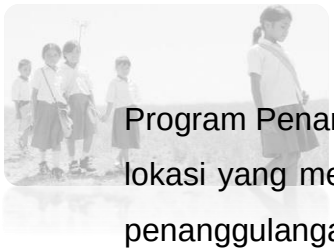

Program Penannggulangan Kemiskinan (5 Tahunan). Lokasi prioritas adalah lokasi yang menjadi pilihan pelaksanaan program- program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan. Penentuan lokasi prioritas merupakan hasil analisis prioritas intervensi dan analisis keterkaitan. Lokasi prioritas ditentukan dengan melihat permasalahan pada indikator tujuan atau indikator utama dan indikator antara atau indikator pendukungnya. Wilayah yang memiliki capaian yang relatif buruk pada kedua indikator tersebut, harus menjadi wilayah yang harus diprioritaskan.

Bab VI Penutup

Pada bagian ini menjelaskan tentang matriks prioritas program penanggulangan kemiskinan periode 5 tahun kedepan..

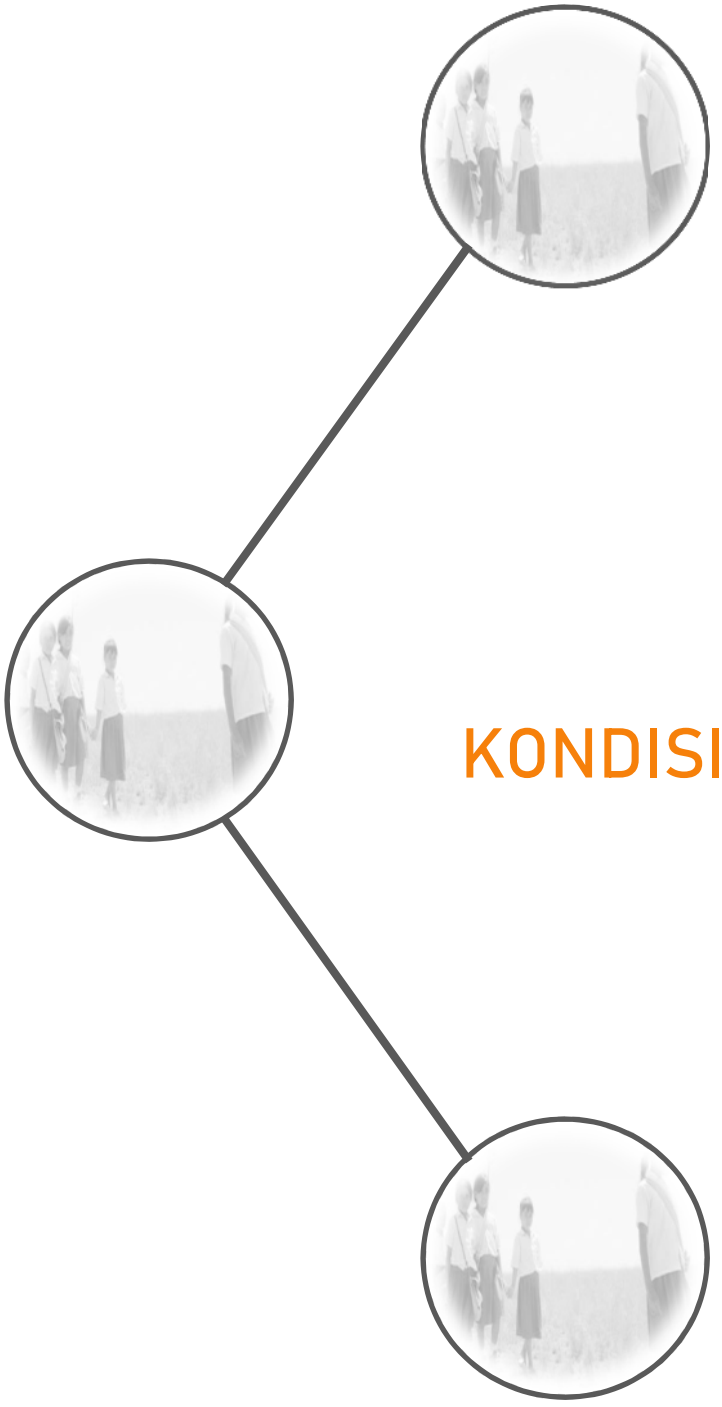

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Aspek administratif berkaitan dengan peraturan pemerintah yang mengatur batas-batas wilayah atau daerah dari sisi kewenangan untuk memerintah di daerah tersebut, sedangkan dari aspek fungsional merupakan upaya manusia untuk membatasi wilayah berdasarkan kepentingan manusia seperti munculnya berbagai kawasan, seperti kawasan lindung dan budidaya, kawasan perkotaan dan perdesaan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) wilayah kecamatan dan 46 (empat puluh enam) wilayah kelurahan. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore dengan luas 206,80 km² (52,35%) dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur dengan luas 7,71 km² (1,95%). Luas Wilayah Kota Palu secara rinci tertera dalam Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas (KM^2)	Persentase
1.	Palu Barat	8,28	2,10
2.	Tatanga	14,95	3,78
3.	Ulujadi	40,25	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,95
6.	Mantikulore	206,8	52,35

No.	Kecamatan	Luas (KM^2)	Persentase
7.	Palu Utara	29,94	7,58
8.	Tawaeli	59,75	15,12
	Kota Palu	**395,06**	**100,00**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Wilayah Kota Palu terletak pada posisi bagian tengah Provinsi Sulawesi Tengah yang dikelilingi atau berbatasan langsung dengan beberapa wilayah kecamatan/kabupaten. Tercatat sebanyak 8 (delapan) kecamatan atau 3 (tiga) kabupaten tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Palu.

Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu dengan beberapa kecamatan/kabupaten yang mengelilinginya disebutkan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kota Palu secara astronomis terletak antara 0º,36” - 0º,56” Lintang Selatan dan 119º,45” - 121º,1” Bujur Timur yang juga berada di bawah Garis Katulistiwa. Keberadaannya di bawah garis itu menyebabkan suhu udara, curah hujan, dan kelembabannya rata-rata menjadi tinggi, serta berpotensi terjadinya hujan *Zenithal* atau hujan yang terjadi pada siang hari yang disebabkan oleh pemanasan udara di sekitarnya yang terlalu tinggi. Gambaran kondisi suhu udara, curah hujan, dan kelembaban akan dijelaskan pada bagian lain di sub-sub karakteristik lokasi dan wilayah Kota Palu selanjutnya.

Berikut letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta administrasi wilayah Kota Palu di bawah ini:

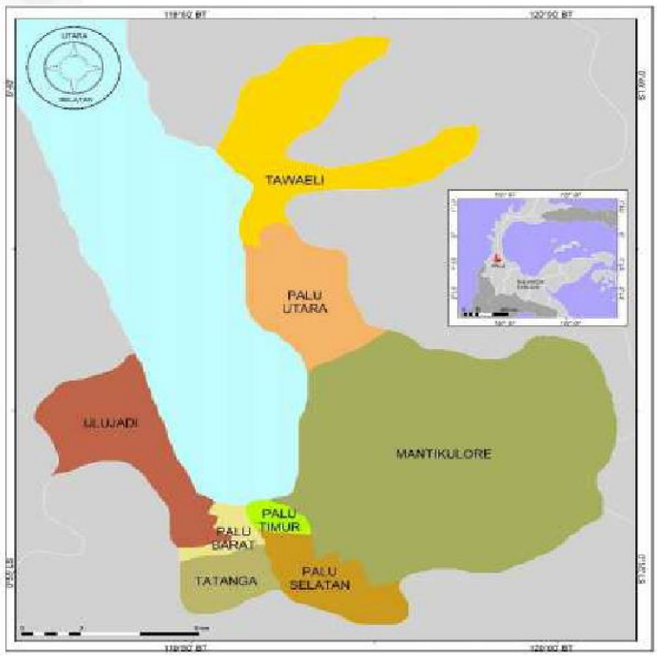

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

2.1.1.3. Kondisi Topografi

Berdasarkan hasil analisis terhadap peta topografi wilayah Kota Palu diperoleh beberapa klasifikasi kemiringan lereng sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2, sebagai berikut :

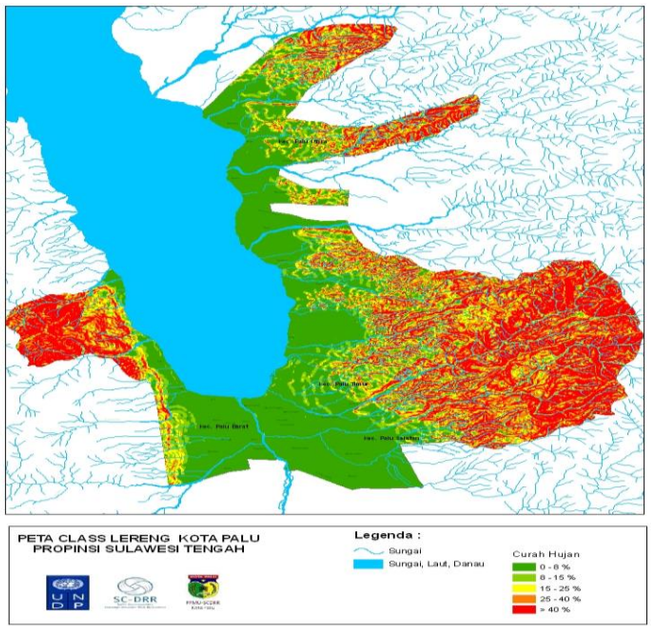

Sumber: Bappeda Kota Palu Tahun 2021

Gambar 2.2.
Peta Class Kelerengan

1. Daerah pedataran dengan kemiringan lereng kurang dari 0% - 8% dan 8% - 15%, meliputi seluruh wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Palu, termasuk semua kelurahan yang ada di dalamnya;
2. Daerah landai dengan kemiringan lereng antara 15% - 25%, meliputi seluruh wilayah kelurahan yang tersebar di empat kecamatan Kota Palu;
3. Daerah agak terjal dengan kemiringan lereng 25% - 40%, meliputi wilayah Kelurahan Kawatuna, Kelurahan Poboya, Kelurahan Lasoani, Kelurahan Buluri, Kelurahan Watusampu, Kelurahan Kabonena, Kelurahan Donggala Kodi, dan lain-lain;
4. Daerah terjal dengan kemiringan lereng > 40%, meliputi wilayah Pegunungan di wilayah Timur, Utara, dan Barat Kota Palu yaitu di wilayah Kelurahan Kawatuna, Kelurahan Poboya, Kelurahan Lasoani, Vatutela, kebun kopi, Kelurahan Buluri dan Kelurahan Watusampu.

Secara umum wilayah Kota Palu dibagi menjadi tiga zona ketinggian, yaitu:

1. Sebagian daerah bagian barat sisi timur memanjang dari utara ke selatan, bagian timur arah utara, dan bagian utara sisi barat yang memanjang dari utara ke selatan, merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan laut (mdpl).
2. Daerah bagian barat sisi barat dan selatan, daerah bagian timur ke arah selatan, dan bagian utara ke arah timur, memiliki ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan laut (mdpl).
3. Daerah pegunungan, memiliki ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl).

2.1.1.4. Kondisi Geologi

Secara geologis, orientasi fisiografi Kota Palu berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun Kota Palu. Sisi kiri dan kanan Kota Palu merupakan jalur patahan utama yaitu Patahan Palu-Koro yang wilayahnya tersusun oleh batuan yang lebih keras dibandingkan dengan material penyusun bagian lembah.

Berdasarkan hubungan geologi dan geomorfologi, wilayah Kota Palu dibagi ke dalam tiga satuan geomorfologi, yaitu :

1. Satuan Geomorfologi Dataran, dengan kenampakan morfologi berupa topografi tidak teratur, lemah, dan wilayah banjir musiman, serta dasar sungai yang umumnya meninggi akibat sedimentasi *fluvial*. Morfologi ini disusun oleh material utama berupa *aluvial* sungai dan pantai.
2. Satuan Geomorfologi Denudasi dan Perbukitan, dengan kenampakan berupa morfologi bergelombang lemah sampai bergelombang kuat. Wilayah kipas *aluvial* (*aluvial fan*) dalam satuan morfologi ini meluas di wilayah Palu Timur dan Palu Utara, serta membatasi wilayah morfologi dataran dengan pegunungan.
3. Satuan Geomorfologi Pegunungan Tebing Patahan, merupakan wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Kenampakan umum berupa tebing-tebing terjal dan pelurusan morfologi akibat proses patahan. Letak pegunungan dengan satuan geomorfologi ini berada hampir di semua arah Kota Palu yaitu selatan, timur, barat, dan sebagian utara, serta menunjukkan pengaruh struktur/tektonik yang kuat terhadap bentuk morfologi kota berupa lembah. Wilayah seperti ini umumnya bukan merupakan wilayah hunian.

2.1.1.5. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai yang melintas pada semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Matikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1 (satu) sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Lima kecamatan lainnya masing-masing dilalui oleh 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli.

Tabel 2.2 berikut memperlihatkan nama-nama sungai yang mengalir melewati semua kecamatan yang berada di wilayah Kota Palu.

Tabel 2.2
Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu
Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Palu Barat	Sungai Palu
2.	Tatanga	Sungai Lewara
3.	Ulujadi	Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo
4.	Palu Selatan	Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna.
5.	Palu Timur	Sungai Palu, dan Sungai Pondo
6.	Mantikulore	Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Watutela
7.	Palu Utara	Sungai Taipa dan Sungai Pajeko
8.	Tawaeli	Sungai Pantoloan, dan Sungan Tawaeli

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Suhu udara maksimum yang tercatat pada Stasiun Udara Mutiara Palu pada Tahun 2020 adalah 34,1°C terjadi pada bulan Januari, Maret, dan April. Suhu udara minimum terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 22,4°C. Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 29,4°C, dan Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 26,7°C. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai 83,8 persen, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 71,1 persen.

Rata-rata suhu udara, dan Kelembabannya di Kota Palu Tahun 2020 tertera dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rata-rata Suhu Udara dan Kelembapan Relatif Setiap bulan di Kota Palu
Tahun 2020

Bulan	Suhu Udara			Kelembapan
	Minimum	Maximum	Rata-Rata	(%)
Januari	23,3	34,1	28,8	72,0
Pebruari	22,9	33,4	29,4	71,1
Maret	24,4	34,1	28,2	75,8
April	24,0	34,1	28,5	74,9
Mei	23,9	34,0	28,7	77,3
Juni	22,4	32,5	27,3	80,8
Juli	22,8	31,6	26,7	83,8
Agustus	22,9	32,9	27,4	78,4
September	23,1	31,9	27,1	82,6
Oktober	23,5	32,9	27,8	78,7
Nopember	23,5	33,2	28,0	77,4
Desember	23,3	33,5	28,4	72,6

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Kondisi tekanan udara, kecepatan angun, dan arah angin setiap bulan di Kota Palu Tahun 2020. Tekanan udara tertinggi yang tercatat pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2020 terjadi pada bulan Februari, Maret, April, dan November sebesar 1.012,0 mb, sedangkan tekanan udara terendah terjadi pada bulan September sebesar 1.0010 mb. Untuk kecepatan angin, terlihat nyaris konstan antara 3-5 knots. Angka 5 knots terjadi pada bulan Februari, dan Maret, 4 knots terjadi pada bulan Januari, April, dan Mei, sementara 3 knots terjadi pada bulan Juni hingga Desember Tahun 2020. Arah angin di wilayah Kota Palu setiap bulan bergerak dari empat arah mata angin yaitu utara, timur, timur laut dan tenggara dengan arah angin terbanyak dalam satu tahun bergerak dari arah utara wilayah Kota Palu.

Rata-rata tekanan udara, kecepatan angin, dan arah angin terbanyak setiap bulan di Kota Palu Tahun 2020 terlihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan
Arah Angin Terbanyak Setiap bulan di Kota Palu Tahun 2020

Bulan	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (knot)	Arah Angin
Januari	1.011	4	Utara
Pebruari	1.012	5	Utara
Maret	1.012	5	Utara
April	1.012	4	Utara
Mei	1.011	4	Utara
Juni	1.011	3	Timur Laut
Juli	1.011	3	Timur Laut
Agustus	1.011	3	Timur
September	1.001	3	Utara
Oktober	1.010	3	Tenggara
Nopember	1.012	3	Timur
Desember	1.010	3	Utara

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Curah hujan tertinggi pada Tahun 2020 terjadi pada bulan September yaitu 304 mm. Rata-rata jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan September pula yaitu sebanyak 28 hari. Jumlah hari hujan paling

sedikit terjadi di bulan Januari sebanyak 11 hari. Penyinaran matahari pada Tahun 2020 tertinggi terjadi pada bulan Mei sebanyak 128 %, sedangkan penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Juni sebanyak 53 %. Berikut rata-rata hari hujan, curah hujan, dan penyinaran matahari setiap bulan di Kota Palu Tahun 2020 tertera dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5
Rata-rata Hari Hujan, Curah Hujan dan
Penyinaran Matahari setiap bulan di Kota Palu,Tahun 2020

Bulan	Jumlah hujan (hari)	Curah Hujan (mm)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	11	15	63
Pebruari	15	25	66
Maret	16	38	61
April	16	64	73
Mei	26	50	128
Juni	26	89	53
Juli	25	181	63
Agustus	25	59	73
September	28	304	54
Oktober	25	48	66
Nopember	22	42	63
Desember	15	20	66

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Pengunaan lahan di wilayah Kota Palu didominasi oleh lahan permukiman dengan luas lahan permukiman mencapai 2.477,16 ha. Lahan terluas untuk permukiman berturut-turut adalah Kecamatan Palu Selatan yakni 583,59 ha (23,56%), kemudian Mantikulore seluas 477,67 ha (19,28%), Kecamatan Palu Utara seluas 398,17 ha (16,07%), Kecamatan Palu Barat seluas 267,58 ha (10,80 %), Kecamatan Ulujadi seluas 244,78 ha (9,88 %), Kecamatan Palu Timur seluas 237,2 ha (9,58 %), Kecamatan Tavaili seluas 140,15 ha (5,66%) dan Kecamatan Tatanga yaitu 128,02 ha (5,17 %).

Rencana pola ruang Kota Palu mencakup rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya pada kawasan daratan seluas ± 39.504 ha dan laut seluas ± 10.460 ha. Klasifikasi pola ruang wilayah

Kota Palu terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, sebagai berikut:

a. Kawasan Lindung Kota Palu seluas ± 22.290 ha, terdiri atas:

- Hutan lindung;
- Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar mata air;
- Ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan permakaman;
- Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir dan kawasan lindung lainnya.

b. Kawasan budidaya Kota Palu meliputi kawasan budidaya wilayah darat dengan luas ± 17.216 ha, dan kawasan budidaya wilayah laut dengan luas ± 10.460 ha, terdiri atas:

- Kawasan perumahan, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah;
- Kawasan perdagangan dan jasa, di antaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- Kawasan perkantoran, di antaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;
- Kawasan industri, meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan;
- Kawasan pariwisata, di antaranya terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
- Kawasan ruang terbuka non hijau;
- Kawasan ruang evakuasi bencana, meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi *melting point* ketika bencana terjadi;
- Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- Kawasan peruntukan lainnya, antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, keamanan dan

keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

2.1.3. Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana Alam

Kerentanan wilayah terhadap bencana alam di Kota Palu dijelaskan melalui beberapa kondisi seperti kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang/tsunami, kawasan rawan banjir, kawasan rawan likuifaksi serta proyeksi perubahan iklim dan indeks rawan bencana Kota Palu.

2.1.3.1. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kota Palu merupakan salah satu wilayah kota dengan kondisi rawan gempa bumi. Gempa bumi yang potensial terjadi adalah jenis gempa bumi tektonik. Gempa jenis ini diakibatkan oleh pergeseran di dalam bumi. Magnitude gempa bumi berkisar kecil sampai besar dengan efek yang luas, kedalaman sumber gempa bisa dangkal, menengah, hingga dalam. Aktivitas gempa bumi di Kota Palu dan sekitarnya terutama dikarenakan oleh patahan aktif Palu Koro dan Patahan Pasternoster.

Berdasarkan data BNPB, terdapat sejumlah peristiwa gempa besar yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Tengah yang terasa di Kota Palu, yakni:

1. Tanggal 1 Desember 1927, gempa berkekuatan 6,5 SR yang berasal dari aktivitas tektonik Watusampo dengan pusat gempa di Teluk Palu. Akibatnya 14 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka;
2. Tahun 1994 gempa mengguncang Kabupaten Donggala;
3. Tanggal 11 Oktober 1998, gempa berkekuatan 5,5 SR mengguncang Kabupaten Donggala;
4. Tanggal 24 Januari 2005, gempa berkekuatan 6,2 SR dengan pusat gempa 16 km arah tenggara kota Palu;
5. Tanggal 17 November 2008, gempa berkekuatan 7,7 SR berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah
6. Tanggal 18 Agustus 2012, gempa berkekuatan 6,2 SR terjadi di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong.

Informasi sebaran peruntukan ruang daerah rawan gempa tertera pada gambar 2.3 berikut ini:

Gambar 2.3
Peta Analisa Rawan Gempa di Kota Palu

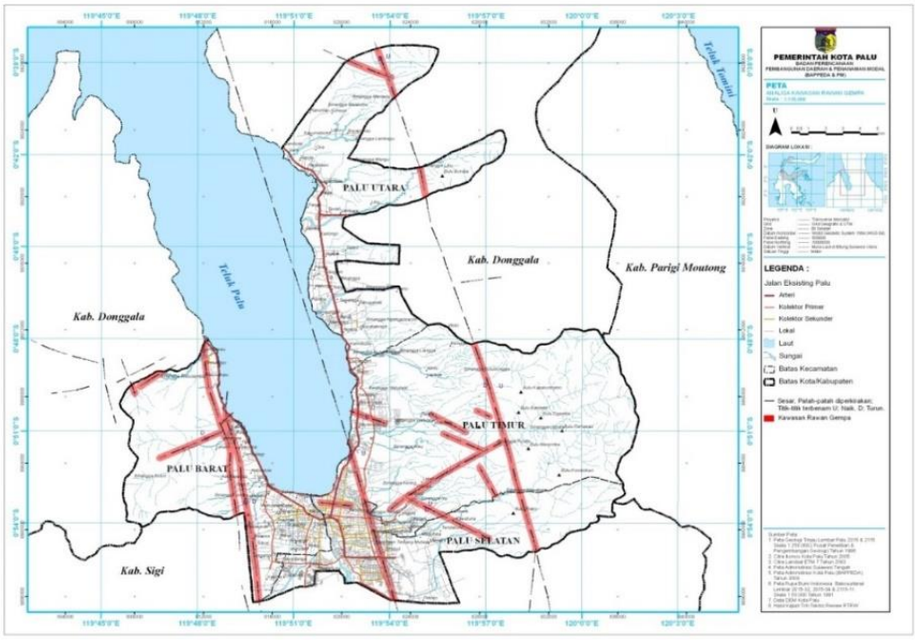

Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2020

2.2. Aspek Demografi

Gambaran aspek demografi untuk Kota Palu antara lain dijelaskan melalui beberapa penjelasan, yaitu; perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.2.1. Perubahan Penduduk

Kota Palu dengan luas 395,06 km², didiami penduduk sebanyak 373.218 jiwa pada Tahun 2020 . Penduduk ini tersebar di 8 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Tawaeli. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mantikulore sebanyak 76.745 jiwa (20,56%) sedangkan Kecamatan Tawaeli memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 22.568 jiwa (6,05%).

Tabel 2.6

Distribusi Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2020

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Palu Barat	23.425	23.010	46.435	101,8
Tatanga	26.471	26.109	52.580	101,4
Ulujadi	17.710	17.345	35.055	102,1
Palu Selatan	36.169	35.890	72.059	100,8
Palu Timur	21.411	21.907	43.318	97,7
Mantikulore	38.331	38.414	76.745	99,8
Palu Utara	12.316	12.142	24.458	101,4
Tawaeli	11.556	11.012	22.568	104,9
Kota Palu	**187.389**	**185.829**	**373.218**	**100,9**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.6 memperlihatkan jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2020 sebesar 373.218 jiwa, terdiri dari 187.389 jiwa penduduk laki-laki dan 185.829 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Palu Tahun 2020 sebesar 100,9 %.

Perkembangan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk (*migration*).

2.2.2. Komposisi dan Populasi Penduduk

2.2.2.1. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia di Kota Palu tertera dalam Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Komposisi Penduduk Kota Palu Menurut Struktur Usia Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	19.132	18.330	37.462
2	5 - 9	16.980	16.258	33.238
3	10 - 14	15.654	14.410	30.064
4	15 - 19	15.389	15.015	30.404
5	20 - 24	17.402	17.802	35.204
6	25 - 29	17.579	17.703	35.282
7	30 - 34	16.661	16.064	32.725

8	35 - 39	14.181	13.825	28.006
9	40 - 44	12.853	12.719	25.572
10	45 - 49	11.072	11.566	22.638
11	50 - 54	9.821	10.265	20.086
12	55 - 59	7.970	8.178	16.148
13	60 - 64	5.715	5.810	11.525
14	65-69	3.744	3.779	7.523
15	70-74	1.920	2.241	4.161
16	75+	1.316	1.864	3.180
	TOTAL	**187.389**	**185.829**	**373.218**

Sumber Data : BPS Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.7 memperlihatkan bahwa komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu pada Tahun 2020 untuk kelompok umur di bawah 15 tahun sebesar 100.764 jiwa atau 26,99 %, kelompok umur 15-64 tahun (usia penduduk produktif) sebesar 257.590 jiwa atau 69,03 %, dan kelompok umur 65 tahun ke atas sebesar 14.864 jiwa atau 3,98 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu didominasi oleh kelompok usia penduduk produktif yang signifikan.

Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif sebanyak 115.628 jiwa atau 30,97 % dengan penduduk usia produktif sebanyak 257.590 jiwa atau 69,03 %, dapat diketahui bahwa besarnya rasio ketergantungan Kota Palu pada Tahun 2020 yaitu sebesar 44,89 %, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak kurang lebih 45 orang penduduk usia tidak produktif (0-14) tahun dan 65 tahun keatas.

2.2.2.2. Populasi Penduduk

Kepadatan penduduk Kota Palu sebesar 944,71 jiwa/km^2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Palu Timur dengan tingkat kepadatan 5.618,42 jiwa/km^2, sementara Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Mantikulore dengan kepadatan sebesar 371,11 jiwa/km^2. Gambaran yang lebih rinci mengenai luas wilayah, kepadatan penduduk, dan presentase penduduk menurut kecamatan di Kota Palu Tahun 2020 diuraikan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2020

Kecamatan	Luas Area (Km^2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km^2	Persentase penduduk
Palu Barat	8,28	46.435	5.608,09	12,44
Tatanga	14,95	52.580	3.517,06	14,09
Ujujadi	40,25	35.055	870,93	9,39
Palu selatan	27,38	72.059	2.631,81	19,31
Palu Timur	7,71	43.318	5.618,42	11,61
Mantikulore	206,8	76.745	371,11	20,56
Palu Utara	29,94	24.458	816,90	6,55
Tawaeli	59,75	22.568	377,71	6,05
Kota Palu 2020	**395,06**	**373.218**	**944,71**	**100**

Sumber: SIPD Tahun 2020, dan Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

2.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Palu dijelaskan berdasarkan 3 (tiga) aspek pembentuk indikator kinerja yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang dicapaai dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu perekonomian merupakan kontribusi dari setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian. Perkembangan perekonomian biasanya akan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam setiap periode kepeminpinan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang diambil akan mempengaruhi perkembangan setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian.

Perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi suatu daerah tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah daerah dapat mengintervensi melalui ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok di daerah. Tekanan inflasi di suatu daerah akan memperburuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan lebih jauh akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat jika pendapatan masyarakat di daerah tersebut tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat ikut memengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat.

1). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, indikator yang umum digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) cara penilaian/pencatatan PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, angka PDRB juga digunakan untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Ada beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan perubahan harga produsen.

Secara umum, kondisi perekonomian Kota Palu dapat tetap tumbuh di tengah perekonomian global yang belum stabil. Secara tahunan, pertumbuhan Tahun 2016 sampai dengan 2020 secara berturut-turut yaitu 5,50 %; 5,53 %; 5,00 %; 5,79 %; dan -4,54 %. Ketahanan ekonomi tersebut tergambar melalui pertumbuhan pada sektor produksi (*supply side*), maupun melalui pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (*demand side*). Pada sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terdapat pada kategori Konstruksi Tahun 2019 tumbuh 19,63 %, sedangkan karakteristik pertumbuhan pada sisi permintaan akhir tetap pada ciri khasnya yaitu didominasi oleh Komponen

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu sebesar 59,43 %.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2015-2019, PDRB Kota Palu ADHB menurut Jenis Pengeluaran dapat ditunjukkan melalui Tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga	10 023721	11 058747	12 304 194	13 756 768	14 747 206
Kons.Lembaga Swasta Nirlaba	331897	362 899	407 273	640 010	855 187
Konsumsi Pemerintah	2 902303	3 037 643	3 234 131	3 307 127	3 589 814
PembentukanModal Tetap Bruto	6 852272	7 415 752	7 843 743	8 767 765	9 752 713
Perubahan Inventori	248200	276 884	216 584	(232 053)	(80 491)
Ekspor Impor	(3 192 196)	(3 581 897)	(3 589 907)	(3 620 732)	(4 048 894)
PDRB	**17 166196**	**18 570 030**	**20 416 019**	**22 618 886**	**24 815 534**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Peningkatan PDRB dari sisi nilai tambah, tentu diikuti oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran PDRB (*demand side*) yang akan diuraikan lebih lanjut dalam publikasi ini.

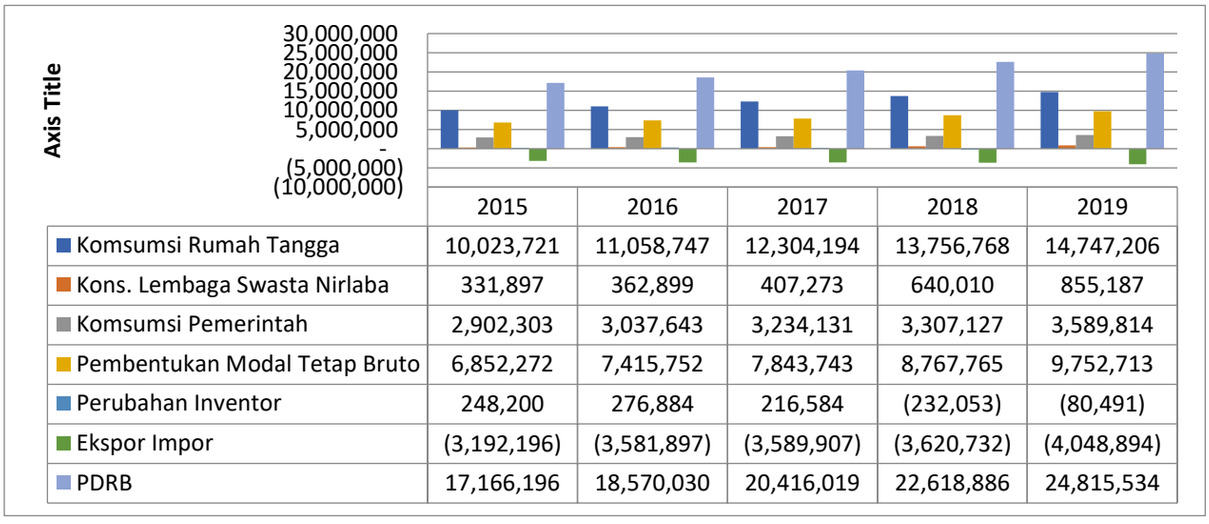

	2015	2016	2017	2018	2019
Komsumsi Rumah Tangga	10,023,721	11,058,747	12,304,194	13,756,768	14,747,206
Kons. Lembaga Swasta Nirlaba	331,897	362,899	407,273	640,010	855,187
Komsumsi Pemerintah	2,902,303	3,037,643	3,234,131	3,307,127	3,589,814
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,852,272	7,415,752	7,843,743	8,767,765	9,752,713
Perubahan Inventor	248,200	276,884	216,584	(232,053)	(80,491)
Ekspor Impor	(3,192,196)	(3,581,897)	(3,589,907)	(3,620,732)	(4,048,894)
PDRB	17,166,196	18,570,030	20,416,019	22,618,886	24,815,534

Sumber : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.4
Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB
Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Juta Rp)

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut jenis pengeluaran juga dinilai dengan ADHK Tahun 2010, atau atas dasar harga berbagai produk yang dievaluasi dengan harga pada Tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan itu maka PDRB untuk masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut jenis pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil. Utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2015-2019, gambaran tentang nilai PDRB ADHK dan pertumbuhan ekonomi Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 2.16. Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Palu meningkat dari 5,5 % pada Tahun 2016 menjadi 5,79 % pada Tahun 2019.

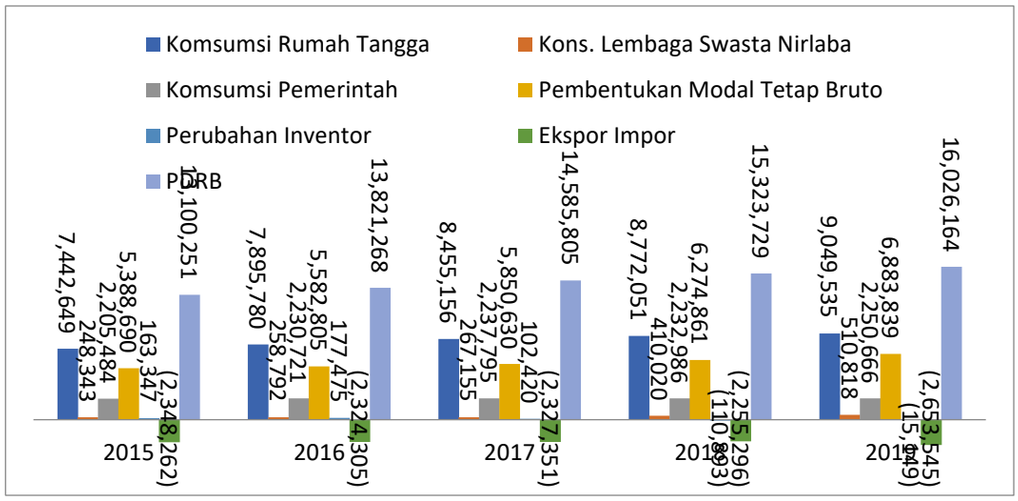

Sumber : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan dan PDRB Kota Palu ADHK
Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019

Tabel 2.10 memperlihatkan peningkatan nilai PDRB ADHK tiap tahunnya yaitu masing-masing sebesar; 13.100.251 miliar rupiah (2015); 13.821.268 miliar rupiah (2016); 14.585.805 miliar rupiah (2017); 15.323.730 miliar rupiah (2018); dan 16.026.164 miliar rupiah (2019).

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KonsumsiRumah Tangga	7 442 649	7 895 780	8 455 156	8 772 051	9 049 535
Kons.Lembaga SwastaNirlaba	248 343	258 792	267 155	410 020	510 818
Konsumsi Pemerintah	2 205 484	2 230 721	2 237 795	2 232 986	2 250 666
PembentukanModal TetapBruto	5 388 690	5 582 805	5 850630	6 274 861	6 883 839
PerubahanInventori	163 347	177 475	102 420	(110 893)	(15 149)
Ekspor Impor	(2 348 262)	(2 324 305)	(2 327 351)	(2 255 296)	(2 653 545)
PDRB	**13 100 251**	**13 821 268**	**14 585 805**	**15 323 730**	**16 026 164**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan metode perhitungan terbaru struktur perekonomian terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) sektor pembentuk PDRB. Empat sektor yang paling besar peranannya dalam PDRB Kota Palu Tahun 2020 berasal dari sektor Konstruksi (19,41 %), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan aminan Sosial Wajib (14,74 %), sektor Informasi dan Komunikasi (10,2 %), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,7 %), dan Jasa Pendidikan (7,9 %). Sedangakan 13 sektor lainnya peranannya di bawah 7 %. Sementara itu salah satu sektor dengan peranan paling kecil adalah sektor Pengadaan listrik dan gas (0,13%)

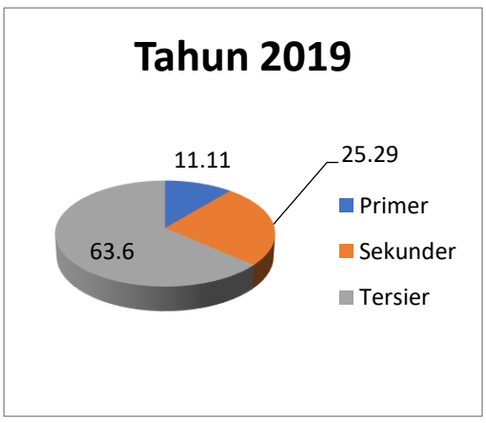

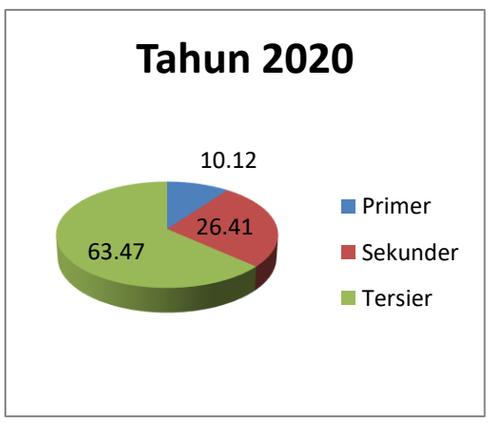

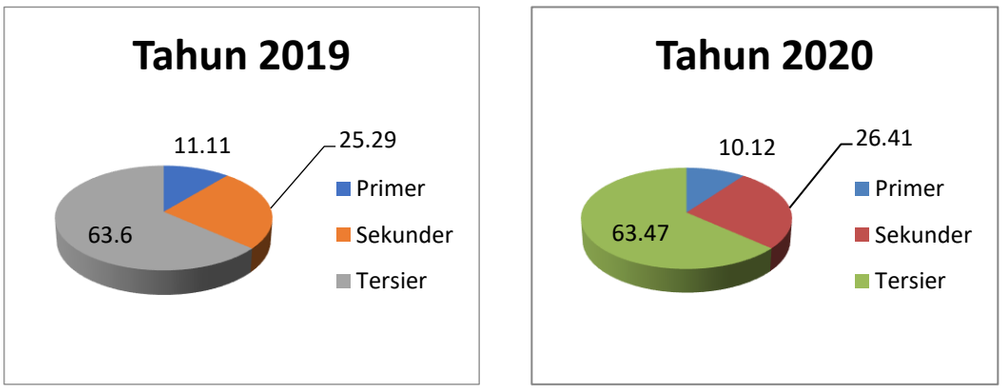

Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2021

Gambar 2.6
Struktur Perekonomian Kota Palu menurut tiga sektor Tahun 2019 dan 2020 (persen)

Gambar 2.6 memperlihatkan bahwa Tahun 2019 dan Tahun 2020 perekonomian Kota Palu didominasi oleh sektor Tersier (Kategori G hingga Kategori U). Sedangkan sektor Sekunder yang terdiri dari Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; serta Konstruksi (Kategori C hingga Kategori F) menempati urutan kedua. Sedangkan sektor Primer yang disokong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan dan penggalian (Kategori A dan B) memiliki kontribusi terkecil dalam perekonomian Kota Palu. Tahun 2020, sektor tersier memiliki kontribusi sebesar 63,47 % menurun 0,13 % dibanding Tahun 2019 sebesar 63,60 %. Sektor sekunder memiliki kontribusi 26,41 % meningkat 1,12 % dibanding Tahun 2019 sebesar 25,29 %. Demikian halnya dengan sektor primer, juga mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,99 % dari 11,11 % pada Tahun 2019 menjadi 10,12 % pada Tahun 2020.

Selain gambaran struktur ekonomi, perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) juga menjadi hal menarik untuk dikaji. Berdasarkan penghitungan PDRB ADHK 2010, perekonomian Kota Palu Tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya yaitu -4,54 % pada Tahun 2020 dan 5,79 % pada Tahun 2019.

Meskipun terjadi penurunan sebesar 10,33 % pada Tahun 2020 (data BPS Kota Palu bulan April Tahun 2021), namun pertumbuhan tertinggi

berada pada kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 9,10 %. Pertumbuhan terendah terjadi pada kategori Transportasi dan Pergudangan yaitu -35,63%. Informasi terinci mengenai pertumbuhan ekonomi masing-masing kategori tertera dalam Tabel 2.11 dan 2.12.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu Tahun 2020 (persen)

Lapangan Usaha / Industrial Origin		LP-PDRB**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (A)	(1,54)
2.	Pertambangan dan Penggalian (B)	(20,83)
3.	Industri Pengolahan (C)	(1,62)
4.	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	1,04
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E)	
	Konstruksi (F)	(0,90)
6.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (G)	(2,93)
7.	Transportasi dan Pergudangan (H)	
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	(7,37)
8.	Informasi dan Komunikasi (J)	(35,63)
9.	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	(13,83)
10.	Real Estate (L)	9,10
11.	Jasa Perusahaan (M,N)	7,24
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O)	0,35
13.	Jasa Pendidikan (P)	(3,07)
14.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial (Q)	
	Jasa lainnya (R,S,T,U)	1,49
15.		(2,25)
16.		7,41
17.		(1,29)
	Kota Palu	**(4,54)**

Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 - 2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	HK	HK	HK	HK	HK
A	**Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan**	4,11	5,21	4,87	(0,86)	(1,54)
B	**Pertambangan dan Penggalian**	9,87	10,49	0,66	14,98	(20,83)
C	**Industri Pengolahan**	1,36	0,61	(1,96)	(0,57)	(1,62)
D	**Pengadaan Listrik dan Gas**	6,22	5,67	7,34	2,10	1,04
E	**Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**	4,38	4,01	1,00	(0,22)	(0,90)
F	**Konstruksi**	(0,11)	2,49	8,42	23,42	(2,93)
G	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	7,01	4,01	6,04	(0,27)	(7,37)
H	**Transportasi dan Pergudangan**	6,89	8,54	6,54	(1,81)	(35,63)
I	**Penyediaan Akomodasi dan**	9,01	7,47	3,19	(10,56)	(13,83)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	HK	HK	HK	HK	HK
	Makan Minum					
J	**Informasi dan Komunikasi**	8,11	7,76	8,60	9,87	9,10
K	**Jasa Keuangan dan Asuransi**	14,20	7,00	0,80	(4,82)	7,24
L	**Real Estate**	3,19	4,31	3,87	(3,20)	0,35
M,N	**Jasa Perusahaan**	6,60	5,54	4,30	5,05	(3,07)
O	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**	5,74	5,12	7,91	4,03	1,49
P	**Jasa Pendidikan**	3,95	5,72	0,27	3,18	(2,25)
Q	**Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**	8,01	11,82	9,55	9,42	7,41
R,S,T,U	**Jasa lainnya**	6,67	5,13	2,53	2,26	(1,29)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**5,50**	**5,53**	**5,00**	**5,79**	**(4,54)**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Struktur ekonomi menunjukkan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha terhadap Total PDRB yang menunjang ekonomi Kota Palu. Sepuluh lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2020 secara berturut-turut: Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Pengadaan Listrik dan Gas; Real Estate; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Lainnya; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Jasa Pendidikan; Konstruksi; Jasa Perusahaan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pertambangan dan Penggalian; dan Transportasi dan Pergudangan.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Tahun 2020 menurut lapangan usaha ADHB sebesar 24.175.890 milyar rupiah. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,48 %. Demikian pula pada PDRB ADHK berdasarkan tahun dasar 2010 menujukan penurunan sebesar 4,54 % dengan total PDRB Tahun 2020 sebesar 15.467.476 milyar rupiah.

Tabel 2.13
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Miliar Rupiah) Tahun 2016 - 2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	782.256	858.145	964.735	973.763	974.147
B	Pertambangan dan Penggalian	1.243.256	1.421.138	1.452.612	1.808.868	1.472.081
C	Industri Pengolahan	1.461.945	1.540.743	1.561.717	1.571.543	1.588.988
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.766	25.716	30.519	31.275	31.851
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	54.527	58.774	68.693	68.152	71.859
F	Konstruksi	3.000.341	3.267.246	3.724.379	4.665.252	4.692.048
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.852.888	2.034.441	2.288.522	2.485.641	2.344.665
H	Transportasi dan Pergudangan	1.705.975	1.950.204	2.247.334	2.407.803	1.556.080
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	210.921	234.647	248.512	237.577	208.652
J	Informasi dan Komunikasi	1.572.447	1.752.796	1.994.364	2.288.772	2.465.360
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.117.952	1.225.842	1.323.771	1.290.037	1.390.908
L	Real Estate	471.327	515.581	565.958	568.689	576.887
M,N	Jasa Perusahaan	220.142	239.388	263.959	279.258	275.317
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.553.227	2.761.359	3.240.726	3.447.843	3.563.720
P	Jasa Pendidikan	1.560.241	1.715.515	1.829.136	1.929.051	1.909.814
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	536.945	613.732	702.124	751.761	822.901
R,S,T,U	Jasa lainnya	183.867	200.745	219.105	232.077	230.605
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**18.570.030**	**20.416.019**	**22.726.172**	**25.046.370**	**24.175.890**

Tabel 2.14
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
(Miliar Rupiah) Tahun 2016 - 2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	612.566	644.505	675.918	670.096	659.800
B	Pertambangan dan Penggalian	912.549	1.008.257	1.014.917	1.169.935	923.843
C	Industri Pengolahan	1.172.290	1.179.480	1.156.388	1.149.778	1.131.203
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27.133	28.671	30.776	31.423	31.749
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.753	48.628	49.114	49.004	48.565
F	Konstruksi	1.994.550	2.044.265	2.216.300	2.735.278	2.655.142
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.446.399	1.504.427	1.595.235	1.590.898	1.473.641
H	Transportasi dan Pergudangan	1.250.906	1.357.740	1.446.599	1.420.453	914.366
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	149.515	160.688	165.820	148.314	127.796

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7
J	Informasi dan Komunikasi	1.365.414	1.471.405	1.597.988	1.755.683	1.915.373
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	874.117	935.347	942.835	897.407	962.381
L	Real Estate	369.929	385.885	400.804	387.980	389.356
M,N	Jasa Perusahaan	163.142	172.174	179.578	188.654	182.865
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.811.828	1.904.644	2.055.219	2.138.073	2.169.956
P	Jasa Pendidikan	1.098.442	1.161.306	1.164.404	1.201.431	1.174.432
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	383.393	429.233	470.219	514.516	552.662
R,S,T,U	Jasa lainnya	141.864	149.140	152.909	156.357	154.338
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**13.821.267**	**14.585.804**	**15.315.031**	**16.202.287**	**15.467.476**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Berikut perkembangan beberapa indikator makro ekonomi Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palu, 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (miliar Rp)	18.570.030	20.416.019	22.726.172,5	25.046.370,5	24.175.890
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar Rp)	13.821.267,8	14.585.804	15.315.031,2	16.202.287,6	15.467.476
Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE (persen)	5,50	5,53	5,00	5,79	(4,54)
PDRB Menurut Jenis Pengeluaran ADHB (miliar Rp)	18.570.030,4	20.416.019,1	22.618.886,7	24.815.534,9	NA

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.15 di atas memperlihatkan bahwa secara umum perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palu periode 2016-2019 membaik. Pertumbuhan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha rata-rata tumbuh sebesar 10,49% per tahun. PDRB ADHK rata-rata tumbuh sebesar 5,44 %, Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan rata-rata tumbuh sebesar 5,39 %, dan PDRB ADHB menurut Jenis Pengeluaran rata-rata tumbuh sebesar 10,15 % per tahun.

Indikator makro ekonomi Kota Palu Tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan (data BPS Kota Palu bulan April Tahun 2021). PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha turun sebesar 13,69% dari tahun sebelumnya yaitu 10,21% menjadi -3,48%, begitupun dengan PDRB ADHK dan LPE turun sebesar 10,33% dari tahun sebelumnya yaitu 5,79% menjadi –4,54 %.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2017 perekonomian Kota Palu tumbuh sebesar 0,03 % menjadi 5,53 % dari tahun sebelumnya 5,50 %, Tahun 2018 turun sebesar 0,53 % dari Tahun 2017 menjadi 5,00 %, Tahun 2019 naik lagi sebesar 0,79 % dari Tahun 2018 menjadi 5,79 %, dan turun lagi secara signifikan pada Tahun 2020 sebesar 10,33 % dari Tahun 2019 menjadi -4,54%.

Dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten yang bertetangga langsung dengan Kota Palu yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Kabupaten Sigi, rata-rata LPE Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir lebih tinggi yaitu sebesar 3,46 % per tahun diikuti oleh Kabupaten Sigi sebesar 3,35 % per tahun, Kabupaten Donggala 2,94 % per tahun, dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 2,65 % per tahun. Sementara jika dibandingkan dengan rata-rata LPE Provinsi Sulawesi Tengah, rata-rata LPE Sulawesi Tengah umumnya lebih tinggi yaitu 7,40 % per tahun.

Tabel 2.16 di bawah ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020.

Tabel 2.16
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi, dan Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Kota Palu	Kab. Donggala	Kab. Parimo	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah
2016	5,50	4,89	5,57	5,60	9,94
2017	5,53	5,10	5,64	5,62	7,10
2018	5,00	5,20	4,66	3,92	6,28
2019	5,79	4,37	2,32	3,57	8,83
2020	(4,54)	(4,87)	(4,92)	(1,97)	4,86

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2021

2). Laju Inflasi

Selama lima tahun terakhir Kota Palu mengalami kenaikan dan penurunan Inflasi. Tahun 2016 hingga Tahun 2018 mengalami kenaikan Inflasi dengan rata-rata sebesar 4,09 %. Tahun 2018 hingga Tahun 2020 mengalami penurunan Inflasi dengan rata-rata sebesar 3,52 %. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2018 sebesar 6,46% dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2016 sebesar 1,49 %.

Rata-rata inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir sebesar 3,31 % per tahun, dan Indonesia sebesar 2,97 % per tahun. Sementara untuk rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Palu sebesar 39,32 % per tahun dan Indonesia sebesar 4,18 % per tahun. Rata-rata inflasi dan pertumbuhan inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2016 – 2020 tertera pada Tabel 2.17 di bawah ini.

Tabel 2.17
Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%)
Tahun 2016-2020

Inflasi	Tahun					Rata-rata Inflasi	Rata-rata Pertumbuhan Inflasi (%)
	2016	2017	2018	2019	2020		
Kota Palu	**1,49**	**4,33**	**6,46**	**2,30**	**1,81**	**3,31**	**39,32**
Indonesia	3,02	3,61	3,13	2,04	3,03	2,97	4,18

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2020

Perkembangan inflasi menurut kelompok pengeluaran Tahun 2016-2019 secara umum menunjukkan sektor-sektor penyumbang inflasi dalam empat tahun terakhir di Kota Palu. Sektor makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau adalah penyumbang inflasi tertinggi dengan rata-rata inflasi sebesar 4,51 % per tahun, dan sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan adalah penyumbang inflasi terendah dengan rata-rata inflasi sebesar 3,13 % per tahun.

Perkembangan inflasi Kota Palu menurut kelompok pengeluaran Tahun 2016-2019 tertera dalam Tabel 2.18 sebagai berikut :

Tabel 2.18
Perkembangan Inflasi Kota Palu menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) Tahun 2016 – 2019

No	Sumber Inflasi	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Umum	1,49	4,33	6,46	2,30
2.	Bahan Makan	(0,46)	3,79	6,37	3,60
3.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	3,53	2,96	8,12	3,42
4.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,42	9,51	4,68	(0,35)
5.	Sandang	3,41	2,09	2,12	5,06
6.	Kesehatan	3,38	3,63	6,21	3,78
7.	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	4,62	(1,56)	8,01	4,18
8.	Tansportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,62	3,08	7,69	1,13

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

3). PDRB per kapita

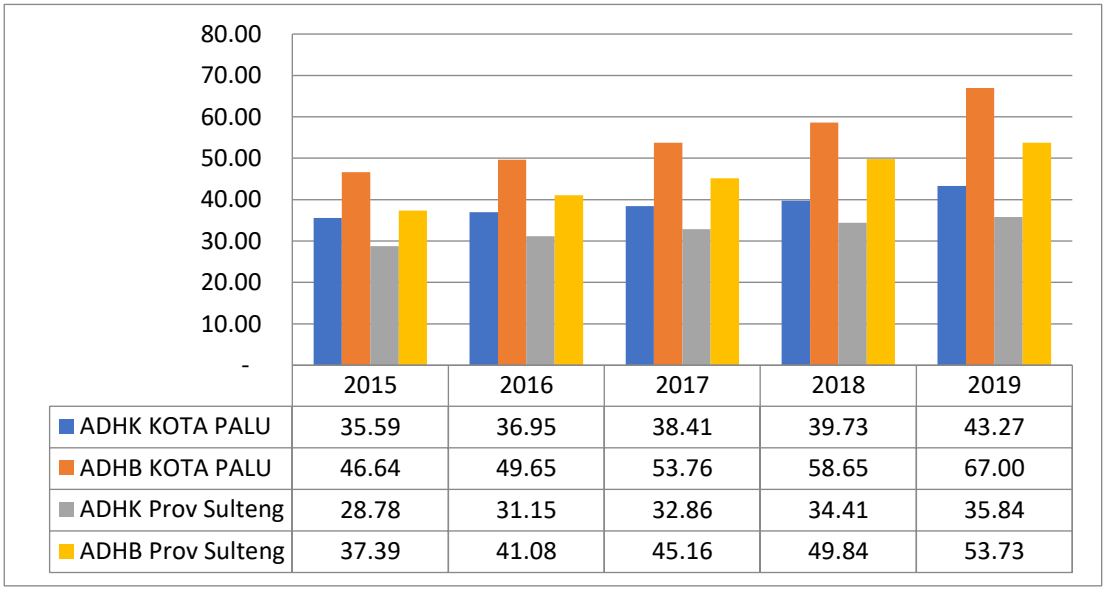

	2015	2016	2017	2018	2019
ADHK KOTA PALU	35.59	36.95	38.41	39.73	43.27
ADHB KOTA PALU	46.64	49.65	53.76	58.65	67.00
ADHK Prov Sulteng	28.78	31.15	32.86	34.41	35.84
ADHB Prov Sulteng	37.39	41.08	45.16	49.84	53.73

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 2.7
PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Juta Rupiah) Tahun 2015 – 2019

Tabel 2.19 memperlihatkan PDRB perkapita ADHK dan ADHB untuk Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah jangka waktu lima tahun (periode Tahun 2015-2019). Rata-rata PDRB perkapita ADHK Kota Palu sebesar 38,79 (juta rupiah) per

tahun lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata PDRB perkapita ADHK Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 32,61 (juta rupiah) per tahun. Rata-rata PDRB perkapita ADHB Kota Palu sebesar 55,14 (juta rupiah) per tahun juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata PDRB perkapita ADHB Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 45,44 (juta rupiah) per tahun. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan penduduk Kota Palu per tahun lebih tinggi dari pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.19
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 -2019

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
1	2	HB	HB	HB	HB
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	4,21	4,20	4,07	3,63
B	Pertambangan dan Penggalian	6,69	6,96	6,42	6,26
C	Industri Pengolahan	7,98	7,55	7,11	6,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,29	0,28	0,27
F	Konstruksi	16,16	16,00	16,47	19,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,98	9,96	9,81	9,47
H	Transportasi dan Pergudangan	9,19	9,55	9,72	9,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,14	1,15	1,10	0,97
J	Informasi dan Komunikasi	8,47	8,59	8,82	9,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,02	6,00	5,61	5,01
L	Real Estate	2,54	2,53	2,50	2,33
M,N	Jasa Perusahaan	1,19	1,17	1,17	1,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,75	13,53	14,33	13,86
P	Jasa Pendidikan	8,40	8,40	8,39	8,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,89	3,01	3,10	3,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,99	0,98	0,97	0,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: PDRB Kota Palu Thn 2016-2019, Kota Palu Dalam Angka Thn 2020

4). Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan

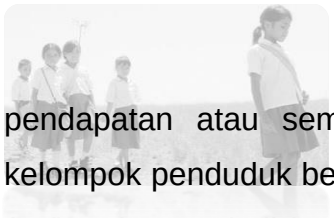

pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (lampiran I) menerangkan angka pada perhitungan rasio gini memiliki arti sebagai berikut:

- Ketimpangan rendah bila gini ratio $< 0{,}3$
- Ketimpangan sedang bila gini ratio antara $0{,}3 \leq G \leq 0{,}5$
- Ketimpangan tinggi bila gini ratio $> 0{,}5$

Berikut perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah tertera dalam Gambar 2.8:

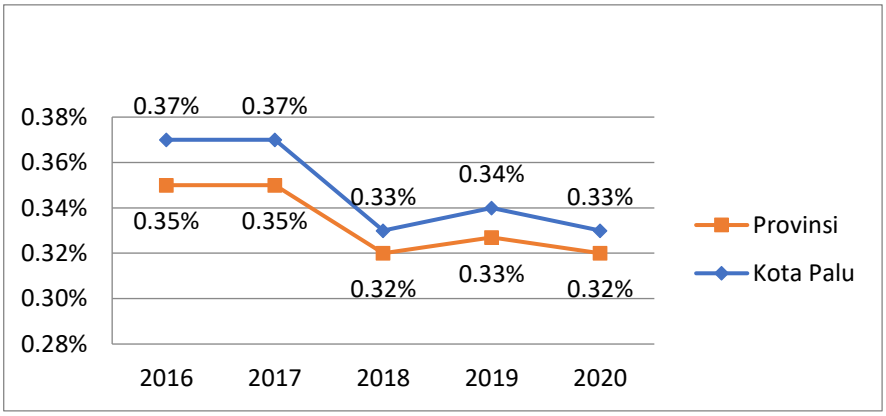

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Gambar 2.8
Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2016 – 2020

Gambar 2.8 memperlihatkan angka gini rasio Kota Palu lima tahun terakhir berada pada jenis ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini dengan rata-rata 0,35 % per tahun, begitu juga indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan rata-rata 0,33 % per tahun. Berdasarkan rata-rata tersebut, Indeks gini Kota Palu masih lebih tinggi tiap tahunnya apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu lima tahun terakhir masih kurang didukung dengan pemerataan pendapatan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya pertumbuhan PDRB dan PDRB perkapita dibarengi dengan adanya

pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

2.4.1. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing *(competitiveness)* merupakan satu di antara faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Gambaran umum kondisi daerah yang berhubungan dengan aspek daya saing daerah meliputi capaian pembangunan daerah yang dapat dilihat dari capaian pemerintah daerah terhadap aspek-aspek antara lain; Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia yang dijelaskan lebih detail sebagaimana berikut:

2.4.1.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah, di mana kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik *(attractiveness)* bagi pelaku ekonomi yang telah berada, dan akan masuk ke suatu daerah. Daya tarik investasi yang tinggi dan bergerak secara cepat aktivitas ekonomi daerah akan menciptakan terjadinya efek ganda *(multiflier effect)* dan efek menjalar *(contagious effect)* bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari: Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Angka Konsumsi Rata-Rata Rumah Tangga per Kapita Sebulan, dan Produktivitas Total Daerah.

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi

karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

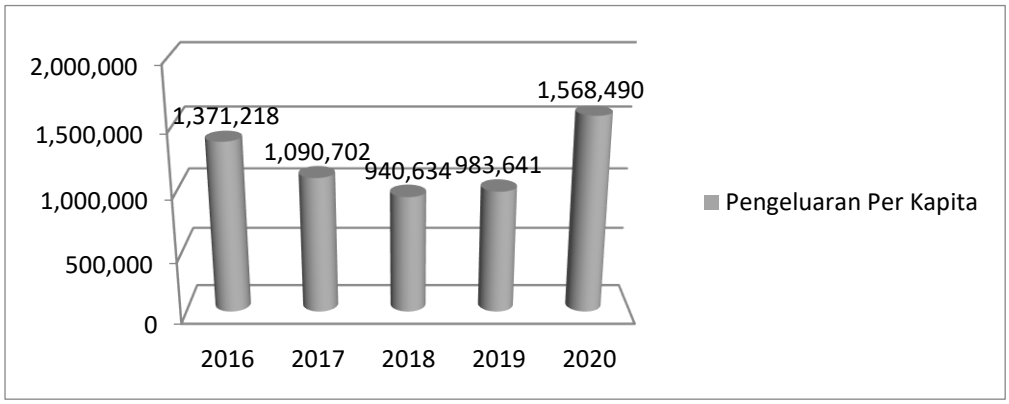

Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2021

Gambar 2.9
Rata-rata Pengeluaran per Kapita (Rp/Tahun)
Tahun 2016-2020

Gambar 2.9 di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran per kapita setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita masyarakat Kota Palu Tahun 2017-2020 masing-masing sebesar -20,46 %, -13,76%, 4,57 %, dan 59,46 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Palu mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak Tahun 2018-2020. Lebih jelasnya, secara rinci ditampilkan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Tahun 2020

Golongan Pengeluaran	Kota Palu	Sulawesi Tengah
< 150000	0.00	0.00
150.000-199.999	0.00	0.19
200.000-299.999	0.00	1,62
300.000-499.999	3,81	12,36
500.000-749.999	14,37	28,82
750.000-999.999	13,74	20,07
1.000.000-1.499.999	20,67	20,13
1.500.000+	47,41	16,81

Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.20 menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Kota Palu didominasi oleh 5 (lima) golongan pengeluaran, yaitu Rp.1.500.000 ke atas (47,41 %), Rp.1.000.000-Rp.1.499.999 (20,67 %), Rp.750.000-Rp.999.999 (13,74 %), Rp.500.000-Rp.749.999 (14,37 %) dan Rp.300.000-Rp.499.999 (3,81 %). Khusus pada golongan pengeluaran tertinggi yaitu Rp.1.500.000 ke atas (47,41%), angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding angka provinsi yang hanya mencapai 16,81 %. Selain pengeluaran golongan makanan, juga terdapat pengeluaran bukan makanan di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2019-2020

Kelompok Bukan Makanan	Kota Palu		Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita
	2019	2020	
Perumahan dan Fasilitas Rumah	247.717	470.376	222.659
Aneka Barang dan Jasa	100.292	217.933	117.641
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	32.692	49.307	16.615
Barang Yang Tahan Lama	46.688	112.333	65.645
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	30.826	54.029	23.203
Keperluan Pesta dan Upacara	17.817	33.131	15.317

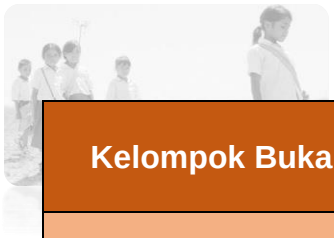

Kelompok Bukan Makanan	Kota Palu		Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita
	2019	2020	
Jumlah	**478.032**	**937.108**	**459.076**

Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.21 memperlihatkan bahwa terjadi pertumbuhan pengeluaran per kapita tertinggi pada kelompok bukan makanan “perumahan dan fasilitas rumah” sebesar 222.659 rupiah sebulan, dan terendah pada “keperluan pesta dan upacara” sebesar 15.317 rupiah sebulan. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga Kota Palu menurut kelompok bukan makanan Tahun 2020 meningkat sebesar 459.076 rupiah sebulan.

Merujuk dari teori atau hasil penelitian bahwa pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu apabila terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1 rupiah maka akan terjadi pertambahan pertumbuhan ekonomi, maka dengan melihat peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga Kota Palu Tahun 2020 sebesar 459.076 rupiah sebulan maka terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 459.076 rupiah sebulan.

Selanjutnya produktivitas total daerah menggambarkan besarnya tingkat produktivitas setiap sektor dalam aktivitas perekonomian suatu daerah. Sektor/Lapangan Usaha di Kota Palu yang menunjang PDRB Kota Palu terdiri dari 17 (tujuh belas) Lapangan Usaha, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Tujuh belas lapangan usaha tersebut, yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2020 adalah lapangan usaha konstruksi (19,63 %); administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (13,86 %); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (9,8 %); dan transportasi dan pergudangan (9,58) %).

2.4.2. Aspek Pelayanan Umum

2.4.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional yang diarahkan demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan bertumpu di atas prinsip ketersediaan lembaga PAUD yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, keterjangkauan layanan PAUD sesuai dengan kemampuan masyarakat, kualitas layanan PAUD dalam mendidik anak usia 4 – 6 tahun, kesetaraan layanan PAUD untuk setiap kelompok masyarakat, dan kepastian setiap anggota masyarakat dalam memperoleh layanan PAUD.

Perkembangan PAUD di Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami Fluktuasi di seriap tahunnya. Tahun 2016–2017 persentase PAUD cukup tinggi dan mengalai peningkatan namun pada Tahun 2018–2020 terjadi penurunan yang cukup besar dengan persentase yang rendah. Pada tahun 2018 persentase murid terhadap penduduk usia 4–6 tahun di Kota Palu sebesar 36,36 % dan menurun lagi menjadi 37,45 % pada Tahun 2019. Meskipun tahun 2020 persentase PAUD naik sebesar 1,09 %, namun perentase ini masih tergolong sangat rendah karena masih ada sekitar 62,55 % Anak Usia Dini 4 – 6 tahun yang belum terjangkau oleh layanan PAUD.

Perkembanggan kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 diuraikan dalam Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palu
Tahun 2016 -2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Murid TK/RA/Penitipan Anak	6.683	8.188	6.675	6.661	7.258
2.	Jumlah Penduduk Usia 4 - 6 Tahun	10.975	11.975	18.222	19.572	19.381
3.	**Persentase PAUD**	**60,89**	**68,38**	**36,36**	**34,03**	**37,45**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2021

b. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Perkembangan rasio ketersedian sekolah di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 diuraikan dalam Tabel 2.23.

Rasio ketersedian sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Pada periode 2016-2018 rasionya menurun hingga 48,77 per 10.000 penduduk, dan meningkat kembali mencapai 54,69 per 10.000 penduduk pada tahun 2019, dan relatif konstan hingga 2020 dengan angka 54.36 per 10.000 penduduk.

Sementara itu, setelah meningkat dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2017 sebesar 54,29 per 10.000 penduduk, rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs mengalami penurunan dan berada di angka 46.73 per 10.000 penduduk di tahun 2020. Rasio ketersediaan sekolah jenjang SMA/SMK/MA selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kota Palu relatif stabil meski cenderung menurun.

Tabel 2.23
Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu (per 10.000)
Tahun 2016-2020

No.	Jenjang pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Sekolah	184	185	185	189	190
1.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	33.218	34.526	33.830	34.215	34.954
	Rasio Palu	**55.39**	**53.58**	**48,77**	**54.69**	**54.36**
2.	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah Sekolah	71	71	70	72	73
2.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun	18.832	13.078	13.645	16.218	15.623
	Rasio Palu	**37.70**	**54.29**	**51.30**	**44.39**	**46.73**
3.	**SMA/SMK/MA**					
3.1	Jumlah Sekolah	63	64	64	64	64
3.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	32.669	33.120	34.722	34.676	N/A
	Rasio Palu	**19.28**	**19.32**	**18.43**	**18.45**	**N/A**

Sumber: Disdikbud Kota Palu dan Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

c. Rasio Ketersediaan Guru

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu per 1.000 jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di Kota Palu di jenjang pendidikan yang disebutkan. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata mengindikasikan ketersediaan guru per kelas rata-rata dalam Kota Palu pada setiap jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK pada Tahun 2016 - 2020 di uraikan dalam Tabel 2.24.

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu pada Tahun 2016 adalah sebesar 60,52, atau sebanyak 60 guru per 1.000 murid SD/MI. Periode 2016 – 2018 menunjukkan tren penurunan hingga rasio berada di titik terendah 50,59 pada tahun 2018, atau 50 guru per 1.000 murid SD/MI. Rasio guru/murid per kelas rata-rata juga menunjukkan trend yang sama, dan berada di titik 36,24 atau 36 guru per 1000 murid per kelas rata-rata. Namun angka rasio guru terhadap murid SD/MI di Kota Palu kembali meningkat hingga berada di angka 67,86, atau 68 guru per 1.000 murid SD/MI pada tahun 2020.

Rasio Guru/Murid Jenjang PendidikanSD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kota Palu (per 1.000 Murid) Tahun 2016 – 2020 diuraikan dalam tabel 2.24 sebagai berikut:

Tabel 2.24
Rasio Guru/Murid Jenjang PendidikanSD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kota Palu (per 1.000 Murid)
Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. SD/MI:					
1.1 Jumlah Guru	2.430	2.232	2.306	2.287	2.641
1.2 Jumlah Murid	41.425	40.818	39.166	36.003	38.916
1.3 Jumlah Kelas	1.334	1.365	1.396	1388	NA
Rasio Guru/Murid	**58,66**	**54,68**	**58,87**	**63,52**	**67,86**
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	**43,97**	**40,05**	**42,17**	**45,76**	**NA**
2. SMP/MTs:					
2.1 Jumlah Guru	1.605	1.601	1.579	1.599	1.675
2.2 Jumlah Murid	23.802	22.257	17.816	21.116	20.778
2.3 Jumlah Kelas	672	660	648	628	NA
Rasio Guru/Murid	**64,73**	**71,93**	**88,62**	**75,72**	**80,61**
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	**96,32**	**108,98**	**136,75**	**120,57**	**NA**

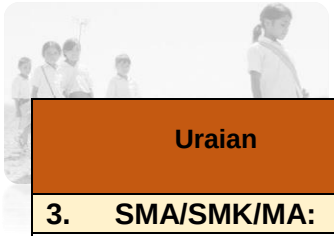

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
3. SMA/SMK/MA:					
3.1 Jumlah Guru	1.742	1.843	1.714	2.078	2.006
3.2 Jumlah Murid	22.607	24.449	24.337	24.857	25.439
3.3 Jumlah Kelas	616	766	916	N/A	NA
Rasio Guru/Murid	**77,05**	**75,38**	**70,42**	**83,59**	**78,85**
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	**125,08**	**98,40**	**76,87**	**NA**	**NA**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, BPS 2021

Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2016 sebesar 73,81 atau 74 orang guru per 1.000 murid. Pada periode 2016 - 2018 rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu turun menjadi 66,66 atau 67 orang guru per 1.000 murid. Namun dalam 2 (dua) tahun terakhir, rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota palu kembali meningkat dan menjadi 81,58 di tahun 2020.

Penurunan tersebut terjadi akibat bertumbuhnya jumlah murid SMP/MTs yang tidak dibarengi oleh meningkatnya jumlah guru. Namun setelah terjadi peningkatan jumlah guru pada tahun 2019 – 2020, maka terjadi peningkatan rasio guru/murid, termasuk pula rasio guru/murid per kelas rata-rata.

d. Kondisi Bangunan Sekolah

Hingga Tahun 2017, jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu Tahun 2016-2020 hampir seluruhnya dalam kondisi baik. Namun bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu pada tahun 2018 menyebabkan kerusakan di beberapa sekolah di Kota Palu, sehingga dari 2018 hingga 2020 terdapat 89,70% atau 148 sekolah yang berada dalam kondisi baik. Hal ini terlihat dalam tabel 2.25.

Tabel 2.25
Jumlah Kondisi Bangunan Sekolah Baik Pada Jenjang SD/MI di Kota Palu Tahun 2016 -2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah Kondisi Baik*	162	162	142	143	145
Jumlah Sekolah	184	185	185	189	190
Kondisi bangunan baik	**88,04%**	**87,56%**	**76,75%**	**75,66%**	**76,31%**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan BPS Kota Palu Tahun 2021

Sekolah dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2016-2019 dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari tabel 2.26 yang menunjukan 100% sekolah dengan kondisi baik pada tiap tahunnya.

Tabel 2.26
Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik Pada Jenjang SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah Kondisi Baik*	46	46	46	46	46
Jumlah Sekolah	71	71	70	72	73
Kondisi bangunan baik	**64,78%**	**64,78%**	**65,71%**	**63,88%**	**63,01%**

Sumber: Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2021

Tabel 2.27
Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik Pada Jenjang SMA/SMK/MA di Kota Palu Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah Kondisi Baik*	46	46	46	46	NA
Jumlah Sekolah	63	64	64	64	64
Kondisi bangunan baik	**73,01%**	**71,87%**	**71,87%**	**71,87%**	**NA**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan BPS Kota Palu Tahun 2021

e. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Salah satu faktor utama penentu kualitas pendidikan adalah kualitas tenaga pendidik. Indikator utama tercapainya kualitas tenaga pendidik adalah kualifikasi pendidikan tenaga pendidik. Pekembangan guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kota Palu selama periode 2016 – 2019 mengalami sedikit penurunan akibat bertambahnya jumlah guru secara keseluruhan. Uraian mengenai perkembangan guru memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2016 – 2019 terlihat dalam tabel 2.28.

Tabel 2.28
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Guru SD/MI, SMP/MTs, Yang	3.926*	4.228	4.099	4.335	4.184

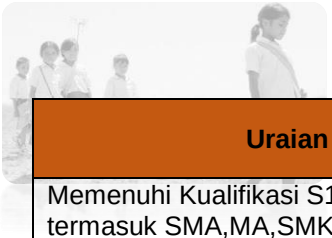

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (belum termasuk SMA,MA,SMK)					
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	5.777	5.676	5.599	5.664	6.322
Rasio	**67,95**	**74,48**	**73,20**	**76,88**	**66,18**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan BPS Kota Palu Tahun 2021

Pada Tahun 2016 rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu sebesar 43,68% dan mengalami peningkatan hingga mencapai 48,20% pada Tahun 2017. Namun pada periode 2018 – 2019, rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu mengalami penurunan hingga menjadi 32,36%.

Selain disebabkan oleh jumlah guru berkualifikasi S1/D-1V yang mengalami penurunan, rasio juga terpengaruh oleh bertambahnya jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang meningkat hampir 45% dari 4.176 di tahun 2018 menjadi 6.048 di tahun 2019. Peningkatan jumlah guru secara total ini tidak dibarengi dengan peningkatan guru yang berkualifikasi S1/D-IV di Kota Palu. Selain itu, jika ditilik dari tren secara keseluruhan, rasio guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu selama periode 2016 – 2019 belum menyentuh 50% dan masih tergolong rendah.

2) Kesehatan

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Jumlah Posyandu sangat ditentukan oleh jumlah balita di suatu wilayah. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 1 unit posyandu bagi 75–100 balita. Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu. Perkembangan rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2020 tertera dalam tabel 2.29.

Rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Tahun 2020 sebesar 5,25 per 1.000 balita. Ini menunjukkan bahwa rasio ketersediaan Posyandu di Kota Palu adalah 1 : 190 balita yang berarti Kota Palu belum memenuhi rasio ketersediaan posyandu. Kebutuhan posyandu masih kurang dari kondisi yang ideal.

Tabel 2.29
Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu
Menurut Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan		Posyandu	Balita	Rasio
Palu Barat		28	4.514	**6,20**
Tatanga		24	5.476	**4,38**
Ulujadi		29	4.021	**7,21**
Palu selatan		27	7.096	**3,80**
Palu Timur		32	3.782	**8.46**
Mantikulore		38	7.654	**4,96**
Palu Utara		21	7.587	**2,76**
Tawaeli		24	2.332	**10,29**
Kota Palu	**2020**	**223**	**42.462**	**5,25**

Sumber: Dinkes Kota Palu dan BPS Kota Palu, Tahun 2021

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah masing-masing unit Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu di Kota Palu dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk.

Pasca peristiwa bencana pada Tahun 2018, jumlah penduduk di Kota Palu mengalami penurunan yang cukup signifikan di Tahun 2019, sehingga angka rasio puskesmas yang tadinya mengalami penurunan pada periode 2016 – 2018, naik menjadi 3,8 per 100.000 penduduk di Tahun 2019. Namun rasio puskesmas kembali mengalami sedikit penurunan di Tahun 2020 menjadi 3,75 per 100.000 penduduk.

Jumlah Poliklinik di Kota Palu yang sempat mencapai 50 Unit di Tahun 2018 namun turun menjadi 29 Unit di Tahun 2019 berpengaruh besar pada menurunnya rasio Poliklinik pada tahun tersebut. Sementara itu ketersedian Puskesmas Pembantu di Kota Palu juga menurun pada Tahun 2018 – 2019 menciptakan tren fluktuatif pada rasio Pustu, yang sempat turun menjadi 7,29 pada Tahun 2019, namun kembali naik pada Tahun 2020 menjadi 8,04 per 100.000 penduduk.

Perkembangan rasio ketersediaan Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2016 – 2019 diuraikan dalam tabel 2.30.

Tabel 2.30
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Palu
(per 100.000 penduduk) Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	13	13	14	14	14
Jumlah Poliklinik	40	52	50	29	28
Jumlah Pustu	30	30	34	27	30
Jumlah Penduduk	374.020	379.782	385.619	370.376	373.218
Rasio Puskesmas	**3,48**	**3,42**	**3,63**	**3,77**	**3,75**
Rasio Poliklinik	**10,69**	**13,69**	**12,97**	**7,82**	**7,5**
Rasio Pustu	**8,02**	**7,89**	**8,81**	**7,29**	**8,04**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Ketersediaan Rumah Sakit di Kota Palu 5 (lima) Tahun terakhir mengalami sedikit sekali perubahan dari segi jumlah. Namun rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Palu dari Tahun 2016-2020 berfluktuasi dan cenderung naik mengikuti total penduduk di Kota Palu di periode tersebut. Jumlah dan rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 diuraikan dalam Tabel 2.31.

Pada Tahun 2016 rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Palu sebesar adalah sebesar 2,67 per 100.000 penduduk, cenderung berfluktuasi pada periode 2017-2019, dan akhirnya menaik hingga mencapai 2,95 atau 3 unit rumah sakit per 100.000 penduduk pada Tahun 2019. Secara umum, 3 unit rumah sakit per 100.000 penduduk belum dapat dikategorikan sebagai kondisi ideal. Untuk menyikapi rendahnya rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Palu, kebijakan yang dapat diambil adalah menambah kapasitas rumah sakit.

Tabel 2.31
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit Umum Daerah	3	3	3	3	3
Provinsi	2	2	2	2	2
Kota Palu	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Swasta	3	3	4	4	4

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
RS Umum	3	3	3	3	3
Rs Bersalin / RS Ibu Anak	4	4	4	4	4
RS Khusus (Mata)	1	1	0	0	0
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	2	2	2	2	2
Jumlah Seluruh Rumah Sakit	19	19	19	19	19
Jumlah Penduduk	374.020	379.782	385.619	370.376	373.218
Rasio Rumah Sakit (per-100.000 Penduduk)	**5,07**	**5,00**	**4,92**	**5,12**	**5,09**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2020, dan BPS Kota Palu Tahun 2021

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Perkembangan jumlah dokter di Kota Palu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren naik. Perkembangan jumlah dan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 diuraikan dalam Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokter	218	319	385	374	374
Jumlah Penduduk	374.020	379.782	385.619	370.376	373.218
Rasio Dokter per-100.000 penduduk	**58,28**	**83,99**	**99,83**	**100,97**	**100,21**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Pada Tahun 2016 rasio dokter persatuan penduduk di Kota Palu sebesar 58,28 per 100.000 penduduk, terus mengalami peningkatan hingga mencapai 100,21 per 100.000 penduduk pada Tahun 2020. Meskipun rasio ini naik namun kondisi ini masih sangat kurang untuk kebutuhan dokter yang melayani penduduk. Rasio 100,21 per 100.000 penduduk bermakna 1 orang dokter melayani 998 penduduk pada Tahun 2020.

Peningkatan jumlah penduduk yang kurang diikuti oleh kenaikan jumlah dokter secara signifikan mempengaruhi rasio ketersediaan dokter di Kota Palu 5 (lima) tahun terakhir. Sementara dalam rangka meningkatkan kualifikasi tipe rumah sakit diperlukan peningkatan rasio dokter khususnya dokter spesialis. Pemerintah Kota Palu diharapkan dapat terus meningkatkan ketersediaan dokter, khususnya dokter spesialis.

e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis di Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Namun demikian peningkatan itu tidak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang juga terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan penduduk masih lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah tenaga medis. Rata-rata jumlah penduduk naik sebesar 18,29 % per tahun sedangkan rata-rata tenaga medis hanya sebesar 12, 87 % per tahun. Kondisi ini mengakibatkan rasio tenaga medis turun sebesar 0,76 % dari capaian 754,64 menjadi 748,89 tenaga medis per 100.000 penduduk pada Tahun 2020, atau bermakna bahwa 1 orang tenaga medis melayani 134 penduduk Kota Palu pada Tahun 2020

Perkembangan jumlah tenaga medis dan rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 diuraikan dalam Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Jumlah dan Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tenaga Medis	1.764	2.361	2.538	2.795	2.795
Jumlah Penduduk	374.020	379.782	385.619	370.376	373.218
Rasio Tenaga Medis per-100.000 penduduk	**471,63**	**621,67**	**658,16**	**754,64**	**748,89**

Sumber: Dinkes Kota Palu Tahun 2021

3) Perumahan dan Kawasan Pemukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Berikut rasio rumah layak huni di Kota Palu Tahun 2019 tertera dalam tabel 2.34.

Tabel 2.34
Rasio Rumah Layak Huni di Kota Palu Tahun 2019

Uraian	Jumlah dan Persentase
Jumlah rumah layak huni	64.642 unit
Jumlah penduduk	370.376 jiwa
Rasio Rumah Layak Huni	17,45 %

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.34 memperlihatkan jumlah rumah layak huni di Kota Palu Tahun 2019 sebanyak 64.642 unit rumah, dan jumlah penduduk pada tahun yang sama sebesar 370.376 jiwa. Berdasarkan hasil dari perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk Kota Palu pada Tahun 2019, maka didapatkan rasio sebesar 0,18 unit per jiwa penduduk Kota Palu.

b. Cakupan Rumah Layak Huni

Cakupan rumah layak huni adalah persentase dari perbandingan jumlah seluruh rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Cakupan rumah layak huni di Kota Palu Tahun 2019 tertera dalam tabel 2.35 sebagai berikut:

Tabel 2.35
Cakupan Rumah Layak Huni di Kota Palu Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Rumah	RTLH	RLH
Palu Barat	9.689	12,73	87,27
Tatanga	11.392	8,12	91,88
Ulujadi	6.352	3,05	96,95
Palu Selatan	15.949	11,16	88,84
Palu Timur	6.330	1,22	98,78
Mantikulore	14.465	11,64	88,36
Palu Utara	4.814	25,07	74,93
Tawaeli	3.968	30,65	69,35
Kota Palu	**72.959**	**11,40**	**88,60**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.35 memperlihatkan bahwa cakupan rumah layak huni di Kota Palu Tahun 2019 sebesar 88,60 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 11,40 % atau sebanyak 8.317 unit rumah yang tidak layak huni di Kota Palu. Persentase rumah layak huni terbesar berada pada wilayah Kecamatan Palu Timur sebesar 98,78 % atau sebanyak 6.253 unit rumah, dan Persentase rumah tidak layak huni terbesar berada pada wilayah Kecamatan Tawaeli sebesar 30,65 % atau sebanyak 1.190 unit rumah.

Jika ditinjau dari jumlah rumah layak huni dan rumah tidak layak huni, maka Kecamatan Palu Selatan adalah kecamatan yang memiliki jumlah rumah layak huni yang terbanyak sebesar 14.169 unit, dan Kecamatan Palu Barat adalah kecamatan yang memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbanyak sebesar 1.233 unit.

5. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Persentase PMKS di Kota Palu yang memperoleh bantuan sosial di Tahun 2018 sebesar 41,27% turun menjadi 10,60 % pada Tahun 2017. Tahun 2019 dari tahun sebelumnya menjadi 45,52% dari total PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Berikut persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Palu Tahun 2017-2020 tertera dalam tabel 2.36 di bawah ini:

Tabel 2.36
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu
Tahun 2017 – 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan (jiwa)	24.892	131.600	261.545	27.659
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	N/A	54.314	27.721	3.200
% PMKS yang memperoleh bantuan sosial		**41,27%**	**10,60%**	**11,57%**

Sumber: Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2021

Sarana sosial di Kota Palu terdiri dari dua jenis yaitu sarana panti asuhan dan rumah singgah. Jumlah ketersediaan sarana sosial berfluktuasi mengikuti ketersediaan sarana panti asuhan di Kota Palu sejak Tahun 2016-2020. Ketersediaan rumah singgah hanya tersedia 1 unit selam kurun waktu lima tahun, sementara panti asuhan berjumlah 36 unit pada Tahun 2016 hingga naik menjadi 59 unit pada Tahun 2018 dan berkurang menjadi 41 unit pada Tahun 2019 dan 2020. Jumlah sarana sosial di Kota Palu Tahun 2016 -2020 diuraikan dalam tabel 2.37 berikut ini:

Tabel 2.37
Jumlah Sarana Sosial di Kota Palu Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Panti Asuhan	36	53	59	41	41
Rumah singgah	1	1	1	1	1
Jumlah	**37**	**54**	**60**	**42**	**42**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

2.4.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1). Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja Tahun 2020 mencapai 202.467 orang, di mana jumlah yang bekerja sebesar 185.507 orang dan pengangguran sebasar 16.960 orang.

Tabel 2.38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu
Tahun 2017 – 2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja	190.455	192.243	193.860	202.467
	a. Bekerja	177.959	181.079	181.523	185.507
	b. Pengangguran	12.496	11.164	12.337	16.960
2	Bukan Angkatan Kerja	96.876	99.837	103.103	102.166
	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	287.331	292.080	293.963	304.633
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kota Palu	66,28	65,81	65,95	66,46
4	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Sul-Teng	67,51	66,82	N/A	N/A
5	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Palu	6,56	5,81	6,36	8,38
6	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Sul-Teng	3,81	3,37	3,11	3,77

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

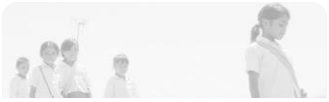

merupakan salah satu bentuk emansipasi yang penting bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender selain keterlibatannya dalam lembaga pemerintahan.

Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta sebesar 55,14% dari total pekerja perempuan, sedangkan untuk lembaga pemerintah sebesar 44,86%, menunjukan bahwa jumlah pekerja perempuan lebih banyak bekerja di lembaga swasta dibandingkan lembaga pemerintah. Berikut keterlibatan pekerja perempuan di lembaga swasta dan pemerintah Kota Palu Tahun 2020 tertera dalam tabel 2.39 di bawah ini:

Tabel 2.39
Persentase Pekerja Perempuan di Kota Palu Tahun 2020

Keterangan	Jumlah
Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	4.908*
Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga Pemerintah	3.993
Jumlah pekerja perempuan	8.901
Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	**55,14%**
Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	**44,86%**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2020

3). Pangan

Untuk bidang pangan, produksi komoditas pangan terdiri dari produksi komoditas pangan nabati beras dan jagung. Jumlah produksi pangan beras pada Tahun 2020 sebesar 1,039 Ton dan jagung sebesar 1.980 Ton.

Konsumsi pangan penduduk terhadap bahan pangan padi-padian sebesar 127,0 kg, umbi-umbian 8,7 kg, pangan hewan 46,5 kg, dan kacang-kacangan 9,5 kg.

Berdasarkan data SUSENAS diperoleh data konsumsi energi di Kota Palu Tahun 2020 sebesar 2.090 kkal/kap/hari, konsumsi protein sebesar 66,30 gram/kap/hari, dan nilai skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 90,30. Konsumsi energi di Kota Palu Tahun 2017-2020 tertera dalam tabel 2.40 sebagai berikut:

Tabel 2.40
Konsumsi Energi di Kota Palu Tahun 2020

	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	2.090	1.908	1.960	2.068
	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari	71,20	59,90	59,68	66,30
	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,40	78,10	82,90	90,30

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 (diolah)

4). Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup yang baik pada suatu daerah dapat ditentukan berdasarkan beberapa indikator di antaranya ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta pengintegrasiannya dalam dokumen perencanaan pembangunan; terselenggaranya KLHS untuk kebijakan, rencana, program; hasil pengukuran indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan; penghargaan lingkungan hidup; peran dan keterlibatan Masyarakat Hukum Adat (MHA); penanganan persampahan; dan lain-lain.

Ketersediaan dokumen RPPLH Kota Palu sampai dengan Tahun 2020 belum terpenuhi sehingga pengintegrasiannya dalam dokumen perencanaan pun belum sesuai harapan. Isu lingkungan hidup yang dituangkan dalam dokumen perencanaan hanya terbatas pada penanganan persampahan, dan ketersediaan air bersih (air minum) bagi masyarakat di Kota Palu.

Berikut Ketersediaan air minum bagi masyarakat di Sulawesi Tengah Tahun 2020 tertera dalam tabel 2.41 di bawah ini:

Tabel 2.41
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum di Kota Palu dan Sulawesi Tengah Tahun 2020

Kabupaten	Air dalam kemasan	Leding	Sumur Bor /Pompa	Sumur Terlindungi	Sumur Tak Terlindungi	Mata Air Terlindungi	Mata Air Tak Terlindungi	Air Permukaan	Air Hujan
Palu	**6,07**	**1,95**	**12,82**	**0,12**	**0,00**	**2,08**	**0,19**	**0,00**	**0,00**
Sul-Teng	1,42	8,43	14,12	7,25	3,00	17,22	2,44	6,28	0,32

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka 2021

Tabel 2.41 memperlihatkan mayoritas rumah tangga di Kota Palu menggunakan sumber air minum dari sumur bor/pompa dengan persentase sebesar

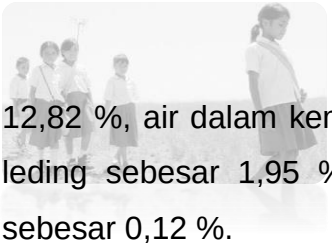

12,82 %, air dalam kemasan sebesar 6,07 %, mata air terlindungi sebesar 2,08 %, leding sebesar 1,95 %, mata air tak terlindungi 0,19 %, dan sumur terlindungi sebesar 0,12 %.

7). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah kantor pemerintah kelurahan di Kota Palu sebanyak 46 unit. Keseluruhan kantor ini difungsikan sebagai kantor pelayanan utama masyarakat dengan kondisi bangunan layak pakai. Meskipun demikian, sebagian kantor kelurahan yang ada merupakan milik pemerintah Kota Palu dan sebagiannya lagi masih dalam status sewa/kontrak.

Setiap kantor kelurahan memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 1 Unit, begitu pula dengan kelompok binaan PKK aktif sebanyak 1 Unit.

Sejak Tahun 2015 sebanyak 43 Kelurahan dilakukan pembentukan Lembaga swadaya masyarakat yang difasilitasi oleh Program-program pemberdayaan masyarakat, antara lain P2KP dan Program NUSSP. Pembentukan ini dilakukan dengan pemilihan sederhana yang melibatkan paling sedikit 30% keterwakilan masyarakat. Pada tahun 2016 dibentuk kembali Lembaga swadaya masyarakat menjadi total sebanyak 46 unit. Lembaga ini lebih dikenal dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Hingga saat ini Tahun 2021 Pemerintah Kota Palu belum pernah melakukan penilaian terhadap kinerja LPM yang ada di setiap kelurahan, sehingga untuk pengukuran LPM berprestasi tidak terpenuhi.

Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat di Kota Palu diukur melalui tingkat keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam membantu pelaksanaan sampai dengan penyelesaian kegiatan program dan besaran/luas lahan yang digunakan pada lokasi sasaran program tanpa ganti rugi.

Pasca program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, selalu dibarengi dengan pembentukan Tim Operasional dan Pemeliharaan yang berfungsi sebagai penjamin hasil konstruksi yang dibangun sesuai dengan umur rencana.

10). Energi dan SDM

Pada periode 2016-2018 produksi listrik mengalami penurunan sekitar 3,95 persen dari 511 juta di tahun 2016, atau hanya diproduksi sekitar 490 juta kwh pada

tahun 2018. Namun di periode 2019-2020 produksi listrik PLN kembali meningkat menjadi 516 juta Kwh di 2019 dan 557 juta Kwh di tahun 2020. Produksi listrik yang meningkat diiringi dengan nilai yang terjual akibat adanya kenaikan jumlah pelanggan yang terjadi antara Tahun 2016 sampai Tahun 2020.

Tabel 2.42
Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik
Tahun 2016-2020

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWH)	Listrik Terjual (KWH)	Dipakai Sendiri/Susut/Hilang (KWH)
2016	235.399,735	511.086.908	459.521.413	306.652
2017	262.881,235	510.761.690	458.461.811	306.457
2018	256.186,00	490.879.890	447.610.719	294.744
2019	290.189,00	516.135.639	453.953.681	NA
2020	183.010,00	557.896.714	506.708.300	334.738

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2021

Terjadi perubahan tren di mana pada periode sebelum Tahun 2016 di mana pengguna listrik di Kota Palu didominasi oleh rumah tangga sekitar hingga lebih dari 90%, dengan sektor bisnis, sosial, industri dan instansi sebagai pengguna non-rumah tangga menempati sisanya. Namun pada tahun 2016-2020 rasio pengguna listrik dari rumah tangga hanya berkisar pada 58-69%.

Secara umum, pada periode 2016-2020 tren menunjukkan kenaikan pada jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik maupun pada jumlah pelanggan listrik secara keseluruhan. Akan tetapi kenaikan jumlah pelanggan listrik relatif lebih tinggi daripada pengguna rumah tangga, sehingga rasionya menurun dari 69,52% di tahun 2016 menjadi 58,42% di tahun 2020.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN di Kota Palu Tahun 2016-2020 adalah 100 persen.

Tabel 2.43
Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN)
Tahun 2016-2020

Tahun	Rumah Tangga	Jumlah Pelanggan Listrik	Rasio (%)
2016	104.998	151.020	69,53
2017	107.871	161.449	66,81
2018	109.654	164.298	66,74
2019	113.344	185.474	61,11
2020	115.696	198.031	58,42

Sumber: BPS Kota Palu 2021, Dukcapil Kota Palu 2020

11). Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai indikator kemiskinan masih membutuhkan kerja yang lebih keras lagi agar dapat terwujud *trend* kinerja yang lebih positif dan berkualitas. Startegi yang disusun untuk keserempakan penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan secara tepat sasaran dengan sumberdaya yang terukur, dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu penanganan agar menghasilkan kondisi yang lebih baik lagi. Adapun kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Palu Tahun 2017-2020 tertera pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.44
Kinerja Penangulangan Kemiskinan di Kota Palu
Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk miskin (Jiwa)*	25.500	25.263	26.731	26.890
2	Persentase orang miskin*	6,74	6,58	6,83	6,80
3	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)(%)*	1,02	0,91	0,99	0,97
4	Indeks keparahan kemskinan (P2) (%)*	0,24	0,19	0,22	0,22
5	Jumlah penerima Jamkesmas/jamkesda**	27.000	27.000	27.000	27.000
6	Kemiskian				
	6.1. Garis kemiskinan**	473.555	492.085	522.444	559.246
	6.2. Penduduk dibawah garis kemiskinan*	25.500	25.263	25.731	26.890
	6.3. Beras untuk penduduk miskin**	12.478	12.478	12.478	12.478
7	Keluarga menurut tingkat kesejahteraan**				
	7.1. Keluarga pra sejahtera**	N/A	13.047	13.026	13.026
	7.2. Keluarga sejahtera tahap 1**	N/A	5.867	5.861	5.861
	7.3. Keluarga sejahtera tahap 2**	N/A	3.314	3.303	3.303

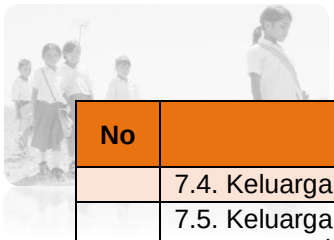

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
	7.4. Keluarga sejahtera tahap 3**	N/A	2.043	2.040	2.040
	7.5. Keluarga sejahtera tahap 3 plus**	N/A	1.784	1.782	1.782

*Sumber: *BPS Kota Palu Tahun 2021, **Dinsos Kota Palu Tahun 2020*

Untuk mengetahui pola perubahan capaian indikator hasil penanggulangan kemiskinan disuatu daerah tertentu relative terhadap pola perubahan yang lebih luas maka digunakan analisis relevansi. Adapun analisis relevansi kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Palu dari rentang tahun 2016-2020, dari grafik 3.1 terlihat bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Palu secara konsisten selalu berada dibawah garis kemiskinan nasional yakni;

- Kota Palu tahun 2016 (7,06) tahun 2017 (6,74), tahun 2018 (6,58) tahun 2019 (6,83) selanjutnya tahun 2020 (6,80), sementara;
- Nasional tahun 2016 (10,70) tahun 2017 (10,12), tahun 2018 (9,66) tahun 2019 (9,22) selanjutnya tahun 2020 (9,78) dan;
- Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 (14,09) tahun 2017 (14,22), tahun 2018 (13,69) tahun 2019 (13,18) selanjutnya tahun 2020 (12,92).

hal ini menandakan bahwa penduduk miskin di Kota Palu sudah berada dibawah target Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah.

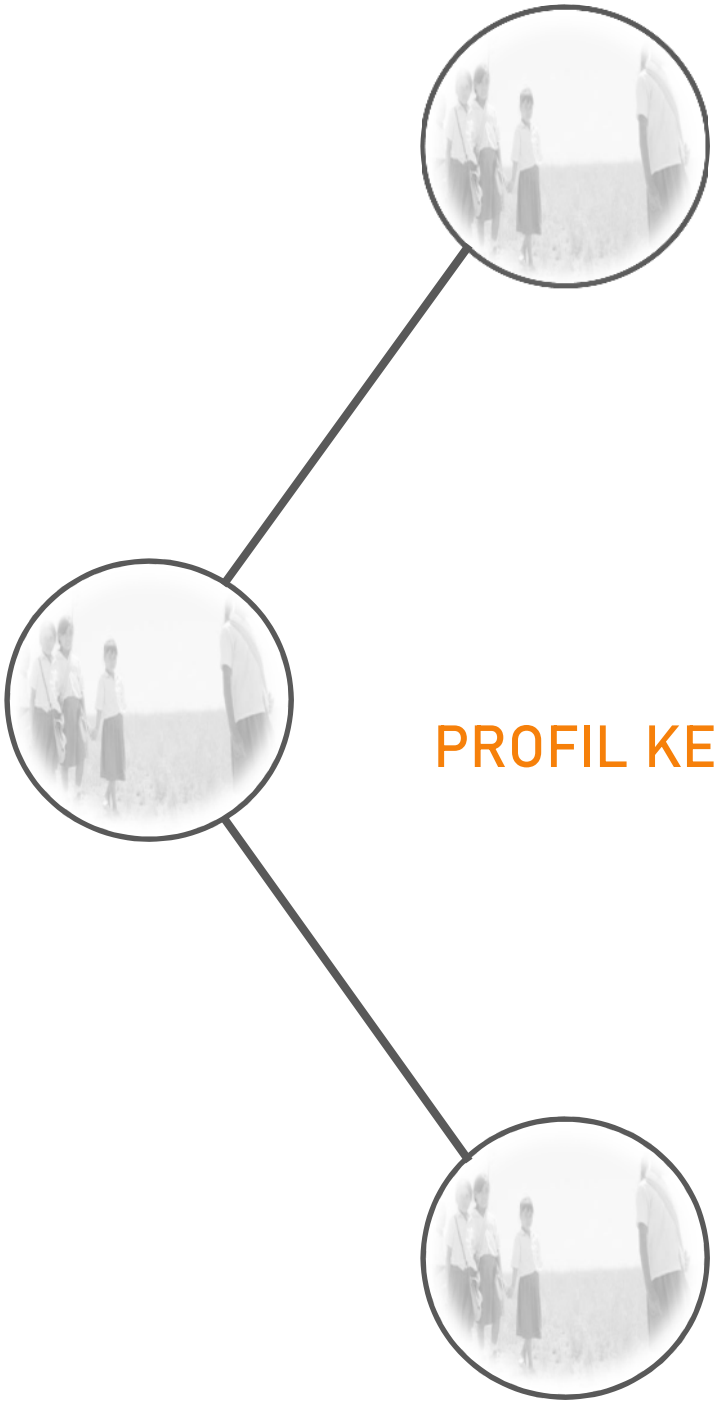

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021-2026

BAB III
PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dengan semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan yang tercapai. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Kota Palu tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan kemiskinan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, lingkungan hidup serta infrastruktur daerah yang merupakan gambaran permasalah daerah dalam skala makro.

Permasalahan daerah juga dapat di tinjau dalam skala mikro, yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan urusan kepemerintahan seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengenai pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Terkait hal ini, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut gambaran permasalahan kemiskinan yang menjadi urusan pemerintahan di Kota Palu.

3.1 Kajian Kemiskinan

Ilmuan sosial sering memetakan faktor penyebab kemiskinan dalam dua pendekatan. *Yang pertama;* pendekatan secara struktural yang melihat penyebab kemiskinan karena faktor kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada masyarakat miskin. *Pendekatan kedua;* melihat penyebab kemiskinan karena faktor kultural. Pendekatan ini lebih melihat bahwa akar masalah kemiskinan karena faktor manusia. Para antropolog sering memandang bahwa kemiskinan itu

lahir dari faktor budaya dan bawaan lahiriah seseorang. Mereka memberi istilah dengan mental menerabas. Suatu stigma yang melihat bahwa seseorang itu miskin karena tak mau kerja keras, tidak disiplin, malas dan stigma minor lainnya.

Perspektif ilmuan sosial strukturalis berpandangan bahwa, permasalahan kemisikinan tidak semata muaranya pada masalah ekonomi, karena ada aspek lain yang bersifat multidimensional dengan akar permasalahannya terletak pada sistem ekonomi, politik dan kebijakan suatu daerah.

Satu contoh misalnya, diskursus tentang kemiskinan selama ini sudah sangat sering dan banyak dibicarakan, diidentifikasi dan dirumuskan, namun identifikasi tersebut hanya terbatas pada aspek gejala-gejala yang nampak dipermukaan, kajiannya belum menyentuh pada aspek substansi, khususnya pada aspek penyebab maupun akar masalahnya.

Kajian tentang kemiskinan khususnya penyebab dan akar masalahnya sering hanya ditimpahkan secara sepihak kepada warga miskin, misalnya masyarakat malas dan tidak punya etos kerja yang tinggi, pendidikan rendah, tidak punya kemauan untuk maju dan berprestasi, serta sejumlah pandangan dan stigma minor dan subyektif dialamatkan kepada masyarakat miskin.

Persoalan kebijakan pemerintah yang mestinya pro kepada masyarakat miskin hampir tidak pernah dipersoalkan, demikian halnya dengan semakin melemahnya kepedulian para pihak termasuk masyarakat kelas menengah yang strata sosial ekonominya mapan juga tidak pernah dibicarakan.

Jika pandangan yang bersifat stigmatisasi tersebut diteruskan, maka konsekwensinya, masyarakat miskin menanggung masalahnya sendiri tanpa ada pihak lain yang peduli. Masalah akan makin ”runyam” jika, kebijakan pemerintah daerah misalnya tidak berubah dari pendekatan program penanggulangan kemiskinan masih selalu bersifat karitatif, sehingga akar masalahnya tidak pernah tersentuh dan terlesaikan. Akibatnya problem kesenjangan sosial akan makin sulit terurai karena dalam pandangan *Bagong Suyanto (2013)*, kesenjangan sosial tidak hanya menyangkut kesenjangan hasil-hasil pembangunan antar suatu daerah yang maju dan daerah tertinggal atau antara daratan dan kepulauan, tetapi juga kesenjangan dalam hal kesempatan, akses dan kondisi sosial masyarakat yang menyebabkan peluang masyarakat dilapisan paling miskin

untuk melakukan mobilitas vertikal menjadi terhambat. Sedangkan, ketidakadilan menyangkut perlakuan semena-mena yang acapkali dialami masyarakat miskin karena ketidakberdayaan dan kerentanan mereka.

Jika penyebab kemiskinan dipahami tak bermuara pada satu faktor tunggal, maka pendekatannya harus multi disiplin khususnya dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin. Argumentasi seperti ini hingga diperlukan adanya Strategi atau Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dengan multi pendekatan dan sejumlah varian teori karena yang akan dilakukan adalah menerobos kesenjangan sosial yang ada disuatu wilayah, seperti di Kota Palu.

Sebagaimana dipahami bahwa kemiskinan itu adalah problem sosial yang multi dimensional, akar masalahnya tak semata karena kurangnya pendapatan seseorang atau tidak memiliki asset produksi untuk meneruskan penghidupannya. Kemiskinan itu menurut *Robert Chambers (1987*), selain berkaitan dengan ketidakmampuan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga menyangkut kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan kelemahan jasmani.

Gambaran kemiskinan dalam pandangan Chamber itu, masyarakat miskin terjebak dalam lingkaran ketidakberdayaan. Pandangan yang lain dari *Sharp, et.al (dalam Kuncoro, 1997)* yang mengidentifikasi akar kemiskinan dari sisi ekonomi dengan tiga perspektif yang berbeda;

Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan dan *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan *(vicious circle of poverty)* menurut *Nurkse (dalam Kuncoro, 1997:132)*:

adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya (lihat Gambar 3.1)

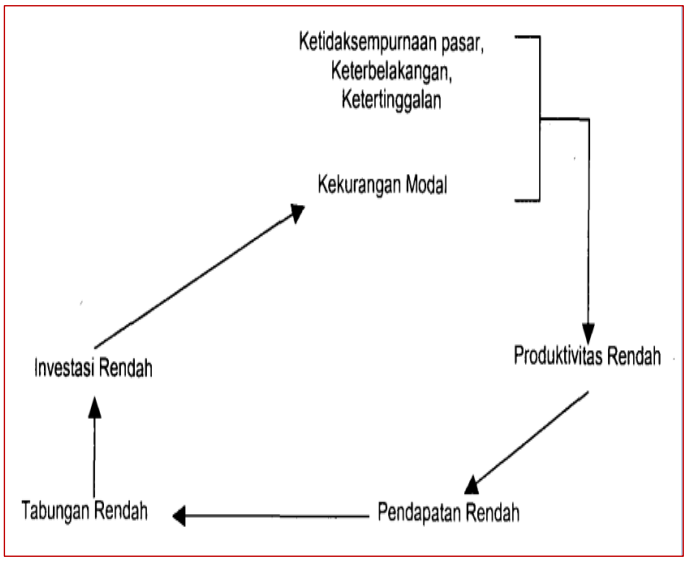

Gambar 3.1
Penyebab Kemiskinan

3.2 Memahami Dimensi Kemiskinan

Dalam penyusunan RPKD Kota Palu Tahun 2021-2026, maka persoalan utama yang harus diapresiasi adalah perlunya memahami dimensi-dimensi kemiskinan maupun memahami anatomi kemiskinan tersebut, ada masalah apa hingga masih terdapat warga terkategori miskin.

Sebagaimana telah terurai sebelumnya, akar permasalahan kemiskinan tidak semata bermuara pada masalah ekonomi, maka pendekatannyapun harus secara multidimensional. Seperti misalnya, masyarakat menjadi miskin oleh sebab adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan mereka, sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya-sumber daya kunci dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak.

Fenomena yang dijumpai dalam komunitas masyarakat miskin adalah, mereka terpaksa hidup di bawah standar yang tidak dapat lagi dinilai manusiawi, baik dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek sosial, dan secara politikpun mereka tidak memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut hidup mereka. Proses ini berlangsung timbal balik saling terkait dan saling mengunci dan akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin.

Parwoto dalam tulisannya *Dimensi Kemiskinan* mengutip Deepa Narayan, dalam bukunya" *Voices of the Poor*, yang menyulitkan atau membuat kemiskinan itu sulit ditangani adalah sifatnya yang tidak saja multidimensional tetapi juga saling mengunci; dinamik, kompleks, sarat dengan sistem institusi (konsensus sosial), gender dan peristiwa yang khas per lokasi.

Kecenderungan lainnya adalah, pola kemiskinan sangat berbeda antar kelompok sosial, umur, budaya, lokasi dan negara, dalam konteks ekonomi yang berbeda. Deepa Narayan menggambarkan empat (4) dimensi utama kemiskinan, seperti;

a) *Dimensi 1* : Dimensi material kekurangan pangan, lapangan kerja. Muaranya adalah kelaparan atau kekurangan makan;
b) *Dimensi 2*: Dimensi psikologi, seperti antara lain ketidakberdayaan (*powerlessness*), tidak mampu berpendapat (*voicelessness*), ketergantungan (*dependency*), rasa malu (*shame*), rasa hina (*humiliation*);
c) *Dimensi 3* : Dimensi akses ke pelayanan prasarana yang praktis tidak dimiliki;
d) *Dimensi 4* : Dimensi aset/milik, praktis tidak memiliki aset sebagai modal untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak seperti antara lain :
    - Kapital fisik (*physical capital*), mencakup tanah, ternak, peralatan kerja, hunian, perhiasan, dan sebagainya.
    - Pada dasarnya masyarakat miskin memang praktis tidak memiliki benda-benda fisik yang diperlukan sebagai modal hidup mereka, seperti tanah yang memadai, rumah tempat tinggal yang layak, perabotan rumah tangga, kendaraan, peralatan kerja dan benda-benda fisik lainnya.
    - Kapital manusia (*human capital*), menyangkut rendahnya kualitas sumberdaya manusia atau tidak memiliki kualitas sumber daya manusia

yang cukup baik yang dapat menjamin keberhasilan hidup mereka, mencakup tingkat kesehatan, pendidikan, kemampuan memproduksi tenaga kerja (*labor power*). Belum lagi karena terinternalisasinya budaya kemiskinan yang menghancurkan kualitas manusia secara keseluruhan, antara lain rendahnya etos kerja, fatalisme, apatis, hancurnya jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan, boros, cari gampang dan sebagainya.

- Aset sosial (*social capital*), atau sering diartikan dalam hal ini sebagai sistem kekerabatan yang mendukung kaum miskin untuk tetap bertahan hidup sebab pada umumnya kaum miskin tidak masuk jaringan formal pengamanan sosial seperti asuransi yang mampu melindungi mereka dari berbagai krisis seperti musibah, keuangan. Termasuk ekses konflik social.
- Masyarakat miskin memang selalu tersisih dari pranata sosial yang ada termasuk sistem asuransi, sehingga mereka harus membangun sendiri institusi mereka agar mendapatkan jaminan sosial (*social security*) yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup mereka (*survival*) melalui kekerabatan antar mereka, asosiasi penghuni, yang seringkali menjadi sangat kuat oleh sebab rasa senasib sepenangungan.
- Aset lingkungan (*environmentalasset)*, mencakup iklim dan musim yang sangat berpengaruh pada petani, nelayan dan sebagai pekerja lapangan.

Pada umumnya masyarakat miskin khususnya di perkotaan memang kurang atau malah tidak memiliki sumber-sumber lingkungan sebagai modal hidup mereka seperti tempat tinggal yang layak, air baku, udara bersih, tanaman, lapangan hijau, pohon-pohon, dan sebagainya. Keempat dimensi kemiskinan tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas yaitu tatanan ekonomi makro dan sistem politik yang berlaku di negara tersebut. Beberapa pendapat lain melihat kemiskinan dari sudut pandang yang sangat berbeda dan menyimpulkan kemiskinan sebagai :

- *Kemiskinan absolut*, yaitu bila penghasilan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut, yaitu suatu ukuran tertentu yang telah ditetapkan dimana kebutuhan minimum masih dapat dipenuhi, dengan kata lain penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang ditetapkan dalam garis kemiskinan tersebut.

- *Kemiskinan relatif*, yaitu suatu kondisi perbandingan antara kelompok penghasilan dalam masyarakat.

Dari pola waktunya kemiskinan juga sering dibedakan sebagai berikut :

- *Kemiskinan menahun* (*persistent poverty*), yaitu kemiskinan yang kronis atau sudah lama terjadi, turun temurun, misalnya masyarakat di lokasi-lokasi kritis atau terisolasi.
- *Kemiskinan siklik* (*cyclical poverty*), yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan
- *Kemiskinan musiman* (*seasonal poverty*), yaitu kemiskinan yang terjadi secara khusus sesuai dengan musim seperti yang sering terjadi pada nelayan atau petani tanaman pangan
- *Kemiskinan mendadak* (*accidental poverty*), yaitu kemiskinan yang terjadi oleh sebab bencana atau dampak dari sebuah konflik social seperti yang terjadi di Kota Palu tanggal 28 September 2018, yang brdampak sangat luas dalam aspek kehidupan masyarakat.

Dengan demikian pembahasan tentang kemiskinan dan dimensi kemiskinan serta akar permalasahan kemiskinan yang terjadi baik secara internal dan eksternal saling berpengaruh satu sama lain, sehingga penyusunan RPKD sebagai master plan penanggulangan kemiskinan di Kota Palu, ini terkait erat dengan rencana penyusunan prioritas kebijakan dan indikasi program-program yang relevan terhadap rehabilitasi sosial, ekonomi dan fisik lingkungan dan pembangunan ekonomi masyarakat pada lokasi-lokasi prioritas dalam upaya percepatan pencapaian target penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Palu.

3.3. Profil Kemiskinan Konsumsi

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. *Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan*.

3.3.1 Persentase penduduk miskin (P0)

Pertumbuhan Penduduk Kota Palu Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Palu 373.218 jiwa terdiri dari 187.389 jiwa penduduk laki-laki dan 185.829 jiwa penduduk perempuan, terjadi penambahan dari jumlah 371.365 jiwa ditahun 2019, itu artinya hanya bertambah 1.853 jiwa. Penduduk di Kota Palu tersebar di delapan kecamatan dengan konsentrasi terbesar pada Kecamatan Palu Selatan dikuti Kecamatan Mantikolore dan Kecamatan Palu Barat dan penduduk dengan jumlah terkecil di Kecamatan Tawaeli. Berikut perkembangan pertumbuhan penduduk Kota Palu tahun 2020 pada tabel berikut;

Tabel 3.1
Laju Pertumbuahan Penduduk Kota Palu

Kecamatan	2019	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Persentase Penduduk
			2019-2020	2019
Palu Barat	51 167	46.435	-10.19	12.44
Tatanga	49 949	52.580	5.00	14.09
Ulujadi	33 804	35.055	3.57	9.39
Palu Selatan	71 591	72.059	0.65	19.31
Palu Timur	47 106	43.318	-8.74	11.61
Mantikulore	71 059	76.745	7.41	20.56
Palu Utara	24 118	24.458	1.39	6.55
Tawaeli	22 571	22.568	-0.01	6.05
Hasil Registrasi	**371. 365**	**373.218**	**0,93**	**100**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2021

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Palu pada tahun 2019-2020 hanya 0,93%, dari data pada tabel 3.1 diatas, angka pertumbuhan tertinggi terdapat di Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Tatanga. Bahkan tiga kecamatan terkategori pertumbuhan minus seperti Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Tawaeli.

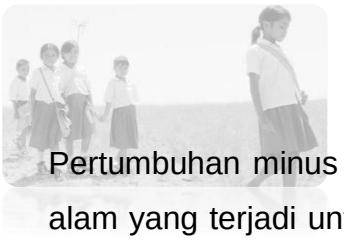

Pertumbuhan minus ini bisa jadi disebabkan salah satu faktor yakni bencana alam yang terjadi untuk jenis likuifaksi dan tsunami dan gempa bumi pada 28 Septmber 2020.

Selanjutnya bila kita lihat luas wilayah dan kepadatan penduduk dan persentase sebaran penduduk pada 8 kecamatan yang ada di Kota Palu, sebagaimana tabel 3.2 menunjukan sebaran kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di wilayah Kecamatan Mantikolore, Palu Selatan selanjutnya Kecamatan Tatanga, sementara sebaran kepadatan penduduk paling rendah terdapat di wilayah Kecamatan Tawaeli, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Ulujadi.

Tabel 3.2
Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2020

Kecamatan		Luas Area (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km²	Persentase penduduk
Palu Barat		8,28	46.435	5.608,09	12,44
Tatanga		14,95	52.580	3.517,06	14,09
Ujujadi		40,25	35.055	870,93	9,39
Palu selatan		27,38	72.059	2.631,81	19,31
Palu Timur		7,71	43.318	5.618,42	11,61
Mantikulore		206,8	76.745	371,11	20,56
Palu Utara		29,94	24.458	816,90	6,55
Tawaeli		59,75	22.568	377,71	6,05
Kota Palu	**2020**	**395,06**	**373.218**	**944,71**	**100**

Sumber: SIPD Tahun 2020, dan Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Selanjutnya untuk mengetahui presentase penduduk miskin dari jumlah penduduk Kota Palu berdasarkan posisi relatif terhadap capaian rata-rata daerah lain dalam satu wilayah dimana, posisi relatif capaian indikator terhadap target makro pembangunan yang ingin dicapai seperti yang tartuang dalam MDGs/RPJMN/RPJMD. Adapun posisi relatif identifikasi permasalahan kemiskinan di Kota Palu dalam rentang tahun 2016-2020 disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Grafik 3.1
Analisis Identifikasi Masalah Presentase Penduduk Miskin (%)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

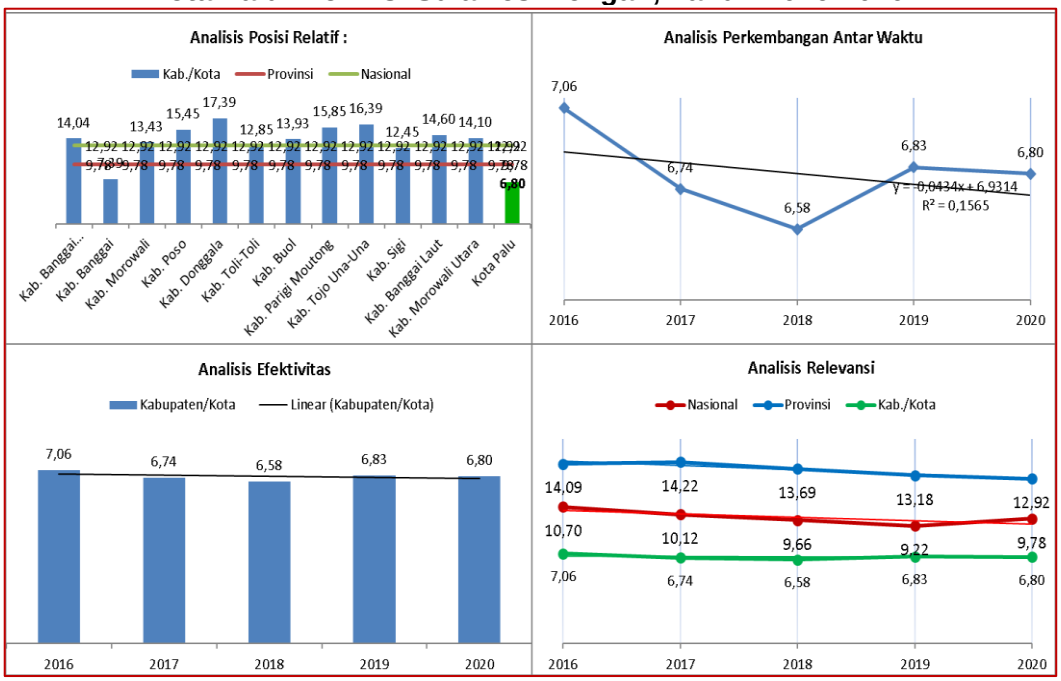

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Berdasarkan grafik 3.1 diatas terkait posisi relatif persentase kemiskinan Kota Palu dengan 13 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah, Kota palu mempati posisi persentase kemiskinan berada lebih rendah, yakni 6,80 %, selanjutnya disusul dengan Kabupaten Banggai dengan angka yakni 7,39 %.

Berdasarkan grafik 3.1 tentang Analisis Perkembangan antar waktu terhadap Identifikasi masalah persentase penduduk miskin dalam rentang tahun 2016-2020 menunjukan trend secara fluktuatif namun secara persamaan matematis menunjukan penurunan secara melandai sebesar 0,0434 % yaitu ditahun 2016 sebesar 7,06 % ditahun 2020 menjadi sebesar 6,80 %.

Untuk mengukur arah perubahan capaian indikator hasil periode kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dimana perubahan itu bersifat relatif terhadap arah perubahan kebijakan sebelumnya, maka dilakukan analisis efektifitas. Adapun hasil identifikasi analisis efektifitas kinerja penanggulangan kemiskinan Kota Palu dalam rentang tahun 2016-2020 ditunjukan pada grafik 3.1 menunjukan trend menurun, namun

melamban bahkan cenderung stagnan, ditahun 2016 sebesar 7,06 % dan ditahun 2020 menjadi sebesar 6,80 %. Hal ini menunjukan tingkat efektifitas penanggulangan kemiskinan Kota Palu telah menemukan posisi ***crack line poverty*** **atau** ***lapisan kemiskinan absolut****,* sehingga diperlukan strategi penurunan kemiskinan yang tepat bukan sekedar *bussines as usual.*

Untuk mengetahui pola perubahan capaian indikator hasil penanggulangan kemiskinan disuatu daerah tertentu relative terhadap pola perubahan yang lebih luas maka digunakan analisis relevansi. Adapun analisis relevansi kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Palu dari rentang tahun 2016-2020, dari grafik 3.1 terlihat bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Palu secara konsisten selalu berada dibawah garis kemiskinan nasional yakni;

- Kota Palu tahun 2016 (7,06) tahun 2017 (6,74), tahun 2018 (6,58) tahun 2019 (6,83) selanjutnya tahun 2020 (6,80), sementara;
- Nasional tahun 2016 (10,70) tahun 2017 (10,12), tahun 2018 (9,66) tahun 2019 (9,22) selanjutnya tahun 2020 (9,78) dan;
- Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 (14,09) tahun 2017 (14,22), tahun 2018 (13,69) tahun 2019 (13,18) selanjutnya tahun 2020 (12,92).

hal ini menandakan bahwa penduduk miskin di Kota Palu sudah berada dibawah target Nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah.

3.3.2 Jumlah penduduk miskin

Secara umum jumlah penduduk miskin di Kota Palu terhitung paling rendah dibanding 13 kota kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun dalam perkembangannya, mengalami fluktuasi seiring dengan perkembangan dinamika jumlah penduduk dan persoalan sosial lainnya. Data statistik (Kota Palu Dalam Angka 2020) penduduk miskin di Kota Palu kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya dengan kisaran angka 26.240 jiwa setara dengan 7,06 %, tahun 2017 berkisaran angka 25.500 jiwa turun menjadi 6,74 % atau terdapat pengurangan penduduk miskin sebesar 740 jiwa, tahun 2018 turun ke angka 6,58 % atau berkurang 137 jiwa, walau penduduk Kota Palu terus tumbuh menjadi 385.619 jiwa. Namun tahun 2019

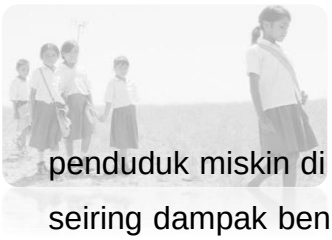

penduduk miskin di Kota Palu kembali bertambah secara signifikan 1.360 jiwa seiring dampak bencana bencana alam yang terjadi 28 September 2018 yang banyak menimbulakn dampak korban jiwa. Total penduduk penduduk di tahun 2019 tersebut tercatat 391.365 jiwa dengan jumlah penduduk miskin 26,731 atau setara dengan 6,83%. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin kembali bertambah menjadi 26.890 jiwa dari jumlah penduduk 373.218 jiwa atau setara 6,80 %.

Dari jumlah penduduk miskin tersebut dapat digambarkan pada garafik Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020, sebagaimana berikut ini;

Grafik 3.2
Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

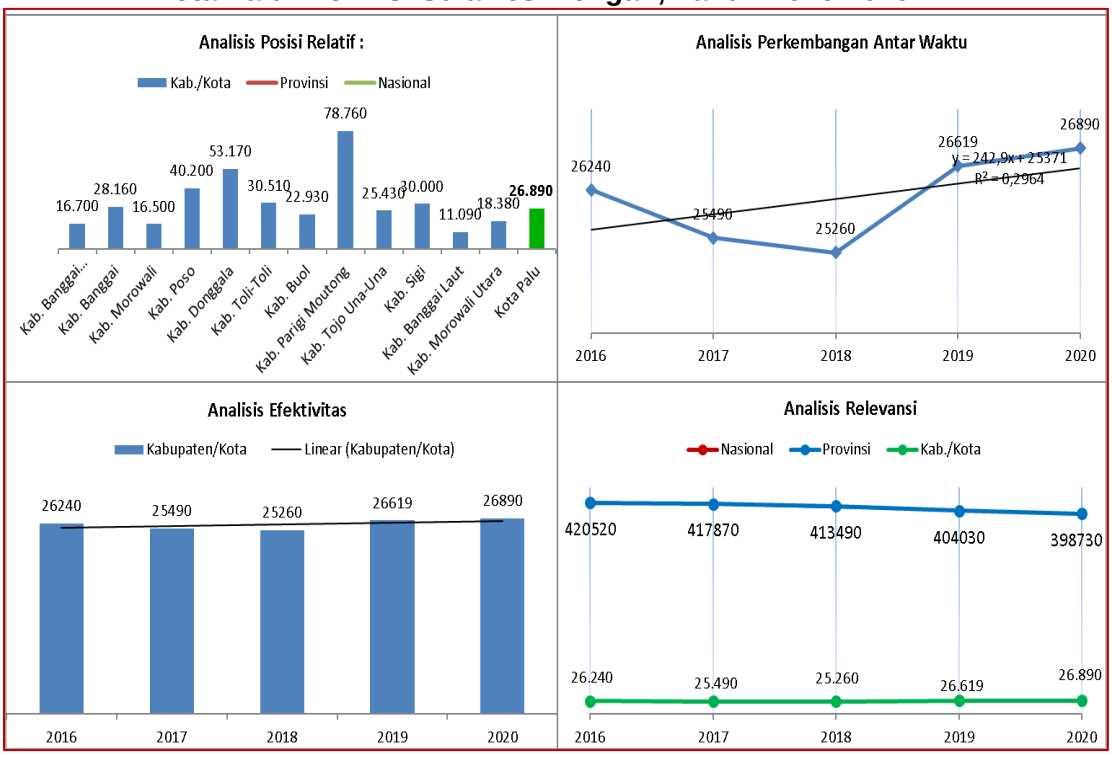

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Berdasarkan Grafik 3.2 diatas, analisis posisi relatif persentase jumlah penduduk miskin Kota Palu tahun 2020 adalah sebesar 26.890 jiwa, namun secara rata-rata ditingkat Provinsi jumlah penduduk miskin Kota Palu masih berada dibawah jumlah kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah terendah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten

Banggai Laut (11.090) jiwa dan jumlah tertinggi penduduk miskin adalah Kabupaten Parigi Moutong (78.767) jiwa. Berdasarkan analisis perkembangan antar waktu sejak tahun 2016-2020 menunjukan fluktuasi penurunan jumlah penduduk miskin selama 5 tahun tersebut sebesar 650 jiwa. Dari data analisis efektifitas penurunan jumlah penduduk miskin rata-rata sekitar 2,42 %, dari data analisis relevansi jumlah penduduk miskin Kota Palu dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah.

Jumlah KK miskin Kota Palu berdasarkan DTKS Dinas Sosial tahun 2020 pada masing-masing kelurahan pada 8 kecamatan yang ada, dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagaimana berikut ini;

Tabel 3.3
Jumlah Desil KK Miskin Kota Palu Tahun 2020

NO	KECAMATAN	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	DESIL 5
1	TAWAELI	267	349	493	1,006	1,181
2	PALU UTARA	162	212	289	571	825
3	MANTIKULORE	281	255	392	848	1,320
4	PALU TIMUR	208	143	198	500	892
5	PALU SELATAN	274	309	351	590	572
6	TATANGA	111	260	307	660	781
7	PALU BARAT	376	418	449	684	685
8	ULUJADI	327	383	432	798	790
JUMLAH		**2,006**	**2,329**	**2,911**	**5,657**	**7,046**

Sumber : DTKS Dinsos Kota Palu Tahun 2020

Sebagaimana telah dijelaskan diatas tentang jumlah penduduk miskin Kota Palu tahun 2020, dari jumlah penduduk miskin tersebut dikategorikan kedalam beberapa kelompok desil. *Orang sering bertanya Apa itu desil kemiskinan*, ***Desil* adalah kelompok per-sepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga. Kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara nasional**, dapat dibagi ke dalam beberapa desil;

- *Desil 1* adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah, (sangat miskin) yang berhak menerima bantuan Program Pemeintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras untu Keluarga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- *Desil 2* adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah (miskin), yang berhak menerima bantuan Program Pemerintah berupa

Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).

- *Desil 3* adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah (hamper miskin) yang berhak menerima bantuan Program Pemerintah berupa Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- *Desil 4* adalah rumah tangga dalam kelompok antara 30-40% terendah (rentan miskin), yang berhak menerima bantuan Program Pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- *Desil 5* adalah rumah tangga dalam kelompok antara 40-50% terendah (rentan miskin), yang berhak menerima bantuan Program Pemerintah berupa Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).

Grafik 3.3
Desil KK Miskin Kota Palu Tahun 2020

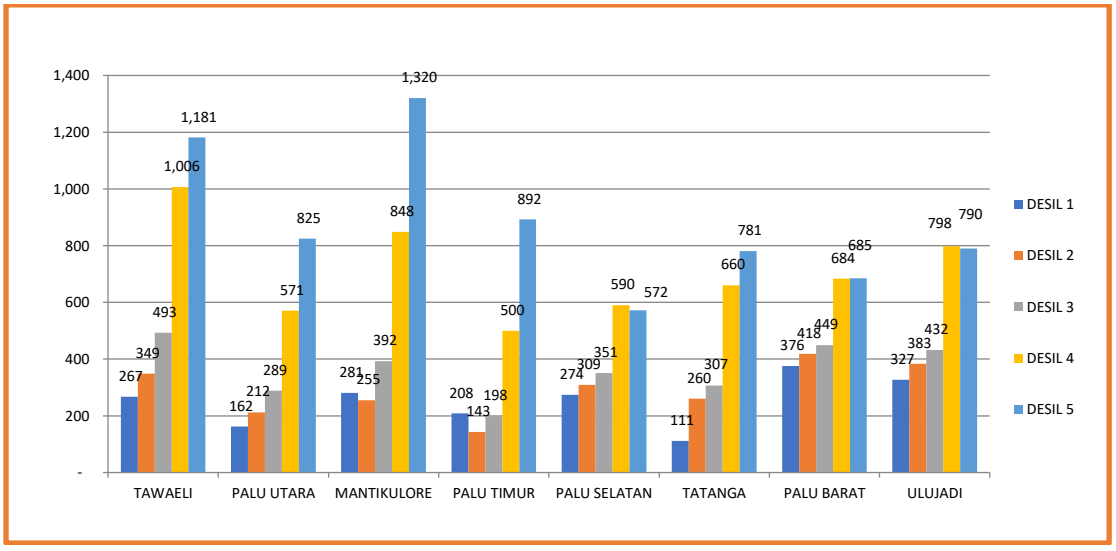

Sumber : DTKS Dinas Sosial Kota Palu 2020

Berdasarkan grafik 3.3 kondisi keluarga miskin berdasarkan desil yang perlu penanganan adalah Desil 1 dan Desil 2 merupakan KK miskin yang parah, menunjukan jumlah pada masing-masing kecamatan yakni;

- Jumlah KK miskin Desil 1 dari delapan kecamatan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Palu Barat dengan 376 KK atau sekitar 18,74 %, Kecamatan Ulujadi dengan 327 KK atau sekitar 16,30 % selanjutnya Kecamatan Mantikulore dengan 281 KK atau sekitar 14,01 %, kemudian Kecamatan

Palu Selatan dengan 274 KK atau sekitar 13,66 % dan Kecamatan Tawaeli dengan 267 KK atau sekitar 13,31 %.

- Jumlah KK miskin Desil 2 dari delapan kecamatan jumlah tertinggi berada fi Kecamatan Palu Barat dengan 418 KK atau sekitar 17,95 %, Kecamatan Ulujadi dengan 383 KK atau sekitar 16,44 % dan Kecamatan Tawaeli dengan 349 KK atau sekitar 14,98 %, selanjutnya Kecamatan Palu Selatan dengan 309 KK atau sekitar 13,27 % serta Kecamatan Tatanga dengan 260 KK atau sekitar 11,16 %

3.3.3 Indeks kedalaman kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Bagaimana dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1). Indeks ini mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Rumus indeks ini menetapkan, semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagaimana grafik berikut;

Grafik 3.4
Analisis Identifikasi Masalah Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1)
(Indeks) Kota Palu Tahun 2016-2020

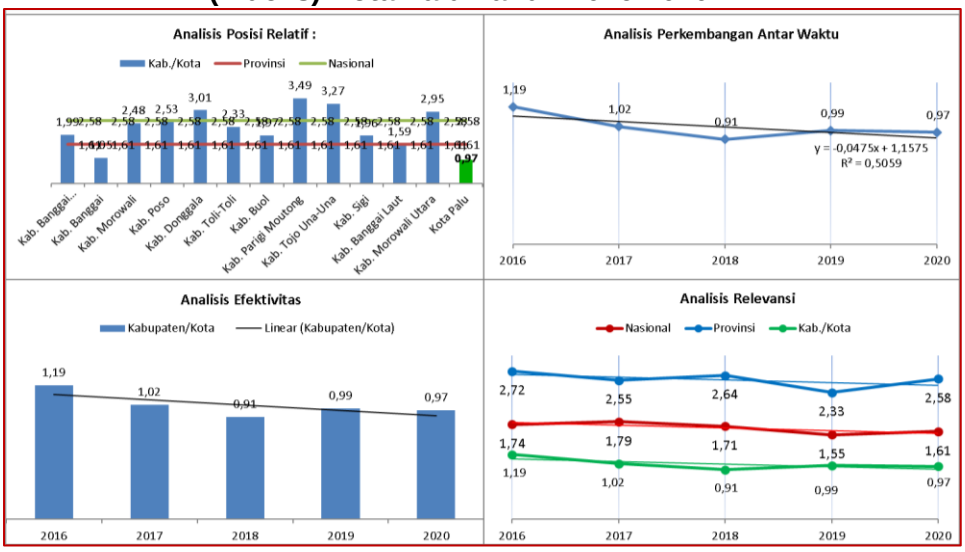

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Berdasarkan grafik statistik 3.4 analisa posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Palu dibandingkan beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah menyusul Kabupaten Banggai, khususnya di tahun 2019 terbilang terendah, dengan nilai indeks yang diperoleh 0,22. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran warga di Kota Palu terbilang rendah, artinya baik. Bahkan tahun 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota 0,91. Bila dianalisa berdasarkan perkembangan waktu, jika diukur rentang waktu tahun 2016-2020 tingkat kesenjangan pengeluaran warga di Kota Palu berkembang secara fluktuatif. Tahun 2016 misalnya Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Palu 1,19, turun menjadi 1,02 pada tahun 2017 dan kembali turun pada tahun 2018 menjadi 0,91. Namun tahun 2019 kesenjangan pengeluaran warga kembali menurun seiring dengan dinamika sosial dan perekonomian di Kota Palu yakni 0,22 dan ditahun 2020 menaik kembali menjadi 0,97 ini bisa disebabkan setelah Kota Palu mengalami bencana alam.

Dari data analisa efektifitas kesenjangan pengeluaran warga miskin dapat dikatakan kecenderungan menurun, walaupun tingkat penurunannya melandai. Selanjutnya analisas relevansi kondisi kesenjangan pengeluaran warga miskin Kota Palu dibandingkan dengan nasional dan provinsi Kota Palu masih berada pada posisi rendah. Rentang tahun 2016-2020 dari 1,19 turun mencapai 0,97 terdapat penurunan 0,22, sementara nasional dari 1,74 turun mencapai 1,61 terdapat penurunan 0,14, sedangkan provinsi dari 2,72 turun mencapai 2,58 terdapat penurunan 0,17.

3.3.4 Indeks keparahan kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berikutnya kita melihat Indeks Keparahan Kemiskinan *(Proverty Severity Index-P2).* Indeks ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di suatu kota atau kabupaten. Hasil akhir dari indeks keparahan kemiskinan ini

menetapkan, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasar rumusan tersebut, maka nilai Indeks Keparahan Kemiskian di Kota Palu terbilang rendah atau kategori baik, selengkapnya terlihat pada grafik 3.5 pada berikut ini;

Grafik 3.5
Analisis Identifikasi Masalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(Indeks) Kota Palu Tahun 2016-2020

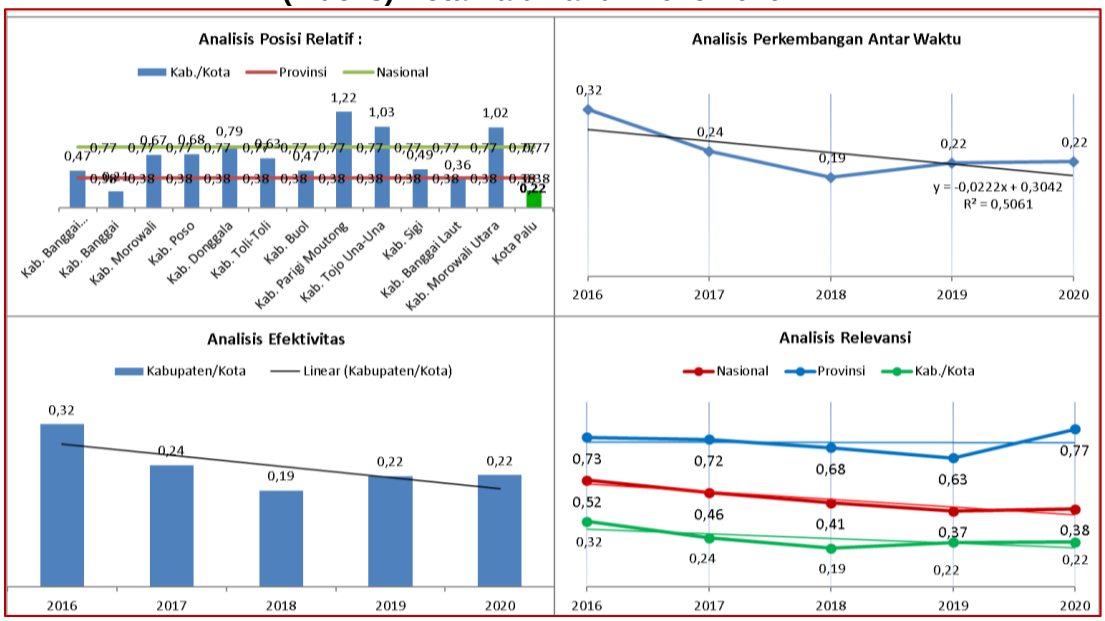

Sumber :BPS (Susenas) 2020

Berdasarkan grafik statistik 3.5 analisis posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kota Palu dibandingkan beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah rentang waktu tahun 2016-2020 terkait ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin mencapai 0,43 masih diatas capaian provinsi yakni hanya mencapai 0,25. Bila dianalisa berdasarkan perkembangan waktu, jika diukur rentang waktu tahun 2016-2020 tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Palu berkembang secara melandai.

Dari data analisis efektifitas ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dapat dikatakan kecenderungan menurun dari 0,32 tahun 2016 menurun mencapai 0,19 tahun 2018 namun naik kembali mencapai 0,22 ditahun 2020.

Selanjutnya analisis relevansi kondisi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kota Palu dibandingkan dengan nasional dan

provinsi Kota Palu masih berada pada posisi rendah. Rentang tahun 2016-2020 dari 0,32 turun mencapai 0,22 terdapat penurunan mencapai 0,10, sementara nasional dari 0,52 turun mencapai 0,38 terdapat penurunan mencapai 0,14, sedangkan provinsi dari 0,73 naik mencapai 0,77 terdapat kenaikan mencapai 0,04.

3.3.5 Garis kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang- kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran

konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Berikut gambaran tentang identifikasi masalah gari kemiskinan Kota Palu rentang waktu tahun 2016-2020, dalam grafik berikut ini;

Grafik 3.6
Analisis Identifikasi Masalah Garis Kemiskinan Kota Palu
Tahun 2016-2020

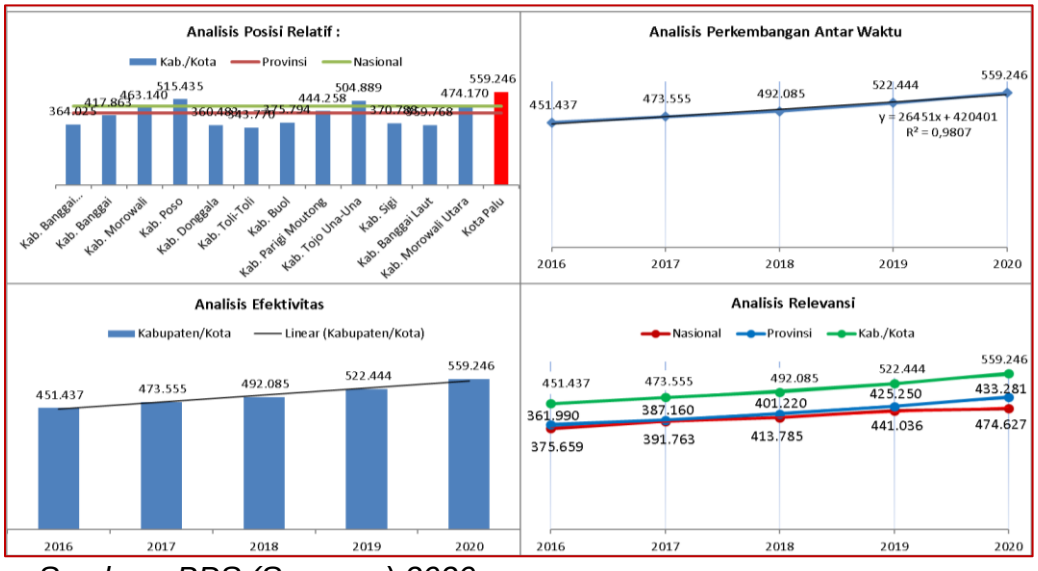

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Data analisis posisi relatif rentang tahun 2016-2020 garis kemiskinan di Kota Palu terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, kemiskinan tahun 2016

(451.427), naik pada tahun 2017 (473.555), tahun 2018 (492.085), tahun 2019 menaik (522.444) dan tahun-2020 kembali mengalami kenaikan (559.246). Bila dibandingkan dengan capaian garis kemiskinan provinsi mencapai tahun 2020 mencapai (474.267) dan nasional mencapai (433.281) Kota Palu masih berada diatas keduanya.

Sementara analisis perkembangan antar waktu perkembangan garis kemiskinan dari 451.437 mencapai 559.246, sementara provinsi dari Rp 375.658 mencapai Rp 474.267, sedang nasional dari Rp 361.990 mencapai Rp 433.281. Sedang analisis efektifitas garis kemiskinan Kota Palu cenderung menaik dari tahun 2016 dari Rp 451.437 menjadi Rp 559.246 mengalami kenaikan selama rentang waktu tersebut mencapai Rp 107.809. Dari analisis relevansi mengambarkan cenderung terus menaik, capainnya berada diatas capaian nasional maupun provinsi. Kondisi tersebut diatas salah satu disebabkan semakin baiknya program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Palu dilaksanakan setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan indikator kemiskinan masih membutuhkan kerja yang lebih keras lagi agar dapat terwujud *trend* kinerja yang lebih positif dan berkualitas. Startegi yang disusun untuk keserempakan penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan secara tepat sasaran dengan sumberdaya yang terukur, dengan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu penanganan agar menghasilkan kondisi yang lebih baik lagi. Hal ini menunjukan tingkat efektifitas penanggulangan kemiskinan Kota Palu telah menemukan posisi ***crack line poverty*** **atau** ***lapisan kemiskinan absolut,*** sehingga diperlukan strategi penurunan kemiskinan yang tepat bukan sekedar *bussines as usual*

3.4. Profil Kemiskinan Non Konsumsi

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode

sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

3.4.1 Bidang Pendidikan

Dalam pendapat umum kita sering mendengar bahwa keluarga miskin akan melahirkan generasi yang tak kalah miskin. Secara empiris saya rasa jawaban itu benar. Sebagaimana dijelaskan disiplin ilmu sosial, kemiskinan selalu satu garis lurus dengan rendahnya pendidikan. Oleh karena itu, jika seorang anak memiliki hubungan genetika di lingkungan belajar yang buruk, hasilnya akan buruk. Hal itu juga yang menjadi catatan Nicolaus Driyarkara tentang disintegrasi. Setiap perubahan sosial (disintegrasi) dengan sendirinya mengakibatkan 1.000 persoalan dalam pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan jika di suatu daerah penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, bisa dipastikan pendidikan di wilayah tersebut terabaikan. Tentu kita bisa berdalih bahwa pendidikan bukan faktor tunggal penyebab kemiskinan. Ada faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya yang juga tidak bisa dikesampingkan, kita sulit mengelak karena hanya pendidikan jawaban rasional yang bisa kita terima untuk memutus rantai kemiskinan.

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka Melek Huruf adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Angka Melek Huruf juga dapat menjadi ukuran kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media cetak, dan menunjukkan kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Angka melek huruf di Kota Palu bersumber dari penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak mungkin lagi bersekolah.

Penduduk Kota Palu yang berusia di atas 15 tahun dan tidak buta aksara selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif stabil di atas angka 99%, namun sedikit mengalami penurunan. Pada Tahun 2016 angka melek huruf di Kota Palu sebesar 99,89% dan mengalami sedikit penurunan selama periode 2016 – 2018 hingga menyentuh angka 99,68%. Pada tahun 2019 Angka Melek Huruf kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 99,84%, dan berakhir menjadi 99,78% di tahun 2020.

Angka Melek Huruf yang selalu berada di atas 99% berarti hanya ada segelintir penduduk usia di atas 15 tahun di Kota Palu yang masih tidak bisa membaca. Angka melek huruf di Kota Palu diperkirakan menjadi 100% pada Tahun 2021 yang berarti pada Tahun 2021 tidak ada lagi penduduk usia di atas 15 tahun di Kota Palu yang tidak bisa baca tulis. Perkembangan angka melek Huruf di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 disajikan dalam berikut.

Tabel 3.4
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu
Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf (Persen)	99,89	99,69	99,68	99,84	99,78

Sumber: BPS, Statistik Daerah Kota Palu 2021

Angka melek huruf menunjukan kemampuan baca tulis penduduk di Kota Palu. Angka melek huruf Kota Palu terus meningkat dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020. Angka tersebut meningkat hingga mendekati angka 100%. Angka Melek Huruf Kota Palu lebih tinggi jika dibandingkan dengan AMH Sulawesi Tengah dan Nasional. Angka Melek Huruf menjadi tujuan

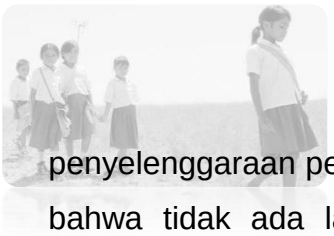

penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah, dimana selalu menjadi harapan bahwa tidak ada lagi penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis. Gambaran AMH Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional tertera pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.7
Angka Melek Huruf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional
Tahun 2016 - 2020

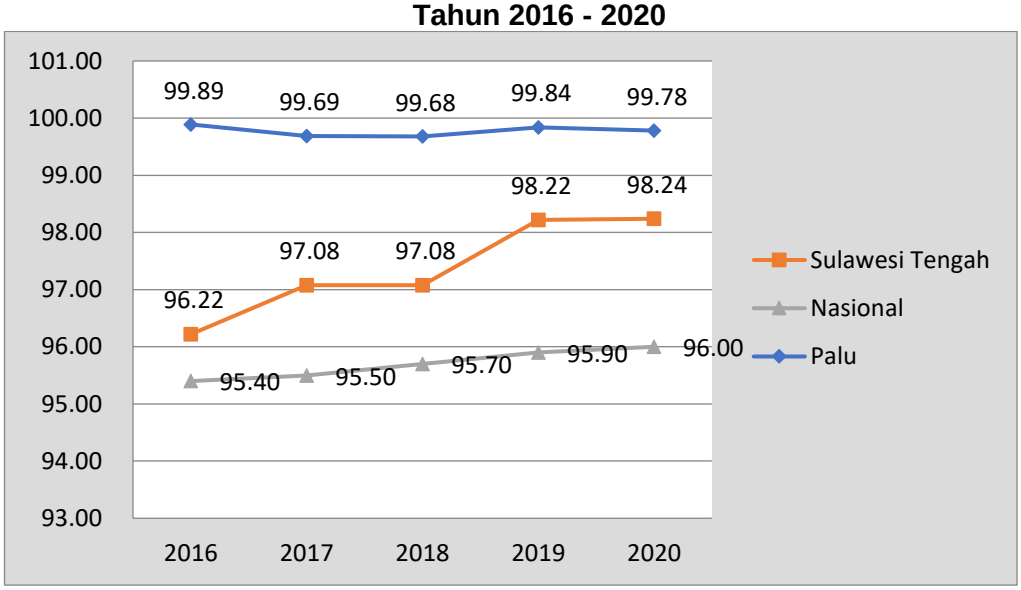

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Grafik 3.12 memperlihatkan AMH tertinggi Kota Palu terjadi pada Tahun 2016 sebesar 99,89 % dan terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 99,68 %. AMH tertinggi Provinsi Sulawesi Tengah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 98,24 % dan terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar 96,22 %. AMH tertinggi Nasional terjadi pada Tahun 2020 sebesar 96,00 % dan terendah terjadi pada Tahun 2016 sebesar 95,40 %. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemberantasan buta huruf di Kota Palu telah membuahkan hasil. Selain itu, peningkatan AMH juga membawa dampak baik bagi penduduk Kota Palu dalam menyerap informasi dari berbagai media sehingga diharapkan semua penduduk dapat berkontribusi dengan baik bagi pembangunan daerah.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-rata lama sekolah menunjukan rata-rata lamanya setiap penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Berikut ini rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera pada grafik berikut;

Grafik 3.8
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kota Palu Tahun 2016-2020

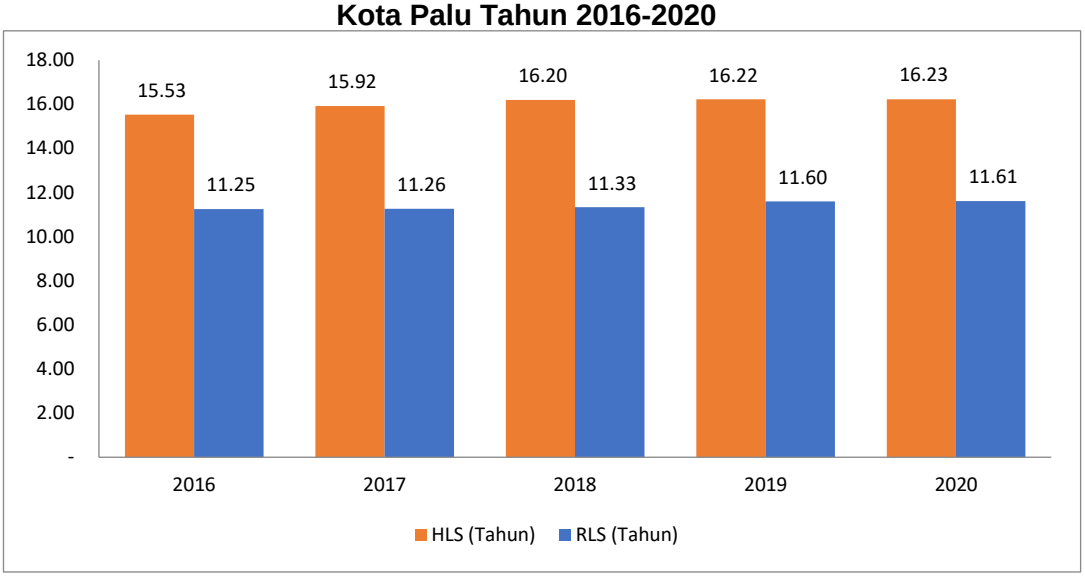

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Grafik 3.8 diatas memperlihatkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah masyarakat di Kota Palu. Tahun 2016 RLS mencapai 11,25 tahun, Tahun 2018 RLS naik menjadi 11,33 tahun. RLS tertinggi Kota Palu terjadi pada Tahun 2020 yaitu 11,61 tahun. Kenaikan angka rata-rata lama sekolah dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 membuktikan bahwa masyarakat Kota Palu telah memberi perhatian yang lebih baik pada dunia pendidikan, sehingga waktu untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah semakin bertambah.

Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kota Palu yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Palu mampu menyelesiakan pendidikannya sampai kelas 2 (dua) jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang terus meningkat dari tahun ke tahun pula membuktikan bahwa masyarakat Kota Palu juga terus memiliki harapan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih baik lagi. Tahun 2020 HLS Kota Palu mencapai angka 16,23 tahun atau memiliki harapan bersekolah sampai lulus perguruan tinggi dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu atau Sarjana S1.

Jika merujuk pada buku Statistik Kesejahteraan Kota Palu 2019, persentase penduduk yang berumur 15 tahun keatas menurut karakteristik dan ijazah tertinggi yang dimiliki, di Kota Palu masih terdapat 13,27 % dari warganya yang tidak memiliki Ijazah Sekolah Dasar (SD). Mereka yang tidk memiliki ijazah tersebut dominan dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (16,37%) dan didominasi oleh kelompom perempuan (14,30%). Demikian halnya 29,67% warga Kota Palu hanya memiliki ijazah SD sederajat, ini juga didominasi dari kelompok pengeluaran 40% terbawah dengan jumlah sekitar 35,98%.

Tabel 3.9 menunjukkan penduduk 15 tahun keatas yang memiliki ijazah tertinggi SMP atau sederajat sekitar 20,07 % juga dari kelompok pengeluaran 40 % terbawah dan dominan dari golongan perempuan. Buku Statistik Kesejahteraan Kota Palu 2019 juga menunjukkan bahwa dominan dari warga Kota Palu memiliki ijazah SMA ke atas, termasuk ijazah universitas, jumlahnya 35 %, tapi jumlah tersebut didominasi dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas (54,72%) disusul kelompok pengeluaran 40 persen tengah, sementara kelompok pengeluaran 40 persen terbawah 23,48%. Kota Palu tahun 2019 menunjukkan bahwa kelompok masyarakat marginal usia lima belas tahun ke atas dengan pengeluaran 40 persen terbawah dominan hanya memiliki ijazah SD (29,67%), bahkan masih terdapat 13,27% tidak memiliki ijazah SD.

Tabel 3.5
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2019

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Keatas
Jenis Kelamin				
Laki-laki	12,27	29,15	21,60	36,98
Perempuan	14,30	30,20	22,55	32,95
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	16,37	35,98	24,18	23,48
40 Persen Tengah	13,31	29,43	22,66	34,60
20 Persen Teratas	8,06	19,72	17,51	54,72
Kota Palu	**13,27**	**29,67**	**20,07**	**35,00**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Palu 2019

Tabel 3.9 berikut, bagaimana dengan formasi sosial untuk penduduk berumur 7-24 tahun menurut karakteristik dan status pendididan. buku Statistik Kesejahteraan Kota Palu 2019 kembali menunjukkan bahwa dari kelompok generasi milenial, 19,63 % terkategori tidak bersekolah dan dominan dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah (21,28%).

Walau demikian, juga tercatat sekitar 17,04 % dari kelompok pengeluaran 20 persen keatas terkategori tidak bersekolah. Kategori ini sesungguhnya dari strata sosial menengah atas, artinya bukan kelompok masyarakat miskin. Namun demikian dominan dari generasi muda di Kota Palu umumnya sedang menempuh pendidikan SMA keatas dengan jumlah sekitar 41,57%. Golongan ini didominasi dadi golongan pengeluaran 20 persen teratas, disusul kelompok 40 peresen tengah (46,31%) dan kelompok 40 persen terbawah 28,43%.

Kota Palu tahun 2019 juga menunjukkan, 14,67 % generasi berumur 7-24 tahun berstatus siswa SMP/sederajat, demimikian halnya dengan siswa SD/sederajat terdapat sekitar 23,85 %. Untuk melihat secara detik persentase penduduk berumur 7-24 tahun menurut karakteristikdan status pendidikan.

Tabel 3.6
Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2019

Karakteristik	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah	Jumlah
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Keatas		
Jenis Kelamin						
Laki-laki	0,33	27,75	14,91	35,58	21,43	
Perempuan	0,24	19,75	14,41	47,93	17,72	
Kelompok Pengeluaran						
40 Persen Terbawah	0,74	31,26	18,29	28,43	21,28	100
40 Persen Tengah	0,00	21,73	12,65	46,31	19,31	100
20 Persen Teratas	0,00	13,67	11,88	57,40	17,04	100
Kota Palu	**0,28**	**23,85**	**14,67**	**41,57**	**19,63**	**100**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Palu 2019

3. Indikator Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari berbagai usia yang sedang sekolah pada setiap jenjang pendidikan masing-masing. Adapun angka partisipasi kasar Kota Palu Tahun 2016-2020 secara rinci diuraikan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.7
APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK Kota Palu (%) Tahun 2016 – 2020

Tahun	Kota Palu			Provinsi Sulawesi Tengah		
	SD/MI	SMP/ MTs	SMA/MA/SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
2016	115	102	103,37	105,78	89,48	83,45
2017	126	107	108,39	105,43	99,19	94,29

Tahun	Kota Palu			Provinsi Sulawesi Tengah		
	SD/MI	SMP/ MTs	SMA/MA/SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
2018	110	109	114,46	105,28	92,88	90,63
2019	111	105	74,42	105,13	83,53	87,35
2020	104,8	91,85	111,55	105,95	91,98	88,42

Sumber: BPS dan SIPD Kota Palu Tahun 2021

Tabel 3.11 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Untuk jenjang pendidikan SD, APK SD/MI di Kota Palu rata-rata 113,36 % lebih tinggi 7,85 % dari rata-rata APK SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah. APK SMP/MTs Kota Palu dengan rata-rata 102,97 % lebih tinggi 11,56 % dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, dan APK SMA/MA/SMK Kota Palu rata-rata 102,44 % lebih tinggi 13,61 % dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.

Kondisi rata-rata APK yang lebih tinggi di Kota Palu ini menunjukkan bahwa masih banyak murid/siswa di atas usia sekolah jenjang pendidikan SD/MI usia 7-12 Tahun, SMP/MTs usia 13-15 Tahun, dan SMA/MA/SMK usia 16-18 Tahun yang sedang bersekolah di Kota Palu.

Jumlah murid/siswa dari berbagai usia yang sedang bersekolah di Kota Palu yang lebih banyak jumlahnya dari jumlah usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan ini terjadi bukan karena banyaknya murid/siswa yang tinggal kelas atau tidak lulus, tetapi diduga karena banyaknya murid/siswa yang berasal dari luar Kota Palu yang berusia di atas usia sekolah yang bersekolah di Kota Palu. Angka kelulusan murid/siswa sekolah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Grafik 3.9
Angka Partsipasi Kasar (APK)

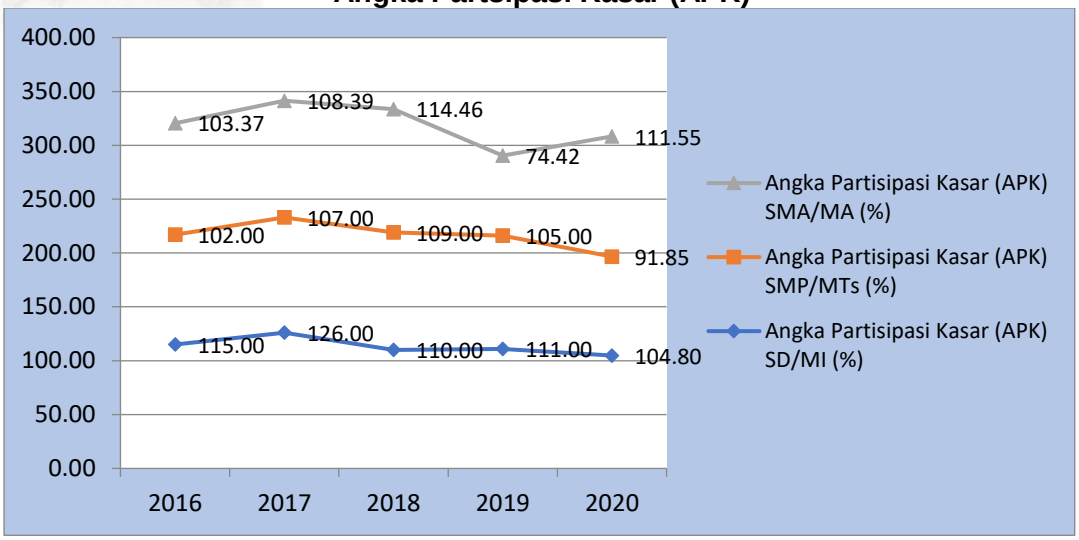

Sumber : BPS (Susenas) 2020

4. Indikator Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan

Grafik 3.10
Angka Partsipasi Murni (APM)

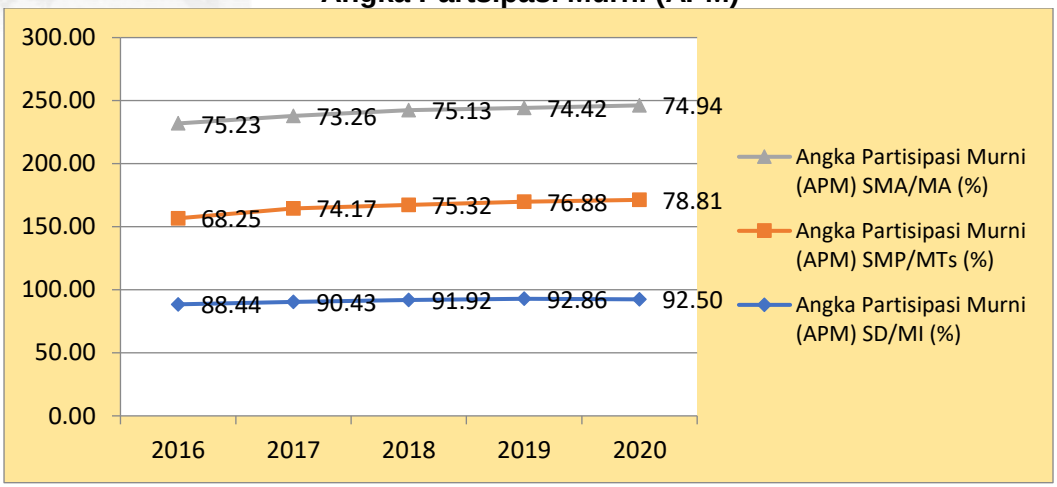

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Angka partisipasi murni menunjukan perbandingan jumlah usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar bersekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni merupakan indikator daya serap untuk mengetahui partisipasi penduduk kelompok usia pada jenjang pendidikan tertentu yang bersekolah sesuai jenjang pendidikan. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Perkembangan APM Kota Palu Tahun 2016-2020 ditampilkan dalam grafik berikut;

Grafik 3.11
Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK
Kota Palu (%) Tahun 2016-2020

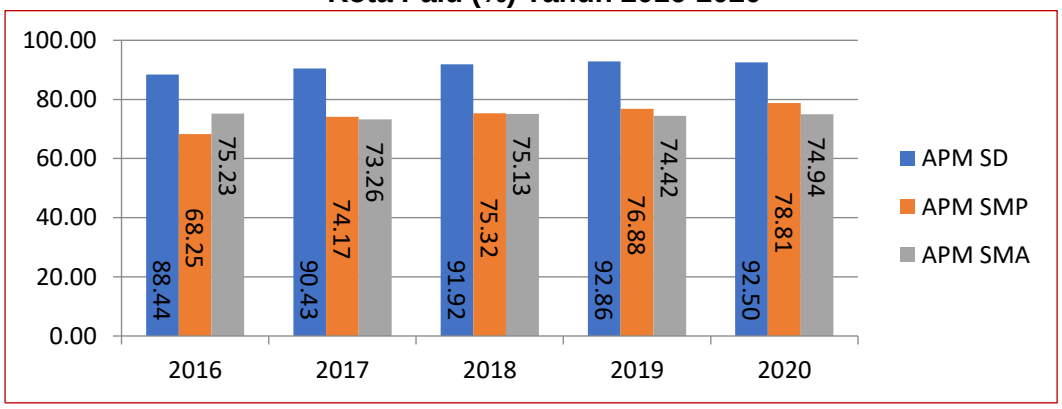

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Grafik 3.16 menunjukan bahwa APM Kota Palu umumnya cenderung fluktuatif dari Tahun 2016 ke Tahun 2020, namun masih menunjukkan tren naik. Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI pada Tahun 2019 sebesar 92,86 % mengalami penurunan menjadi 92,50 % pada Tahun 2020. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SD/MI adalah 1,3 persen. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs pada Tahun 2019 sebesar 76,88 % mengalami kenaikan menjadi 78,81 % pada Tahun 2020. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SMP/MTs adalah 1,7 persen. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA pada Tahun 2019 sebesar 74,42 % mengalami kenaikan menjadi 74,94 % pada Tahun 2020. Meskipun terdapat fluktuasi pada Angka Partisipasi Murni SMA, secara keseluruhan perkembangan APM Kota Palu cenderung naik. Perbandingan APM antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020 pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK diuraikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Perbandingan APM Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
1	Banggai Kepulauan	90,34	80,54	60,69
2	Banggai	90,64	74,23	71,58
3	Morowali	99,21	71,66	76,96
4	Poso	95,38	80,48	61,71
5	Donggala	97,72	63,92	53,50
6	ToliToli	89,31	63,55	68,05
7	Buol	90,03	72,43	65,62
8	Parigi Moutong	87,77	63,86	53,38
9	Tojo Una-Una	96,23	67,96	55,88
10	Sigi	93,96	64,26	57,02
11	Banggai Laut	93,50	83,27	37,38
12	Morowali Utara	92,71	78,38	71,01
13	**Kota Palu**	**92,50**	**78,81**	**74,94**
Sulawesi Tengah		**93,24**	**74,42**	**65,02**

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kota Palu Tahun 2020 jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi masih relatif rendah. Terdapat 7 (tujuh) Kabupaten yang memiliki APM lebih tinggi

dibanding APM Kota Palu Tahun 2020 yaitu; Kabupaten Morowali (99,71%), Kabupaten Donggala (97,72%), Kabupaten Tojo Una-Una (96,23%), Kabupaten Poso (95,38%), Kabupaten Sigi (93,96%), Kabupaten Banggai Laut (93,50%), dan Kabupaten Morowali Utara (92,71%), Kabupaten lainnya masih lebih rendah dibanding Kota Palu. Sementara APM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 juga masih lebih tinggi di banding Kota Palu.

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Palu masih lebih tinggi dari beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan di atas rata-rata APM Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian pula yang terjadi pada APM SMA/MA/SMK Kota Palu termasuk salah satu yang tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 74,94 % pada Tahun 2020. Hal ini dimungkinkan karena aksesibilitas penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota Palu lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya. Aksesibilitas yang dimaksudkan adalah ketersediaan sarana pendidikan SMP dan SMA yang lebih banyak serta kemampuan masyarakat dalam mendanai pendidikan anak lebih baik dari daerah lainnya. Selain aksesibilitas sarana pendidikan, faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi pengembangan anak di masa akan datang sangat mempengaruhi tingginya APM pada tingkatan pendidikan SMP dan SMA.

Grafik 3.12
Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

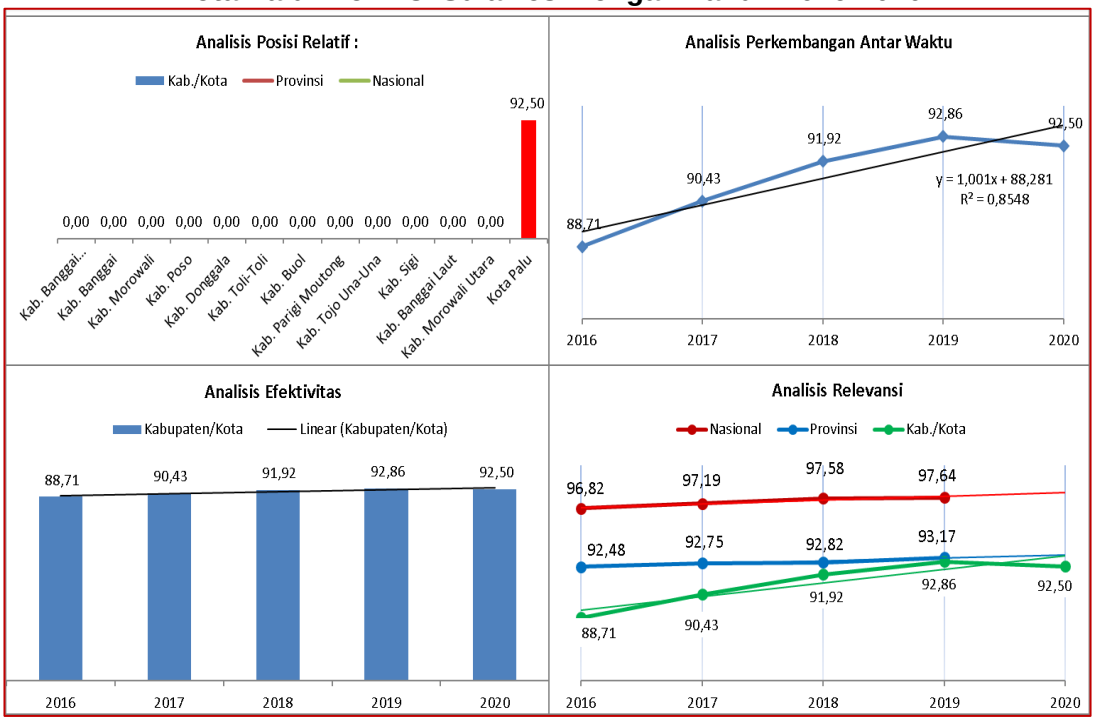

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Grafik 3.13
Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs (%) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Grafik 3.14
Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/MA (%) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

Sumber : BPS (Susenas) 2020

5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah yang berpartisipasi dalam pendidikan formal dengan penduduk yang berusia sekolah, yang dinyatakan dalam persentase.

Pergerakan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020 secara keseluruhan cenderung fluktuatif, namun tetap mengalami peningkatan pada tahun 2020. Pada Tahun 2018 APS SD/MI di Kota Palu sebesar 98,22 naik menjadi 98,56 pada Tahun 2020. Pada Tahun 2018 APS SMP/MTs di Kota Palu sebesar 94,86 naik menjadi 95,54 pada Tahun 2020.

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 8,22 % begitupun dengan SMP/MTs sebesar 9,79 % akibat terjadinya bencana alam pada bulan September Tahun 2018.

Gambaran mengenai APS di Kota Palu Tahun 2016-2020 diuraikan dalam Gambar 2.26.

Grafik 3.15
Perkembangan APS SD/MI, SMP/MTs/SMA/MA/SMK
di Kota Palu (persen) Tahun 2016 – 2020

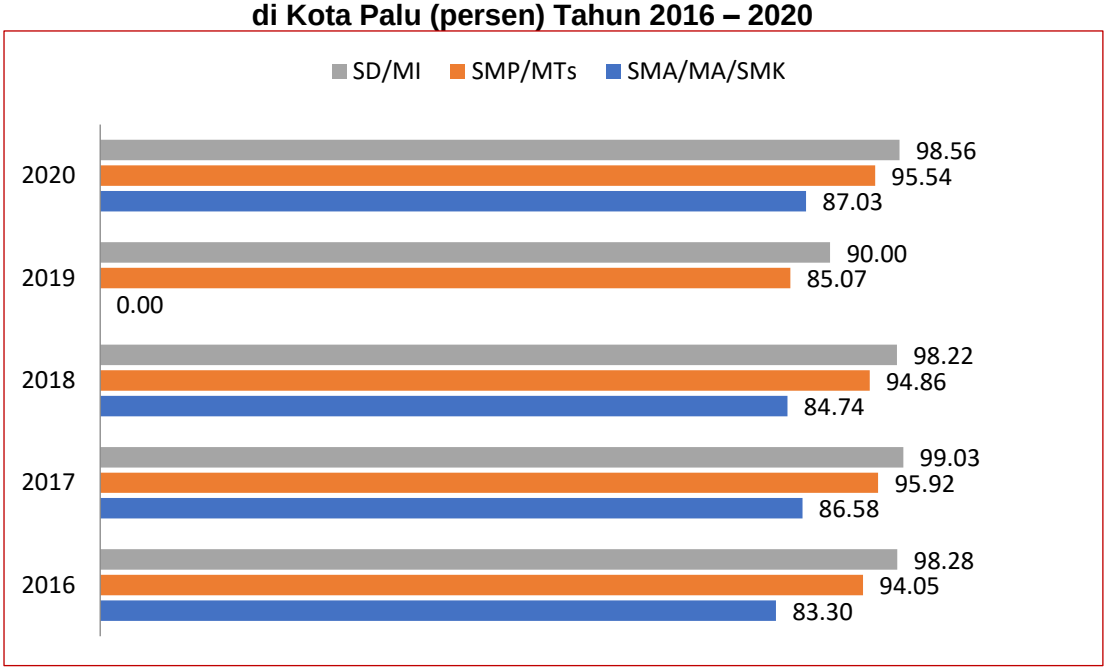

Sumber: BPS 2021

APS jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2020 sudah cukup tinggi walaupun belum mencapai 100 %. Ini bermakna masih terdapat sebagian kecil penduduk usia 7 tahun hingga 12 tahun yang tidak bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs. Apabila dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun, kondisi ini belum ideal karena masih ada anak-anak yang tidak masuk sekolah pada pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.

6. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan penduduk usia sekolah yang pernah menjadi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, tidak dapat melanjutkan sekolah karena suatu alasan, tidak termasuk penduduk yang tidak pernah sekolah. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 0,04 % naik 0,01 % menjadi 0,05 % pada Tahun 2018. Tahun 2019 APS SD/MI turun sebesar 0,02 % menjadi 0,03 %.

Sementara angka putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 0,01 % naik sebesar 0,25 % menjadi 0,26 % pada Tahun 2018. Tahun 2019 turun sebesar 0,17 % menjadi 0,09 %.

Gambaran Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, dan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2020 diuraikan dalam Grafik berikut;.

Grafik 3.16
Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Kota Palu Tahun 2017-2019

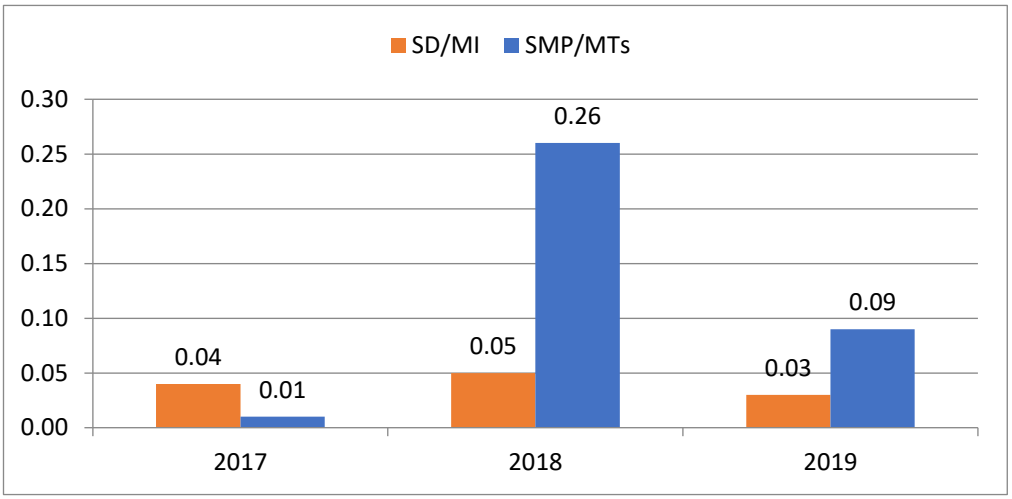

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang tertentu, yang kemudian dinyatakan dalam persentase. Angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kota Palu Tahun 2016 adalah sebesar 100%.

Gambaran perkembangan angka kelulusan SD dan SMP di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Angka Kelulusan SD, SMP dan SMA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah lulusan pada jenjang SD	6.051	6.498	6.399	6.176	6.169
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun sebelumnya	6.051	6.498	6.399	6.176	6.169
Angka Kelulusan SD	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah lulusan pada jenjang	4.820	5.400	5.661	5.675	5.410

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
SMP					
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya	4.820	5.400	5.661	5.675	5.410
Angka Kelulusan SMP	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2021

Grafik 3.17
Analisis Identifikasi Masalah Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

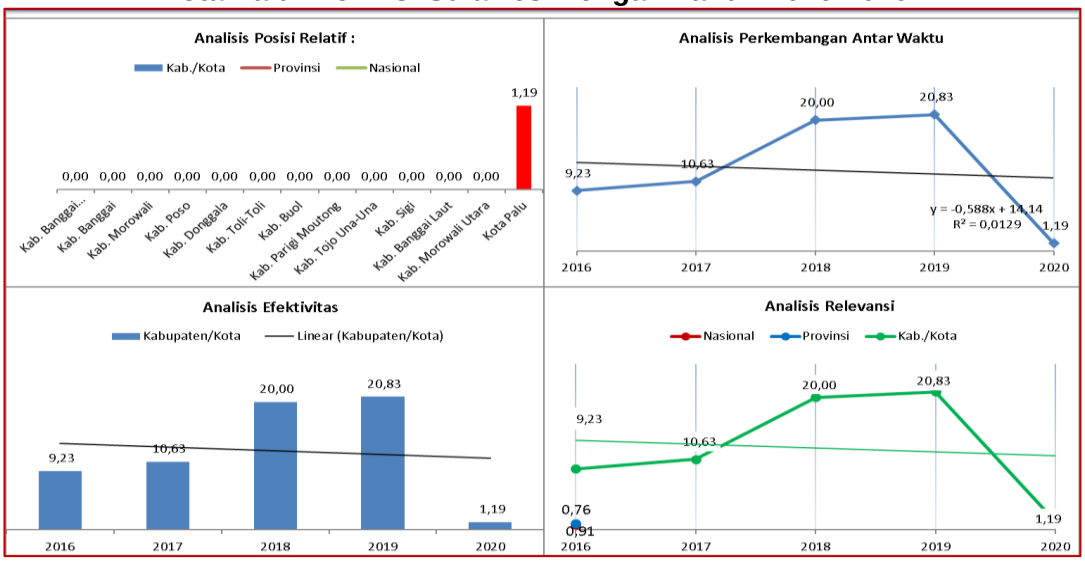

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Grafik 3.18
Analisis Identifikasi Masalah Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

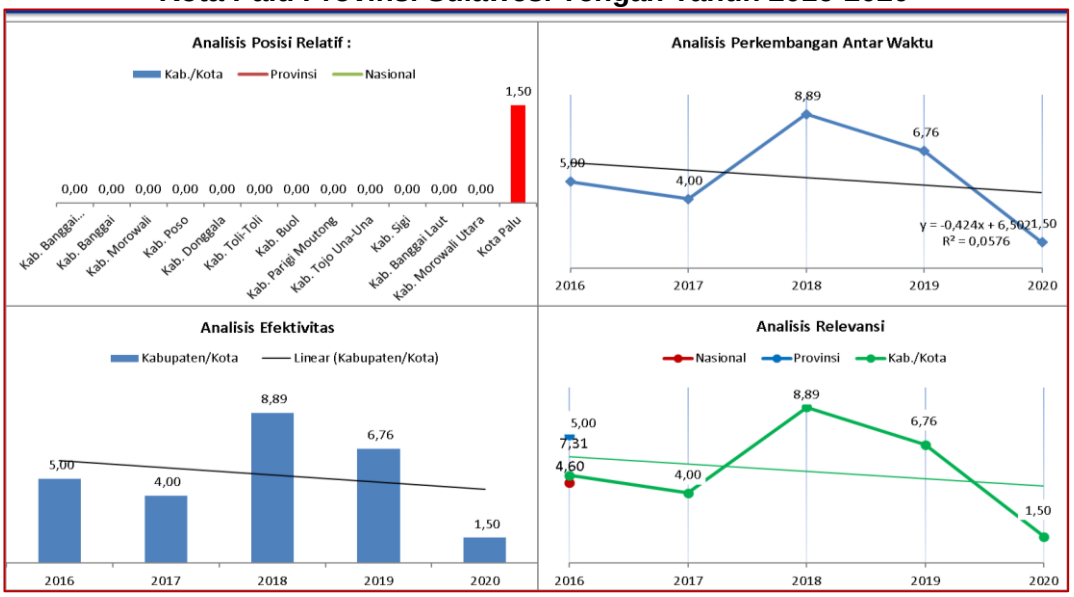

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Grafik 3.19
Analisis Identifikasi Masalah Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020

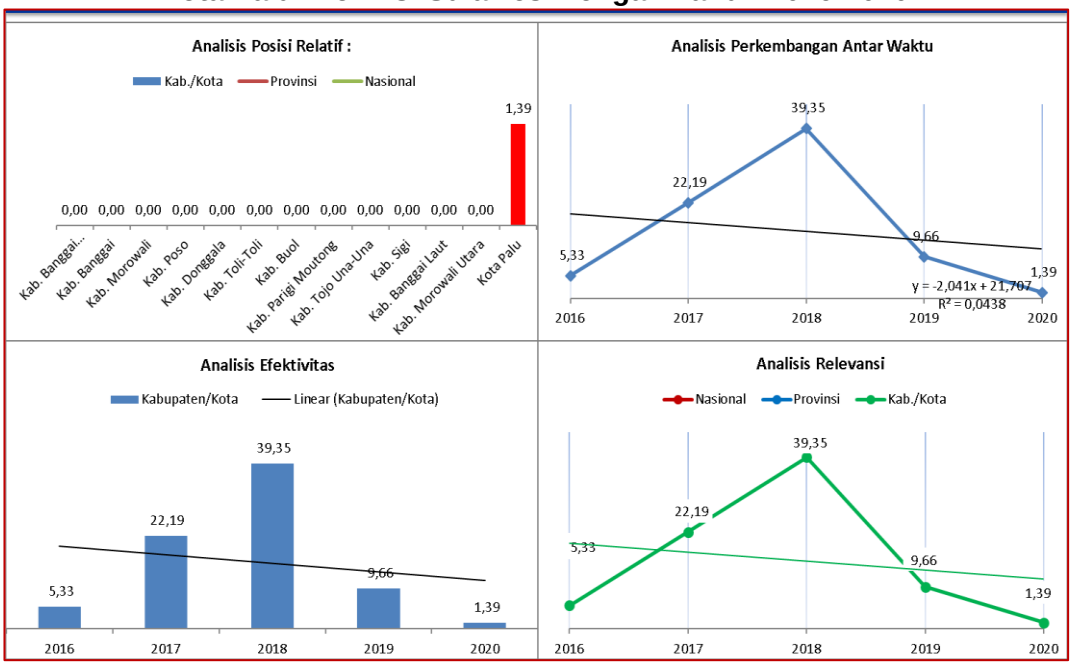

Sumber : BPS (Susenas) 2020

8. Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada tingkat pertama jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah pada tahun tersebut.

Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kota Palu mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada dua tahun terakhir Tahun 2019 dan 2020. Angka Melanutkan Peididkan dari SD ke SMP adalah 85,8% di Tahun 2016, meningkat dan mencapai angka tertinggi 87,8% di Tahun 2018, dan menurun kembali menjadi 85,25% di Tahun 2020.

Perkembangan angka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SD	6.051	6.498	6.399	6.176	6.169
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMP	5.194	5.634	5.621	5.303	5.259
Angka Melanjut SD ke SMP	**85,8%**	**86,7%**	**87,8%**	**85,86%**	**85,25%**
Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SMP	4.820	5.400	5.661	5.675	5.410
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK	7.319	7.580	7.710	8.037	N/A
Angka Melanjut SMP ke SMA/SMK	**151,8%**	**140,4%**	**136,2%**	**141,62%**	**N/A**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2021

Tabel diatas memperlihatkan angka melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA/SMK di Kota Palu Tahun 2016 sebesar 151,8% menurun menjadi 140,4% dan 136,2% di tahun 2017 dan 2018, lalu meningkat kembali menjadi 141,62% di tahun 2019.

Besarnya Angka Melanjutkan Pendidikan dari SMPs ke SMA/SMK di Kota Palu yang melebihi angka 100% disebabkan tingginya jumlah siswa baru pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kota Palu yang berasal dari daerah luar Kota Palu yang mungkin berasal dari kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah bahkan mungkin juga dari provinsi lain seperti Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, dan lainnya.

9. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kota Palu, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2016-2020 di Kota Palu cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Palu naik sebesar 11,43 persen.

Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam Tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016-2020

Tahun	Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio (%)
2016	35.873	374.020	9.59
2017	38.858	379.782	10,23
2018	40.586	385.691	10,52
2019	40.968	370.376	11,06
2020	42.662	373.218	11,43

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021 (diolah)

10. Rasio Guru dan Siswa

Perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan. Menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menetapkan guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya terhadap gurunya sebagai berikut : (i) untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1; (ii) untuk SD atau yang sederajat 20:1; (iii) untuk MI atau yang sederajat 15:1; (iv) untuk SMP atau yang sederajat 20:1; (v) untuk MTs atau yang sederajat 15:1; (vi) untuk SMA atau yang sederajat 20:1; (vii) untuk MA atau yang sederajat 15:1; (vii) untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan (viii) untuk MAK atau yang sederajat 12:1. Berikut data identifikasi masalah ratio guru perkelas pada tingkatan pendidikan SMP/MTs.

Grafik 3.20
Analisa Identifikasi Masalah Rasio Guru/Kelas SD/MI(Guru)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

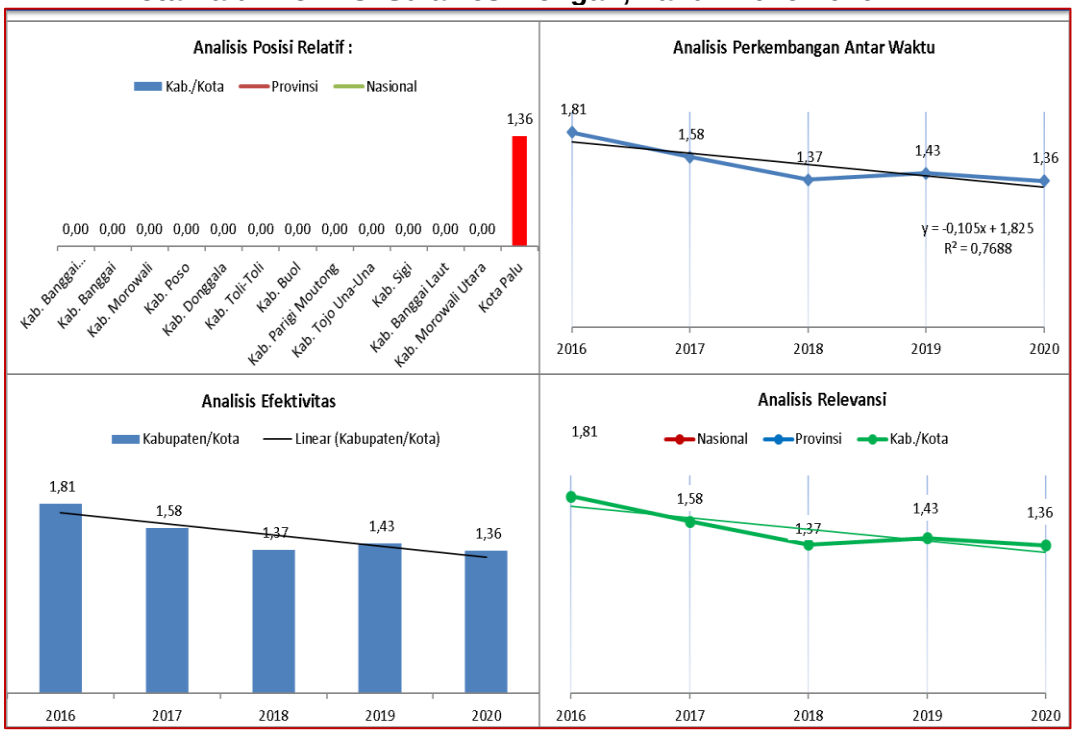

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Grafik 3.21
Analisa Identifikasi Masalah Rasio Siswa/Guru SD/MI(Siswa)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

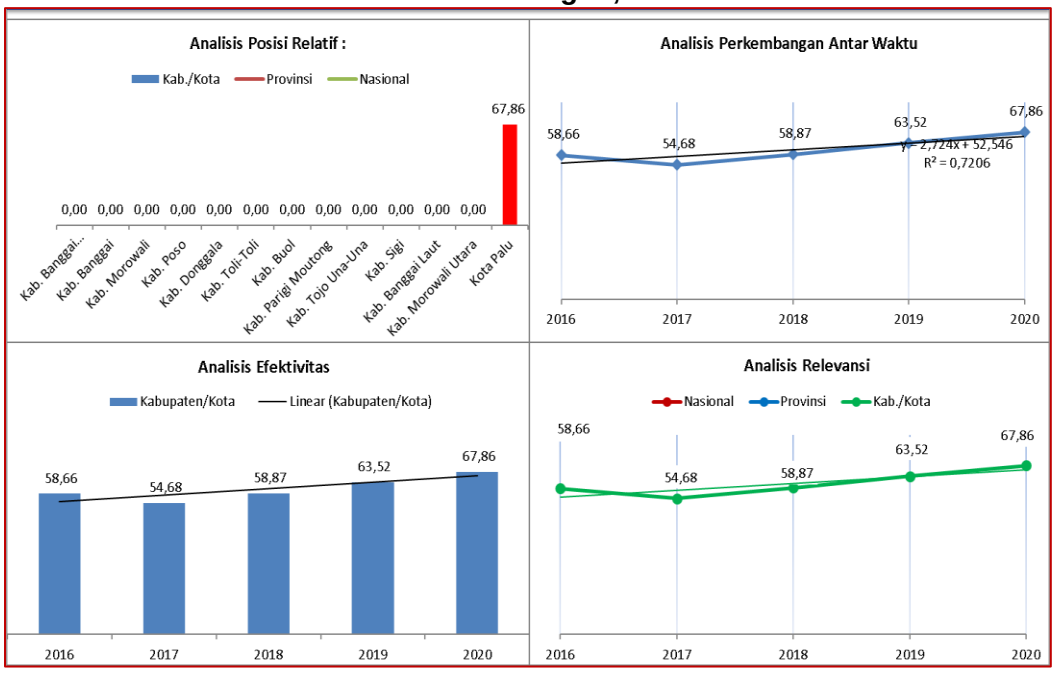

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Grafik 3.22
Analisa Identifikasi Masalah Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

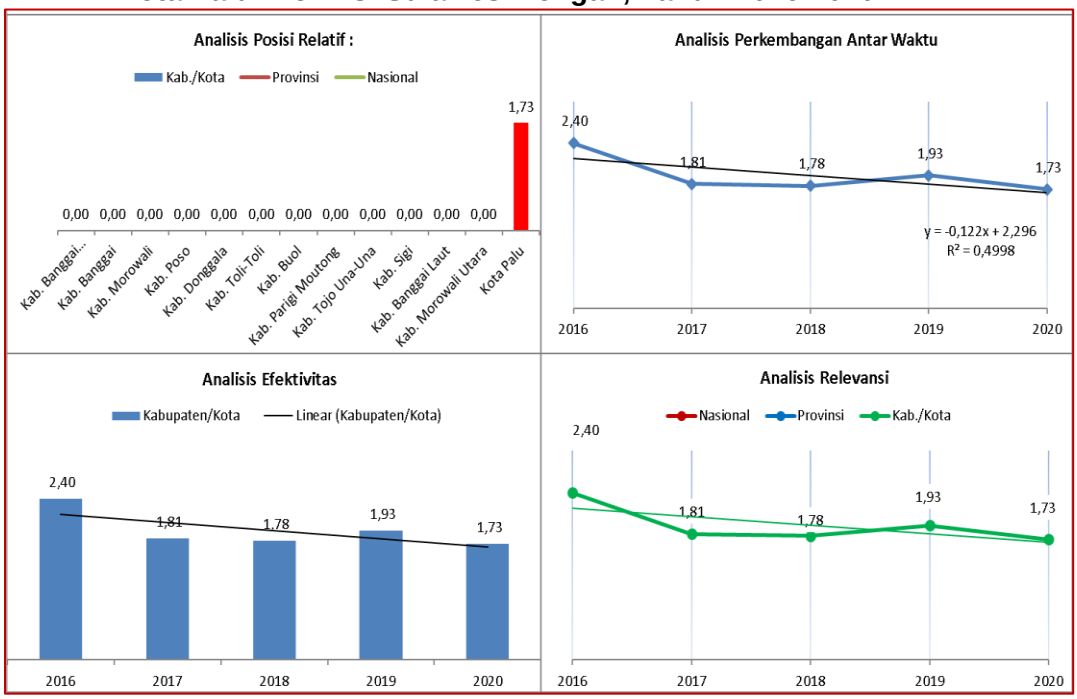

Sumber :BPS (Susenas) 2020

Grafik 3.23
Analisa Identifikasi Masalah Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

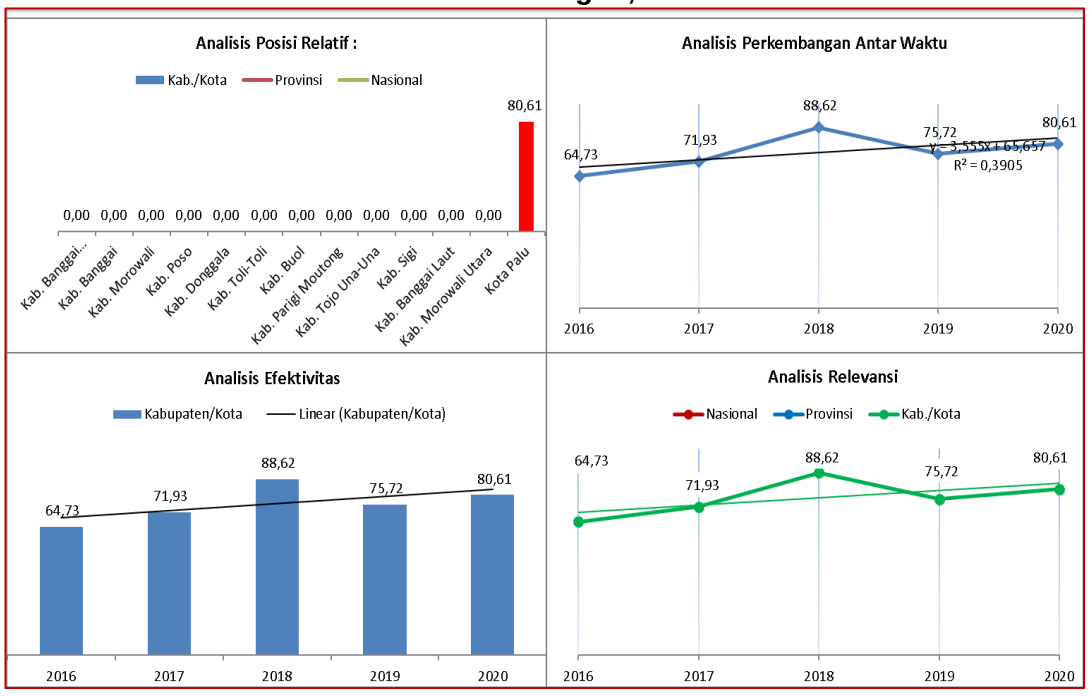

Sumber :BPS (Susenas) 2020

Grafik 3.24
Analisa Identifikasi Masalah Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

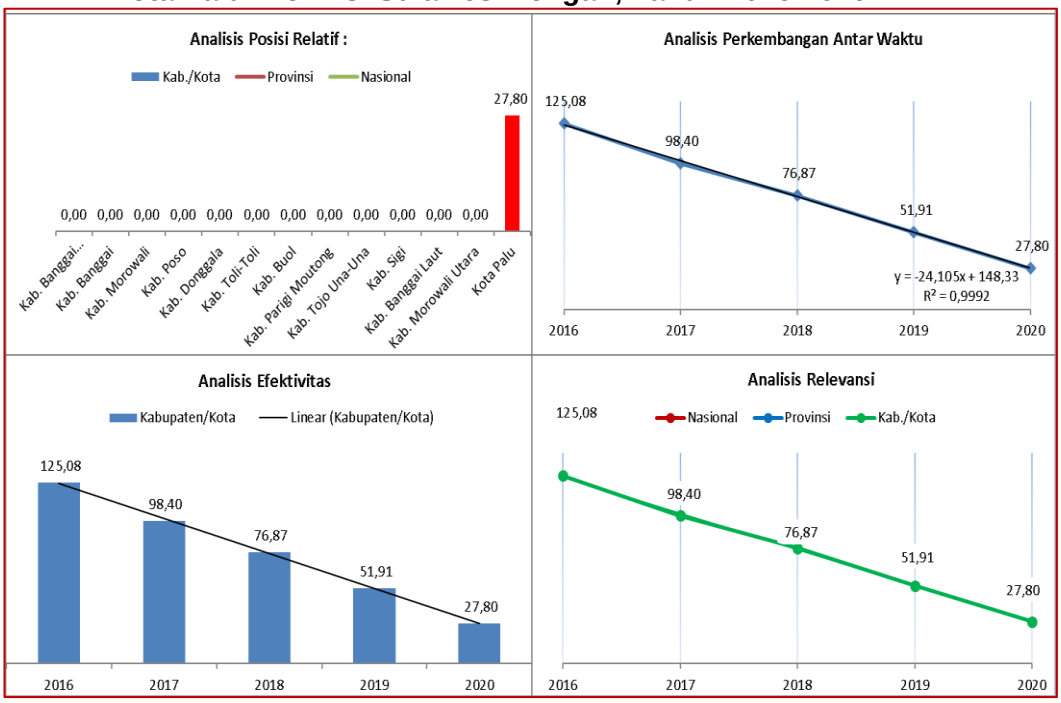

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Grafik 3.25
Analisa Identifikasi Masalah Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

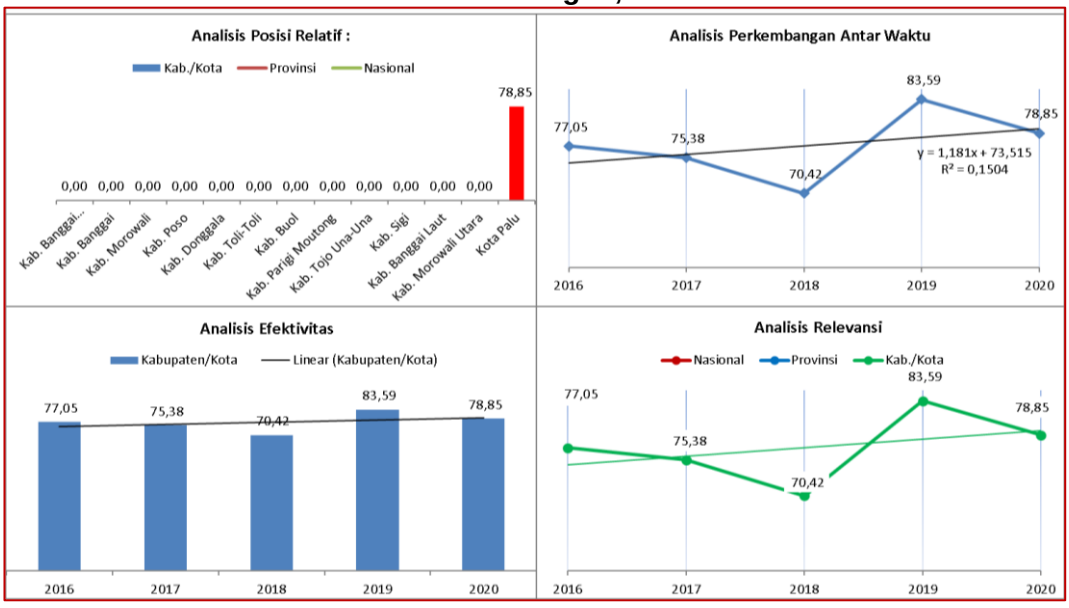

Sumber : BPS (Susenas) 2020

11. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Salah satu faktor utama penentu kualitas pendidikan adalah kualitas tenaga pendidik. Indikator utama tercapainya kualitas tenaga pendidik adalah kualifikasi pendidikan tenaga pendidik. Pekembangan guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kota Palu selama periode 2016 – 2019 mengalami sedikit penurunan akibat bertambahnya jumlah guru secara keseluruhan. Uraian mengenai perkembangan guru memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2016 – 2019 terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.12
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
di Kota Palu Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Guru SD/MI, SMP/MTs, Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (belum termasuk SMA,MA,SMK)	3.926*	4.228	4.099	4.335	4.184
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	5.777	5.676	5.599	5.664	6.322
Rasio	**67,95**	**74,48**	**73,20**	**76,88**	**66,18**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan BPS Kota Palu Tahun 2021

Pada Tahun 2016 rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu sebesar 43,68% dan mengalami peningkatan hingga mencapai 48,20% pada Tahun 2017. Namun pada periode 2018 – 2019, rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu mengalami penurunan hingga menjadi 32,36%.

Selain disebabkan oleh jumlah guru berkualifikasi S1/D-1V yang mengalami penurunan, rasio juga terpengaruh oleh bertambahnya jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang meningkat hampir 45% dari 4.176 di tahun 2018 menjadi 6.048 di tahun 2019. Peningkatan jumlah guru secara total ini tidak dibarengi dengan peningkatan guru yang berkualifikasi S1/D-IV di Kota Palu. Selain itu, jika ditilik dari tren secara keseluruhan, rasio guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu selama periode 2016 – 2019 belum menyentuh 50% dan masih tergolong rendah.

3.4.2 Bidang kesehatan

Bidang kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Setiap orang berhak atas kesehatan tanpa adanya perbedaan ras, paham politik, agama, kondisi social maupun ekonomi. Dalam Undang undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan Negara bertanggung Jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Maka kesehatan merupakan perpaduan antara kondisi fisik dan mental yang mampu mendukung individu untuk beraktifitas secara normal.

Memberikan pelayanan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas kepada masyarakat ditujukan untuk dapat meningkatkan cakupan layanan masyarkat miskin dalam pelayanan kesehatan di Kota Palu yang merupakan tugas utama pemerintah untuk dapat mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat yang tinggi. Kualitas kesehatan masyarakat dapat di ukur dari kemampuan masyarakat menjangkau layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Upaya pemerintah dalam mempermudah aksesibilitas masyarakat pada layanan kesehatan adalah mengupayakan ketersediaan jumlah sarana kesehatan, meringankan biaya pelayanan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Selain ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah Kota Palu perlu meningkatkan cakupan jaminan kesehatan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Semakin besar *universal coverage* jaminan kesehatan akan memungkinkan semakin banyak masyarakat miskin yang akan menerima layanan kesehatan berkualitas. Isu strategis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat selain meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman kesehatan kepada masyarakat melalui program-program promosi kesehatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan didorong dengan upaya masyarakat menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga. Ketersediaan sanitasi yang memadai, jaringan air bersih yang digunakan,

pengolahan limbah keluarga serta pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan sehat bagi keluarga. Berikut potret perkembangan kondisi bidang kesehatan di Kota Palu;

1. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Jiwa)

Kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. "Angka kematian ibu di Kota Palu dalam dua tahun terakhir masih cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, tahun 2015 terdapat 22 kematian dari 7.068 kelahiran hidup atau sekitar 326/100.000 kelahiran hidup. Sementara tahun 2016 tercatat 11 kematian dari 7.158 kelahiran hidup atau sekitar 158/100.000 kelahiran hidup. Data tersebut, memberikan informasi atau menggambarkan bahwa tingkat kematian ibu di Kota Palu masih sangat tinggi. Namun, tingginya kematian ibu tidak hanya terjadi di Kota Palu, tetapi hampir di semua daerah di Indonesia. "Nah ini adalah fenomena nasional. Dimana hampir semua daerah di Indonesia mengalami hal yang sama yaitu meningkatnya kematian ibu di tahun 2015," bahwa angka tersebut sangat jauh bila dibandingkan dengan angka Millennium Development Goals (MDGs) yang berada di posisi 125/100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi, bahwa angka kematian ibu di Kota Palu angka terus menurun dari tahun ke tahun sampai pada titik nol atau angka nol. Bahwa tahun 2017 ditargetkan menurunkan angka kematian hingga mecapai 100/100.000 kelahiran hidup. Tingginya kematian ibu dipengaruhi oleh meningkatkan hipertensi dalam kehamilan ibu, yang menyebabkan tensi ibu hamil naik. "Naiknya hipertensi menyebabkan kematian ibu. Hal ini di pengaruhi oleh lingkungan atau faktor rumah tangga, serta stres ibu yang tinggi.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dari derajat kesehatan. Kematian Ibu adalah kematian seorang wanita yang terjadi selama masa kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (sampai dengan 42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhatikan lama kehamilan, yang disebabkan oleh kehamilannya atau penanganan kehamilannya, dan bukan karena kecelakaan.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu hamil ditambah ibu bersalin, dan ibu nifas (menyusui) per-100.000 KH (Kelahiran Hidup). AKI menggambarkan resiko yang dihadapi oleh ibu selama kehamilan, melahirkan dan pasca persalinan. Komplikasi yang dihadapi pada saat-saat tersebut merupakan penyebab utama kematian ibu (15-49 tahun). Komplikasi obstetri yang paling sering terjadi dan mengakibatkan kematian (±90%) adalah perdarahan, infeksi, dan eklampsia. Faktor-faktor yang mempengaruhi AKI diantaranya adalah keadaan sosial ekonomi, status kesehatan ibu selama masa kehamilan serta ketersediaan dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetrik. AKI di Kota Palu cenderung berfluktuasi selama tiga tahun terakhir ini.

Dalam upaya akselerasi penurunan AKI dan AKB di Kota Palu telah diadakan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap percepatan penurunan AKI dan AKB antara lain peningkatan cakupan dan kualitas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kegiatan P4K (Pemantapan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), pertemuan AMP (Audit Maternal Perinatal) sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun guna membahas faktor penyebab kematian bayi dan ibu serta upaya penanganannya, pelacakan kasus Bumil Resti, pertemuan evaluasi dan tindak lanjut PWS-KIA, Pelatihan Orientasi Pemasaran Sosial bagi bidan-bidan kelurahan.

Dari fakta yang ada di lapangan, faktor penyebab langsung kematian ibu masih didominasi oleh eklampsia dan penyebab lain-lain. Sedangkan faktor tidak langsung penyebab kematian ibu adalah faktor 3 (tiga) Terlambat yaitu terlambat dalam mencapai fasilitas pelayanan, terlambat dalam mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat di fasilitas pelayanan dan terlambat dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan, dan 4 (empat) Terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak. Keduanya saling berkaitan dengan faktor akses, sosial budaya, pendidikan dan ekonomi.

Dalam upaya akselerasi penurunan AKI dan AKB di Kota Palu telah diadakan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat memberikan daya ungkit

terhadap percepatan penurunan AKI dan AKB antara lain peningkatan cakupan dan kualitas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kegiatan P4K (Pemantapan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi), pertemuan AMP (Audit Maternal Perinatal) sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun guna membahas faktor penyebab kematian bayi dan ibu serta upaya penanganannya, pelacakan kasus Bumil Resti, pertemuan evaluasi dan tindak lanjut PWS-KIA, Pelatihan Orientasi Pemasaran Sosial bagi bidan-bidan kelurahan

2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Jiwa)

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi).

Perkembangan AKHB Kota Palu dalam periode 2016 - 2019 cenderung menurun hingga Tahun 2019. Namun sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2019 AKHB di Kota Palu mengalami perubahan. Secara lebih rinci, AKHB dan AKB di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.13
AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,17	1,42	2,67	1,48	2,35
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	995,83	998,58	997,33	997,28	997,99

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

3. Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 Balita (Jiwa)

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi).

Perkembangan AKHB Kota Palu dalam periode 2016 - 2019 cenderung menurun hingga Tahun 2019. Namun sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2019 AKHB di Kota Palu mengalami perubahan. Secara lebih rinci, AKHB dan AKB di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.14
AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup) Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,17	1,42	2,67	1,48	2,35
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	995,83	998,58	997,33	997,28	997,99

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

4. Proporsi Kelahiran yang Ditolong Tenaga KesehatanTerlatih (%)

Proporsi Pertolongan Kelahiran (PPK) oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (TKT) adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat tergolong sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian.

Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Berikut perkembangan proporsi pertolongan kelahiran (PPK) oleh tenaga kesehatan terlatih Kota Palu periode tahun 2016-2021;

Tabel 3.15
Jumlah Pertolongan Tenaga Kesehatan Terlatih

No	Uraian	Formula	Satuan	Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	=(a/b)× 100%	%	96,29	97,43	96,37	100,20	99,06	64,99
	a. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu		Orang	6.955	7.058	7.087	7.431	7.380	4.848
	b. Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama		Orang	7.223	7.244	7.354	7.416	7.450	7.460

Sumber BPS tahun 2021

5. Angka Morbiditas (%)

Morbiditas adalah angka kesakitan, dapat berupa angka insiden maupun angka prevalensi dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan.

Morbiditas secara umum didapatkan dari data yang berasal dari sarana pelayanan kesehatan (*facility based data*) yang diperoleh melalui sistem pencatatan dan pelaporan misalnya pada 10 penyakit pada rawat jalan Puskesmas dan RS, sedangkan prevalensi dan insidennya dapat diketahui melalui laporan pada bagian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular.

Berikut dapat dilihat grafik gambaran analisis masalah angka Morbilitas (%) Kota Palu tahun 2016-2020;

Grafik 3.26
Analisis Identifikasi Masalah Angka Morbilitas (%)
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tangah Tahun 2016-2020

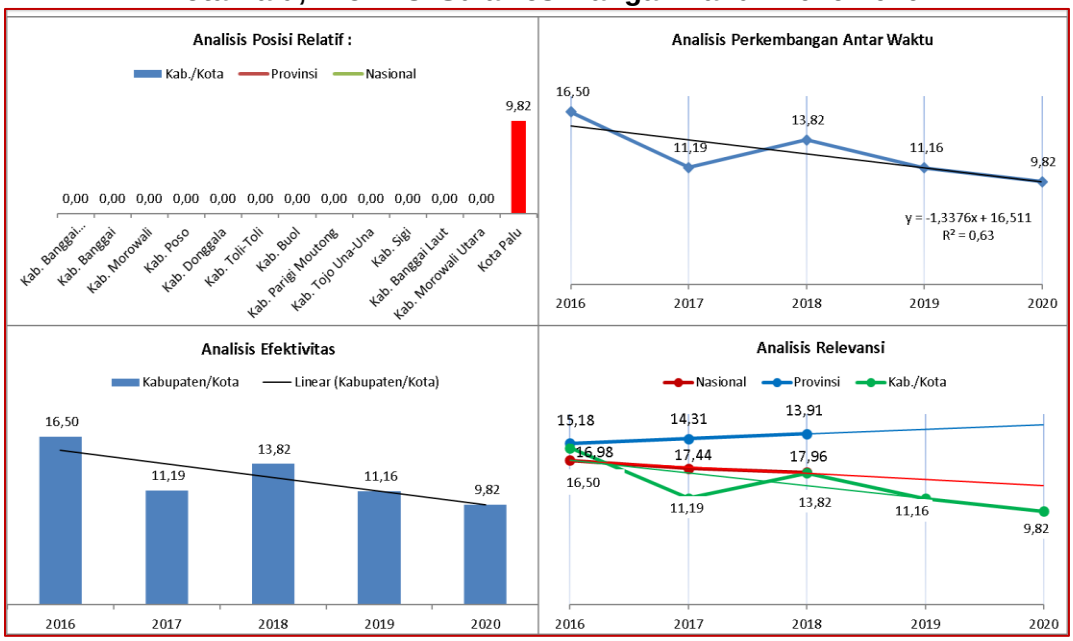

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Berikut dapat dilihat grafik gambaran analisis masalah rasio bidan Kota Palu rentang waktu tahun 2016-2020

Grafik 3.27
Analisis Identifikasi Masalah Rasio Bidan (Per 100,000 Penduduk)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

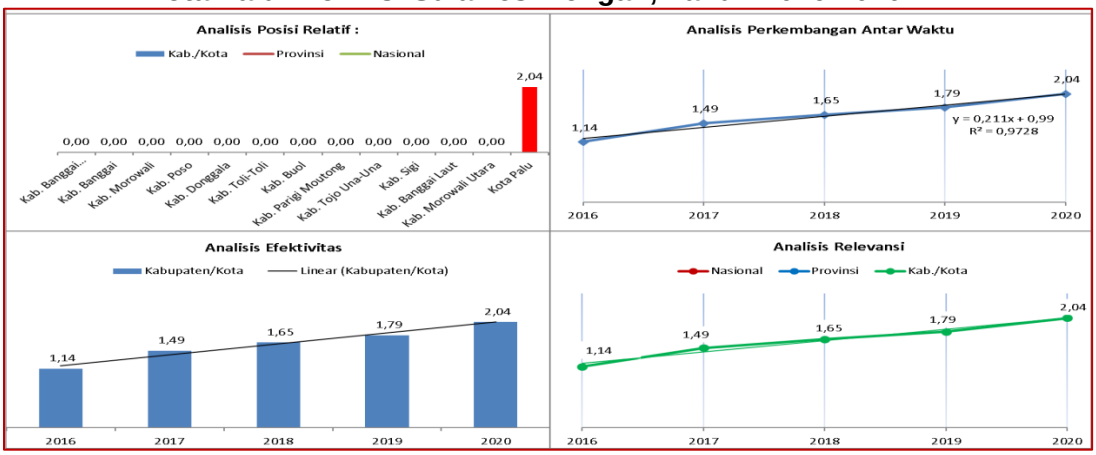

Sumber :BPS (Susenas) 2020

a. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Kecenderungan perkembangan angka harapan hidup di Kota Palu yang terus meningkat dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palu memiliki kualitas kesehatan atau lama hidup yang tinggi sampai pada usia 71,04 tahun. Gambaran angka harapan hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 tertera pada grafik sebagai berikut:

Grafik 3.28
Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2016 – 2020

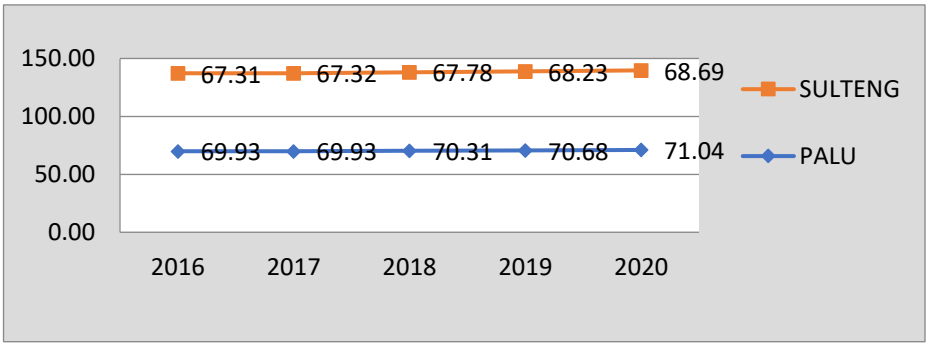

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Grafik 3.28 memperlihatkan angka harapan hidup masyarakat Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun

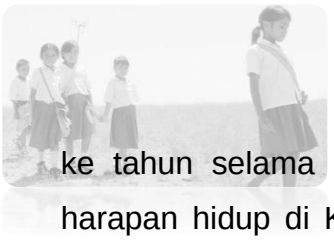

ke tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingginya angka usia harapan hidup di Kota Palu mungkin disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat yang lebih baik dari kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Proporsi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Permenkes RI No. 10/2018:I:1(3)). Tindakan pertama yang paling banyak dilakukan dalam upaya pengobatan sakit adalah pengobatan sendiri (self- medication) (Supardi S, 1997 dalam Utari dan Wiwing, 2016 : 7). Di Negara berkembang upaya pemeliharan keseahatan terbanyak yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi keluhan kesehatannya ialah berobat sendiri (Dharmasari, 2003 dalam Maria dan Lolita, 2014

Self medication atau swamedikasi merupakan upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri (Departemen Kesehatan RI, 2007 : 9). WHO mendefinisikan swamedikasi sebagaiman pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit (WHO, 1998 : 3).

Masyarakat memilih pengobatan sendiri karena sakit ringan, hemat biaya, dan hemat waktu, serta sifatnya sementara, yaitu penanggulangan pertama sebelum berobat ke puskesmas atau mantri (Supardi dan Notosiswoyo, 2005 : 142). Alasan masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi atau peresepan sendiri karena penyakit dianggap ringan (46%), harga obat yang lebih murah (16%) dan obat mudah diperoleh (9%) (Kartajaya dkk, 2011 : 4). Adapun fenomena swamedikasi ini di sebabkan oleh, perkembangan teknologi informasi dengan semakin berkembangnya teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengakses infomasi termasuk di dalamnya informasi

kesehatan. Masyarakat jadi lebih terbuka dengan adanya informasi di Internet mengenai pengobatan, termasuk juga pengobatan alternatif. Masyarakat jadi lebih berani untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit 2 yang dideritanya berdasarkan aneka informasi yang didapatkan melalui Internet. (Kartajaya dkk, 2011 : 2). Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2017 terdapat 69,43% penduduk Indonesia yang melakukan swamedikasi dibandingkan penduduk yang berobat jalan 46,32%. Angka ini meningkat dari tahun 2016 sebanyak 63,77%. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku swamedikasi di Indonesia masih cukup besar.

7. Prevalensi Malaria, Diare, DB per 1000 penduduk (%) (pilih salah satu penyakit, jika ada penyakit yang paling banyak terjadi di daerah setempat)

Malaria, Diare dan Demam Berdarah merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas secara global serta mengakibatkan kematian lebih banyak pada anak usia dini setelah periode neonatal dibandingkan etiologi lain.

Satu dari sembilan kematian pada anak disebabkan oleh malaria, diare dan demam berdarah, menjadikannya sebagai penyebab kematian pada anak usia di bawah lima tahun terbanyak kedua di dunia. Secara global dari semua penyebab kematian pada anak, malaria, diare dan demam berdarah menyumbang 15% atau 1.600 kematian setiap harinya pada anak usia di bawah lima tahun. Di Afrika dan Asia Selatan, empat per lima dari semua kematian pada balita (82%) disebabkan oleh diare. Setengah dari total kematian pada anak usia di bawah lima tahun di seluruh dunia yang disebabkan oleh diare terjadi di lima negara miskin yaitu India, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Pakistan, dan Ethiopia.

Diare adalah masalah kesehatan yang penting di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Secara global ada sekitar 1,7 miliar kejadian diare pada anak-anak setiap tahunnya. Menurut WHO, sebanyak 842.000 kematian di negara berpenghasilan rendah dan menengah disebabkan oleh air, kebersihan, dan sanitasi yang tidak memadai. Jumlah ini mewakili 58% dari total kematian yang disebabkan oleh diare dan 1,5% dari

total beban penyakit. Terpisah dari faktor risiko individu, 520.000 kematian disebabkan oleh air minum yang tidak aman dan tidak mencukupi, 297.000 kematian disebabkan oleh cuci tangan yang tidak adekuat, dan 280.000 kematian disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Selain sosial ekonomi dan usia, faktor risiko penting terjadinya diare di negara berpenghasilan rendah adalah air minum yang tidak memadai, kebersihan, dan sanitasi yang buruk.

Laporan UNICEF & WHO tentang sanitasi dan air minum di seluruh dunia menyatakan lebih dari 663 juta orang masih kekurangan akses untuk air minum yang aman dan 159 juta orang bergantung pada air permukaan untuk konsumsi air mereka. Di beberapa negara di dunia, kesenjangan regional dalam akses air masih sangat besar. Sekitar 79% orang bergantung pada air minum yang kurang layak dan 93% tergantung pada air permukaan terutama di daerah pedesaan.

Dalam situasi ini dengan kualitas air yang buruk dan paparan risiko tinggi maka penyakit seperti diare menjadi perhatian utama. Menurut data statistik Indonesia diketahui bahwa Indonesia sangat mencerminkan pola global ini. Sebanyak 18% rumah tangga Indonesia mengandalkan air minum mereka dari sumber air permukaan seperti mata air, sungai, telaga, dan danau yang rentan terhadap kontaminasi.

Tabel 3.16
Prevalensi Malaria, Diare, DB per 1000 penduduk (%) Kota Palu

No	Uraian	Formula =(a/b)* 100%	Satuan	Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**								
	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun		orang	637	401	398	599	309	126
	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama		orang	637	401	398	599	309	126
	(%)			**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2	**Penderita Diare Yang Ditangani**								
	Jumlah penderita penderita diare yang dating dan dilayani disaran kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam 1 tahun		orang	7.467	6.644	8.713	4.958	3.139	-
	Jumlah penderita penderita diare pada suatu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare X jumlah penduduk)		orang	7.467	9.746	9.900	9.980	10.027	10.038

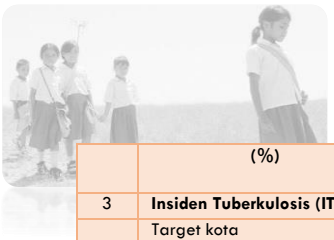

	(%)			100	100	100	100	100	-
3	**Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk**								
	Target kota		orang	-	-	-1.477	1.489	1.593	1.595
	Capaian kota		orang	760	871	738	761	670	431
4	**Kejadian Malaria per 1.000 penduduk**								
	Target kota		orang	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	Capaian kota		orang	0,006	0,003	0,011	0,000	0,000	0,000

8. Prevalensi HIV/AIDS (%)

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus HIV dapat masuk ke dalam sel darah putih dan merusaknya, sehingga jumlah sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi akan menurun. Sebagai akibat dari kondisi tersebut, sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dan penderitanya mudah terkena berbagai penyakit. Kondisi inilah yang disebut sebagai Acquired Immuno Deficiency Syndrom (AIDS). Jadi, AIDS adalah kumpulan penyakit (sindrom) yang muncul akibat penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Melansir Buku Bahan Ajar AIDS pada Asuhan Kebidanan (2015) oleh Yulrina Ardhiyanti, SKM., M.Kes., dkk., ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh, maka semua penyakit dapat masuk ke dalam tubuh dengan mudah (infeksi oportunistik). Oleh karena sistem kekebalan tubuh penderita AIDS menjadi lemah, maka penyakit yang tadinya tidak berbahaya bisa menjadi sangatberbahaya.

Tabel 3.17
Prevalensi HIV/AIDS Kota Palu

Uraian	Formula	Satuan	Tahun					
			2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari otal populasi	**=(a/b)*100%**	**%**	**0,026**	**0,035**	**0,032**	**0,031**	**0,033**	**0,000**
Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah pada kurun waktu tertentu		orang	94	127	116	114	124	0
Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama		orang	360,171	361,343	366,650	359,614	371,365	371,795

Sumber BPS 2021

9. Prevalensi Balita Kurang Gizi (%)

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

a. rendah = di bawah 10 %
b. sedang = 10-19 %
c. tinggi = 20-29 %
d. sangat tinggi = 30 %

Perkembangan persentase balita gizi buruk Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup berfluktuasi. Gambaran ringkas persentase balita gizi buruk di Kota Palu Tahun 2016 – 2020 ditunjukkan dalam grafik berikut.

Grafik 3.29
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palu Tahun 2016-2020

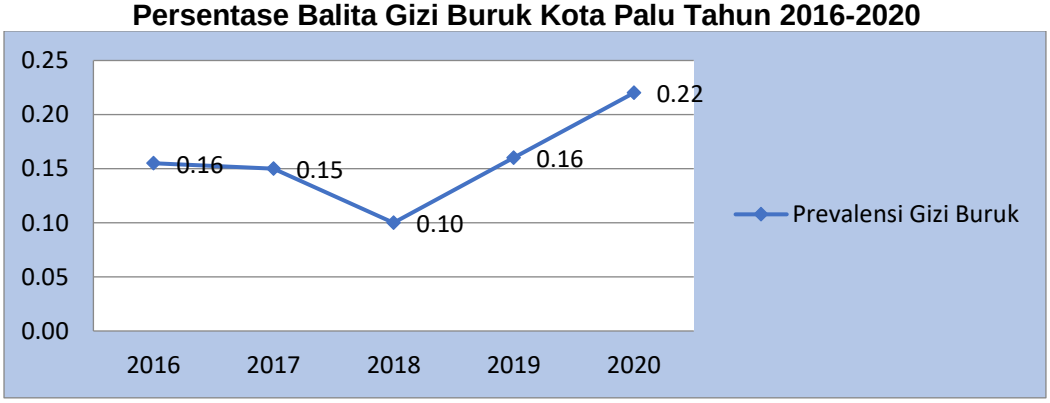

Sumber: Dinkes Kota Palu Tahun 2020

Pada Tahun 2016 persentase balita gizi buruk Kota Palu mencapai 0,16% menurun menjadi 0,15% pada Tahun 2017. Tahun 2018 kembali menurun mencapai 0,10%. Penurunan persentase gizi buruk ini disebabkan oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi Kota Palu tahun 2016 mencapai 5,50 %, tahun 2017 mencapai 5,53 % dan tahun 2018 mencapai 5,00 %,

tahun 2019 mencapai 5,79 % serta tahun 2020 mencapai (-4,54) %. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga membawa dampak kepada kondisi kesehatan keluarga.

Tahun 2019 dan 2020 persentase terus meningkat dengan kenaikan masing-masing mencapai 0,16 % dan 0,22 %. Kenaikan persentase ini disebabkan faktor kebencanaan yang terjadi di akhir tahun 2018 dan Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Ini sebagai faktor utama naiknya persentase gizi buruk pada periode tersebut. Karena gizi buruk berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Melihat tren perkembangan tersebut Kota Palu masih tergolong kategori rendah.

10. Prevalensi Stunting (%)

Pernah dengar stunting sebagian orang mungkin asing dengan istilah tersebut, stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, Di Indonesia, kasus stunting masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (growth faltering) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun,

Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (growth faltering) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan otak, rendahnya kemampuan kognitif yang akan mempengaruhi prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan,

Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan dimasyarakat. Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) mengatakan "Ajarkan ke anak-anak kita, kalau nanti bila mereka atau istri mereka mengandung, harus hamil yang direncanakan." "Berikan kasih sayang, makan makanan

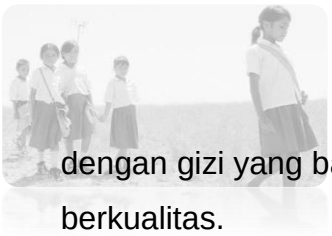

dengan gizi yang baik agar anaknya tidak stunting, jadi anak yang cerdas dan berkualitas.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada 2017. Angkanya mencapai 36,4 persen. Namun, pada 2018, menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), angkanya terus menurun hingga 23,6 persen, Dari data yang sama, diketahui pula stunting pada balita di Indonesia pun turun menjadi 30,8 persen. Adapun pada Riskesdas 2013, stunting balita mencapai 37,2 persen, Perlu diketahui bahwa riskesdas memang dirilis setiap lima tahun sekali.

Sedangkan stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang antara lain disebabkan gizi buruk, Anak dikatakan stunting ketika pertumbuhan tinggi badannya tak sesuai grafik pertumbuhan standar dunia. Atau dalam bahasa yang lebih umum adalah kuntet.

Dari Riskesdas 2018 itu, sangat pendek mencapai 6,7 Penurunan angka stunting di Indonesia adalah kabar baik, tapi belum berarti sudah bisa membuat tenang. Maklum, bila merujuk pada standar WHO, batas maksimalnya adalah 20 persen atau seperlima dari jumlah total anak balita. "Stunting diyakini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan. Situasi ini jika tidak diatasi segera maka dapat dipastikan Indonesia tidak mampu bersaing menghadapi tantangan global pada masa depan," kata seorang juru bicara Konsepsi-NTB, Dr Muh Taqiuddin,

Stunting berkembang dalam jangka panjang karena kombinasi dari beberapa atau semua faktorfaktor berikut:

1) Kurang gizi kronis dalam waktu lama
2) Retardasi pertumbuhan intrauterine
3) Tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori
4) Perubahan hormon yang dipicu oleh stres
5) Sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak
6) Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan

7) Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal (setelah melahirkan)
8) Kurangnya akses air bersih dan sanitasi
9) Masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Perkembangan stunting adalah proses yang lambat, kumulatif dan tidak berarti bahwa asupan makanan saat ini tidak memadai,

Kegagalan pertumbuhan mungkin telah terjadi di masa lalu seorang.Selain itu, efek jangka panjang yang disebabkan oleh stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, acap kali dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.

Gejala Stunting 1). Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya 2). Proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda/kecil untuk usianya 3). Berat badan rendah untuk anak seusianya 4). Pertumbuhan tulang tertunda.

Mencegah Stunting Mencegah Stunting akibat asupan gizi yang kurang dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan gizi yang sesuai, Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jalan yang paling tepat agar kebutuhan gizi dapat tercukupi dengan baik. Pencegahan Stunting bisa dilakukan dengan cara-cara berikut ini :

- Berikan anak gizi seimbang agar tubuhnya bisa bertambah tinggi dan untuk perkembangan otak anak.
- Melakukan aktivitas fisik, minimal olah raga 30 menit setiap hari.
- Jangan biarkan anak tidur larut malam agar anak mendapat istirahat yang cukup.

Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1.000 hari pertama anak. Hitungan 1.000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun, Jika pada rentang waktu ini, gizi tidak dicukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka pendek dan efek jangka panjang Gejala stunting jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran, Sedangkan gejala jangka panjang meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi,

dan osteoporosis. Oleh karena itu, upaya pencegahan baiknya dilakukan sedini mungkin. Pada usia 1.000 hari pertama kehidupan, asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan dikonsumsi oleh ibu hamil,

Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dirinya, asupan nutrisi yang baik juga dibutuhkan jabang bayi yang ada dalam kandungannya, , pada saat bayi telah lahir, penelitian untuk mencegah Stunting menunjukkan bahwa, konsumsi protein sangat mempengaruhi pertambahan tinggi dan berat badan anak di atas 6 bulan, Anak yang mendapat asupan protein 15 persen dari total asupan kalori yang dibutuhkan terbukti memiliki badan lebih tinggi dibanding anak dengan asupan protein 7,5 persen dari total asupan kalori Anak usia 6 sampai 12 bulan dianjurkan mengonsumsi protein harian sebanyak 1,2 g/kg berat badan.

Sementara anak usia 1–3 tahun membutuhkan protein harian sebesar 1,05 g/kg berat badan, Jadi, pastikan si kecil mendapat asupan protein yang cukup sejak ia pertama kali mencicipi, "Ternyata hormon pertumbuhan itu kerjanya pukul 00.00 sampai 01.00 malam. Dia (hormon) bekerja kalau tidur nyenyak. Dengan cara itu anak bisa tinggi,"

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, sekitar 37,2 persen anak Indonesia di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Kementerian Kesehatan dengan dukungan Millennium Challenge AccountIndonesia (MCA-I), melalui Program Hibah Compact Millennium Challenge Corporation (MCC) melakukan Kampanye Gizi Nasional Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM).

Salah satu intervensi dalam program PKGM adalah tentang perubahan prilaku masyarakat, yang dilakukan dalam program Kampanye Gizi Nasional (KGN). Program KGN di wilayah OKI dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, seperti melakukan aktifasi posyandu-posyandu dan pemberian pengetahuan tentang gizi anak, mulai dari makanan apa saja yang boleh untuk bayi di atas enam bulan, bagaimana tekstur yang baik, berapa banyak yang harus diberikan, termasuk pengetahuan pentingnya ASI Eklusif.

Banyaknya anak stunting akan memengaruhi kualitas generasi muda Indonesia di masa mendatang, maka dari itu orang tua wajib memperhatikan tumbuh kembang anak sebelum terlambat.

Tabel 3.18
Prevalensi Stunting Kota Palu

No	Uraian	Formula	Satuan	Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun/balita								
	a. Target Nasional		%	≤20	≤20	≤20	≤20	24.30	21.16
	b. Capaian Nasional		%	Tidak ada data					
	c. Target Kota		%	≤20	≤20	≤20	≤20	24.10	21.10
	d. Capaian Kota		%	Tidak ada data		30.51	17.90	14.04	30.51

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

3.4.3 Bidang perumahan dan kawasan permukiman

Salah satu wujud kota dicerminkan dari ketersediaan infrastruktur pendukung layanan kepada masyarakat. Ketersediaan jalan, jembatan, transportasi jaringan irigasi, air bersih, penerangan jalan serta beberapa infrastruktur lainnya menjadikan salah satu tolak ukur layanan pemerintah kepada masyarakat, kondisi pasca bencana gempa bumi dan tsunami serta likuifaksi tanggal 28 September 2018 membuat infrastruktur yang pernah dimiliki Kota Palu sebagian besar mengalami kerusakan, olehnya kondisi ini membutuhkan penanganan yang sangat serius kedepannya.

Kondisi infrastruktur Kota Palu ini masih lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah ketersediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi sebuah keharusan, mengingat Palu menjadi cerminan Provinsi Sulawesi Tengah. Beberapa infrastruktur yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan salah satunya drainase, kondisi drainase yang kurang memadai dan tidak terkelola dengan baik, mengakibatkan banjir ketika hujan turun. Di beberapa ruas jalan sering terjadi genangan air akibat meluapnya air dari drainase yang tidak mampu menampung air ketika hujan.

Pengembangan infrastruktur berupa bangunan pemerintah dan sarana publik akan diarahkan untuk berorentasi pada ornamen-ornamen budaya lokal yang dapat mencirikan identitas Kota Palu. Infrastruktur yang akan dikembangkan diharapkan akan dapat mendukung pariwisata yang berbasis

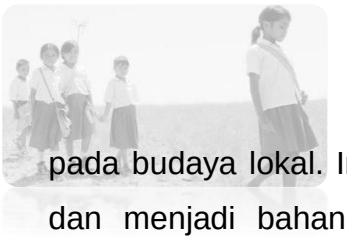

pada budaya lokal. Infrastuktur publik akan mencerminkan maskot Kota Palu dan menjadi bahan promosi pariwisata budaya Kota Palu. Ketersediaan infrastruktur kota dengan kualitas baik akan mencerminkan budaya kehidupan masyarakatnya, demikian pula sebaliknya Indikator Infrastruktur Dasar.

1. Persentase Rumah Layak Huni (%)

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Berikut rasio rumah layak huni di Kota Palu Tahun 2019 tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.19
Rasio Rumah Layak Huni di Kota Palu Tahun 2019

Uraian	Jumlah dan Persentase
Jumlah rumah layak huni	64.642 unit
Jumlah penduduk	370.376 jiwa
Rasio Rumah Layak Huni	17,45 %

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel diatas memperlihatkan jumlah rumah layak huni di Kota Palu Tahun 2019 sebanyak 64.642 unit rumah, dan jumlah penduduk pada tahun yang sama sebesar 370.376 jiwa. Berdasarkan hasil dari perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk Kota Palu pada Tahun 2019, maka didapatkan rasio sebesar 0,18 unit per jiwa penduduk Kota Palu.

Cakupan rumah layak huni adalah persentase dari perbandingan jumlah seluruh rumah layak huni terhadap jumlah seluruh rumah pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Cakupan rumah layak huni di Kota Palu Tahun 2019 tertera dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20
Cakupan Rumah Layak Huni di Kota Palu Tahun 2019

Kecamatan	Jumlah Rumah	RTLH	RLH
Palu Barat	9.689	12,73	87,27
Tatanga	11.392	8,12	91,88
Ulujadi	6.352	3,05	96,95
Palu Selatan	15.949	11,16	88,84

Kecamatan	Jumlah Rumah	RTLH	RLH
Palu Timur	6.330	1,22	98,78
Mantikulore	14.465	11,64	88,36
Palu Utara	4.814	25,07	74,93
Tawaeli	3.968	30,65	69,35
Kota Palu	**72.959**	**11,40**	**88,60**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel diatas memperlihatkan bahwa cakupan rumah layak huni di Kota Palu Tahun 2019 sebesar 88,60 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 11,40 % atau sebanyak 8.317 unit rumah yang tidak layak huni di Kota Palu. Persentase rumah layak huni terbesar berada pada wilayah Kecamatan Palu Timur sebesar 98,78 % atau sebanyak 6.253 unit rumah, dan Persentase rumah tidak layak huni terbesar berada pada wilayah Kecamatan Tawaeli sebesar 30,65 % atau sebanyak 1.190 unit rumah.

Jika ditinjau dari jumlah rumah layak huni dan rumah tidak layak huni, maka Kecamatan Palu Selatan adalah kecamatan yang memiliki jumlah rumah layak huni yang terbanyak sebesar 14.169 unit, dan Kecamatan Palu Barat adalah kecamatan yang memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbanyak sebesar 1.233 unit.

2. Persentase lingkungan permukiman yang tertata (%)

Pengertian pemukiman sering disamakan dengan makna perumahan dan atau sebaliknya. Pemukiman berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata human settlement yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungannya. Perumahan menitiberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu *house*s dan *land settlement*. Sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (*human*).

Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakekatnya saling melengkapi. Dimana permukiman adalah susunan dan penyebaran

bangunan (termasuk antara lain rumah-rumah, gedung-gedung, kantor, pasar dan sebagainya). Memperhatikan bangunan-bangunan, jalan-jalan dan pekarangan-pekarangan yang menjadi salah satu sumber penghidupan penduduk.

Sedangkan pengertian permukiman padat adalah kawasan permukiman yang dihuni terlalu banyak penduduk dan terjadi ketidakseimbangan antara lahan dengan bangunan yang ada. Permukiman padat menjadikan kawasan permukiman tersebut cenderung terlihat kurang tertata pola perkembangannya.

3. Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Kondisi relasi sosial dan kekerabatan relatif tinggi sebagai perwujudan keberadaan komunitasnya (Rindarjono, 2012). Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk menetapkan lokasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompokkan kedalam kriteria:

1). Vitalitas Non Ekonomi

Kriteria vitalitas non ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi.

2). Vitalitas Ekonomi Kawasan

Kriteria vitalitas ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan *city without slum* sebagaimana menjadi komitmen dalam Hari Habitat Internasional. Oleh karenanya kriteria ini akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga perubah penilai untuk kriteria ini meliputi: 1). Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis, 2). Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat-pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi lainnya, dan 3). Jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan permukiman kumuh.

3). Status Kepemilikan Tanah

Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaanya. Kemudahan pengurusan masalah status tanah dapat menjadikan jaminan terhadap ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan.

4). Keadaan Prasarana dan Sarana

Kriteria kondisi prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas; Kondisi jalan, Drainase. Air bersih dan Air limbah.

5). Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota

Komitmen pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota/) dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal ini mempunyai indikasi bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di daerahnya.

6). Prioritas Penanganan Kegiatan

Penilaian kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria.

4. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ sistem terpusat. Secara umum, tujuan sanitasi yaitu untuk menjamin kebersihan lingkungan manusia sehingga terwujud suatu kondisi yang sesuai dengan persyarakat kesehatan serta untuk mengembalikan, memperbaiki, dan mempertahankan kesehatan manusia.

Grafik 3.30
Analisi Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (&)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

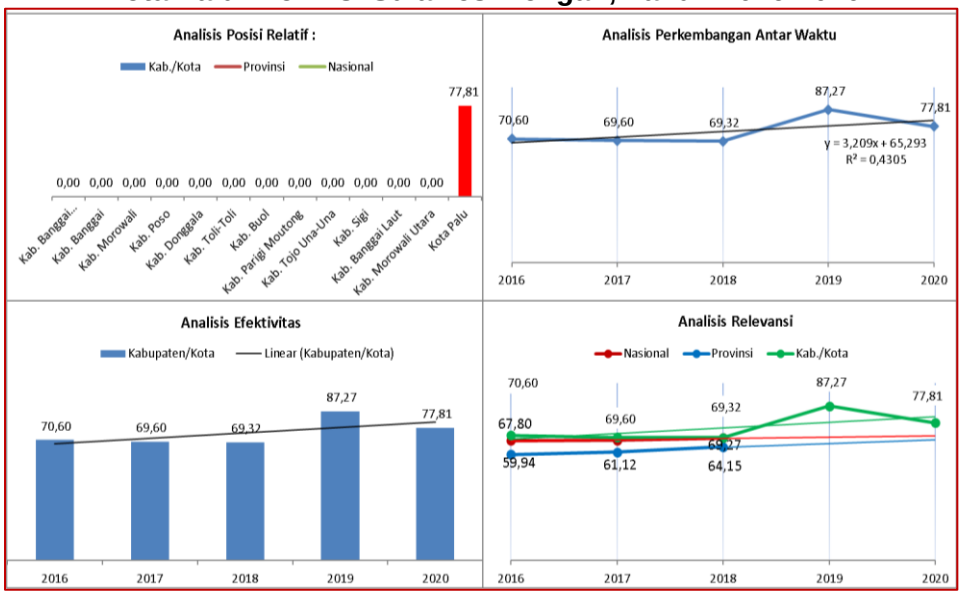

Sumber :BPS (Susenas) 2020

Pada grafik 3.30 menggambarkan data analisis posisi relatif proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kota Palu dengan kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Tengah, kota Palu berada pada capaian 78 %, artinya masih ada penduduk yang menggunakan sanitasi yang tidak layak 22 %. Proporsi penduduk yang menggunakan sanitasi yang layak dilihat perkembangan antar waktu rentang tahun 2016-2020 proporsi rumah tangga dengan sanitasi yang layak capaiannya fluktuatif. Sementara jika dilihat analisis efektifitasnya terlihat capaian meningkat walaupun kenaikannya melandai. Berdasarkan analisis relevansi proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kota Palu dengan nasional dan provinsi, posisi Kota Palu masih berada diatas capaian nasional maupun provinsi.

Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Pada saat ini diperkirakan baru 6,8 persen rumah tangga yang memenuhi keempat kriteria tersebut.

Fungsi terpenting dari sistem penyediaan air bersih adalah pencegahan penyebaran penyakit melalui air. Tujuan sistem penyediaan air bersih adalah agar dapat menyalurkan/mensuplai air bersih kepada konsumen dalam jumlah yang cukup. Bagian terpenting dalam sistem penyediaan air bersih adalah sumber air baku. Manusia memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air. Namun, tak semua air minum layak konsumsi. Untuk menjamin keamanan untuk dikonsumsi, air harus bersih dan memenuhi syarat kualitas air yang sehat. Air bersih diartikan sebagai air yang digunakan dalam rumah tangga untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi, buang hajat, mencuci baju, minum, dan memasak. Khusus untuk air minum, kualitasnya harus memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 dan telah lulus uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu selama Tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan yang signifikan tiap tahunnya. Pada Tahun 2016 persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 99,77% menjadi 97,77% di Tahun 2017. Tahun 2018 persentase rumah tangga pengguna air bersih kembali turun sebesar 0,47 % dari tahun sebelumnya mencapai 97,77 % hingga mencapai 96,95 % pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 persentase rumah tangga pengguna air bersih naik signifikan sebesar 2,26 % hingga mencapai 99,21 %. dari total Berikut gambaran persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu Tahun 2016-2020 tertera dalam gambar 2.28 di bawah ini.

Grafik 3.31
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kota Palu Tahun 2016 – 2020

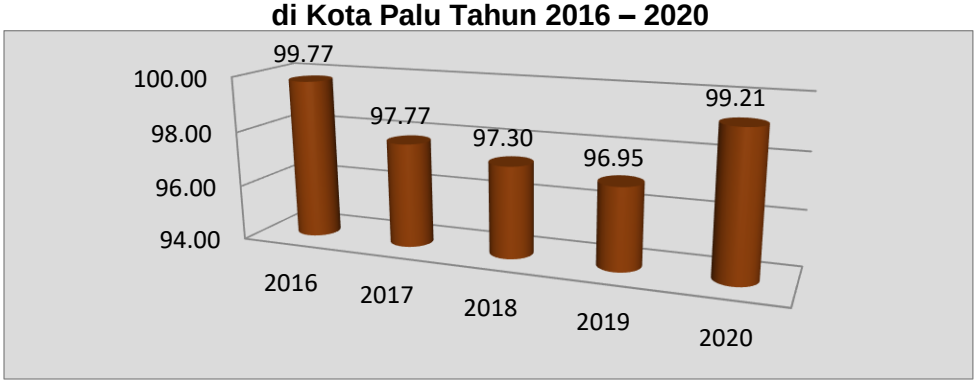

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Data analisis identifikasi masalah proporsi rumah tangga dengan air bersih yang layak di Kota Palu, dapat digambarkan pada grafik berikut;

Grafik 3.32
Analisa Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kota Palu Tahun 2016-2020

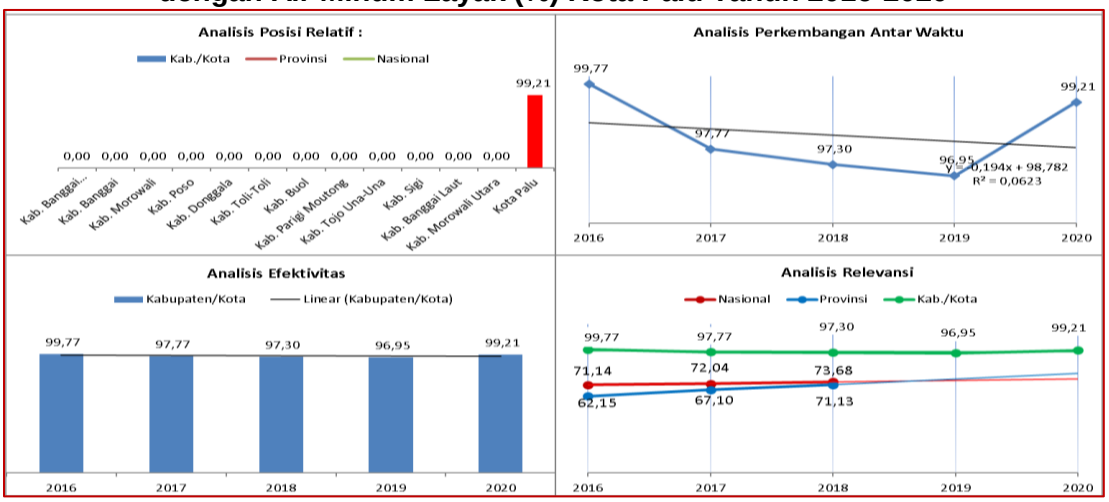

Sumber :BPS (Susenas) 2020

Pada grafik 3.32 menggambarkan data analisis posisi relatif proporsi rumah tangga dengan Air Minum layak di Kota Palu dengan kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Tengah, kota Palu berada pada capaian 99 %, artinya penduduk yang menggunakan air minum yang tidak layak sudah tidak banyak. Proporsi penduduk yang menggunakan air minum yang layak dilihat perkembangan antar waktu rentang tahun 2016-2020 masih ada 0,19 % dengan air minum yang tidak layak. Sementara jika dilihat analisis efektifitasnya terlihat pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan, hal ini mungkin disebabkan bencana yang terjadi pada tahun tersebut, sehingga sarana sumber air minum yang layak banyak yang terdampak. Bila dibandingkan berdasarkan analisis relevansi proporsi rumah tangga dengan Air Minum layak di Kota Palu dengan nasional dan provinsi, posisi Kota Palu masih berada diatas capaian nasional maupun provinsi.

5. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)

Kemiskinan tidak hanya sekedar kondisi kesejahteraan seseorang yang memiliki pendapatan rendah, tetapi juga merupakan suatu kondisi deprivasi

kapabilitas dasar seseorang untuk memiliki kebebasan dalam mencapai nilai-nilai yang diinginkan dalam kehidupan (Sen 2000). Pemenuhan hak-hak mendasar seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup layak memang dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang dimasa yang akan datang. Pengukuran terkait kemiskinan tersebut dikenal dengan Indeks Kemiskinan Multi Dimensi (IKM).

Secara umum, dua dari empat indikator kemiskinan di Indonesia yang masih relatif tinggi berkaitan dengan energi. Berdasarkan pada nilai indikator IKM, rumah tangga miskin memiliki persoalan tertinggi terkait elektrifikasi yang berasal dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN)/non-PLN. Elektrifikasi yang meningkat memiliki manfaat langsung dari peningkatan jam belajar anak-anak (Barkat et al. 2002; World Bank 2002; Unnayan Shamannay 1996); peningkatan aktivitas masyarakat atau penerangan jalan, disisi lain, menanamkan rasa aman, yang merupakan manfaat tidak langsung.

Disisi kegiatan produktif, memungkinkan kegiatan produksi dilakukan dimalam hari, yang berkaitan dengan pekerjaan yang memerlukan cahaya. Penelitian tentang peranan energi listrik di Indonesia relatif terbatas. Penelitian yang ada diantaranya melakukan pemetaan kemiskinan energi, dengan metode Multidimensional Energy Poverty Index (MEPI) untuk wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016.

Penelitian lainnya tentang dampak infrastruktur listrik terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan analisis panel simultan. Penelitian yang telah dilakukan tidak secara spesifik membahas dampak energi listrik terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji distribusi konsumsi elektrifikasi antar kelompok rumah tangga dan tingkat kemiskinan rumah tangga; determinan akses listrik berdasarkan karakteristik wilayah (desa/kota) dan karakteristik rumah tangga dengan model probit; determinan kemiskinan berdasarkan karakteristik wilayah dan karakteristik rumah tangga dengan model probit di Indonesia. Data yang

digunakan merupakan data Susenas Maret 2018, dengan observasi yang digunakan sebanyak 282 227 rumah tangga.

Nilai koefisien Gini konsumsi listrik menunjukkan perdesaan di Indonesia memiliki ketimpangan konsumsi antarkelompok rumah tangga relatif lebih timpang dibandingkan di perkotaan. Koefisien Gini konsumsi listrik terendah berada di Sulawesi Utara, berdasarkan status wilayah perkotaan koefisien Gini tertinggi berada di Kepulauan Bangka Belitung dan perdesaan berada di Kalimantan Tengah. Berdasarkan pengelompokkan pulau, ketimpangan konsumsi listrik antarkelompok rumah tangga di Pulau Jawa, lebih rendah dibandingkan pulau-pulau lainnya, terutama Sumatera.

Berdasarkan model yang digunakan terlihat bahwa variabel yang meningkatkan peluang rumah tangga untuk mendapatkan akses listrik PLN adalah umur kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, lama pendidikan kepala rumah tangga dan jenis kelamin kepala rumah tangga. Variabel yang menyebabkan rendahnya peluang rumah tangga untuk mendapatkan akses listrik PLN adalah status kepemilikan rumah milik sendiri dan status wilayah rumah tangga di perdesaan.

Variabel yang memengaruhi rendahnya peluang kemiskinan bagi rumah tangga, berdasarkan model, adalah jumlah anggota rumah tangga, lama pendidikan kepala rumah tangga, status kepemilikan rumah milik sendiri, dan adanya akses listrik. Variabel yang meningkatkan peluang kemiskinan rumah tangga adalah umur kepala rumah tangga, kepala rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan, dan rumah tangga yang berada di perdesaan. Elektrifikasi sangat penting untuk percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia.

Rumah tangga yang memiliki akses listrik peluangnya lebih rendah 0.0854 persen poin untuk menjadi rumah tangga miskin. Keterkaitan antara elektrifikasi dan kemiskinan terlihat di Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, sebagian besar berada di Kawasan Timur Indonesia. Rendahnya akses listrik di wilayah tersebut diduga memengaruhi tingginya persentase rumah tangga miskin. Kebijakan terkait elektrifikasi perlu penajaman agar minat investor untuk penyediaan

infrastruktur listrik meningkat. Peran serta swasta dan pemerintah juga harus terus didorong lewat program corporate social responsibility (CSR) yang menyentuh wilayah dengan rasio elektrifikasi masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif tinggi.

3.4.4 Bidang pembangunan kelurahan

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kelurahan yang baik

Jumlah kantor pemerintah kelurahan di Kota Palu sebanyak 46 unit. Keseluruhan kantor ini difungsikan sebagai kantor pelayanan utama masyarakat dengan kondisi bangunan layak pakai. Meskipun demikian, sebagian kantor kelurahan yang ada merupakan milik pemerintah Kota Palu dan sebagiannya lagi masih dalam status sewa/kontrak. Setiap kantor kelurahan memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 1 Unit, begitu pula dengan kelompok binaan PKK aktif sebanyak 1 Unit.

Tabel 3.21

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kondisi Kantor	Jumlah LPM	Jumlah PKK
1	Palu Barat	6	Baik	6	6
2	Tatanga	6	Baik	6	6
3	Ulujadi	6	Baik	6	6
4	Palu Selatan	5	Baik	5	5
5	Palu Timur	5	Baik	5	5
6	Mantikulore	7	Baik	7	7
7	Palu Utara	5	Baik	5	5
8	Tawaeli	5	Baik	5	5
	Jumlah	**46**	**-**	**46**	**46**

2. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Hingga Tahun 2021 Pemerintah Kota Palu belum pernah melakukan penilaian terhadap kinerja LPM yang ada di setiap kelurahan, sehingga untuk pengukuran LPM berprestasi tidak terpenuhi. Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat di Kota Palu diukur melalui tingkat keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam membantu pelaksanaan sampai dengan penyelesaian kegiatan program dan besaran/luas lahan yang digunakan pada lokasi sasaran program tanpa ganti rugi. Pasca program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, selalu dibarengi dengan pembentukan Tim Operasional dan Pemeliharaan yang berfungsi sebagai penjamin hasil konstruksi yang dibangun sesuai dengan umur rencana.

Tabel 3.22
Cakupan Kelompok Binaan LPM

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah LPM
1	Palu Barat	6	6
2	Tatanga	6	6
3	Ulujadi	6	6
4	Palu Selatan	5	5
5	Palu Timur	5	5
6	Mantikulore	7	7
7	Palu Utara	5	5
8	Tawaeli	5	5
	Jumlah	**46**	**46**

3. Persentase PKK aktif

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah proses yang berkaitan dengan upaya mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang dikenal di Indonesia dan Sains Rumah Tangga yang dikenal di Malaysia merupakan suatu bidang keilmuan yang sama yang memiliki konsep bahwa ilmu ini

untuk meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki mutu kehidupan, dan untuk kesejahteraan manusia. PKK adalah sarana relevan guna mengantarkan masyarakat membina kehidupan keluarga yang sejahtera lahir maupun bathin . Mengingat manusia sebagai makhluk sosial, pada hakekatnya pelajaran PKK sangatlah penting bagi kita, karena menyangkut tata cara hidup bermasyarakat dan bernegara. Perkembangan peran aktif PKK Kota Palu, sebagaimana tabel beriku;

Tabel 3.23
Persentase PKK aktif Kota Palu

No	Uraian	Realisasi Kinerja PKK					Tingkat Kinerja
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	95%	100%	95%

4. Persentase Posyandu aktif

Jumlah Posyandu sangat ditentukan oleh jumlah balita di suatu wilayah. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah antara 1 unit posyandu bagi 75–100 balita. Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu. Perkembangan rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2020 Rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Tahun 2020 sebesar 5,25 per 1.000 balita. Ini menunjukkan bahwa rasio ketersediaan Posyandu di Kota Palu adalah 1 : 190 balita yang berarti Kota Palu belum memenuhi rasio ketersediaan posyandu. Kebutuhan posyandu masih kurang dari kondisi yang ideal.

Tabel 3.24
Rasio Posyandu Per 1.000 Balita Kota Palu Per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Posyandu	Balita	Ratio
Palu Barat	28	4.514	6,20
Tatanga	24	5.476	4,38
Ulujadi	29	4.021	7,21
Palu Selatan	27	7.096	3,80
Palu Timur	32	3.782	8,46
Mantikolore	38	7.654	4,96
Palu Utara	21	7.587	2,76

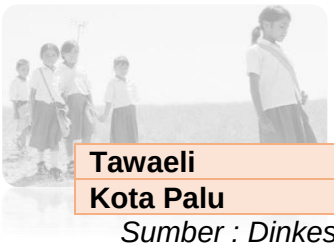

Tawaeli	24	2.332	10,29
Kota Palu	**223**	**42.462**	**5,25**

Sumber : Dinkes Kota Palu dan BPS Kota Palu Tahun 2021

5. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

Sejak Tahun 2015, sebanyak 43 Kelurahan dilakukan pembentukan Lembaga swadaya masyarakat yang difasilitasi oleh Program-program pemberdayaan masyarakat, antara lain P2KP dan Program NUSSP. Pembentukan ini dilakukan dengan pemilihan sederhana yang melibatkan paling sedikit 30% keterwakilan masyarakat. Pada Tahun 2016 dibentuk kembali Lembaga swadaya masyarakat menjadi total sebanyak 46 unit. Lembaga ini lebih dikenal dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

6. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kota Palu selalu dilaksanakan 100% oleh masyarakat setempat yang dikoordinir oleh Kelompok Pemelihara. Pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan maka dilakukan serah terima dari pelaksana kegiatan kepada masyarakat dan masyarakat diwajibkan membentuk Tim pemelihara sehingga apabila suatu saat ada kerusakan maka menjadi kewajiban masyarakat dan anggota tim pemelihara mempunyai kewajiban mengkoordinir iuran pemeliharaan serta proses pemeliharaannya.

Program-program pemberdayaan masyarakat antara lain P2KP selanjutnya menjadi PNPM Perkotaan dan Saat ini menjadi Program KOTAKU, selain itu ada pula program daerah yang dilaksanakan tahun sebelumnya yakni PDPM, dimana program ini banyak membangun infrastruktur lingkungan permukiman guna menjawab kebutuhan masyarakat, pasca dibangun sarana prasarana sesuai kebutuhan dilingkungan masing-masing, masyarakat bertanggungjawab dalam pemeliharaan pasca pembangunan.

3.4.5 Bidang Ketenagakerjaan

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)

Sementara terkategori pengangguran didominasi lulusan SMA. Selengkapnya terlihat pada berikut :

Tabel 3.25
Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2017– 2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
I. Angkatan Kerja	190.455	192.243	193.860	202.467
1. Bekerja/Working	177.959	181.079	181.523	185.507
2.Pengangguran/Unemployment	12.496	11.164	12.337	16.960
II. Bukan Angkatan Kerja	96.876	99.837	100.103	102.166
Total	**287.331**	**292.080**	**293.963**	**304.633**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,28	65,81	65,95	66,46
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,56	5,81	6,36	8,38
Rasio Penduduk yang bekerja	**93,44**	**94,19**	**93,64**	**91,62**

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

2. Angkatan Kerja (Jiwa)

Berikut dapat dilihat grafik gambaran analisis masalah angkatan kerja (jiwa) Kota Palu tahun 2016-2020

Grafik 3.33
Analisis Identifikasi Masalah Angkatan Kerja (jiwa)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

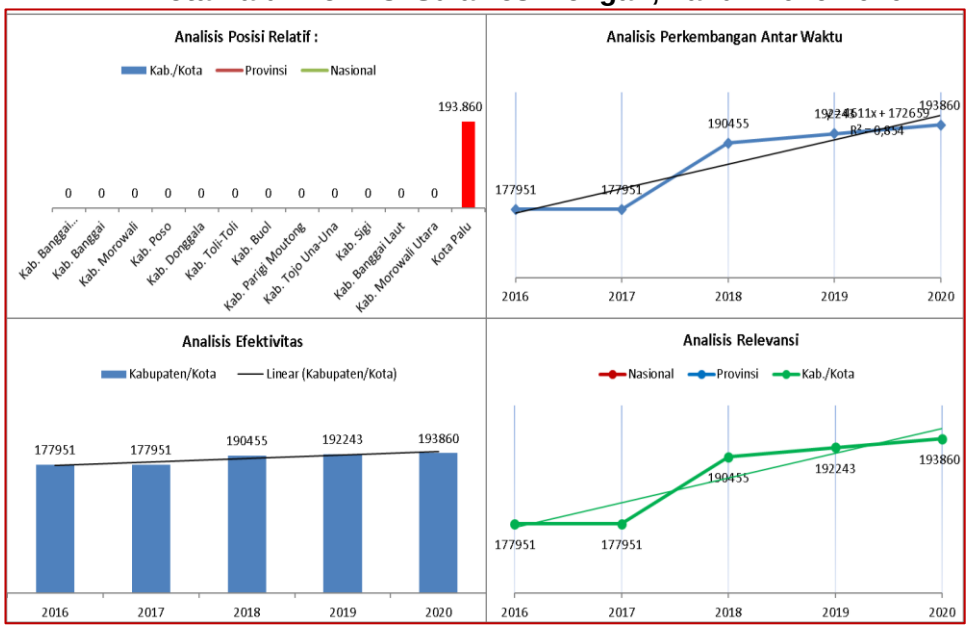

Sumber : BPS (Susenas) 2020

Rentang waktu tahun 2016-2020 posisi relatif masalah angkatan kerja Kota Palu dengan beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 193.860 jiwa grafik 3.7 diatas, dari tahun 2016 mengalami peningkatan yang significan sekitar 15.909 jiwa. Analisis perkembangan antar waktu dari tahun 2016-2020 menunjukan perkembangan yang terus meningkat dengan rata-rata peningkatan mencapai 8,21 %.

Data analisis efektifitas lenier antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat namun melandai. Bila dilihat data analisis relevansi periode tahun 2016-2020 menunjukan peningkatan yang cukup significan terjadi 2018 hingga tahun 2020, mungkin disebabkan faktor bencana yang terjadi di Kota Palu, yang berdampak banyak penduduk yang kehilangan lapangan kerja.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka partisipasi angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran). Angka partisipasi angkatan kerja Kota Palu Tahun 2017

terus mengalami peningkatan sampai mencapai angka 202.467 jiwa dengan rasio penduduk yang bekerja sebesar 91,62 % pada Tahun 2020. Rendahnya rasio penduduk yang bekerja disebabkan oleh naiknya angka atau jumlah pengangguran mencapai 16.960 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,38 % pada Tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar 6,36 %.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palu selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 65,81 % menjadi 66,46 % pada Tahun 2020. Naiknya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja ini disebabkan oleh meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja mencapai 202.467 jiwa yang dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja mencapai 185.507 jiwa pada Tahun 2020. Gambaran angka partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka, serta rasio penduduk yang bekerja di Kota Palu Tahun 2017-2020 diuraikan dalam Tabel sebagai berikut, Jumlah angkatan kerja Tahun 2020 mencapai 202.467 orang, di mana jumlah yang bekerja sebesar 185.507 orang dan pengangguran sebasar 16.960 orang. Berikut tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Palu rentang waktu tahun 2017-2020 dalam tabel berikut ini;

Tabel 3.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu Tahun 2017 – 2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja	190.455	192.243	193.860	202.467
	a. Bekerja	177.959	181.079	181.523	185.507
	b. Pengangguran	12.496	11.164	12.337	16.960
2	Bukan Angkatan Kerja	96.876	99.837	103.103	102.166
	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	287.331	292.080	293.963	304.633
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kota Palu	66,28	65,81	65,95	66,46
4	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Sul-Teng	67,51	66,82	N/A	N/A
5	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Palu	6,56	5,81	6,36	8,38
6	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Sul-Teng	3,81	3,37	3,11	3,77

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2021

Tahun 2020 Di Kota Palu tercatat sekitar 202.467 jiwa terkategori angkatan kerja dari penduduk berusia 15 tahun ke atas. Jumlah tersebut didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan perguruan tinggi. Dari jumlah angkatan kerja tersebut terserap dilapangan kerja sejumlah 181.507 jiwa dan terdapat 16.960 jiwa tidak terserap dan terkategori pengangguran. Pengangguran paling tinggi naik di tahun 2020, ini disebabkan situasi pandemi Covid-19 yang berpengaruh langsung terhadap lajunya pertumbuhan ekonomi Kota Palu yang mengalami kontraksi -4,45%, hal ini berkaitan langsung dengan penyerapan tenaga kerja.

3.4.6 Bidang Ketahanan Pangan dan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimaknai sebagai pertumbuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyaraka yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar penduduk.

Data penduduk miskin Kota Palu, terus berfluktuasi mengikuti dinamika perkotaan, Tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Palu menurun dari 6,83 persen (Tahun 2019) menjdi 6,80 (Tahun 2020). Namun secara absolut, jumlah penduduk miskin tahun 2020 mengalami peningkatan dari Tahun 2019 yakni dari 26.620 jiwa menjadi 26.890 jiwa. Raihan angka kemiskinan ini secara konsisiten terus berada di bawah angka kemiskinan Propinsi Sulawesi Tengah yang berada di angka 12,92 persen, dan angka kemiskinan nasional yang berada diangka 9,78 persen pada tahun 2020. Fakta ini juga mengambarkan bahwa 1 dari 15 penduduk Kota Palu termaksud dalam kategori penduduk miskin.

Adapun tingkat kedalaman kemiskinan atau P1 yang mengambarkan ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran masing masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, menunjukan penurunan di tahun 2020, yaitu 0,97, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan atau P2, yang mengambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, angkanya tidak berubah sejak tahun 2019, hingga tahun 2020, yaitu pada angka 0,22

1. Indeks Ketahanan Pangan

Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi **ketahanan** pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya. Sebagai contoh, sebuah rumah tangga mempunyai ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada pada kondisi kelaparan ataupun dihantui oleh ancaman kelaparan.

Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat (Permentan No 43/2010).

Untuk bidang pangan, produksi komoditas pangan terdiri dari produksi komoditas pangan nabati beras dan jagung. Jumlah produksi pangan beras pada Tahun 2020 sebesar 1,039 Ton dan jagung sebesar 1.980 Ton. Konsumsi pangan penduduk terhadap bahan pangan padi-padian sebesar 127,0 kg, umbi-umbian 8,7 kg, pangan hewan 46,5 kg, dan kacang-kacangan 9,5 kg. Berdasarkan data SUSENAS diperoleh data konsumsi energi di Kota Palu Tahun 2020 sebesar 2.090 kkal/kap/hari, konsumsi protein sebesar 66,30 gram/kap/hari, dan nilai skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 90,30. Konsumsi energi di Kota Palu Tahun 2017-2020 tertera dalam tabel 3.19 sebagai berikut:

Tabel 3.27
Konsumsi Energi di Kota Palu Tahun 2017-2020

No.	Uraian	Tahun			
		2017	**2018**	**2019**	**2020**
1	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	2.090	1.908	1.960	2.068
2	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari	71,20	59,90	59,68	66,30
3	Nilai Skor Pola Pangan	90,40	78,10	82,90	90,30

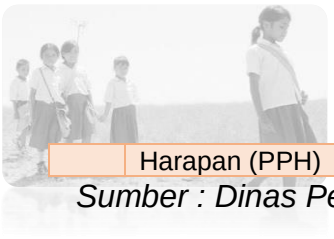

	Harapan (PPH)				

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 (diolah)

Pembangunan ekonomi Kota Palu dalam lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan (i) meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam PDRB, (ii) meningkatnya pertumbuhan investasi daerah, (iii) meningkatnya pertumbuhan ekonomi digital, serta (iv) terwujudnya kerjasama ekonomi.

Sektor sekunder yang akan didorong pertumbuhannya adalah sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan yang bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan. Sedangkan sektor tersier yang akan didorong sektor perdagangan, sektor transportasi, sektor akomodasi, sektor komunikasi, sektor real estat, serta sektor jasa-jasa dan sektor jasa lainnya.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi Kota Palu didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan dalam pemantauan dan evaluasi capaian target pembangunan daerah, serta perbaikan kualitas kebijakan daerah.

Isu strategi pembangunan Kota Palu berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat diarahkan melalui kemandirian ekonomi masyarakat kota. Pemerintah Kota Palu berupaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan dan pengembangan Usaha Masyarakan Kecil dan Menengah (UMKM) ditiap perwilayah kelurahan. Menjadikan kelurahan yang inovatif unggul dan mandiri yang mampu menciptakan daya saing bagi UMKM melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi lokal.

Pemerintah di tingkat kelurahan diarahkan untuk mampu mengembangkan usaha ekonomi yang ada diwilayahnya dengan dukungan instansi terkait. Langkah awal dalam isu strategis ini adalah pemetaan potensi pada semua kelurahan di Kota Palu, untuk mengidentifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan dengan melihat lima aspek yaitu bahan baku, jumlah usaha dalam industri, keunikan produk dibandingkan daerah lain, nilai tambah produksi dan kontribusinya terhadap ekonomi daerah. Berdasarkan

pemetaan potensi ekonomi, pemerintah melalui dinas terkait akan melakukan penguatan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan pada masing masing industri di tiap wilayah kelurahan. Untuk saat ini Pemerintah Kota Palu sedang menggalakkan Program Kelompok Usaha Bersama di setiap Kelurahan yang ada, dibawah naungan Dinas Sosial. Hal ini dimaksudkan untuk membantu program pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam bidang perdagangan dan usaha lainnya.

Dalam upaya menunjang sektor pariwisata, pemerintah Kota Palu akan mendorong tumbuh kembangnya industri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat. Penguatan industri kreatif seperti industri kerajinan, musik, desain, seni pertunjukan, periklanan serta beberapa subsektor yang telah tumbuh di masyarakat, akan di dorong untuk menjadi usaha yang memiliki daya saing di tingkat nasional dengan mengandalkan *comparative advantage* sumber bahan baku lokal.

Penguatan usaha mikro dan kecil akan diupayakan melalui peningkatan ketrampilan usaha seperti pemagangan, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Diharapkan nantinya akan menciptakan pengusaha mikro dan kecil yang mampu bersaing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, keunikan potensi lokal dan penguasaan pasar lokal.

Pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan akan mendorong peningkatan dan pengembangan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis industri rumah tangga. Peningkatan keanekaragaman usaha akan diupayakan melalui perbaikan iklim investasi, kemudahan serta kepastian usaha. Pemberian kemudahan dalam mengakses sumber dana untuk memodali pengembangan usaha masyarakat, akan mempu mendorong semangat masyarakat dalam mengembangakan usahanya, serta dukungan dalam memudahkan proses-proses promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan oleh kelompok UKM yang tentunya mampu bersaing dengan produk-produk UKM dari daerah lain.

Grafik 3.34
Analisis Identifikasi Masalah Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

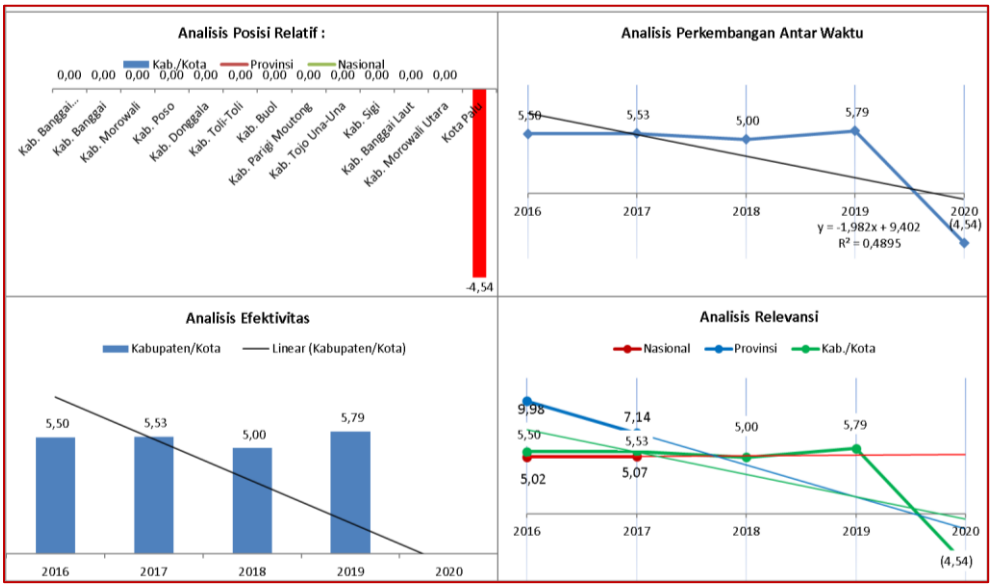

Sumber :BPS (Susenas) 2020

Ekonomi Kota Palu Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,00%, Tahun 2019 tumbuh menjadi 5,79 %, namun mengalami kontraksi pada Tahun 2020 yakni tumbuh -5 %. Meskipun secara akumulatif pertumbuhan ekonomi Kota Palu tumbuh -5 %, namun beberapa sektor masih tumbuh positif seperti sektor pengadaan listrik dan gas, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kontribusi sektor primer dalam pembentukan PDRB Kota Palu juga mengalami fluktuasi, Tahun 2018 berkontribusi sebesar 10,64%, selanjutnya tumbuh menjadi 11,11% pada Tahun 2019, namun mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi 10,12%. Untuk sektor sekunder, mengalami trend kontribusi yang positif, Tahun 2018 sebesar 23,69 % dan naik pada Tahun 2020 menjadi 26,41%. Kontribusi sektor tersier juga mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar 65,66% turun menjadi 63,47% pada Tahun 2020 (BPS,2020, diolah).

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang

dicapaai dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu perekonomian merupakan kontribusi dari setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian. Perkembangan perekonomian biasanya akan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam setiap periode kepeminpinan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang diambil akan mempengaruhi perkembangan setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian.

Perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi suatu daerah tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah daerah dapat mengintervensi melalui ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok di daerah. Tekanan inflasi di suatu daerah akan memperburuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan lebih jauh akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat jika pendapatan masyarakat di daerah tersebut tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat ikut memengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat.

Grafik 3.35
Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Inflasi (%)
Kota Palu Tahun 2016-2020

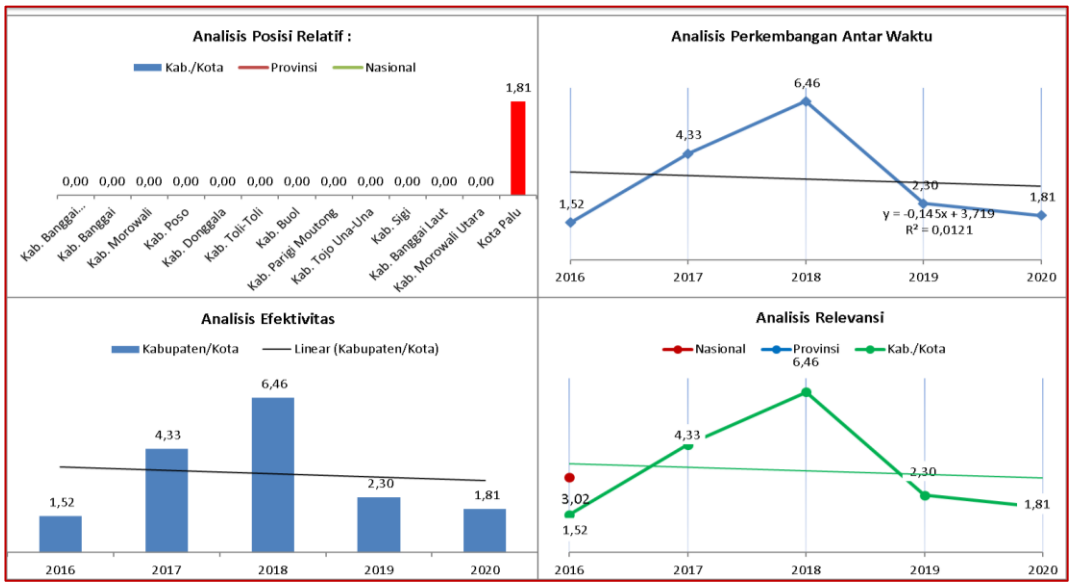

Sumber :BPS (Susenas) 2020

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin, memiliki produktivitas yang rendah serta kontribusi terhadap PDRB yang cenderung menurun. Sebanyak 49,8 persen kepala keluarga dari kelompok miskin dan rentan bekerja di sektor pertanian dan 13,4 persen bekerja di sektor perdagangan dan jasa akomodasi (Susenas, 2018). Di sisi lain, rata-rata pendapatan sektor tersebut merupakan yang terendah, rata-rata pendapatan sektor pertanian adalah Rp. 743.399,- sementara sektor perdagangan dan jasa akomodasi sebesar Rp. 1.218.955,- per bulan (Sakernas, 2017). Rendahnya produktivitas di sektor ini karena masih minimnya kepemilikan asset, produktif, minimnya akses terhadap pembiayaan serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan.

Rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki akses terhadap layanan keuangan hanya sekitar 25,6 persen (Susenas, 2018). Selain minimnya pendanaan yang sesuai dengan profil usaha kelompok miskin dan rentan dibutuhkan juga pengembangan skema pendanaan bagi dunia usaha dengan kegiatan yang memiliki dampak sosial (*social impact fund*). Dalam hal kemandirian ekonomi, kelompok miskin dan rentan masih sulit bersaing dalam usaha produktif karena daya saing yang rendah, akses terhadap pasar dari produk yang dihasilkan serta kolaborasi usaha yang rendah dan kolaborasi keperantaraan usaha belum optimal.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang dicapaai dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu perekonomian merupakan kontribusi dari setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian. Perkembangan

perekonomian biasanya akan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam setiap periode kepeminpinan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang diambil akan mempengaruhi perkembangan setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian.

2. Harga beras kualitas rata-rata (Rp)

Perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi suatu daerah tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah daerah dapat mengintervensi melalui ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok di daerah. Tekanan inflasi di suatu daerah akan memperburuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan lebih jauh akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat jika pendapatan masyarakat di daerah tersebut tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat ikut memengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat.

Ketahanan pangan adalah permasalahan tingkat dunia di mana masing-masing negara juga memiliki definisi mereka yang lebih spesifik. Ketahanan pangan merupakan persoalan yang kompleks sebab meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik berperan paling dominan dan menjadi sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan urusan pangan suatu negara. Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin krusial sebab menurut FAO**,** populasi dunia diperkirakan akan bertambah dan akan ada hampir 10 miliar orang di bumi pada tahun 2050. Dan, sekitar 3 miliar lebih banyak mulut untuk diberi makan daripada tahun 2010. Konferensi FAO tahun 1984, mencetuskan dasar-dasar ketahanan pangan yang pada intinya menjamin kecukupan ketersediaan pangan bagi umat manusia dan terjaminnya setiap individu untuk dapat memperoleh pangan. Berikut selengkapnya memahami ketahanan pangan, pengertian,

sistem, beserta strateginya. Data analisis identifikasi ketahanan pangan di Kota Palu, dapat digambarkan pada grafik berikut;

Grafik 3.36
Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Harga Beras (Rp)
Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020

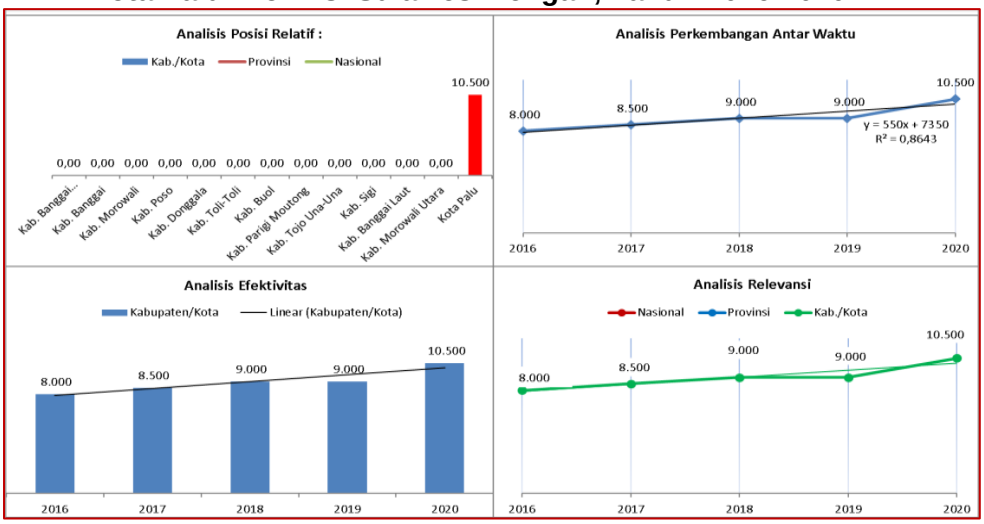

Sumber :BPS (Susenas) 2020

3. Harga bahan-bahan pokok lainnya (Rp)

Harga pokok produksi adalah unsur yang harus tercatat di dalam sebuah laporan keuangan. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam daftar biaya yang bisa menjadi tolak ukur penjualan produk perusahaan, harga pokok produksi secara lengkap beserta unsur dan cara penghitungannya, berikut kita akan bahas lebih jauh. Harga pokok produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Di dalamnya terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi dan lain sebagainya. Jika harga pokok ini sudah ketemu, pihak perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan harga produk. Paling tidak, harga produk yang akan dijual sudah diperhitungkan secara cermat antara laba dan rugi yang bakal muncul dari penjualan yang dilakukan.

Menurut Susilowati (2009), harga pokok produksi adalah seluruh pembiayaan yang dibebankan pada produk dan jasa yang dapat diukur dalam bentuk uang yang akan diserahkan. Lain lagi menurut Supriyono (2013), yang menyatakan kalau harga pokok produksi merupakan jumlah

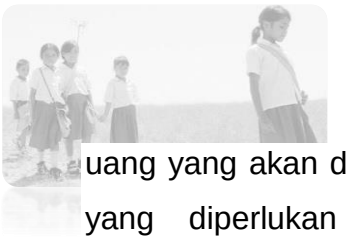

uang yang akan dibayarkan dalam rangka untuk memiliki produk atau jasa yang diperlukan perusahaan sebagai sarana untuk menghasilkan keuntungan.

Tabel 3.28
Rata-rata Harga Komoditi Penting per bulan di Kota Palu, 2020

Bulan	Beras	Tepung Terigu	Ikan Selar/Kato	Minyak Goreng	Daging Sapi	Daging Ayam	Jagung
Februari	10 910	9 407	35 795	14 102	117 500	33 391	**7 691**
Maret	10 912	9 426	34 225	14 324	117 500	35 978	**7 942**
April	10 990	9 414	33 564	14 534	117 500	35 514	**7 359**
Mei	10 844	9 231	35 452	14 338	117 500	32 862	**6 790**
Juni	10 812	9 256	34 038	14 325	120 000	38 546	**8 945**
Juli	10 800	9 314	32 756	14 312	118 750	37 389	**8 195**
Agustus	10 801	9 350	32 844	14 141	117 500	32 775	**6 799**
September	10 774	9 620	30 465	14 188	117 500	33 213	**5 939**
Oktober	10 784	9 620	33 193	14 416	117 500	35 371	**6 807**
November	10 645	9 607	35 992	14 577	117 500	35 239	**7 072**
Desember	**10 652**	**9 607**	**39 397**	**14 742**	**117 500**	**37 371**	**7 746**

BPS, Survei Harga Konsumen 2021

3.4.7 Bidang kelautan dan perikanan

Bidang Kelautan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek kelautan, meliputi pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Usaha perikanan, usaha perikanan dari jenis perairannya dibedakan menjadi perairan darat dan laut. Namun berdasarkan kegiatan usahanya dibagi menjadi 5 yaitu kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.

Tabel 3.29
Produksi Perikanan Laut menurut Jenis Usaha Perikanan (Ton), 2016-2020

Kecamatan *Subdistrict*	Perikanan Tangkap				
	2016	2017	2018	2019	2020*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Palu Barat	**...**	**210,8**	**144,8**	**149,4**	**35,6**
Tatanga	**...**	**-**	**-**	**-**	**-**
Ulujadi	**...**	**267,8**	**189**	**183,3**	**132,4**
Palu Selatan	**...**	**-**	**-**	**-**	**-**
Palu Timur	**...**	**-**	**-**	**-**	**-**
Mantikulore	**...**	**430,8**	**262,4**	**190,2**	**65,9**
Palu Utara	**...**	**364,0**	**254,9**	**132,1**	**14,2**
Tawaeli	**...**	**356,1**	**259,6**	**330,6**	**48,1**
Kota Palu	2 865	1 629,5	1 110,7	985,6	296,2

Sumber: Dinas Kehutanan, Pertanian, dan Kelautan Kota Palu

1. Produksi perikanan budidaya

Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembang biakan ikan atau organisme air lainnya. Manfaat atau hasil yang diharapkan dari kegiatan pemeliharaan ikan juga bisa berupa produksi ikan yang bisa dijual, atau bisa juga untuk keperluan konsumsi sendiri. Perikanan tangkap, berbeda dengan perikanan budi daya, adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). Budi daya perikanan meniru sistem yang terdapat di alam untuk membiakan dan membesarkan ikan. Perkembangan produksi perikanan Kota Palu, sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.30
Produksi Perikanan Darat menurut Jenis Usaha Perikanan (Ton), 2016-2020

Kecamatan	Budidaya Kolam				
	2016	2017	2018	2019	2020*)
Palu Barat	**...**	**-**	**-**	**-**	**0,5**
Tatanga	**...**	**17,23**	**22,35**	**48,63**	**38,21**
Ulujadi	**...**	**27,66**	**24,69**	**21,34**	**20,22**
Palu Selatan	**...**	**11,58**	**19,37**	**13,64**	**10,31**
Palu Timur	**...**	**11,20**	**10,48**	**9,08**	**7,76**
Mantikulore	**...**	**10,26**	**10,94**	**16,31**	**8,25**
Palu Utara	**...**	**28,12**	**15,69**	**7,68**	**6,91**
Tawaeli	**...**	**6,20**	**11,41**	**35,48**	**27,25**

Kota Palu	79,84	112,26	114,93	152,16

Sumber: Dinas Kehutanan, Pertanian, dan Kelautan Kota Palu

2. Cakupan binaan kelompok nelayan

Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa- desa atau pesisir (Sastrawidjaya. 2002). Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Peran nelayan adalah menangkap ikan dilaut, dan hasilnya dijual kepada konsumen. hal ini berarti peran nelayan bisa sebagai pencari/penghasil ikan.

Interaksi sosial yang terjadi pada nelayan yang menangkap ikan di laut yaitu interaksi nelayan dengan nelayan yang sama-sama sedang menangkap ikan dilaut dan interaksi nelayan dengan ikan. Sebagai penyedia lapangan kerja, perikanan telah berkontribusi terhadap penciptaan dan pengembangan industri rumah tangga, usaha mikro kecil menengah dan industri besar berskala ekspor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Tabel 3.31
Nilai Produksi Perikanan Laut menurut Jenis Usaha Perikanan (000 Rupiah), 2016-2020

Kecamatan *Subdistrict*	Perikanan Tangkap				
	2016	2017	2018	2019	2020*)
Palu Barat	...	6 930 000	4 764 500	4 482 000	1 303
Tatanga	...	-	-	-	
Ulujadi	...	8 034 000	5 670 000	5 499 000	4 850
Palu Selatan	...	-	-	-	
Palu Timur	...	-	-	-	
Mantikulore	...	18 585 500	11 025 500	5 706 000	2 452
Palu Utara	...	11 648 000	8 167 000	3 963 000	510
Tawaeli	... 000	10 811 000	7 858 000	9 918 000	2 001
Kota Palu		81 825 746	56 008 500	37 485 000	29 568

Sumber: Dinas Kehutanan, Pertanian, dan Kelautan Kota Palu

3.4.8 Bidang sosial

1. Persentase rehabilitasi sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Konsekuensinya penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota.

Sedangkan dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi,dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah

kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dampak dari kemiskinan sangat kompleks menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis dan jumlah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Upaya penanganan masalah kemiskinan memerlukan berbagai strategi dalam pelaksanaannya. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan potensi atau sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan. PSKS inilah yang bersama-sama dengan pendamping sosial akan berupaya melakukan usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan untuk itu diperlukan pemahaman mendalam para pendamping sosial tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS khususnya dalam menyelenggarakan pendampingan kepada masyarakat).

3.5 Informasi Sosial Budaya Yang Berkaitan Dengan Isu Kemiskinan Dan Isu-Isu Terkait Lainnya

3.5.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kunci dari suatu perubahan kebijakan dalam jangka waktu tertentu, karena isu strategis dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membuat suatu kebijakan yang prioritas dan berdaya ungkit kuat. Oleh karena itu perumusan isu strategis harus didasarkan pada analisis yang menyeluruh (*comprehensive*), didukung data atau bukti yang valid dan mengacu kepada *analisis potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman atau tantangan* untuk mewujudkan kondisi yang

diharapkan pada masa mendatang. Isu strategis yang patut diangkat dalam RPKD Kota Palu Tahun 2021-2026 ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

1. Kriteria 1: Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan daerah;
2. Kriteria 2: Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
3. Kriteria 3: Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat miskin;
4. Kriteria 4: Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap permasalahan kemiskinan daerah;
5. Kriteria 5: Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola
6. Kriteria 6: Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan dalam kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan.

3.5.2 Isu Strategis Penanggulangan Kemiskinan Kota Palu

Adapun isu yang akan berdampak dan mempengaruhi kebijakan pembangunan Kota Palu selama periode RPKD tahun 2021-2026, antara lain :

1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penanganan Kemiskinan

Dampak yang ditimbulkan adanya Pandemi Covi-19 terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat secara umum, dan khususnya masyarakat Kota Palu, perlu mendapat penanganan yang serius dari pemerintah daerah Kota Palu, bila tidak tertangani secara baik akan menimbulkan masalah baru dapat terjadi semakin bertambahnya masyarakat miskin.

2. Meningkatnya angka kemiskinan Kota Palu secara konsisten

Kemiskinan Kota Palu tahun 2020 mengalami kenaikan 0.59% atau sebesar 159 jiwa dari tahun sebelumnya. Beberapa indikator penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut antara lain pendapatan

masyarakat yang menurun, inflasi meningkat, pengeluaran juga meningkat, yang menyebabkan tanggungan hidup keluarga miskin semakin berat. Selain itu faktor terjadinya bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di bulan September 2018, mengakibatkan perekonomian masyarakat Kota Palu menjadi melemah, sehingga sebagian besar masyarakat kehilangan mata pencarian.

3. Alokasi pembiayaan pemerintah untuk pengangulangan kemiskinan

Alokasi dana Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu pada tahun 2019 sebesar Rp. 59.078.539.325, dengan jumlah penduduk miskin Kota Palu tahun 2019 yaitu 26.731 jiwa atau 7,22% dari penduduk kota palu. Adapun alokasi dana penanggulangan kemiskinan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 57.210.353.604, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2020 sebesar 26.890 jiwa atau 7,20% dari jumlah penduduk Kota Palu. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Palu yang pengalokasiannya tersebar pada beberapa OPD teknis Kota Palu.

4. Peran kelembagaan TKPK

Dalam melaksanakan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah Kota Palu telah membentuk lembaga pengelola program, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Palu. Lembaga ini berfungsi sebagai koordinasi dalam rangka menjamin keberlanjutan program dan menggalang partisipasi pemangku kepentingan pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palu. Lembaga ini bersifat lintas OPD dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Palu Tahun 2021 yang dibentuk terdiri dari : Sekretariat, Pokja bidang Pendataan dan Informasi, Pokja Pengembangan Kemitraan, Pokja Pengaduan Masyarakat, Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga,Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

dan Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, dan kelompok Program-program lainnya.

5. Sistem Koordinasi Kolaborasi penanggulangaan kemiskinan

Pusat koordinasi dilakukan melalui kelembagaan TKPKD sesuai dengan amanat PERMENDAGRI Nomor 42 Tahun 2010. Tugas TKPKD tertuang pada pada pasal 8 yaitu : 1) melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan 2) mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh TKPKD Kota Palu dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal sebagai upaya untuk mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Pemanfaatan data terkait kemiskinan

Dalam perlindungan sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) telah berhasil menargetkan individu dan keluarga miskin untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus gerak cepat merespons bencana melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dengan penggunaan data yang dimiliki Kota Palu, membantu mudahnya penelusuran nama dan alamat beserta kondisi sosial ekonomi masyarakat. DTKS berfungsi sebagai bank data lengkap berisi status sosial ekonomi warga dan divalidasi teratur, sehingga Pemerintah Kota Palu memiliki informasi valid untuk menentukan setiap keluarga yang berhak menerima bantuan sosial.

Manfaat lain DTKS adalah agar semakin tepat sasaran perlindungan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu data ini sangat mendukung perluasan layanan yang lebih cepat, serta ketahanan jangka panjang upaya perlindungan sosial.

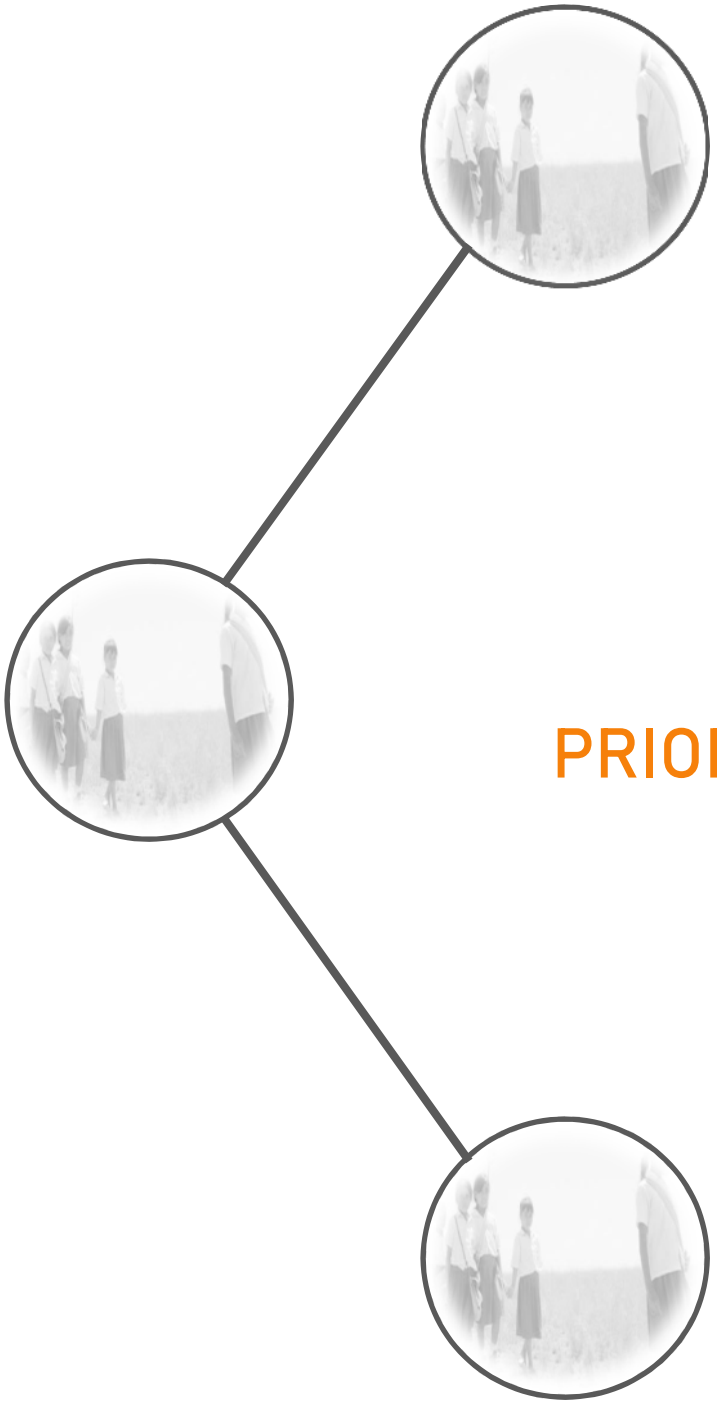

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021-2026

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM

Kesadaran bahwa kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi, didasari oleh kesadaran bahwa masalah kemiskinan saling terkait dengan dimensi lain yang sangat kompleks, dan tidak terkait sekedar kemampuan ekonomi (konsumsi) masyarakat, tetapi juga menyangkut status kehiduan sosial mereka dalam makna yang luas. Karenanya Rencana penanggulangan kemiskinan dalam hal ini perlu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk upaya penanggulanganya, secara komprehensif.

Perlu dipahami bahwa beda daerah, beda pula permasalahannya, beda pula penganan kemiskinannya. Secara kontekstual, masalah kemiskinan didaerah dibentuk oleh kompleksitas karakteristik wilayah (makro), komunitas (meso) dan rumah tangga (mikro). Keberadaan dokumen RPKD diperlukan untuk menjabarkan strategi dasar penanggulangan kemiskinan yang berada ditingkat nasional kedalam konteks penyelesaian masalah lokal.

Dalam penanganan strategi penanggulangan kemiskinan, harus ada masalah yang perlu diprioritaskan penangananya. Ada karateristik tertentu dari kemiskinan yang secara empiris cenderung tipikal antar daerah dan oleh sebab itu menjadi target nasional. Dokumen penangulangan kemiskinan dalam hal ini perlu memastikan bahwa indikator itu menjadi prioritas intervensi kebijakan daerah dan merancang sinergi antara inisiatif kebijakan (program) nasional dan daerah.

Theory of Change (ToC) atau teori perubahan, lazim diguunakan oleh para perancang pembangunan dalam mendisain sebuah program agar menjadi efektf, selain teori perubahan ini juga akan memberikan panduan tentang bagaimana beragam intervensi tersusun dan dapat terlaksana secara runtut sehinga sasaran (*objective*) dapat terurai dan memberikan hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang diinginkan. Teori perubahan ini dalam proses mendisain

sebuah program, akan memberikan keunggulan kompetititf dan peluang lebih besar bagi suatu program dalam mencapai tujuannya, yaitu dengan membangkitkan dan memberikan manfaat bagi para penerima manfaat.

Disisi lain, karena dampak program, baik yang diinginkan (*intended*) maupun yang tidak disengaja (*unintended*), dapat bersifat positif maupun negatif, teori perubahan ini dapat digunakan untuk mengurangi resiko sejak awal kemungkinan munculnya dampak negatif apalagi yang tidak disengaja dari sebuah program. Teori perubahan ini, juga merupakan rangkaian metodologi untuk perencanaan, partisipasi dan evaluasi yang digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial. Teori Perubahan mendefinisikan tujuan jangka panjang dan kemudian memetakan ke belakang untuk mengidentifikasi prasyarat yang diperlukan.

Teori Perubahan menjelaskan proses perubahan dengan menguraikan hubungan sebab akibat dalam suatu inisiatif, yaitu, hasil jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Perubahan yang diidentifikasi dipetakan - sebagai "jalur hasil" - menunjukkan setiap hasil dalam hubungan logis dengan yang lainnya, serta alur kronologis. Hubungan antara hasil dijelaskan oleh "alasan" atau pernyataan mengapa satu hasil dianggap sebagai prasyarat untuk yang lain.

Theory of change (ToC) untuk program penangulangan kemiskinan di Kota Palu, diurai kedalam bidang ketenaga kerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan dan kemiskinan.

Indonesia menggunakan konsep atau definisi kemiskinan sesuai dengan konsep Badan Pusat Statistik bahwa Kemiskinan Absolut yaitu kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti Pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Kebutuhan Pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum/ kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut, mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting untuk menilai efek dari kebijakan penanggulangan kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu program terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit usaha kecil).

Angka kemiskinan akan dapat dibandingkan antara satu negara dengan negara lain, jika garis kemiskinan absolut yang digunakan sama di negara yang dibandingkan. Bank dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya sosial atau dana yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pemerintah Indonesia menggunakan ukuran pendapatan US $1 perkapita per hari sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah US$1 perkapita per hari dikatagorikan sebagai penduduk miskin.

Tidak tercapainya standar hidup layak oleh seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya multidimensi seperti tidak mencukupinya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya kesempatan produktif dan tidak mencukupinya perlindungan social. Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya yang diselenggarakan pemerintah. Sementara kurangnya kesempatan produktif dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan dan iklim wirausaha khususnya bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Sementera perlindungan sosial yang cukup akan melindungi masyarakat dari guncangan sosial yang dapat menyebabkan seseorang jatuh kedalam kemiskinan ketika terjadi bencana, sakit ataupun krisis ekonomi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dengan demikian percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
5. Mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi.

A. Berisi Theory of Change/Logika Program semua bidang (sebagai cara untuk mencari akar masalah dari masalah yang sudah.

Teori Perubahan (*Theory of Change*) kini telah menjadi salah satu persyaratan wajib bagi para perancang dalam mendesain proyek yang efektif, dan para manajer untuk memandu mereka dalam mengelola pelaksanaan kegiatan intervensi proyek. Mengapa demikian? Ini karena Teori Perubahan akan memberikan panduan tentang bagaimana beragam intervensi tersusun dan dapat terlaksana secara runtut sehingga sasaran (*objective*) dapat tercapai dan memberikan hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang diinginkan. Di tengah semakin sulitnya memperoleh dana untuk melakukan intervensi pembangunan, dan sengitnya persaingan antar-lembaga di segala bidang untuk mempertunjukkan keefektifan pendekatan yang masing-masing usulkan, Teori Perubahan dalam desain proyek akan memberikan keunggulan kompetitif dan peluang lebih besar bagi suatu proyek dalam mencapai tujuannya, yaitu membangkitkan dan memberikan manfaat bagi para penerima-manfaatnya. Di sisi lain, karena dampak proyek, baik yang diinginkan (*intended*) mau pun yang tidak

disengaja (*unintended*), dapat bersifat positif maupun negatif, Teori Perubahan dapat digunakan untuk mengurangi risiko sejak awal kemungkinan munculnya dampak negatif apalagi yang tidak disengaja dari sebuah proyek.

Oleh karena itu, Teori Perubahan juga sangat disarankan untuk digunakan dalam mengevaluasi dampak proyek: disamping untuk menilai apakah terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat berakibat kepada dampak yang terjadi, ia juga dapat digunakan untuk membahas mengapa suatu atau beberapa dampak dapat terjadi. Dalam evaluasi dampak, Teori Perubahan tidak hanya berbicara tentang dampak yang terjadi tetapi juga mengulas mengapa dampak tersebut dapat terjadi.

Diterjemahkan dari bahasa Inggris-Theory of Change adalah metodologi untuk perencanaan, partisipasi, dan evaluasi yang digunakan di perusahaan, filantropi, nirlaba dan sektor pemerintah untuk mendorong perubahan sosial. Wikipedia (Inggris)

1. Analisis TOC Bidang Pendidikan

Berikut Tergambar permasalahan pada indicator pendidikan serta program pada pendidikan, tujuan dan hasil yang di capai seperti pada Teori Of Change di bawah ini :

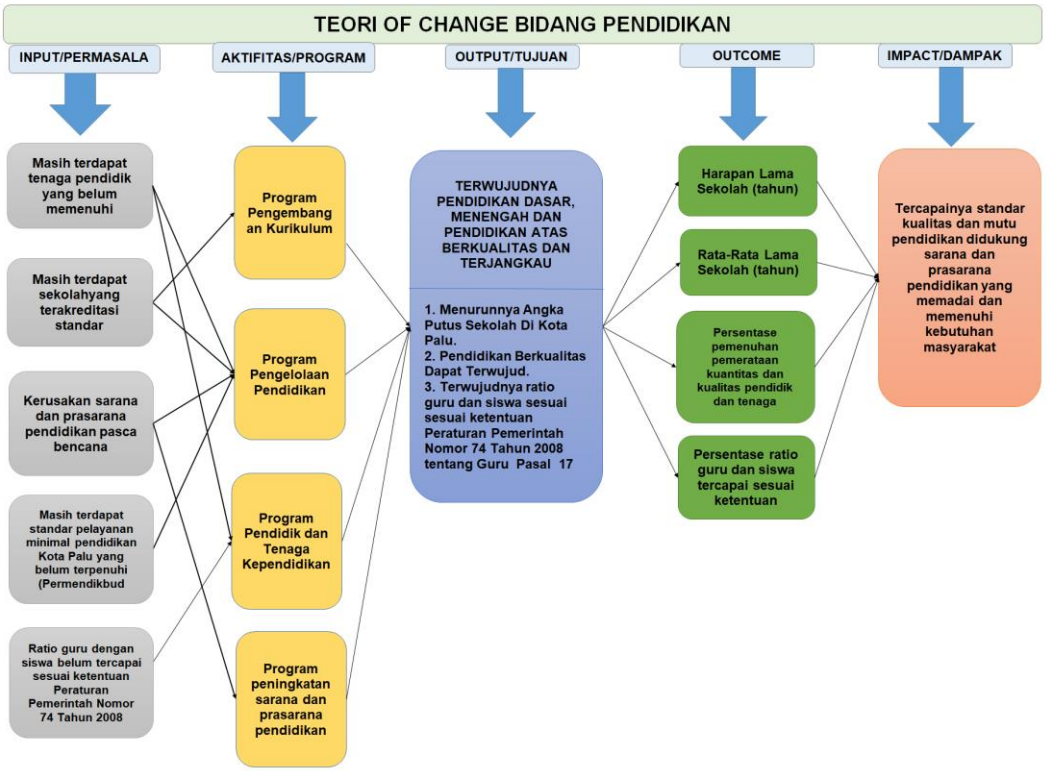

Gambar 4.1
Theory of Change bidang Pendidikan

Berikut penjelasan terkait hubungan antara Program penangggulangan Kemiskinan Dengan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan indicator pendidikan. Dimana terdapat beberapa program dan tujuan serta hasil yang ingin dicapai berkaitan Dengan indicator pendidikan antara lain :

1) Program pengembangan Kurikulum, dimana melalui program pengembangan kurikulum ini di harapkan dapat menghasilkan sebuah tujuan dimana terwujudnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas dari segi kualitas. Terwujudnya pendidikan berkualitas berefek pada Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
2) Program Pengelolaan Pendidikan, melalui program ini bertujuan dimana kedepan angka putus sekolah semakin berkurang di Kota

Palu sehingga secara tidak langsung akan memepngaruhi peningkatan sumber daya manusia di Kota Palu

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui program ini kedepan terkait permasalahan Rasio Guru terhadap murid semakin berkurang khusus di Kota Palu, sehingga kedepan ratio guru dan siswa sesuai sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 dapat tercapai.

Secara keseluruhan beberapa program Pada Indikator Pendidikan kedepan dapat menjawab / mengurangi beberapa permasalalahan baik Persentase jumlah tamatan SD/MI 6.169 melanjut ke SMP 5.259 atau 85,25%, terdapat 910 anak tidak melanjutkan ke SMP (15 %), Terdapat 1,19 % anak putus sekolah tingkat SD, Terdapat 1,50 % anak putus sekolah tingkat SMP.MTs, Terdapat 1,39 % anak putus sekolah tingkat SMA/MA, Ratio guru dengan siswa belum tercapai sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17.

2. Analisis TOC Bidang Kesehatan

Berikut gambaran permasalahan pada bidang Kesehatan dan beberapa program pemerintah dalam rangka penanganan permasalahan serta Tujuan dan Hasil yang ingin dicapai pada Teori Of Change di Bawah Ini :

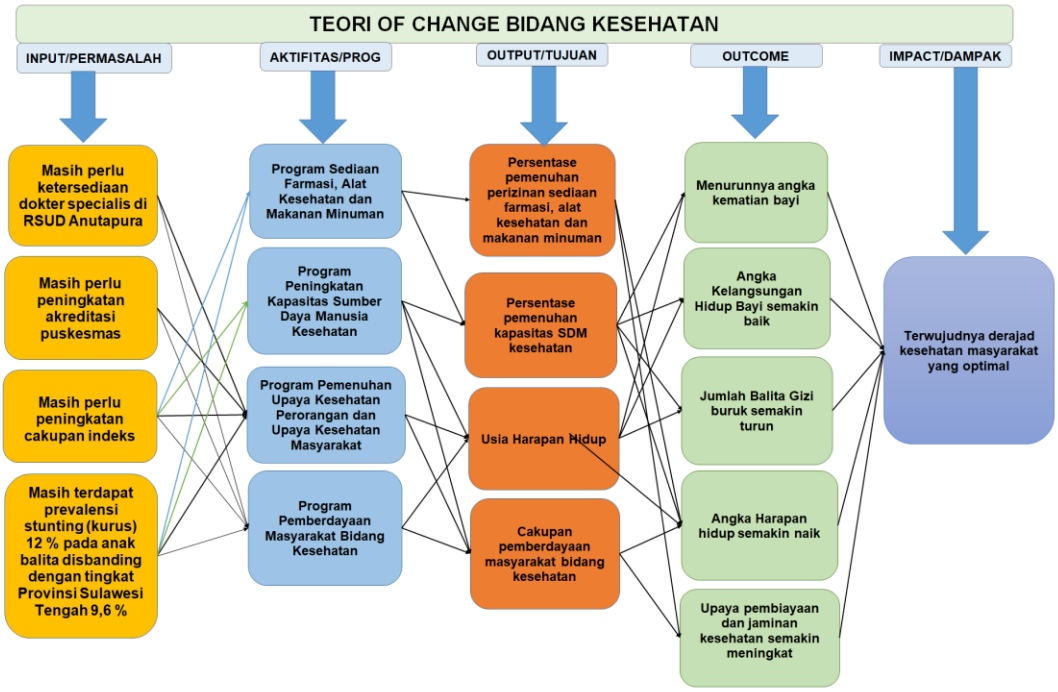

Gambar 4.2
Theory of Change bidang Kesehatan

Keterangan penjelasan keterkaitan hubungan antara Program penangggulangan Kemiskinan terhadap permasalahan kemiskinan yang berkaitan dengan indicator Kesehatan diantaranya : 1). Angka Kematian Bayi (AKB) usia dibawah 1 tahun Kota Palu tahun 2020 mencapai 2,35 %, 2). Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) hidup sampai usia 1 tahun Kota Palu tahun 2020 mencapai 997,99 jiwa/ 1.000 kelahiran, 3). Jumlah balita gizi buruk Kota Palu tahun 2020 mencapai 0,22 %, 4). Angka harapan hidup Kota Palu tahun 2020 mencapai 71,04 tahun, serta program bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebagai berikut :

1) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, melalui program ini permasalahan terkait Jumlah balita gizi buruk Kota Palu tahun 2020 mencapai 0,22, kedepan dapat berkurang dan teratasi (Cari data jumlah balita keseluruhan kota palu), dan permasalahn terkait Angka harapan hidup Kota Palu tahun 2020 mencapai 71,04 dapat meningkat ditahun berikutnya sesuai Dengan

tujuan program dimana Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman makin meningkat, Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan dan Usia Harapan Hidup yang makin meningkat.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, melalui program ini di harapkan dapat menjawab empat permasalahan pada bidang kesehatan , Angka Kematian Bayi (AKB) usia dibawah 1 tahun Kota Palu tahun 2020 mencapai 2,35 %, Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) hidup sampai usia 1 tahun Kota Palu tahun 2020 mencapai 997,99 jiwa/ 1.000 kelahiran, Jumlah balita gizi buruk Kota Palu tahun 2020 mencapai 0,22 %, Angka harapan hidup Kota Palu tahun 2020 mencapai 71,04 tahun, Dengan adanya program peningkatan kapasitas SDM di bidang kesehatan ini diharapkan peningkatan SDM serta pemahaman akan pentingnya kesehatan sampai tingkat masyarakat terkecil dapat merubah prilaku di masayarakat betapa pentingnya penerapan pola hidup sehat.
3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, melalui program ini bertujuan peningkatan usia harapan hidup yang berdampak pada hasil menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya angka kelangsungan hidup bayi semakin baik, menurunnya jumlah balita gizi buruk serta yang tidak kalah penting meningkatnya jumlah angka harapan hidup di Kota Palu.
4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, program ini memiliki tujuan Peningkatan cakupan pemberdayaan masayarakat di bidang kesehatan serta peningkatan usia harapa hidup di Kota Palu, sehingga permasaahan terkait Menurunnya angka kematian bayi, Angka Kelangsungan Hidup Bayi semakin baik, Jumlah Balita Gizi buruk semakin turun, Angka Harapan hidup semakin naik, Upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan semakin meningkat sehingga Dengan peningkatan tingkat pemberdayaan di masyarakat dapat

menciptakan kemandirian dimasayarakat sampai tingkat basis terkecil dalam rangka peninggkatan pemahaman di bidang kesehatan.

3. Analisis TOC Bidang Ketenagakerjaan

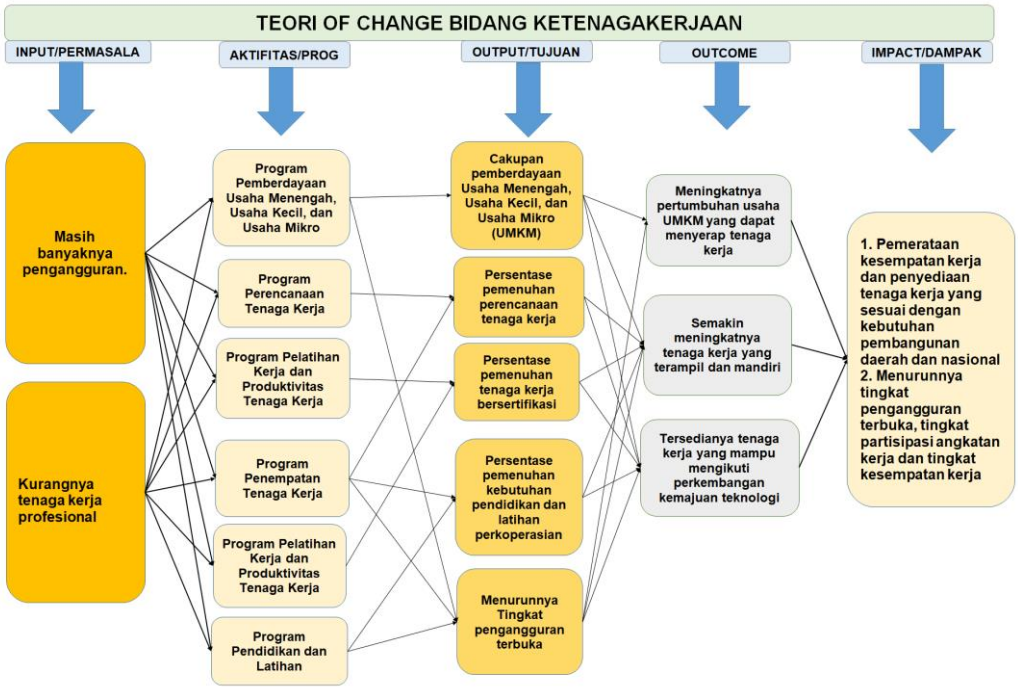

Gambar 4.3
Theory of Change bidang Ketenagakerjaan

Keterangan penjelasan keterkaitan hubungan antara Program penangggulangan Kemiskinan terhadap permasalahan kemiskinan yang berkaitan dengan indicator Ketenagakerjaan, dimana pada bidang ketenaga kerjaan memiliki sebuah masalah besar terkait dengan pengangguran dimana Jumlah pengangguran di Kota Palu tahun 2020 16.960 orang dengan tingkat pengangguran terbuka 8,38 % cenderung meningkat. Sehigga di perlukan sebuah solusi dalam bentuk sebuah program kerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang bersentuhan langsungn dengan masalah pengangguran.

Berikut gambaran program pemerintah dalam rangka penanganan permasalahan serta Tujuan dan Hasil yang ingin dicapai pada Teori Of Change di Bawah Ini :

1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), bertujuan pada ruang Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Dengan hasil yang di capai dan Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka Dengan hasil yang ingin dicapai 1). Meningkatnya pertumbuhan usaha UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja. 2). Semakin meningkatnya tenaga kerja yang terampil dan mandiri, 3). Tersedianya tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.
2) Program Perencanaan Tenaga Kerja bertujuan meningkatkan Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja, sehingga dapat menghasilkan peningkatan tenaga kerja yang terampil dan mandiri serta penyediaan tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.
3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat sehingga dapat berdaya saing dengan tenaga kerja di luar kota palu. Atas dasar tujuan tersebut dapat meningkatkan tenaga kerja terampil dan mandiri serta tenaga kerja yang mampu melek teknologi.
4) Program Penempatan Tenaga Kerja bertujuan peningkatan Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja, kemudian peningkatan Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian, Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka, sehingga hasil yang dicapai diantaranya semakin meningkatnya tenaga kerja yang terampil dan mandiri dan tersedianya tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.
5) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, pada program ini bertujuan pada peningkatan Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian dan Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka, sehingga Dengan berjalannya

program tersebut dapat meningkatkan ketrampilan tenaga kerja dan tenaga kerja yang selalu update terhadap teknologi.

6) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian merupakan program yang di rancang bertujuan untuk Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja, Persentase pemenuhan tenaga kerja bersertifikasi, Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian, Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka, Dengan beberapa tujuan tersebut dapat merumuskan beberapa hasil diantaranya peningkatan pertumbuhan usaha UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja , peningkatan tenaga kerja yang terampil dan mandiri, serta Tersedianya tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.

4. Analisis TOC Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

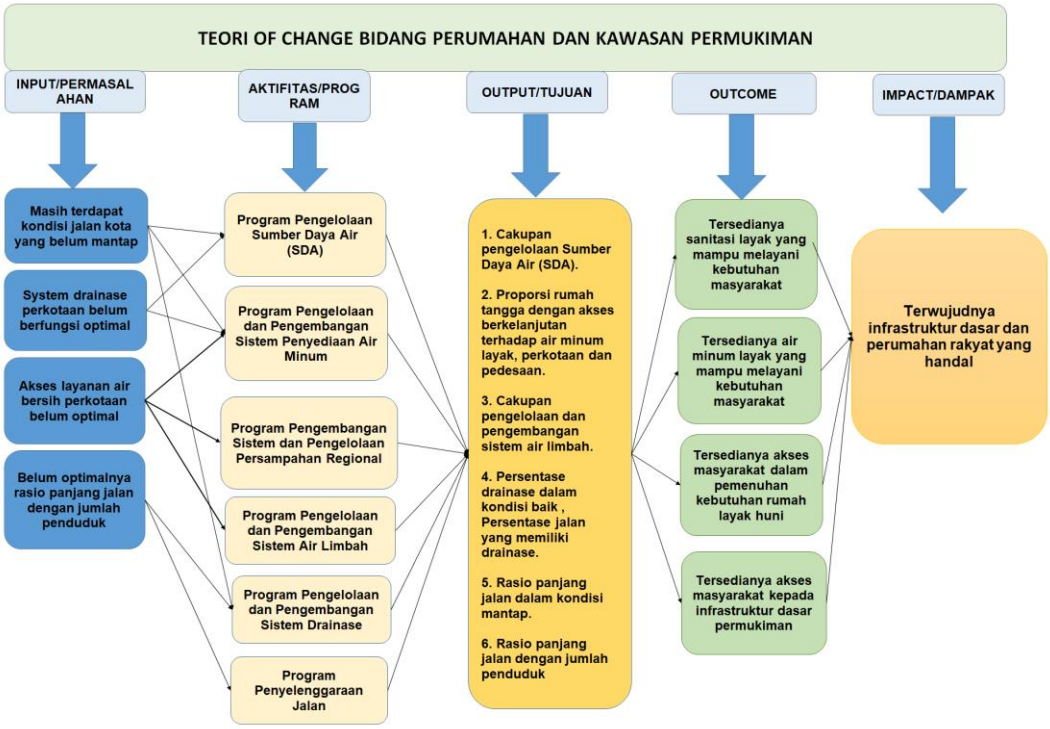

Gambar 4.4
Theory of Change bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Keterangan penjelasan keterkaitan hubungan antara Program penangggulangan Kemiskinan terhadap permasalahan kemiskinan yang berkaitan dengan indicator Bidang Infrastruktur Dasar, dimana pada bidang Infrastruktur Dasar memiliki sebuah permasalahan 1). Masih ada penduduk di tahun 2020 yang menggunakan sanitasi yang tidak layak mencapai 22 %, 2). Terdapat 0,19 % masyarakat dengan air minum yang tidak layak, 3). Masih terdapat 11,40 % atau sebanyak 8.317 unit rumah yang tidak layak huni , 4). Belum optimalnya rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk hunian. Berdasar atas permsalahan tersebut pemerintah melalui beberapa program berharap dapat teratasi. Berikut gambaran program pemerintah dalam rangka penanganan permasalahan serta Tujuan dan Hasil yang ingin dicapai pada Teori Of Change di Bawah Ini :

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6) Program Penyelenggaraan Jalan,

Melalui beberapa program tersebut kedepan dapat meningkatkan Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), terkait jumlah Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dapat teratasi baik perkotaan dan pedesaan. Untuk Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dapat terjawab, Persentase drainase dalam kondisi baik , Persentase jalan yang memiliki drainase, Rasio panjang jalan dalam kondisi mantap, Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Secara keseluruhan 7 program pemerintah tersebut dapat menjawab seluruh permasalahan sehingga tahun berikutnya permasalahan makin berkurang dan teratasi.

5. Analisis TOC Bidang Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat, disebutkan dalam UU bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya. Terdapat 9 indikator ketahanan pangan yaitu; 1). rasio warung, 2). rasio toko, 3). rasio rumah tangga tidak sejahtera, 4). rasio rumah tangga tanpa arus listrik, 5). rasio akses roda 4, 6). rasio anak tidak sekolah, 7). rasio rumah tangga tanpa air bersih, 8). rasio jumlah tenaga kesehatan, 9). dan rasio fasilitas sanitasi.

Selanjutnya empat pilar ketahanan pangan adalah (1) *ketersediaan* yaitu tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya; (2) *akses* yaitu terjangkaunya pangan atau memiliki sumber daya untuk mendapatkan pangan; (3) *pemanfaatan* yaitu penggunaan yang tepat berdasarkan pengetahuan gizi dasar serta (4) *stabilitas* dari ketersediaan.

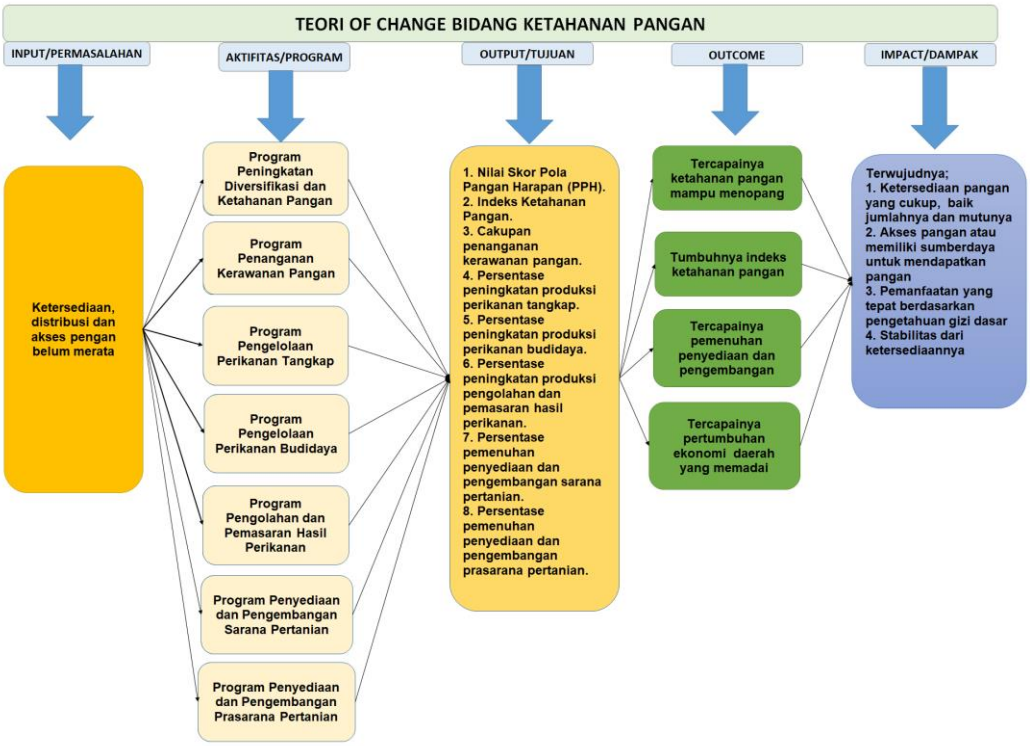

Gambar 4.5
Theory of Change bidang Ketahanan Pangan

Keterangan penjelasan keterkaitan hubungan antara Program penangggulangan Kemiskinan terhadap permasalahan kemiskinan yang berkaitan dengan indicator Ketahanan Pangan, dimana pada bidang Ketahanan Pangan memiliki dua permasalahan besar yaitu Berdasarkan data SUSENAS diperoleh data konsumsi energi di Kota Palu Tahun 2020 sebesar 2.090 kkal/kap/hari, konsumsi protein sebesar 66,30 gram/kap/hari, dan nilai skor pola pangan harapan (PPH) sebesar 90,30 dan Tahun 2020 secara akumulatif pertumbuhan ekonomi Kota Palu mengalami kontraksi tumbuh -5 %. Merujuk pada dua permasalahan tersebut berikut beberapa program pemerintah diharapkan dapat mengatasi atau mengurangi dampak dari masalah tersebut. Adapun program pemerintah :

1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
2) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
3) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Dari keseluruhan program pada bidang ketahanan pangan diatas tergambar bahwa target/tujuan yang ingin dicapai terdiri atas , 1). Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH), 2). meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan, 3). Cakupan penanganan kerawanan pangan. 4). Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, 5). Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya. 6). Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 7). Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. 8). Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

Capain yang dihasilkan dari pemnuhan tujuan program tersebut diantaranya : 1). Tercapainya ketahanan pangan mampu menopang kebutuhan masyarakat, 2). Tumbuhnya indeks ketahanan pangan, 3).

Tercapainya pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, 4). Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang memadai.

6. Analisis TOC Bidang Sosial

Pelayanan sosial sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara profesional untuk membantu memecahkan permasalahan sosial yang dialami oleh individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan menggunakan pendekatan praktik pekerjaan social. Pelayanan kesejahteraan sosial merupakan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup para penerima manfaatnya. Para penerima manfaat tersebut dapat perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat secara luas.

Suatu totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yg di wujudkan dalam pandangan hidup, falsafah negara dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara yg menjadi asa (tujuan/harapan) untuk melandasi pola perilaku dan tata struktur masyarakat yg ada.

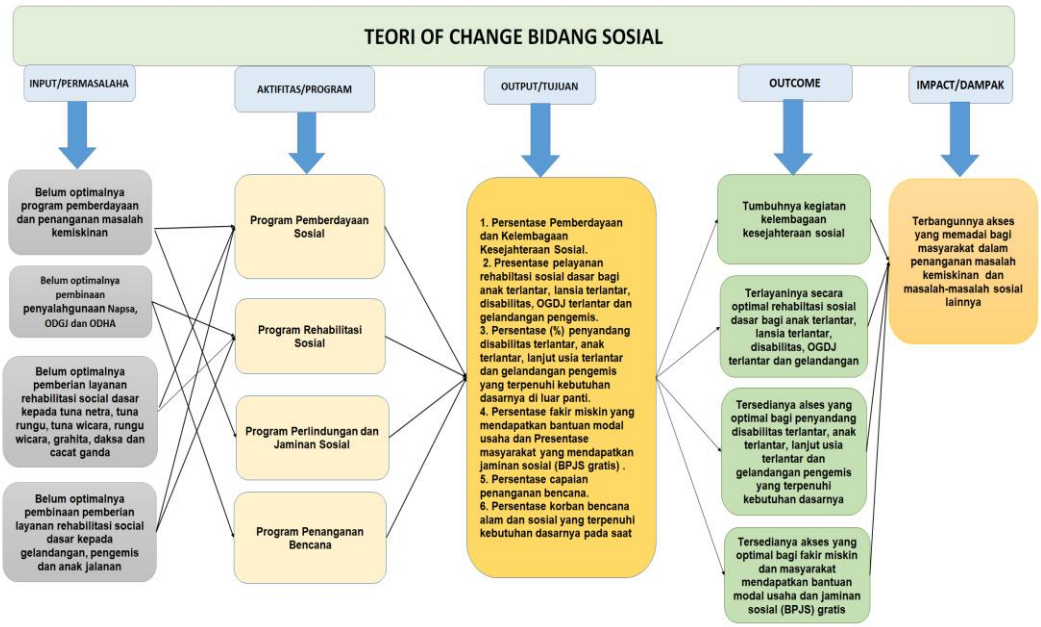

Gambar 4.6
Theory of Change bidang Sosial

B. Komposisi APBD berdasarkan pendapatan dan belanja.

1). Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan daerah akan diupayakan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara terukur dan rasional dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah. Perkembangan pendapatan khususnya PAD hingga saat ini dihadapkan pada keterbatasan dalam pencapaian target penerimaannya.

MATRIKS PENDAPATAN DAERAH

URAIAN	TAHUN		Rata-Rata Petumbuhan
	2020	2021	
	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN	**1.304.323.522.371**	**1.208.464.555.693**	**(7.35)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**260.179.004.254**	**219.003.412.004**	**(15.83)**
Pajak Daerah	112.880.185.945	100.060.000.000	(11.36)
Retribusi Daerah	9.901.834.854	11.463.282.600	15.77
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	2.048.503.784	2.048.503.784	0
Lain-lain PAD yang Sah	135.348.479.670	105.431.625.620	(22.10)
PENDAPATAN TRANSFER	**992.442.539.501**	**950.740.421.607**	**(4.20)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	917.652.340.129	884.655.943.216	(3.60)
Dana Perimbangan	886.421.012.129	869.170.417.216	(1.95)
Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak/ Dana Transfer Umum	57.467.020.999	35.135.286.300	(38.86)
Dana Alokasi Umum	648.403.965.000	636.284.819.000	(1.87)
Dana Alokasi Khusus	180.550.026.130	197.750.311.916	9.53

URAIAN	TAHUN		Rata-Rata Petumbuhan
	2020	2021	
	(Rp)	(Rp)	%
Dana Insentif Daerah (DID)	0	15.485.526.000	
DID	0	15.485.526.000	
Lainnya	31.231.328.000	0	(100.00)
Dana Penyesuaian	31.231.328.000	0	(100.00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	74.790.199.372	66.084.478.391	(11.64)
Pendapatan Bagi Hasil	74.790.199.372	66.084.478.391	(11.64)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	74.790.199.372	66.084.478.391	(11.64)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**51.701.978.616**	**38.720.722.082**	**(25.11)**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	51.701.978.616	38.720.722.082	(25.11)
Lain-lain Pendapatan	51.701.978.616	38.720.722.082	(25.11)
Pendapatan Hibah	48.196.398.616	38.720.722.082	(19.66)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.505.580.000	0	(100.00)

Sumber: BPKAD Kota Palu Tahun 2020-2021 (diolah)

2). Belanja Daerah.

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran Kas Daerah yang menjadi beban atau kewajiban daerah yang ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran belanja daerah diarahkan untuk membiayai berbagai

pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan umum serta kegiatan pemerintah daerah lainnya.

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebijakan penganggaran belanja pembangunan memberi arahan dan menjadi pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun dan merencanakan anggaran program dan kegiatan yang lebih realistis, terukur dan akuntabel.

URAIAN	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
	(Rp)	(Rp)	%
BELANJA	**1.733.031.450.274**	1.609.111.108.290	(7.15)
BELANJA OPERASI	**1.527.064.078.062**	1.380.672.984.387	(9.59)
Belanja Pegawai	620.322.658.150	581.988.983.589	(6.18)
Belanja Barang dan Jasa	426.662.706.750	489.145.628.808	14.64
Belanja Hibah	69.784.545.762	9.223.371.990	(86.78)
Belanja Bantuan Sosial	409.665.000.000	300.315.000.000	(26.69)
Belanja Bantuan Keuangan	629.167.400	0	(100.00)
BELANJA MODAL	**187.309.386.265**	**213.438.123.902**	**13.95**
Belanja Tanah	7.028.601.970	2.350.000.000	(66.57)
Belanja Peralatan dan Mesin	43.855.052.220	45.046.722.743	2.72
Belanja Bangunan dan Gedung	29.813.730.294	49.796.664.136	67.03
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.702.989.924	116.151.437.023	9.88
Belanja Aset Tetap Lainnya	909.011.857	93.300.000	(89.74)
BELANJA TIDAK TERDUGA	**18.657.985.947**	**15.000.000.000**	**(19.61)**
Belanja Tidak Terduga	18.657.985.947	15.000.000.000	(19.61)

Sumber: BPKAD Kota Palu Tahun 2020-2021 (diolah)

3). Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan dimaksudkan untuk menutup defisit/kekurangan dan atau memanfaatkan surplus anggaran, transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih abtara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran, maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

URAIAN	TAHUN		Rata-Rata Petumbuhan
	2020	2021	
	(Rp)	(Rp)	%
PEMBIAYAAN DAERAH	**1,031,071,024,850**	**400.646.552.597**	**(61.14)**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1.033.071.024.850**	**400.646.552.597**	**(61.22)**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	1.033.071.024.850	400.646.552.597	(61.22)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2.000.000.000**	**0**	**(100.00)**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000	0	(100.00)

Sumber: BPKAD Kota Palu Tahun 2020-2021 (diolah)

C. Sumber pendapatan daerah (belanja langsung dan tidak langsung) disesuaikan dengan tahun 2021 (SESUAIKAN DENGAN KONDISI KOTA PALU)

1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Analisis terkait proporsi penggunaan

anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.

URAIAN	TAHUN		Rata-Rata Petumbuhan
	2020	2021	
	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN	1.304.323.522.371	1.208.464.555.693	(7.35)
BELANJA	1.733.031.450.274	1.609.111.108.290	(7.15)
SURPLUS / (DEFISIT)	(428,707,927,903)	(400,646,552,597)	(6.55)
PEMBIAYAAN NETTO	1,031,071,024,850	400.646.552.597	(61.14)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	602,363,096,947	0	

Sumber: BPKAD Kota Palu Tahun 2020-2021 (diolah)

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bertambahnya jumlah aparatur dan jenis kebutuhan yang lebih kompleks

2. Perkembangan derajat Desentralisasi fiskal dan ruang fiskal

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dievaluasi untuk menunjukkan relevansi dan efektivitasnya dalam penanggulangan kemiskinan melalui Laporan Realisasi Anggaran. Ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap besaran APBD secara keseluruhan menyangkut struktur anggaran, besaran pendapatan dan belanja, sumber-sumber pendapatan, kapasitas fiskal, derajat otonomi fiskal dan pembagian proporsi belanja APBD antara Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Kapasitas

fiskal dan derajat otonomi fiskal akan ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat dilihat kemandirian Kota Palu semakin besar atau kecil ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Dampaknya adalah terhadap fleksibilitas dalam perencanaan penganggaran untuk menjalankan program dan kegiatannya termasuk dalam penanggulangan kemiskinan, selain itu kemandirian suatu daerah juga dapat menjamin keberlangsungan (sustainability) program-program penanggulangan kemiskinan yang menjadi inisiatif daerah sendiri.

Pendapatan Daerah (PAD) pada Tahun 2020 menyumbang 19,95 % dari Total pendapatan daerah, dan 18,12 % pada tahun 2021. Penyumbang terbesar pendapatan Kota Palu adalah dana pendapatan transfer yang mencapai 76,09 % dari total pendapatan daerah pada tahun 2020 dan 78,672 % pada tahun 2021. Sedangkan proporsi lain-lain pendapatan yang sah menurun dalam 2 tahun terakhir dengan proporsi masing-masing sebesar 3,96 % pada tahun 2020 dan 3,20 % pada tahun 2021, sebagaimana ditunjukan dalam tabel dibawah ini.

APBD Kota Palu menurut Pendapatan, kapasitas Fiskal dan Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dijelaskan sebagai berikut: Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

MATRIKS KAPASITAS FISKAL

URAIAN	TAHUN	
	2020	2021
	(Rp)	(Rp)
PENDAPATAN	**1.304.323.522.371**	**1.208.464.555.693**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**260.179.004.254**	**219.003.412.004**
DANA BAGI HASIL PAJAK /BAGI HASIL BUKAN PAJAK/ DANA	57.467.020.999	35.135.286.300

TRANSFER UMUM		
DANA ALOKASI UMUM	648.403.965.000	636.284.819.000
DANA INSENTIF DAERAH (DID)	0	15.485.526.000
DANA PENYESUAIAN	31.231.328.000	0
PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	74.790.199.372	66.084.478.391
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**51.701.978.616**	**38.720.722.082**
BELANJA PEGAWAI	**620.322.658.150**	**581.988.983.589**
JUMLAH PENDUDUK MISKIN	**26.890**	**-**
KAPASITAS FISKAL KOTA PALU	**18.722.605**	**-**

Derajat desentralisasi fiskal merupakan tingkat kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal. Suatu daerah dikatakan layak menjadi daerah otonom bila salah satu syaratnya memiliki kemampuan pembiayaan yang berasal dari potensi yang dimiliknya sendiri.

KRITERIA DERAJAT DESENTRALISASI

Derajat Desentralisasi Fiskal	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,10 – 20,00	Kurang
20,10 – 30,00	Sedang
30,10 – 40,00	Cukup
40,10 – 50,00	Baik
Di atas 50,00	Sangat baik

Sumber : Litbang Depdagri 1991

MATRIKS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

Komponen	2020	2021
	Proporsi terhadap Pendapatan dalam APBD (%)	Proporsi terhadap Pendapatan dalam APBD (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19,95	18,12
Pendapatan Transfer	76,09	78,67
Lain-lain Pendapatan yang Sah	3,96	3,20
Kapasitas Fiskal	0,0014	-
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kurang	Kurang

Tabel diatas menunjukan Kota palu memiliki Kapasitas Fiskal dan Derajat desentralisasi fiscal yang masih rendah. Pada dua tahun terakhir capaian PAD Kota Palu berada dibawah capaian dana Pendapatan Transfer Pusat. Bila dihubungkan dengan jumlah penduduk miskin, Kota Palu belum mampu untuk menanggulanginya secara mandiri akibat kapasitas fiscal dan desentralisasi fiskal yang masih rendah. Tentunya peran dari Pemerintah Pusat sangat diharapkan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Fleksibilitas dan sustanabilitas program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Palu belum bias diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah, melainkan perlu peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat yang secara perlahan perannya dapat dikurangi dimasa mendatang.

3. Penjelasan relevansi dan efektivitas APBD terhadap kondisi kemiskinan daerah.

Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat proporsi belanja operasional, belanja modal maupun belanja tidak terduga yang berkaitan dengan perbaikan indikator utama pada tiap bidang. Evaluasi anggaran belanja pertama kali dilakukan dengan melihat komposisi belanja operasional, belanja modal maupun belanja tidak terduga beserta masing-masing komponennya, dalam analisis antar waktu dengan melihat perkembangan belanjannya. Poin-poin yang perlu dilihat adalah berapa (nominal dan proporsi) dan untuk apa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hubah, belanja bansos, dan belanja bantuan keuangan. Kemudian evaluasi belanja dilakukan pada setiap bidang untuk melihat relevansi dan efektivitas belanja terhadap program prioritas dan perbaikan capaian program tersebut dari waktu ke waktu.

HASIL IDENTIFIKASI KETERPADUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA PALU TAHUN 2021

NO	OPD	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	TOTAL	JUMLAH TOTAL ANGGARAN MASING-MASING OPD	PEMAFAATN UNTUK PROGRAM KEMISKINAN
1	**DINAS KESEHATAN**	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	21.300.000	**761.320.000**	**155.724.605.080**	**0,49%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	715.020.000			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25.000.000			
2	**DINAS PENDIDIKAN**	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.505.000	91.505.000	359.283.258.489	0,03%
3	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	24.000.000	419.895.750	8.026.718.444	5%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	395.895.750			
4	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	440.000.000	3.267.775.700	21.061.822.248	16%
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	710.153.600			
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	123.200.000			
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	154.000.000			
		Pengembangan Prasarana Pertanian	119.047.100			
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.345.175.000			
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	376.200.000			
5	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	Pencegahan Kekerasan terhadap PerempuanLingkup Daerah Kabupaten/Kota	19.746.425	524.083.626	5.262.619.181	10%
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagiPerempuan Korban Kekerasan yang MemerlukanKoordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	501.337.201			
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas KeluargaTingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000			
6	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	31.200.000	31.200.000	8.179.812.226	0,38%
7	**DINAS SOSIAL**	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan SosialKabupaten/Kota	1.424.306.310	11.888.273.370	20.031.581.258	59,35%
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	8.894.919.500			
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	47.500.000			
		Penyediaan Makanan Bantuan Logistik Keluarga Korban Covid 19 (ODP/OTG)	1.049.568.810			
		Penyediaan Alat Bantu	128.050.000			
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	343.928.750			

NO	OPD	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	TOTAL	JUMLAH TOTAL ANGGARAN MASING-MASING OPD	PEMAFAATN UNTUK PROGRAM KEMISKINAN
8	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	2.347.500.000	6.397.500.000	8.929.031.677	71,65%
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh	500.000.000			
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	3.300.000.000			
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi hunian	250.000.000			
9	KECAMATAN PALU UTARA	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.423.478.850	3.144.894.258	9.619.899.954	33%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.721.415.408			
10	KECAMATAN PALU TIMUR	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.565.957.890	2.778.186.640	10.189.138.128	27%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.212.228.750			
11	KECAMATAN PALU SELATAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan	2.824.547.700	2.824.547.700	12.017.550.000	24%
12	KECAMATAN PALU BARAT	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.409.204.929	2.722.557.928	9.992.855.701	27%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.313.352.999			
13	KECAMATAN TAWAELI	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	926.952.100	2.845.248.600	9.880.442.188	29%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.918.296.500			
14	KECAMATAN MANTIKULORE	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan	4.518.485.242	4.518.485.242	14.888.673.551	30%
15	KECAMATAN TATANGA	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.588.160.000	3.025.385.000	11.810.442.108	26%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.437.225.000			
16	KECAMATAN ULUJADI	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.962.352.800	4.026.174.000	10.872.269.088	37%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.063.821.200			
	JUMLAH TOTAL			49.267.032.814	675.770.719.321	7%

Pada tahun 2021, komposisi anggaran belanja sektoral untuk membiayai program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Palu ditetapkan berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang mendesak yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera. Pelaksanaan Program–program tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun dengan program dan kegiatan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta program yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota juga diiringi dengan program dunia usaha (swasta) dan masyarakat.

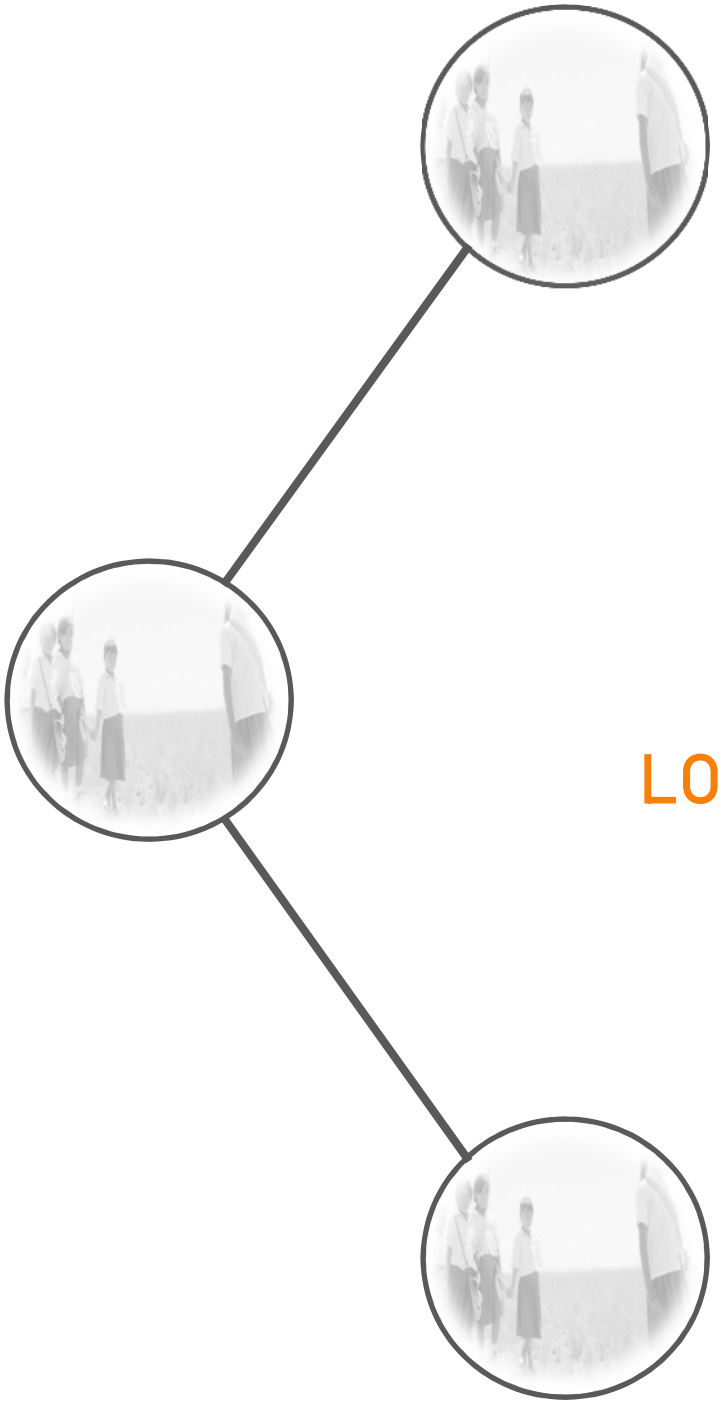

BAB V

LOKASI PRIORITAS

BAB V
LOKASI PRIORITAS

5.1 Lokasi Prioritas Berdasarkan Teori Of Change

Theory of Change atau Teori Perubahan adalah deskripsi yang spesifik dan terukur dari inisiatif perubahan sosial yang membentuk dasar untuk perencanaan strategis, terus-menerus pengambilan keputusan dan evaluasi. Teori Perubahan menggambarkan jenis intervensi (satu program atau inisiatif masyarakat luas) yang membawa hasil yang digambarkan dalam jalur dari peta perubahan. Setiap hasil di jalur perubahan terkait dengan intervensi, mengungkapkan kegiatan yang diperlukan untuk membawa perubahan.

Teori Perubahan tidak akan lengkap tanpa adanya asumsi bahwa para stakeholder digunakan untuk menjelaskan proses perubahan. Asumsi menjelaskan kedua koneksi antara awal, tujuan jangka menengah ,panjang dan harapan tentang bagaimana serta mengapa diusulkan intervensi. Seringkali, asumsi didukung oleh penelitian. Penilitian yang memperkuat kasus harus dibuat secara masuk akal dari teori dan kemungkinan yang menyatakan tujuan yang akan tercapai.

Teori perubahan merupakan bagian dari perencanaan dan evaluasi program karena mereka menciptakan visi umum yg dipahami dalam tujuan jangka panjang, bagaimana mereka akan dicapai, serta apa yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan sepanjang proses. Perencanaan yang baik dan metode evaluasi untuk perubahan sosial, memerlukan peserta harus jelas pada tujuan jangka panjang, mengidentifikasi indikator-indikator terukur dari kesuksesan, dan merumuskan tindakan untuk mencapai tujuan.

5.2 Teori Perubahan menurut Kurt Lewin

Teori perubahan Lewin menjelaskan bahwa seseorang yang akan mengadakan perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang ada. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan akan berhadapan dengan penolakan untuk berubah. Perubahan

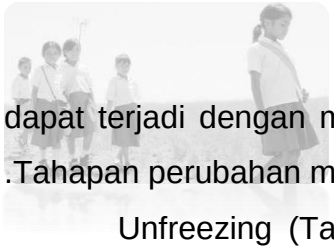

dapat terjadi dengan memperkuat tekanan melemahkan penolakan untuk berubah .Tahapan perubahan menurut Lewin antara lain :

Unfreezing (Tahap Pencairan): Pada tahap awal ini, seseorang mencari sesuatu yang baru baik dari sisi nilai, sikap maupun kepercayaan. Seseorang dapat mengadakan proses perubahan jika memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula

Changing (Tahap Mengubah): Pada tahap ini , Changing merupakan langkah tindakan, baik memperkuat tekanan maupun memperlemah penolakan. Bisa dikatakan juga tahap menstabilkan norma-norma yang sudah ada.

Refreezing (Tahap Pembekuan) : Tahap ini merupakan tahap pembekuan di mana seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru.

Action Research (Tahap Penelitian Tindakan) : menjelaskan bahwa hasil penelitian yang ada langsung diaplikasikan ke kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian, lebih fokus menaruh penelitian terhadap suatu tindakan yang berfokus pada masalah yang nyata. Penelitian itu dikembangakan dari pengetahuan atau teori dan logat yang dapat di ambil

5.3 Teori Perubahan menurut Rogers E

Menurut Rogers E, perubahan sosial adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu antara anggota suatu sistem sosial. Menurut Rogers, langkah-langkah untuk mengadakan perubahan antara lain :

Tahap Awarness Tahap awal yang menyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan diperlukan adanya kesadaran untuk berubah

Tahap Interest Tahap ini menyatakan untuk mengadakan perubahan harus timbul perasaan suka / minat terhadap perubahan. Timbulnya minat akan mendorong dan menguatkan kesadaran untuk berubah.

Tahap Adoption Tahapan terakhir yaitu proses perubahan terhadap sesuatu yang baru setelah ada uji coba dan merasakan ada manfaatnya sehingga mampu mempertahankan hasil perubahan.

Terkait lokasi prioritas program untuk kebutuhan intervensi penanganan permasalahan yang telah teindentifikasi melalui beberapa indikator yang mengalami permasalahan, yang di bab sebelumnya telah di bahas untuk permasalahan di

masing-masing indikator dengan melihat dari 4 analisa grafik antara lain analisa posisi relatif, analisi perkembangan antar waktu, analisis efektifitas dan analisis relevansi terindikasi beberapa permasalahan atau menurunnya target dari beberapa indikator, sehingga berdampak pada indikator lainnya. Atas dasar keempat analisa tersebut yang didasarkan pada permasalahan di masing-masing indikator maka di bab 4 dilakukan penysusunan teori of change dimana disusun sebuah logika yang menghubungkan antara indikator yang akan di perbaiki berdasarkan sebuah permasalahan yang dibahas di bab sebelumnya sehingga tidak ada satupun program yg tidak berkontribusi Dengan pencapaian sasaran.

Atas dasar hasil permasalahan tersebut maka di rumuskan lokasi prioritas berdasarkan hasil teori of change di pembahasan bab sebelumnya yang mana mem prioritaskan penanganan permasalahan di semua indikator yang paling bermasalah. Namun terkait intervensi anggaran akan dilakukan skala prioritas terhadap permasalahan indikator, dimana akan di sharing tingkat permasalahan dari setiap indikator yang akan di lakukan intervensi dan berdampak pada sasaran indikator lainya. Berikut grafik kuadran prioritas berdasarkan pengelompokan penanganan wilayah :

Grafik.5.1

Pengelompokan Wilayah Total KRT Per Desil (Desil 1 sampai Desil 4) dan Persentase Desil 1 sampai 4 Tingkat Kecamatan Tahun 2020

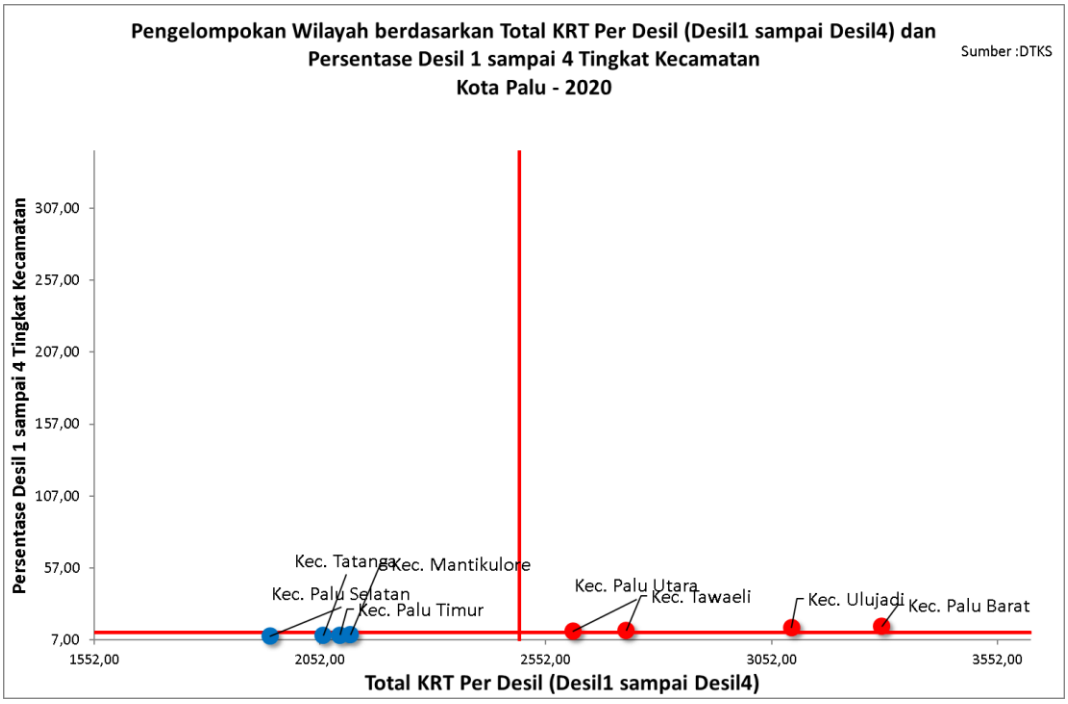

Terlihat pada grafik Kuadran Prioritas bahwa jumalh kepala Rumah Tangga berdasar pada Desil 1 samapai dengan Desil 4 terbanyak di kecamatan Palu Barat dengan Jumlah Kepala Rumah Tangga sebesar 3296 Kepala Rumah Tangga dengan persentase 16, 52%, kemudian berikut pada kecamatan Ulujadi dengan Total desil dari desil 1 sampai dengan 4 berjumlah 3096 kepala rumah Tangga dengan persentase 15,52 %, berikutnya di kecamatan Tawaeli berjumlah 2730 Kepala rumah Tangga dengan persentase sebesar 13, 68%, kemudian pada kecamatan palu utara dengan total jumlah desil 2612 kepala rumah tangga dengan persentase 13,09 %, diikuti kecamatan palu timur dengan jumlah total desil 1 sampai dengan desil 4 berjumlah 2096 kepala rumah tangga dengan persentase 10,51%, selanjutnya pada kecamatan Tatanga dengan total jumlah desil dari desil 1 sampai pada desil 4 berjumlah 2059 dengan persentase 10,32 %, dan untuk kecamatan palu selatan dengan jumlah total desil dari desil 1 sampai pada desil 4 sejumlah 1941 kepala rumah tangga, dimana dengan persentase 9,73%. Melihat besaran jumlah total nilai desil dan besaran persentase di masing-masing kecamatan terlihat bahwa kecamatan yang memiliki total jumlah desil mulai dari desil 1 sampai pada desil 4 terdapat pada kecamatan Palu Barat, sementara jumlah desil yang paling kecil totalnya baik dari desil 1 sampai pada desil 4 ada pada kecamatan Palu selatan.

Berdasarkan Jumlah dan besaran nilai persentase di masing-masing kecamatan terlihat bahwa terdapat empat kecamatan (kecamatan palu barat,Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Palu Utara, dan Kematan Tawaeli) yang Membutuhakan intervensi program, dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Dimana terlihat bahwa indikasi warna merah pada grafik kuadran prioritas menandakan bahwa empat kecamatan tersebut memiliki permasalahan yang lebih besar berdasarkandata desil 1 sampai dengan desil 4 untuk dilakukan intervensi. Salah satunya dengan program PKH dan padat karya dan program-program sejenisnya untuk mengintervensi desil 1.

Grafik 5.2

Pengelompokan Wilayah Berdasarkan belanja infarastruktur dan tidak ada fasilitas bab Kota Palu Tahun 2020

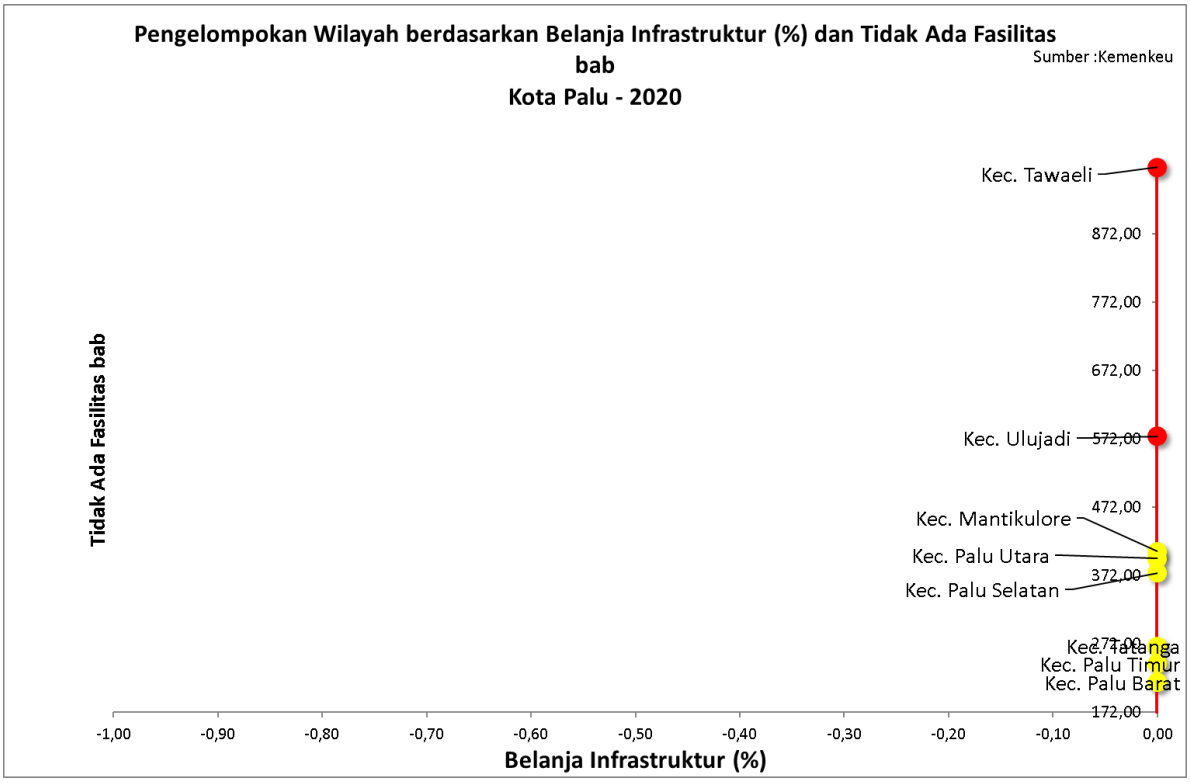

Pada grafik Kuadran Prioritas bahwa jumlah kepala Rumah Tangga berdasar pada belanja infarastruktur dan tidak ada fasilitas bab terbanyak di kecamatan Tawaeli dengan Jumlah Kepala Rumah Tangga sebesar 969, kemudian berikutnya pada kecamatan Ulujadi dengan belanja infarastruktur dan tidak ada fasilitas bab berjumlah 576 kepala rumah Tangga, berikutnya di kecamatan Mantikulore dengan belanja infarastruktur dan tidak ada fasilitas bab berjumlah 407 Kepala rumah Tangga, selanjutnya pada kecamatan palu Utara dengan belanja infarastruktur dan tidak ada fasilitas bab dengan total jumlah 397 kepala rumah tangga, diikuti kecamatan palu utara dengan belanja infarastruktur dan tidak ada fasilitas bab dengan jumlah total berjumlah 376 kepala rumah tangga dengan, selanjutnya pada kecamatan Tatanga dengan belanja infarastruktur dan tidak ada fasilitas bab berjumlah 269, dan untuk kecamatan palu selatan dengan belanja infarastruktur dan tidak ada fasilitas bab dengan jumlah 376 kepala rumah tangga, dimana dengan persentase 9,73%. Melihat besaran jumlah total nilai dengan belanja infarastruktur dan tidak ada fasilitas bab di masing-masing kecamatan menunjukan bahwa kecamatan yang memiliki belanja infarastruktur dan tidak ada fasilitas bab terdapat

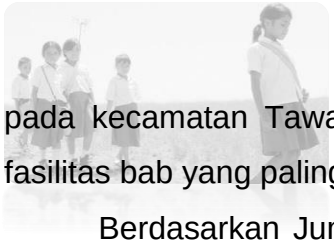

pada kecamatan Tawaeli, sementara jumlah belanja infarastruktur dan tidak ada fasilitas bab yang paling kecil ada pada kecamatan Palu Barat.

Berdasarkan Jumlah dan besaran nilai di masing-masing kecamatan terlihat bahwa terdapat dua kecamatan (kecamatan Tawaeli dan ,Kecamatan Ulujadi) yang paling membutuhakan intervensi program, terkait fasilitas bab bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan. Terlihat bahwa indikasi warna pada dua kecamatan tersebut berwarna merah pada grafik kuadran prioritas menandakan bahwa dua kecamatan tersebut memiliki permasalahan yang lebih besar terkait fasilitas bab untuk dilakukan intervensi, dengan berbagai program kegiatan infra sturktur untuk penyediaan fasilitas bab.

Grafik.5.3

Pengelompokan Wilayah berdasarkan pada belanja infrastruktur dan temapt pembuangan sampah Tinja (SPAL) Tahun 2020

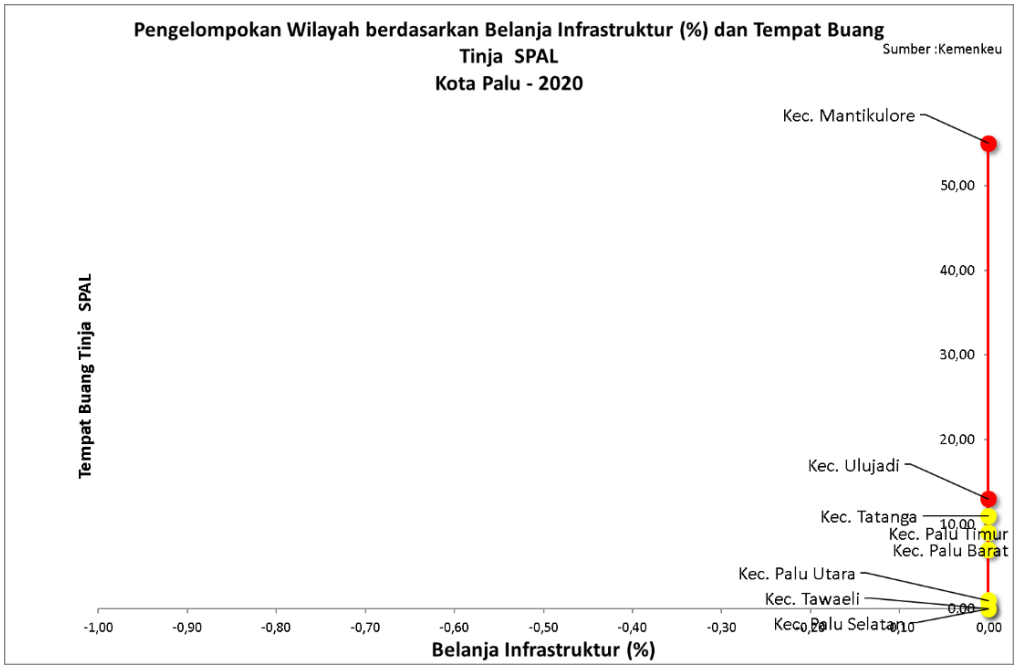

Melihat grafik kuadran prioritas tergambar bahwa 2 kecamatan di Kota Palu terkait permasalahan pembuangan sampah tinja sangat bermasalah atau belum maksimal. Tergambar bahwa warna merah pada dua kecamatan tersebut memperlihatkan permsalahan masalah SPAL tersebut. Dimana dari 8 kecamatan di kota palu nilai permasalahan yang paling terkecil sesuai dengan data yang ada di aplikasi input data kemiskinan yang bersumber pada data DTKS dimana nilai terkecil memiliki permasalahan yang paling dominan terkait SPAL terdapat pada dua kecamatan mantikulore dan kecamatan ulujadi sedangkan 6 kecamatan lainnya tetap dianggap bermasalah namun secara indikasi warna belum menunjukan

permasalahan yang sangat besar terlihat pada indikasi warna di 6 kecamatan tersebut berwarna kuning. Sehingga kesimpulannya terkait fasilitas SPAL di dua kecamatan tersebut kedepannya lebih di prioritaskan untuk dilakukan intervensi dengan berbagai program pemerintah , swasta maupun lembaga donor lainnya yang fokus penanganan bergerak pada pembangunan tempat pembuangan tinja (SPAL).

Grafik 5.4

Pengelompokan Wilayah Berdasarkan belanja infarastruktur dan tempat pembuangan tinja lubang tanah Kota Palu Tahun 2020

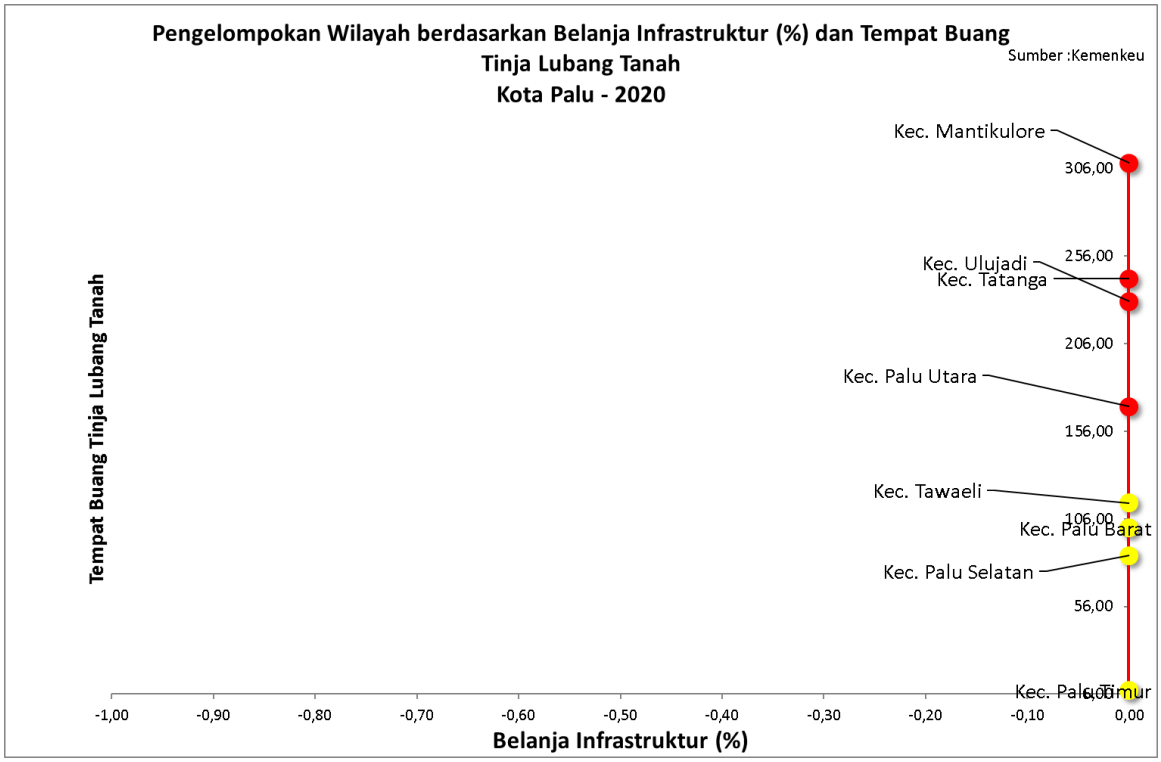

Terlihat pada Grafik kuadran prioritas diatas Jumlah kecamatan yang memiliki nilai tertinggi untuk permasalahan tempat pembuangan tinja luba tanah terdapat di 4 kecamatan diantaranya ; kecamatan mantikulore dengan jumlah kepala rumah tangga yang masih membuang tinja ke dalam lubang tanah sebesar 306 kepala rumah tangga, kemudian di kecamatan Ulujadi dan Kecamatan Tatanga sebesar 256 kepala rumah tangga, dan di kecamatan palu utara sebesar 156 kepala rumah tangga. Hal tersebut ditunjukan pada indikasi warna dan besaran nilai yang ada pada grafik kuadran prioritas. Untuk itu dibtuhkan sebuah perencanaan untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan tersebut untuk kedepannya dibuatkan fasilitas atau saluran pembuangan tinja sehingga masyarakat di empat kecamatan

tersebut tidak lagi membuang tinja pada lubang tanah. Terkait intervensi kegiatan yang akan dilakukan lebih focus pada pembuatan Saluran pembuangan air limbah (SPAL) untuk 4 kecamatan tersebut. Untuk itu dibutuhkan sebuah peran kerjasama dalam hal penanggulangan kemiskinan salah satunya Dengan pembuatan SPAL bertujuan agar masayrakat tidak lagi membuang tinja pada lubang namun kedepan dibuatkan SPAL. Untuk itu di butuhkan peran bersama di semua lapisan masyarakat baik pemerintah, swasta dan lembaga linnya yang bergerak dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Palu.

Grafik 5.5

Pengelompokan Wilayah Berdasarkan belanja infarastruktur dan faslilitas bab milik umum Kota Palu Tahun 2020

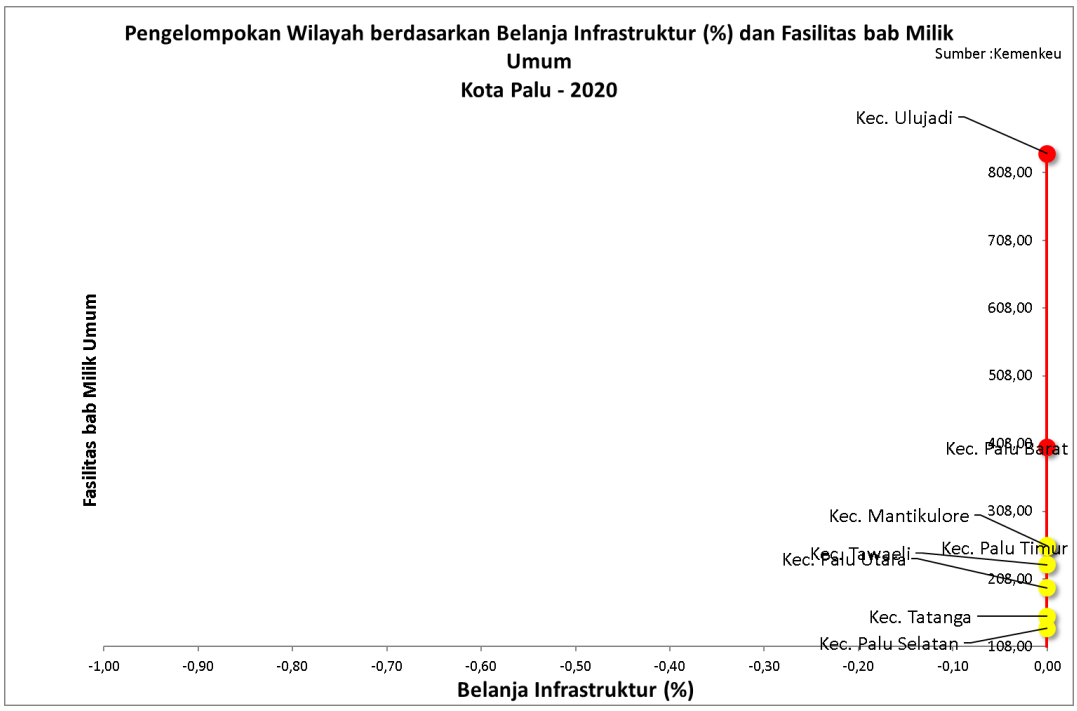

Terdapat dua kecamatan yang bermasalah, dimana melihat indicator permasalahan belanja infarstuktur dan dan faslilitas bab milik umum Kota Palu Tahun 2020. Dua kecamatan tersebut terdiri dari kecamatan ulujadi dan kecamatan mantikulore. Melihat data dan grafik kuadran prioritas permasalahan fasilitas bab untuk umum masih sangat belum maksimal / masih sangat kurang di dua kecamatan tersebut. Untuk itu kedepan sebisa mungkin perencanaan terkait fasilitas umum dimana didalamnya termasuk fasilitas bab milik umum sangatlah menjadi prioritas di dua kecamatan tersebut (kecamatan ulujadi dan Kecamatan mantikulore) sehingga

diharapkan angka yang masih dianggap besar dalam satuan kepala rumah tangga dapat diturunkan dengan melakukan intervensi untuk kegiatan peyediaan fasilitas bab milik umum, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk miskin dimasing-masing kecmatan tersebut sehingga pembangunan fasilitas bab tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Grafik 5.6

Pengelompokan Wilayah Berdasarkan belanja infarastruktur dan tempat pembuangan tinja di pantai/tanah lapang dan kebun.

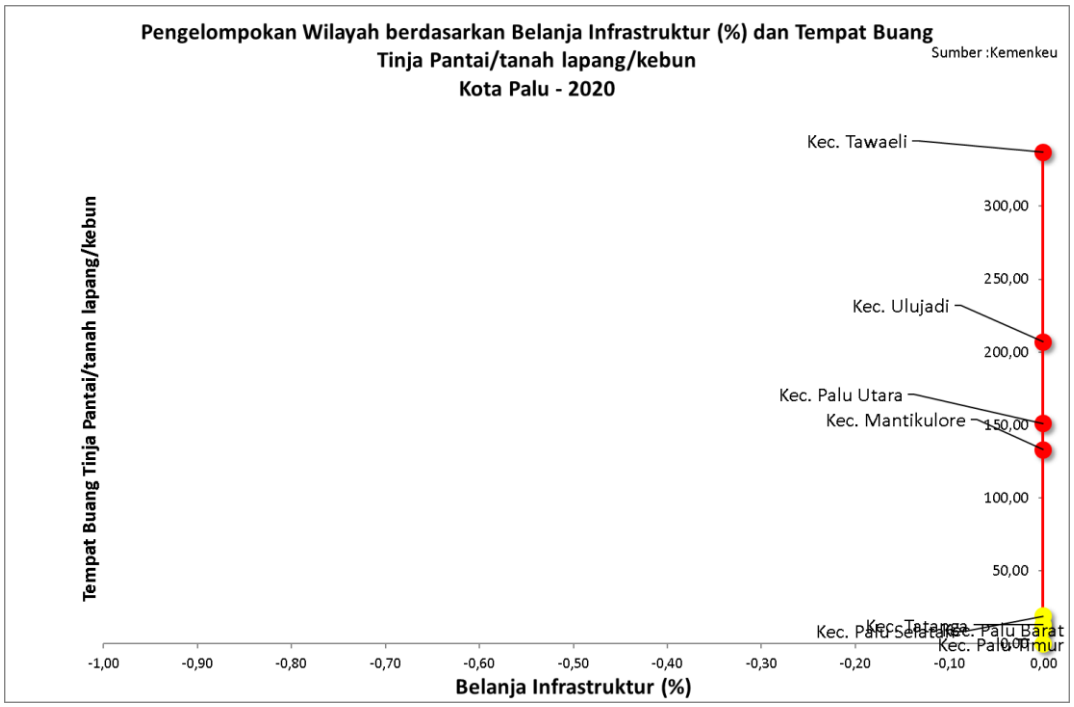

Memasuki era modern saat ini kita berharap hal-hal atau kegiatan yang menjadi yang menjadi rutinitas masyarakat di kota palu , tidak lagi seperti pada 10 tahun sebelumnya. Salah satunya adalah tempat pembuangan tinja , dimana saaat ini semestinya seluruh warga masayarakat kota palu sudah memiliki SPAL atau hal semacamnya yang secara kesehatan atau keamanan sudah terjamin. Namun data pada grafik kuadran prioritas memperlihatkan masih banykanya masyarakat kota palu yang dalam kesehariannya untuk melakukan pembuangan tinja maih ditemukan dilakukan di pantai, tanah lapang dan kebun. Seperti pada garfik kuadran diatas terdapat empat kecamatan yang warganya masih melakukan hal tersebut dimana dalam hal membuang tinja masih dilakukan di pantai, tanah lapang dan kebun. Hal tersebut ditunjukan pada nilai besaran kepala rumah tangga di empat kecamatan. Dianaranya kecamatan tawaeli Dengan jumlah kepala rumah tangga 337 , kemudian di kecamatan ulujadi 207 kepala rumah tangga, kemudian di kecamatan palu uatara

151 kepala rumah tangga dan kecamatan mantikulore sebesar 133 kepala rumah tangga. Permasalahan tersebut menjadi perhatian semua pihak terutama pihak yang focus pada penangan pengentasan kemiskinan sehingga kedepan warga masyarakat di 4 kecamatan tersebut akan berkurang jumlahnya untuk indicator oembuangan tinja di pantai, tanah lapang dan kebun.

Grafik 5.7

Pengelompokan Wilayah Total KRT Per Desil (Desil 1 samapi Desil4) dan Persentase Desil 1 sampai 4 Tingkat Kecamatan Tahun 2020

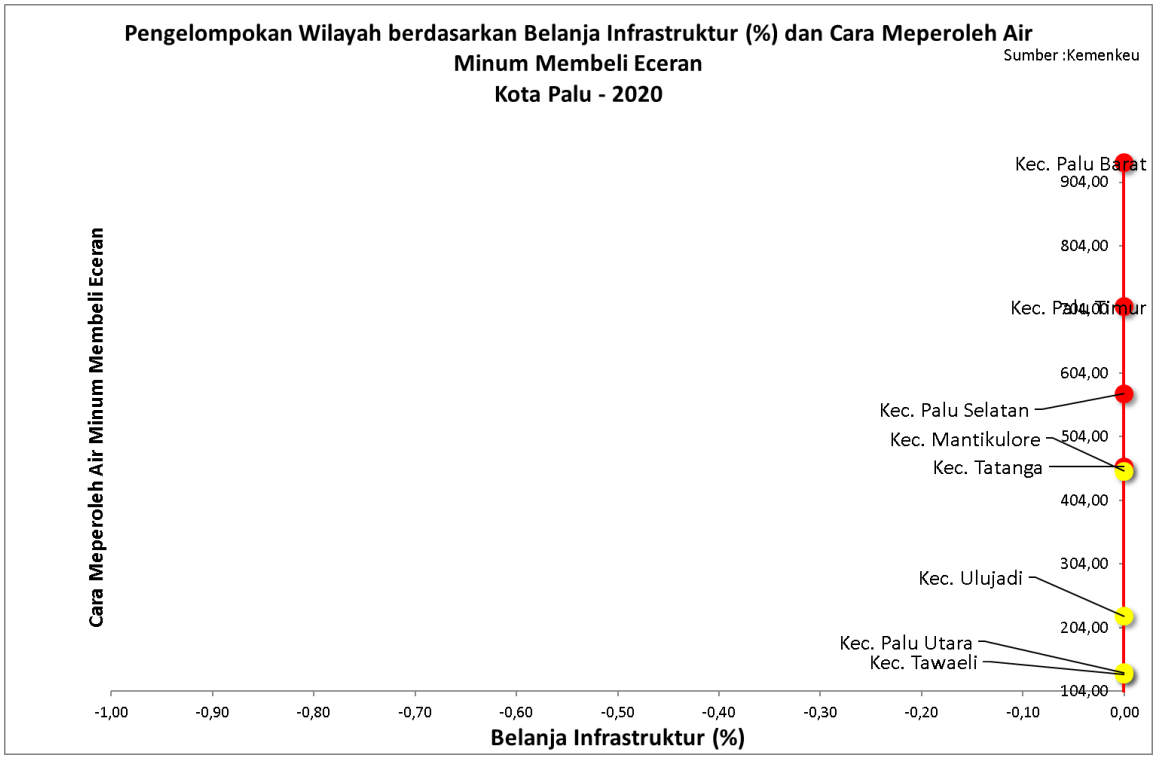

Air merupakan kenbutuhan pokok bagi semua mahluk hidup, terutama kita sebagai manusia pastinya sangat membutuhkan. Selain untuk kebutuhan mencuci, mandia dan lainnya juga yang tidak kalah pentingnya menjadi sumber air minum bagi tubuh kit. Sehingga kualitas air sangatlah menjadi prioritas. Tergambar pada grafik kuadran prioritas diatas bahwa kecamatan yang memperoleh/membeli air minum eceran terdapat pada kecamatan palu barat Dengan jumlah kepala rumah tangga 935, kemudian kecamatan palu timur dengan jumlah kepala rumah tangga 709, berikut di kecamatan palu selatan dengan jumlah kepal rumah tang untuk memeproleh air minum eceran Dengan membeli sebesar 572, dan kecamatan berikutnya adalah kecamatan tatanga sebesar 457 dan kecamatan berikutnya adalah kecamatan mantikulore sebesar 450 kepala rumah tangga. Di 5 kecamatan

tersebut secara jumlah kepala rumah tangga dalam rangka pemenuhan air minum masih sangatlah besar, untuk itu kedepan intervensi terkait kebutuhan air minum prioritas intervensi di 5 kecamatan tersebut sehingga masyarakat di lima kecamatn tersebut tidak membeli air untuk kebutuhan airminum, dimana telah tersedia fasilitas air bersih di lima kecamatan tersebut.

Grafik 5.8

Pengelompokan Wilayah berdasarkan belanja infrastruktur dan jenis kloset .

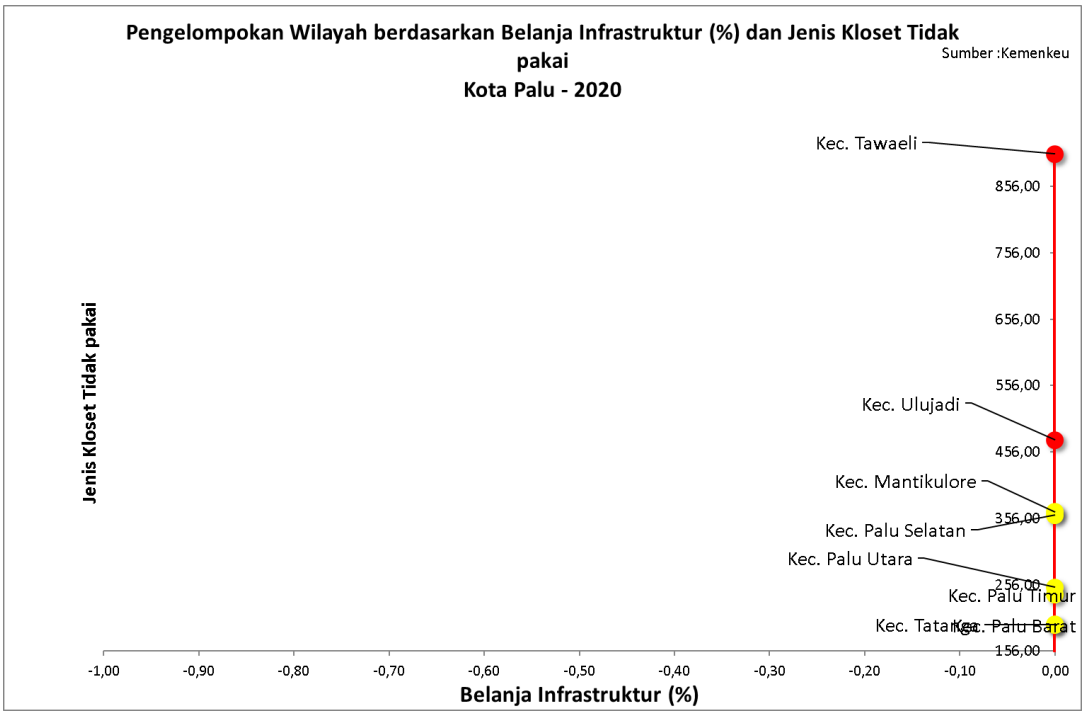

Pada grafik kuadran prioritas terkait permasalahan jenis kloset terdapat beberapa kecamatan yang jumlah kepala rumah tangganya tertinggi disbanding kecamatan lainnya yang tidak memiliki jenis kloset sesuai standar kesehatan, dimana terdapat pada kecamatan tawaeli dan kecamatan ulu jadi. Untuk kecamatan Tawaeli jumla kepala ruma tangga yang memiliki kloset tetapi tidak sesuai standar sebesar 905 sementara di kecamatan ulujadi sebesar 474 kepala rumah tangga yang memiliki kloset namu tidak sesuai standar kesehatan. Penting kloset sesuai standar kesehatan menjadi prioritas penangan untuk kedepan sehingga berbagai bibit penyakit lebih dini dapat teratasi.

Grafik.5.9

Pengelompokan Wilayah Total KRT Per Desil (Desil 1 samapi Desil 4) dan Persentase Desil 1 sampai 4 Tingkat Kecamatan Tahun 2020

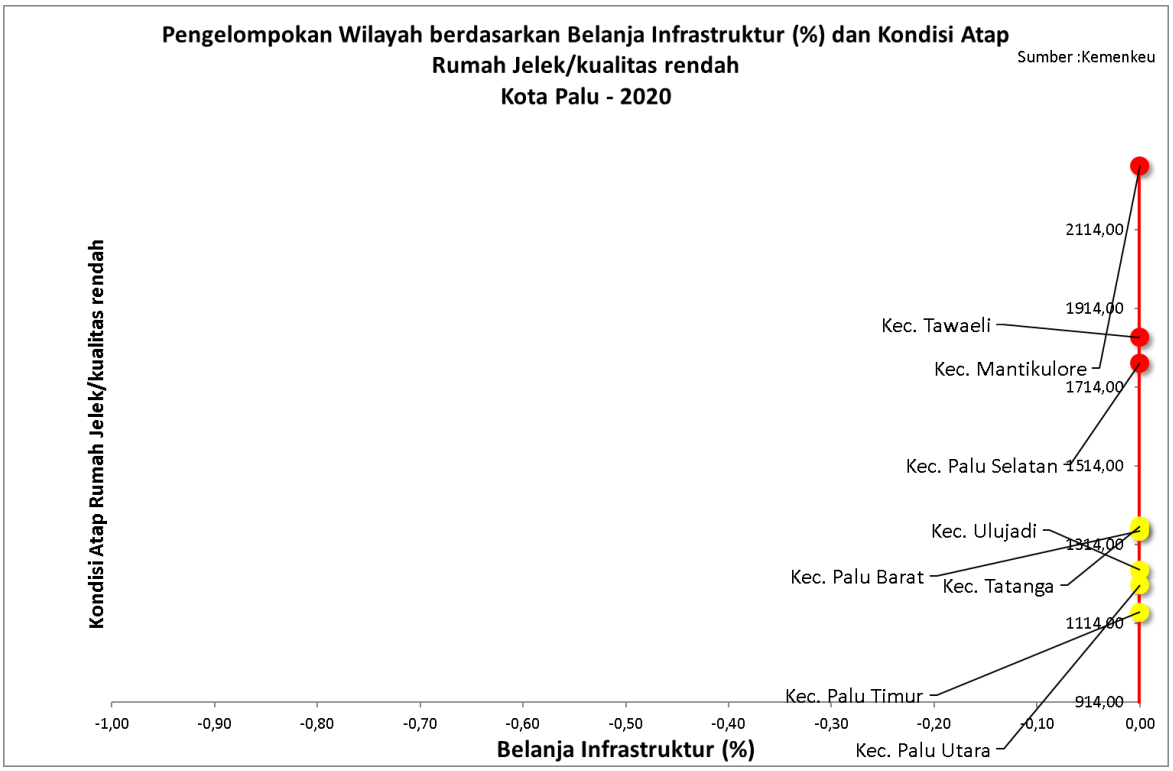

Terkait kondisi atap dibeberapa kecamatan dalam kota palu terdapat 3 kecamatan yang kondisi atap rumahnya memiliki kualitas jelek/kualitas rendah, dimana terdapat pada kecamatan mantikulore Dengan jumlag kepala rumah tangga yang memiliki atap dalam kondisi kualitas rendah sebesar 2276, kemudian di kecamatan tawaeli sebesar 1841 kepala rumah tangga selanjutnya terbesar berikutnya terdapat di kecamatan palu selatan berjumlah 1776 kepala rumah tangga. Prioritas penanganan kedepan terdapat di tiga kecamatan tersebut namun Dengan melihat kerusakan dan fungsi atap tersebut mana yang masih layak digunakan. Kemudian untuk kecamatan lainnya tidak menutup kemungkinan dilakukan intervensi namun untuk menjadi skala prioritas di tiga kecmatan tersebut.

.

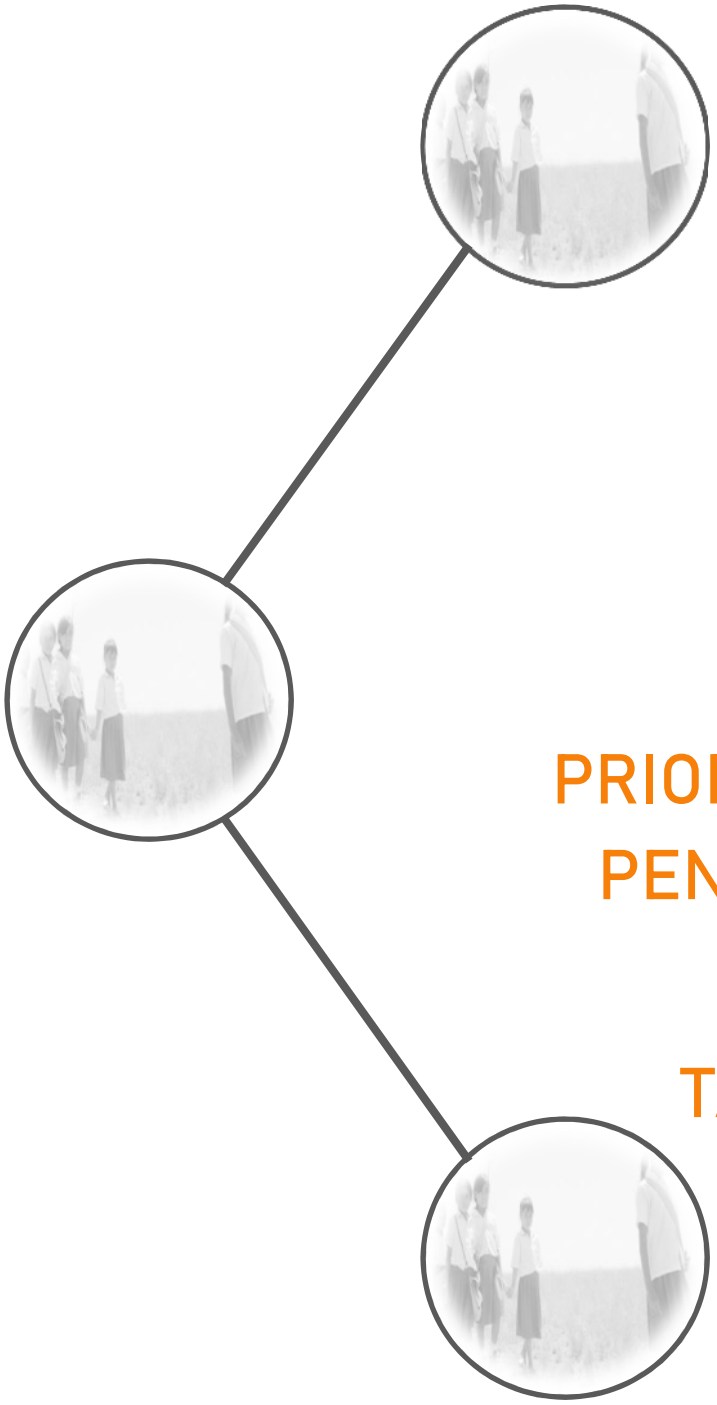

BAB VI

PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TAHUN 2021-2026

BAB VI
PRIORITAS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2021-2026

6.1. Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan (5 Tahunan).

Bagian ini menguraikan rencana program prioritas yang disertai dengan indikasi rencana kebutuhan pendanaan penanggulangan kemiskinan. Berikut Matriks prioritas program penanggulangan Kemiskinan :

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembag	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	70,66	66.810.046.353	71,01	77.716.179.221	71,73	85.520.795.150	71,73	92.535.872.627	72,09	103.646.629.014	72,45	102.309.990.419

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		aan lain																
2	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah	Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter per satuan Penduduk	98,93	10.000.000	99	12.338.264	99,01	6.312.383	99,01	6.830.173	99,01	7.650.270	99,01	7.551.611
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah	Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100	10.000.000	100	12.338.264	100	6.312.383	100	6.830.173	100	7.650.270	100	7.551.611
4	Meningk	Meningk	Meningk	Kesehatan	Program	Cakupan	100				100		100		100		100	

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	atkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	atkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	atnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		804.533.000	100	935.865.700		957.597.059		1.036.146.581		1.160.556.411		1.145.589.745
5	Infra Strukutr Dasar	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah	Infra Strukutr Dasar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100	5.305.431.328	100	6.171.494.774	100	6.314.800.555	100	6.832.789.368	100	7.653.200.480	100	7.554.503.945
6	Infra Strukutr Dasar	Meningkatkan kemitraan usaha	Meningkatnya nilai tambah,	Infra Strukutr Dasar	Program Pengelolaan dan Pengemba	Proporsi rumah tangga dengan	33,98	11.900.619.569	31,4	13.843.287.556	32,02	14.164.736.930	32,66	15.326.638.277	33,32	17.166.903.455	33,98	16.945.517.135

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah		ngan Sistem Penyediaan Air Minum	akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan												
7	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah	Infra Strukutr Dasar	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase ketercapaian Pelaksanaan Program pemberdayaan sosial	100	976.450.700	100%	1.135.847.402	100%	1162222455	1	1257556935	100 %	1408551445	100 %	1390386607
8	Penguatan kewirausahaan,	Meningkatkan kemitraan usaha	Meningkatnya nilai tambah,	Infra Strukutr Dasar	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase tercapainya rehabilitas	100	1.978.262.550	100%	2.301.195.932	100%	2354631071	1	2547776134	100 %	2853686903	100 %	2816885436

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah			i kesejahteraan sosial												
9	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah	Infra Strukutr Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan jaminan sosial	100	9.173.191.500	100%	9.732.593.415	100%	9958590025	1	10775470650	100 %	12069278402	100 %	11913631629

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
10	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah	Ketenagakerjaan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	.	.	100%	101.234.172	.		.		.		.	
11	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah	Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan tenaga kerja bersertifikasi	.	33.011.000	.	38.399.746	.	39291410,68	.	42514396,26	.	47619087,95	.	47004986,83
12	Meningkatkan produkti	Meningkatkan kemitraan	Meningkatnya nilai	Ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga	Tingkat pengangguran	6%	15.712.800	6%	18.277.772	5,70%	18702192,53	5,42%	20236291,1	5,14%	22666056,93	5%	22373752,9

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	vitas dan daya saing tenaga kerja	usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah		Kerja	terbuka												
13	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah	Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Indeks Ketahanan Pangan	90,4	686.771.225	91,4	798.880.386	92,4	817430863,8	93,4	884482869,4	94,4	990682480,6	95,4	977906527,8
14	Meningkatkan produktivitas dan daya saing	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja,	Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan		117.810.000	1	137.041.412	1	140.223.595	1	151.725.819	1	169.943.496	1	167.751.886

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	tenaga kerja	mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	investasi ,dan daya saing perekonomian daerah															
15	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah	Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pelanggaran keamanan pangan		44.095.790		51.294.027		52485104,79		56790339,27		63609139,45		62788828,83
16	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya	Kemiskinan	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	0,678	1.381.016.308	0,681	1.606.454.669	0,715	1.643.757.502	0,751	1.778.591.214	0,788	1.992.146.164	0,828	1.966.455.223

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	saing perekonomian daerah															
17	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah	Kemiskinan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %	46.634.575	100%	54.247.246	100%	55.506.899	100 %	60.060.004	100 %	67.271.392	100 %	66.403.853
18	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi,	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,per	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian	Kemiskinan	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,85	802.078.000	1,81	933.009.944	1,78	954.674.990	1,74	1.032.984.821	1,71	1.157.015.020	1,67	1.142.094.024

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	guruan tinggi, dan kelembagaan lain	daerah															
19	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah	Kemiskinan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100 %	1.400.336.250	100%	1.628.928.416	100%	1.666.753.103	100 %	1.803.473.092	100 %	2.020.015.602	100 %	1.993.965.254
20	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya	Kemiskinan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100 %	562.577.400	100%	654.413.048	100%	669.608.908	100 %	724.535.413	100 %	811.530.178	100 %	801.064.593

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	(UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	saing perekonomian daerah															
21	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100 %	75.291.000	100%	113.172.872	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0
22	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro,	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor	Kemiskinan	Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	100 %	220.916.850	100%	256.979.518	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	pangan															
23	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	.	292.580.000	.	340.341.026	.	0	.	0	.	0	.	0
24	Penguatan kewiraus	Meningkatkan kemitraan	Terwujudnya ketahana	Kemiskinan	Program Pengelolaan	Persentase peningkatan	.	966.382.310	.	1.124.135.439	.	0	.	0	.	0	.	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	ahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	n ekonomi sektor pangan		Perikanan Budidaya	produksi perikanan budidaya												
25	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	.	387.365.000	.	450.598.816	.	0	.	0	.	0	.	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
26	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100 %		100%	157.273.475	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0
27	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100 %	187.495.775	100%	218.102.756	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	kreatif berbasis digita																	
28	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	14.560.415.750	100%	15.937.271.290	100%	16.307.344.213	100 %	17.644.998.790	100 %	19.763.628.868	100 %	19.508.754.886
29	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi,	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100 %	875.171.571	100%	1.018.035.376	100%	1.041.674.763	100 %	1.127.120.989	100 %	1.262.454.091	100 %	1.246.173.341

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		dan kelembagaan lain																
30	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100 %	379.873.760	100%	441.884.699	100%	452.145.525	100 %	489.234.000	100 %	547.976.189	100 %	540.909.427
31	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	100 %	44.062.463	100%	51.255.260	100%	52.445.437	100 %	56.747.418	100 %	63.561.065	100 %	62.741.374

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
32	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah		Program Penyuluhan Pertanian	Nilai tukar petani/nelayan Kota Palu	100 %	257.397.280	100%	299.415.047	100%	306.367.642	100 %	331.498.287	100 %	371.301.194	100 %	366.512.852
33	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 %	174.220.920	100%	202.660.902	100%	207.366.809	100 %	224.376.639	100 %	251.317.479	100 %	248.076.461
34	Meningkatnya kualitas	Meningkatkan kemitraan	Meningkatnya nilai		Program Standardisasi dan	Persentase pemenuhan	100 %	100%	174.220.920	100%	202.660.902	100%	0	100%	0	100%	0	100%

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	iklim usaha dan investasi	usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah		Perlindungan Konsumen	standarisasi dan perlindungan konsumen												
35	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan perencanaan dan pembangunan industri	100 %	888.994.179	100%	1.034.114.399	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0
36	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja,		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri	100 %	170.476.510	100%	198.305.251	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	investasi	mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	investasi ,dan daya saing perekonomian daerah															
37	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi ,dan daya saing perekonomian daerah		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	5.974.586.884	100%	6.949.883.893	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0
38	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangu	100 %	1.247.229.670	100%	1.450.828.578	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	berkelanjutan			nan												
39	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	100 %	2.376.988.250	100%	2.765.009.979	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0
40	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,per	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.828.314.900	100%	8.106.216.160	100%	9.294.447.323	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		guruan tinggi, dan kelembagaan lain																
41	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.		100%	97.342.654	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0
42	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	4.189.235.100	100%	4.668.680.680	100%	6.876.693.232	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		kelembagaan lain																
43	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	9.530.651.559	100%	10.086.443.807	100%	11.320.657.035	100 %	0	100 %	0	100 %	0
44	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.		100%	126.723.453	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
45	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	5.288.649.992	100%	6.025.250.585	100%	8.294.826.536	100 %	0	100 %	0	100 %	0
46	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.147.355.879	100%	7.150.855.856	100%	8.316.902.985	100 %	0	100 %	0	100 %	0
47	Meningkatnya kualitas	Meningkatkan kemitraan	Terwujudnya pengelol		Program Penyelenggaraan	Cakupan penyelenggaraan	100 %	64.098.000	100%	89.712.677	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	iklim usaha dan investasi	usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	aan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pemerintahan dan pelayanan publik												
48	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	3.692.408.822	100%	4.280.009.743	100%	6.471.189.975	100 %	0	100 %	0	100 %	0
49	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerinta	100 %	6.604.278.588	100%	7.682.367.045	100%	8.860.756.179	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	daerah	mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	yang berkualitas dan berkelanjutan		Kabupaten/Kota	han daerah												
50	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.		100%	85.765.433	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0
51	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	3.501.040.540	100%	3.986.788.156	100%	6.167.120.707	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	berkelanjutan															
52	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.492.227.608	100%	8.715.265.672	100%	9.917.639.328	100 %	0	100 %	0	100 %	0
53	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,per	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.		100%	91.423.788	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		guruan tinggi, dan kelembagaan lain																
54	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	4.227.539.500	100%	4.826.223.114	100%	7.031.837.589	100 %	0	100 %	0	100 %	0
55	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.857.949.888	100%	6.814.206.968	100%	7.972.436.908	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
		kelembagaan lain																
56	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.		100%	86.677.912	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0
57	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	3.937.547.300	100%	4.493.638.199	100%	6.686.673.776	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
58	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.047.484.288	100%	7.034.681.136	100%	8.198.030.618	100 %	0	100 %	0	100 %	0
59	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.		100%	92.313.789	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0
60	Penguatan pilar pertumbu	Meningkatkan kemitraan	Terwujudnya pengelol		Program Pemberdayaan	Cakupan pemberdayaan	100 %	4.735.359.800	100%	5.416.050.461	100%	7.636.271.746	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	han dan daya saing daerah	usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	aan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Masyarakat Desa dan Kelurahan	masyarakat kelurahan												
61	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.648.068.571	100%	6.570.064.433	100%	7.722.625.239	100 %	0	100 %	0	100 %	0
62	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	.		100%	84.574.673	100%	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target											
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu	Kinerja	Pagu
	daerah	mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	yang berkualitas dan berkelanjutan		Publik	publik												
63	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	3.897.841.383	100%	4.449.553.891	100%	6.639.413.727	100 %	0	100 %	0	100 %	0

6.2. Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021

Berikut Matriks program penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021:

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Tahun 2021	
							Kinerja	Pagu
1	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	70,66	66.810.046.353
2	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter per satuan Penduduk	98,93	10.000.000
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100	10.000.000
4	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100	804.533.000
5	Infra Strukutr Dasar	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Infra Strukutr Dasar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100	5.305.431.328
6	Infra Strukutr Dasar	Meningkatkan kemitraan usaha antara	Meningkatnya nilai tambah,	Infra Strukutr Dasar	Program Pengelolaan dan	Proporsi rumah tangga dengan akses	33,98	11.900.619.569

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Tahun 2021	
							Kinerja	Pagu
		usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan		
7	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Infra Strukutr Dasar	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase ketercapaian Pelaksanaan Program pemberdayaan sosial	100	976.450.700
8	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Infra Strukutr Dasar	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase tercapainya rehabilitasi kesejahteraan sosial	100	1.978.262.550
9	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Infra Strukutr Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase perlindungan jaminan sosial	100	9.173.191.500
10	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Ketenagakerjaan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja	.	.
11	Meningkatkan produktivitas	Meningkatkan kemitraan usaha antara	Meningkatnya nilai tambah,	Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan	Persentase pemenuhan tenaga kerja	.	33.011.000

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Tahun 2021	
							Kinerja	Pagu
	dan daya saing tenaga kerja	usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah		Produktivitas Tenaga Kerja	bersertifikasi		
12	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	6%	15.712.800
13	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Indeks Ketahanan Pangan	90,4	686.771.225
14	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan		117.810.000
15	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pelanggaran keamanan pangan		44.095.790
16	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Kemiskinan	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	0,678	1.381.016.308

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Tahun 2021	
							Kinerja	Pagu
17	Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Kemiskinan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	46.634.575
18	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Kemiskinan	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,85	802.078.000
19	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Kemiskinan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	1.400.336.250
20	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah	Kemiskinan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	562.577.400
21	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	75.291.000

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Tahun 2021	
							Kinerja	Pagu
	kreatif berbasis digita							
22	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	100%	220.916.850
23	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	.	292.580.000
24	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	.	966.382.310
25	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	.	387.365.000
26	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan	100%	

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Tahun 2021	
							Kinerja	Pagu
	menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain			dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
27	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	187.495.775
28	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta IKM dalam sektor ekonomi kreatif berbasis digita	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	14.560.415.750
29	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya ketahanan ekonomi sektor pangan	Kemiskinan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	875.171.571
30	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%	379.873.760
31	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja,		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	100%	44.062.463

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Tahun 2021	
							Kinerja	Pagu
		menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	investasi,dan daya saing perekonomian daerah					
32	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah		Program Penyuluhan Pertanian	Nilai tukar petani/nelayan Kota Palu	100%	257.397.280
33	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	174.220.920
34	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	100%
35	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan perencanaan dan pembangunan industri	100%	888.994.179
36	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri	100%	170.476.510
37	Meningkatnya kualitas iklim usaha	Meningkatkan kemitraan usaha antara	Meningkatnya nilai tambah,		Program Pemerintahan dan	Persentase ketercapaian pelaksanaan	100%	5.974.586.884

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Tahun 2021	
							Kinerja	Pagu
	dan investasi	usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	lapangan kerja, investasi,dan daya saing perekonomian daerah		Kesejahteraan Rakyat	program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
38	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100%	1.247.229.670
39	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	100%	2.376.988.250
40	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.828.314.900
41	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	
42	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	4.189.235.100

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Tahun 2021	
							Kinerja	Pagu
43	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.530.651.559
44	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	
45	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	5.288.649.992
46	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.147.355.879
47	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	64.098.000
48	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	3.692.408.822

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Tahun 2021	
							Kinerja	Pagu
		kelembagaan lain						
49	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.604.278.588
50	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	
51	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	3.501.040.540
52	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	7.492.227.608
53	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	
54	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	4.227.539.500

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Tahun 2021	
							Kinerja	Pagu
		besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	berkelanjutan					
55	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.857.949.888
56	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	
57	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	3.937.547.300
58	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6.047.484.288
59	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	
60	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	4.735.359.800

No	Sektor/Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Tahun 2021	
							Kinerja	Pagu
		menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	berkualitas dan berkelanjutan					
61	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	5.648.068.571
62	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	.	
63	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing daerah	Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, usaha menengah, usaha besar,perguruan tinggi, dan kelembagaan lain	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	3.897.841.383